



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan telah dilakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah yang baru, yang mewajibkan tertuangnya program-program Organisasi Perangkat Daerah dalam indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - b. bahwa berdasarkan kondisi keuangan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu disesuaikan dengan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013-2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
 - BAB IV : ANALISA ISU STRATEGIS
 - BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
 - BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
 - BAB IX : PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
 - BAB X : PENUTUP

- (2) Uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Indikator pembangunan daerah merupakan ukuran keberhasilan pembangunan paling utama dari sasaran RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013-2018 yang harus dicapai pada akhir periode lima tahun.
- (2) Indikator pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan APK tingkat Pendidikan SMP menjadi 100% (seratus persen);
 - b. peningkatan APM tingkat pendidikan SMP menjadi 84,26% (delapan puluh empat koma dua puluh enam persen);
 - c. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN yang dicerminkan dengan perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Daerah dan peningkatan opini audit BPK berpredikat WTP pada tahun 2016;
 - d. terbangunnya sarana dan prasarana perkantoran bagi dinas/kantor dan lembaga teknis lainnya;
 - e. terwujudnya percepatan pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Sepaku;
 - f. peningkatan jaringan perpipaan air bersih di 4 (empat) kecamatan;
 - g. pengembangan *water front city*;
 - h. pengembangan kawasan agroforestri dan agroindustri;
 - i. peningkatan usia harapan hidup hingga usia 73 (tujuh puluh tiga) tahun;
 - j. penurunan prosentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) hingga 5% (lima persen);
 - k. penurunan jumlah keluarga miskin sebanyak 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 - l. peningkatan Kunjungan Wisatawan Domestik hingga 25% (dua puluh lima persen); dan
 - m. peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 20% (dua puluh persen) dengan tetap mengacu pada kelestarian lingkungan.
 - n. pemekaran wilayah kecamatan dan desa/kelurahan, serta perubahan status kelurahan jadi desa;
- (3) Indikator pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun dokumen rencana pembangunan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 November 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 21 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 19.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 13/87/2017

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
4 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TAHUN 2013-2018

RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TAHUN 2013-2018

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur patut kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan HidayahNya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018 dapat selesai.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 – 2018 disusun sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berdasarkan Petunjuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah.

Saat ini RPJMD telah dilaksanakan selama 2 tahun berjalan. Sepanjang perjalanan, adanya penambahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dengan sendirinya mewajibkan untuk memuat program program dalam RPJMD. Program-program yang tertuang dalam RPJMD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Tahunan (Renja) SKPD. Hal ini bertujuan agar lebih fokus dalam pencapaian program. Disamping itu, kondisi perekonomian yang menyebabkan perubahan anggaran mengakibatkan penyesuaian terhadap kebutuhan pendanaan dalam penentuan pagu indikatif. Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka dianggap perlu untuk melakukan revisi terhadap RPJMD terkait dengan penentuan target program-program yang akan dilaksanakan SKPD serta penyesuaian terhadap sasaran yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Kami sadari bahwa penyusunan Revisi RPJMD ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan penyusunan buku ini ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak terkait yang telah banyak membantu dalam penyusunan Revisi RPJMD ini.

Besar harapan kami bahwa Dokumen Revisi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi, misi pemerintah daerah dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat Penajam Paser Utara.

Penajam, 21 November 201

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	iii
Daftar tabel.....	v
Daftar Gambar	viii

Bab I PENDAHULUAN..... BAB I-1

1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-6
1.3. Landasan Hukum	I-8
1.4. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-11
1.5. Sistematika Penulisan.....	I-14

Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... BAB II-1

2.1. Kondisi Geografis dan Demografi	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-19
2.3. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-32
2.4. Fokus Seni dan Budaya	II-33
2.5. Pelayanan Umum.....	II-34
2.6. Daya Saing Daerah	II-104
2.7. Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-110
2.8. Fokus Sumber Daya Manusia	II-113

Bab III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN..... BAB III-1

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III-3
3.1.1.1. Pendapatan Daerah	III-3
3.1.2. Neraca daerah	III-7
3.1.3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan	III-17
3.2. Kebijakan Keuangan Masa Lalu	III-17
3.2.1. Proporsi penggunaan anggaran.....	III-18
3.2.2. Analisa pembiayaan	III-21
3.3. Kerangka Pendanaan	III-23
3.3.1. Proyeksi pendapatan	III-23
3.3.2. Proyeksi belanja wajib dan mengikat.....	III-25

BAB IV ANALISA ISU STRATEGIS..... BAB IV-1

4.1. Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.2. Isu Strategis Internal Penajam Paser Utara.....	IV-41

4.3. Isu Strategis Eksternal.....	IV-48
4.4. Analisis SWOT Isu Strategis.....	IV-56
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	BAB V-1
5.1. Visi	V-1
5.2. Misi.....	V-2
5.3. Tujuan dan Sasaran	V-15
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	BAB VI-1
BAB VIIKEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN.....	BAB VII-1
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI	
KEBUTUHAN PENDANAAN	BAB VIII-1
BAB IX PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN	BAB IX-1
BAB X PENUTUP	BAB X-1

DAFTAR TABEL

2.1	Luas wilayah menurut kecamatan Kab. PPU tahun 2012.....	II-3
2.2	Penggunaan tanah tahun 2011 di Kab. PPU.....	II-5
2.3	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan pertumbuhan penduduk Kab. PPU tahun 2008-2012.....	II-14
2.4	Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2008-2012.....	II-14
2.5	Penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kab. PPU tahun 2008-2012.....	II-18
2.6	Penduduk berdasarkan agama Kab. PPU tahun 2012.....	II-19
2.7	Perkembangan PDRB dan pertumbuhan PDRB dengan migas dan tanpa migas di Kab. PPU tahun 2009-2012.....	II-22
2.8	Laju pertumbuhan ekonomi di Kab. PPU tahun 2009-2012 (%)......	II-23
2.9	Kontribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB berdasar harga berlaku Kab. PPU tahun 2009-2012.....	II-27
2.10	Perkembangan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dan konstan tahun 2000 Kab. PPU, tahun 2009-2012.....	II-29
2.11	PDRB perkapita dan pendapatan perkapita dengan migas dan tanpa migas Kab. PPU tahun 2009-2012.....	II-31
2.12	Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Kab. PPU tahun 2009-2011.....	II-33
2.13	Perkembangan seni budaya dan olahraga di kab. PPU tahun 2013.....	II-33
2.14	Perkembangan angka partisipasi sekolah (APS) di Kab. PPU tahun 2007-2011.....	II-36
2.15	Perkembangan angka partisipasi kasar dan murni di Kab. PPU tahun 2009-2012.....	II-36
2.16	Angka partisipasi sekolah (APS) menurut kecamatan di Kab. PPU tahun 2012.....	II-36
2.17	Rasio jumlah murid terhadap gedung sekolah di Kab. PPU tahun 2008-2012.....	II-37
2.18	Rasio murid terhadap gedung sekolah di setiap Kecamatan di Kab. PPU tahun 2012.....	II-38
2.19	Rasio guru terhadap murid di Kab. PPU tahun 2008-2012.....	II-39
2.20	Rasio guru terhadap murid per kecamatan di Kab. PPU tahun 2011.....	II-39
2.21	Rasio penduduk per sarana dan prasarana kesehatan Kab. PPU tahun 2006-2012.....	II-40
2.22	Jumlah tenaga kesehatan di RSUD Penajam Tahun 2012.....	II-41
2.23	Angka kelangsungan hidup, usia harapan hidup dan balita gizi buruk Kab. PPU tahun 2009-2012.....	II-43
2.24	Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi Kab. PPU tahun 2008-2012	II-46
2.25	Panjang jalan berdasarkan jenis permukaan di Kab. PPU tahun 2012....	II-48

2.26	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tahun 2008-2012 Kab. PPU	II-49
2.27	Jaringan irigasi Kab. PPU tahun 2008-2012.....	II-51
2.28	Jaringan irigasi menurut kecamatan Kab. PPU tahun 2012.....	II-51
2.29	Efisiensi dan efektivitas pengelolaan jaringan irigasi Kab. PPU tahun 2002-2012.....	II-51
2.30	Sebagian wilayah genangan yang belum tertangani di Kab. PPU tahun 2013.....	II-53
2.31	Rasio tempat ibadah Kab. PPU.....	II-54
2.32	Rasio tempat ibadah menurut kecamatan Kab. PPU tahun 2012.....	II-54
2.33	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Kab. PPU tahun 2009-2012.....	II-56
2.34	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk menurut Kecamatan tahun 2012 Kab. PPU.....	II-56
2.35	Rasio penduduk per TPS menurut Kecamatan tahun 2012 Kab. PPU.....	II-57
2.36	Persentase luas permukiman yang tertata menurut kecamatan tahun 2012 Kab. PPU.....	II-60
2.37	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan menurut kecamatan tahun 2012 Kab. PPU.....	II-61
2.38	Ruang terbuka hijau (RTH) per satuan luas wilayah menurut kecamatan tahun 2012 Kab. PPU.....	II-62
2.39	Jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2008-2012 kab. PPU.	II-64
2.40	Rasio ijin trayek terhadap jumlah angkutan	II-65
2.41	Persentase uji kir angkutan umum tahun 2008-2012 kab. PPU.....	II-66
2.42	Persentase rumah tangga (RT) menurut sumber air minum tahun 2011	II-71
2.43	Capaian indikator kinerja pelayanan kependudukan dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. PPU tahun 2013.....	II-75
2.44	Jangka waktu penerbitan dokumen kependudukan Kab. PPU.....	II-76
2.45	Keadaan tenaga kerja, kesempatan kerja dan pengangguran Kab. PPU tahun 2009-2013.....	II-78
2.46	Angkatan kerja yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama Kab. PPU tahun 2009-2013.....	II-80
2.47	Jumlah koperasi dan usaha kecil menengah	II-80
2.48	Jumlah investor, nilai investasi, daya serap tenaga kerja dan nilai realisasi PMDN.....	II-82
2.49	Aspek pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tahun 2013.....	II-86
2.50	Aspek pelayanan umum bidang otonomi daerah tentang perangkat daerah.....	II-87
2.51	Produksi padi dan ketersediaan padi per jiwa.....	II-90
2.52	Luas panen dan produksi padi sawah.....	II-98

2.53	Luas panen dan produksi padi ladang	II-98
2.54	Luas panen dan produksi palawija.....	II-98
2.55	Angka kriminalitas Kab. PPU tahun 2009-2013.....	II-111
2.56	Rasio ketergantungan di Kab. PPU	II-114
3.1	Derajat desentralisasi fiskal tahun 2009-2013	III-3
3.2	Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kab. PPU tahun 2009-2013	III-4
3.3	Perkembangan kontribusi sumber pendapatan daerah Kab. PPU 2009-2013	III-5
3.4	Proporsi penggunaan anggaran belanja daerah Kab. PPU tahun 2009-2013.....	III-6
3.5	Neraca daerah Kab. PPU tahun 2009-2013	III-9
3.6	Analisis rasio keuangan tahun 2010-2012 Kab. PPU.....	III-11
3.7	Rasio lancar tahun 2010-2012 kab. PPU (Rp. Juta).....	III-12
3.8	Quick Ratio tahun 2009-2013 Kab. PPU (Rp. Juta).....	III-13
3.9	Rasio total hutang terhadap total asset tahun 2010-2012 Kab. PPU (Rp. Juta)	III-14
3.10	Rasio total hutang terhadap modal tahun 2010-2012K Kab. PPU (Rp. Juta).....	III-14
3.11	Rata-rata umur piutang tahun 2010-2012 Kab. PPU(Rp.Juta)	III-15
3.12	Rata-rata umur persediaan tahun 2010-2012 Kab. PPU.....	III-16
3.13	Perputaran total aktiva 2010-2012 Kab. PPU	III-17
3.14	Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah 2010-2012 Kab. PPU	III-17
3.15	Proporsi penggunaan anggaran daerah Kab. PPU tahun 2009-2013.....	III-19
3.16	Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kab. PPU tahun 2009-2013.....	III-20
3.17	Realisasi pengeluaran belanja periodic dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kab. PPU tahun 2009-2012.....	III-20
3.18	Defisit riil anggaran Kab. PPU tahun 200-2012.....	III-21
3.19	Komposisi penutup deficit riil anggaran Kab. PPU tahun 2008-2012.....	III-22
3.20	Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Kab. PPU tahun 2008-2012..	III-23
3.21	Proyeksi pendapatan daerah tahun 2014-2018.....	III-24
3.22	Proyeksi pembiayaan 2014-2018.....	III-25
3.23	Proyeksi belanja wajib dan mengikat.....	III-25
3.24	Proyeksi kapasitas riil keuangan tahun 2014-2018.....	III-28
3.25	Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	III-28

3.26	Komposisi belanja langsung dan tidak langsung tahun 2014-2018 Kab. PPU.....	III-29
4.1	Matriks SWOT makro Kab. PPU	IV-56
5.1	Keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kab. PPU	V-16
6.1	Strategi, arah dan kebijakan Kab. PPU misi pertama.....	VI-1
6.2	Strategi, arah dan kebijakan Kab. PPU misi kedua.....	VI-2
6.3	Strategi, arah dan kebijakan Kab. PPU misi ketiga.....	VI-2
6.4	Strategi, arah dan kebijakan Kab. PPU misi keempat.....	VI-3
6.5	Strategi, arah dan kebijakan Kab. PPU misi kelima.....	VI-3
7.1	Indikasi rencana program prioritas.....	VII-1
8.1	Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan	VIII-2

DAFTAR GAMBAR

1.1	Keterkaitan dokumen perencanaan menurut UU No. 25 Tahun 2001	I-12
1.2	Hubungan antara perencanaan makro dan sektoral.....	I-13
1.3	Kedudukan RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara dalam system perencanaan pembangunan nasional.....	I-14
2.1	Batas administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara.....	II-2
2.2	Penggunaan lahan	II-6
2.3	Kawasan lindung Kab. PPU tahun 2012.....	II-8
2.4	Peta kawasan budidaya Kab. PPU.....	II-10
2.5	Kawasan strategi Kab. PPU tahun 2012.....	II-12
2.6	Piramida penduduk per kecamatan dan Kab. PPU tahun 2012.....	II-16
2.7	Sebaran penduduk di Kab. PPU tahun 2012.....	II-17
2.8	Laju pertumbuhan ekonomi Kab. PPU tahun 2009-2012.....	II-20
2.9	Struktur ekonomi Kab. PPU tahun 2012.....	II-25
2.10	Perkembangan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dan harga konstan Kab. PPU, tahun 2009-2012.....	II-30
2.11	Produksi padi menurut Kabupaten/Kota.....	II-97
2.12	Produktivitas pertanian tanaman pangan	II-99
2.13	Total pengeluaran rumah tangga per bulan.....	II-107
4.1	Analisis permasalahan pemerataan ekonomi.....	IV-2
4.2	Permasalahan pendidikan di Kab. PPU.....	IV-7
4.3	Problema sektor kesehatan	IV-10
4.4	Permasalahan lingkungan hidup di wilayah PPU.....	IV-13
4.5	Permasalahan pelayanan di Kab. PPU.....	IV-18
4.6	Persoalan sosial di Kab. PPU	IV-20
4.7	Problema sektor pertanian tanaman pangan di wilayah PPU.....	IV-25
4.8	Persoalan pembangunan perkebunan di Kab. PPU.....	IV-29
4.9	Permasalahan pada sub sector kehutanan.....	IV-31
4.10	Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap daya saing di wilayah PPU	IV-33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selama 20 tahun yang memperhatikan pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara 2005-2025 memiliki empat tahap rencana pembangunan jangka menengah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2008-2013 merupakan tahapan pertama RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dengan telah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara jabatan 2013 – 2018, RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara harus disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan

Program Kepala Daerah untuk kurun waktu lima tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara disusun berdasarkan analisa permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, indikator sasaran dan target pencapaian pembangunan daerah yang bertumpu pada program pembangunan daerah lengkap dengan kerangka pendanaan serta kaidah pelaksanaannya.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2013 – 2018 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan RPJMD

Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim, menyusun jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan narasumber sebagai tim ahli untuk membantu dalam penyusunan RPJMD.

b. Penyusunan rancangan awal RPJMD

Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program SKPD dan lintas SKPD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif.

c. Penyusunan rancangan RPJMD

Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Renstra SKPD dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

- d. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD.
Merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan Musrenbang RPJMD untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi rancangan akhir RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara.
- e. Perumusan rancangan akhir RPJMD
Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala SKPD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara diajukan dan dikonsultasikan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
- f. Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD melalui Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2013 – 2018 dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2013 – 2018.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2013 – 2018 dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut :

- a) Pendekatan Politis; Pendekatan politis merupakan pendekatan yang ditawarkan oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye melalui penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program pembangunan serta pembahasan dengan DPRD dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2011-2015.
- b) Pendekatan Teknokratis; Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode ini merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan kerangka manajemen strategis dan berbasis kinerja.
- c) Pendekatan Partisipatif; Melibatkan semua stakeholder melalui pelaksanaan musrenbang
- d) Pendekatan *Top Down* dan *Bottom Up*; Hasil dari pendekatan *bottom up* melalui penjaringan aspirasi masyarakat bersama *stakeholder* dan Musrenbang RPJMD serta pendekatan *top down* dengan penyelarasan pada dokumen perencanaan provinsi dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional (dan provinsi) dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2018 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada tahun 2014, terjadi perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2014, tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Badan Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Perpustakaan dan Arsip); Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2014, tentang Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2014, tentang Organisasi dan tata kerja sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Penajam Paser Utara; dan perubahan kondisi perekonomian yang menyebabkan perubahan anggaran mengakibatkan penyesuaian terhadap kebutuhan pendanaan dalam penentuan pagu indikatif. Beberapa hal tersebut diatas mengharuskan untuk dilakukan revisi terhadap RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara.

1.2. Maksud dan Tujuan

Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2018 ditetapkan dengan maksud untuk tetap memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan. RPJMD ini sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) secara berjenjang.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2018 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menetapkan Visi, Misi, dan Program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan perencanaan penganggaran;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun APBN;

5. Menyediakan tolak ukur sebagai standar dalam mengevaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah;
6. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah;
7. Mewujudkan seluruh jajaran aparatur pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
8. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun;
9. Menjabarkan kondisi saat ini, hambatan dan tantangan dalam capaian kerja lima tahun berikutnya.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2018 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih.
2. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan serta mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Menjaga kesinambungan dan kesatuan arah antara Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara.

1.3. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 Kabupaten Penajam Paser Utara memperhatikan pada peraturan perundang-undangan sebagai rujukan, yakni antara lain :

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2013;
20. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2011-2025;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2014, tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Badan Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Perpustakaan dan Arsip);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2014, tentang Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
29. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2014, tentang Organisasi dan tata kerja sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Penajam Paser Utara;

1.4. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

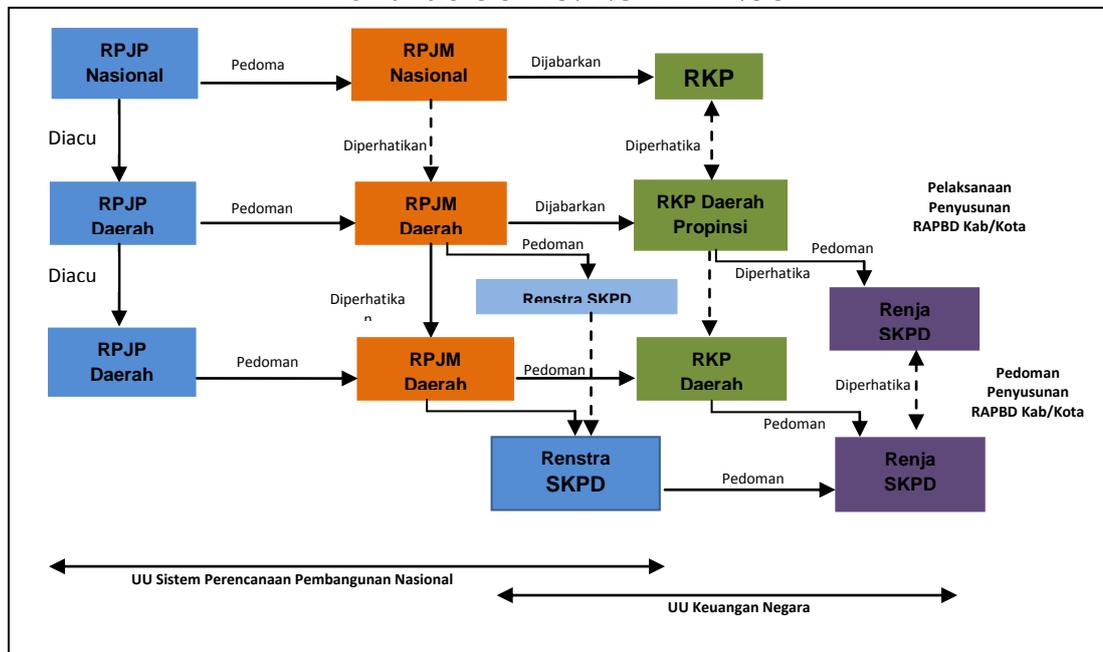
Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2018 dengan dokumen perencanaan lainnya memiliki keterkaitan vertikal dan horisontal sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2018 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan memperhatikan RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 dan RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara 2005-2025. Selain itu

memperhatikan pula pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2013 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013.

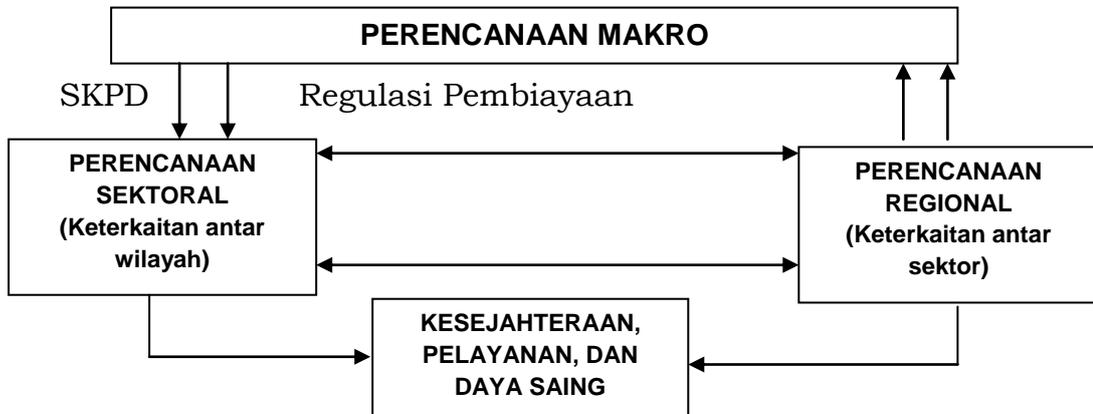
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan rencana kerja tahunan. (Lihat gambar 1.1.)
3. Perencanaan makro selanjutnya diterjemahkan ke dalam perencanaan sektoral yang dikaitkan dengan perencanaan regional dan spasial. Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan hubungan antara perencanaan makro, perencanaan regional, dan spasial. (Lihat gambar 1.2.).

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut UU No. 25 Thn 2001



Sumber : UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

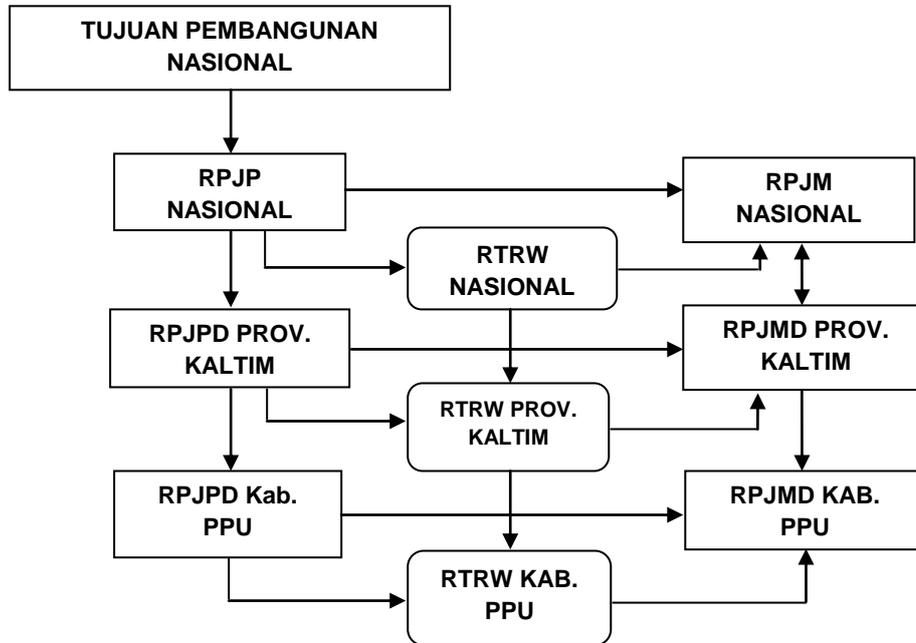
Gambar 1.2.
Hubungan antara Perencanaan Makro dan Sektoral



Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Revisi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara akan mempengaruhi perencanaan tata ruang kabupaten. Visi dan Misi Bupati terpilih akan diterjemahkan ke dalam perencanaan spasial. Sehubungan dengan penyusunan RPJMD ini maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara yang sedang disusun saat ini harus diselaraskan dengan dokumen RPJMD. Hal ini dimaksudkan agar keselarasan perencanaan pembangunan lima tahun mendatang sesuai dengan rencana penataan ruang wilayah. Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan kedudukan RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Gambar 1.3.
Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Penajam Paser Utara dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH & KERANGKA PENDANAAN
- BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH
- BAB VIII : INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB IX : PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAIDAH
PELAKSANAAN
- BAB X : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Geografis dan Demografi

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A.1. Batas Administrasi

Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara terletak antara 00°48'29" - 01°36'37" Lintang Selatan dan 116°19'30" - 116°56'35" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Penajam Paser Utara sangat strategis sebagai pintu gerbang transportasi laut dan transportasi darat menuju Provinsi Kalimantan Selatan serta merupakan jalur pergerakan barang dan jasa lintas Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki batas-batas administrasi dengan kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Balikpapan dan Selat Makassar;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Selat Makassar;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat.

A.2 Luas Wilayah, Topografi dan Kemiringan Lereng

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah 3.333,06 Km² meliputi wilayah daratan seluas 3.060.82 Km² dan wilayah lautan seluas 272.24 Km². Berdasarkan Topografinya, Penajam Paser Utara berada di ketinggian antara 0-500 m diatas permukaan laut (dpl). Pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai yang mengalir di Penajam Paser Utara. Penajam Paser Utara memiliki wilayah yang didominasi wilayah perbukitan dan dataran di wilayah bagian barat. Tabel 2.1 menyajikan luas wilayah Penajam Paser Utara yang disajikan menurut Kecamatan.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten PPU Tahun 2012

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)		Jumlah (Km ²)	Persentase (%)
	Darat	Laut		
Babulu	355,71	43,74	399,45	11,98
Waru	496,05	57,83	553,88	16,62
Penajam	1.036,70	170,63	1.207,37	36,22
Sepaku	1.172,36	0,00	1.172,36	35,17
Jumlah	3.060,82	272,24	3.333,06	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2012

A.3 Klimatologi

Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai karakteristik iklim yakni wilayah iklim *tropika bumida*. Berdasarkan kajian data iklim pada masing-masing kecamatan dapat diketahui bahwa curah hujan rata-rata adalah 10 hari perbulan sebesar 230 mm perbulannya. Curah hujan diatas 300 mm perbulan terjadi antara bulan Desember sampai dengan bulan Februari. Sementara untuk curah hujan sebesar 100 mm sampai 300 mm terjadi pada bulan maret sampai Oktober. Temperatur udara rata-rata sebesar 26⁰ C

dengan perbedaan temperatur pada waktu siang dan malam berkisar 5^o C sampai 7^o C. Temperatur minimum terjadi antara bulan Agustus sampai bulan Oktober.

A.4 Hidrologi

Ditinjau dari kondisi hidrologi, wilayah Penajam Paser Utara dipengaruhi oleh daerah aliran sungai (DAS) dan mempunyai daerah pelayanan yang paling besar, yaitu DAS Babulu, DAS Labangka, DAS Sesulu, DAS Tunan, DAS Riko, dan DAS Sepaku. Secara umum berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum bahwa jumlah DAS yang ada di Kab.Penajam Paser Utara berjumlah 11 DAS yakni Sungai Sepaku, Sungai Semuntai, Sungai Pemaluan, Sungai Riko, Sungai Nenang Besar, Sungai Tunan, Sungai sesumpu, Sungai Bukit, Sungai babulu, Sungai Sesulu, dan Sungai Api-Api Besar.

A.5 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan kumpulan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan. Penggunaan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diklasifikasikan menjadi kampung/permukiman, kebun campur, sawah, tegalan, hutan, dan lain-lain penggunaan lahan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir penggunaan lahan di Penajam Paser Utara mengalami perubahan walaupun tidak signifikan. Perubahan penggunaan lahan terjadi pada jenis tanah untuk pertanian tanaman pangan ke perkebunan. Alih fungsi lahan tersebut masuk ke daerah pedesaan. Jika ditinjau dari aspek pertanian, meskipun terjadi perubahan penggunaan lahan namun luas lahan pertanian yang ada masih mampu untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Namun demikian alih fungsi lahan tersebut harus dikendalikan secara ketat agar tidak mengancam

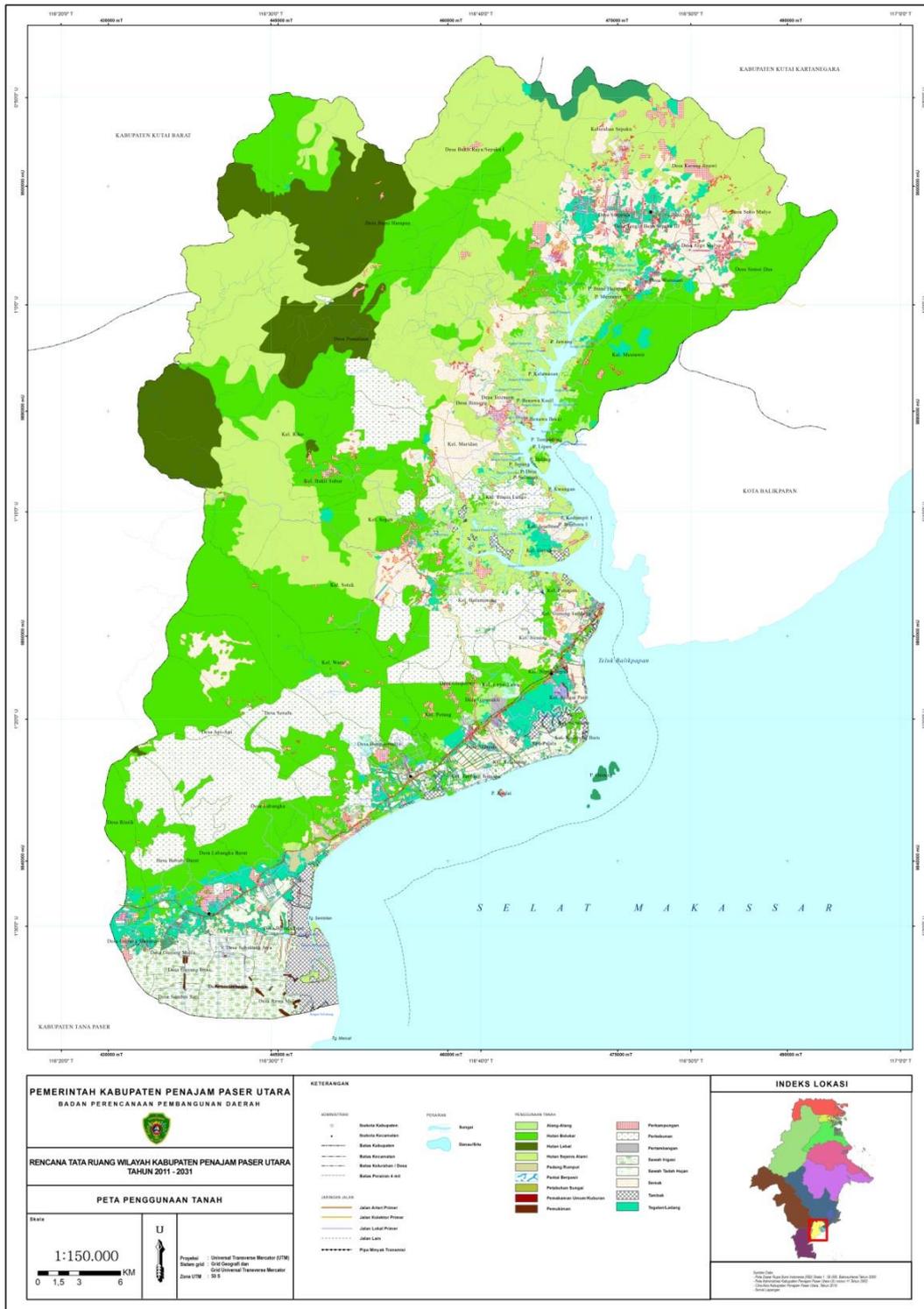
potensi pertanian dan ketersediaan bahan pangan. Tabel 2.2 menyajikan pemanfaatan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2012.

**Tabel 2.2 Penggunaan Tanah Tahun 2011
di Kabupaten Penajam Paser Utara**

No	Penggunaan Tanah	2011	Persentase
		Luas (Ha)	
1.	Sawah	4.715	1,38
2.	Pertanian tanah kering	10.740	3,60
3.	Perkebunan	12.217	4,09
4.	Kolam/tambak	709	0,23
5.	Industri	290	0,09
6.	Pertambangan	48	0,06
7.	Hutan lebat	188.175	63,12
8.	Hutan belukar	50.075	16,79
9.	Hutan sejenis	15.253	5,11
10.	Hutan rawa	2.400	0,80
11.	Permukiman	2.808	0,94
12.	Semak belukar	18.320	6,14
13.	Lain-lain	7.810	2,61
Jumlah		313.560	100

Sumber: BPS, Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2012

Gambar 2.2 Penggunaan Lahan



Sumber : Peta RTRW Kab. PPU Tahun 2011 - 2031

B. Potensi Pengembangan Wilayah

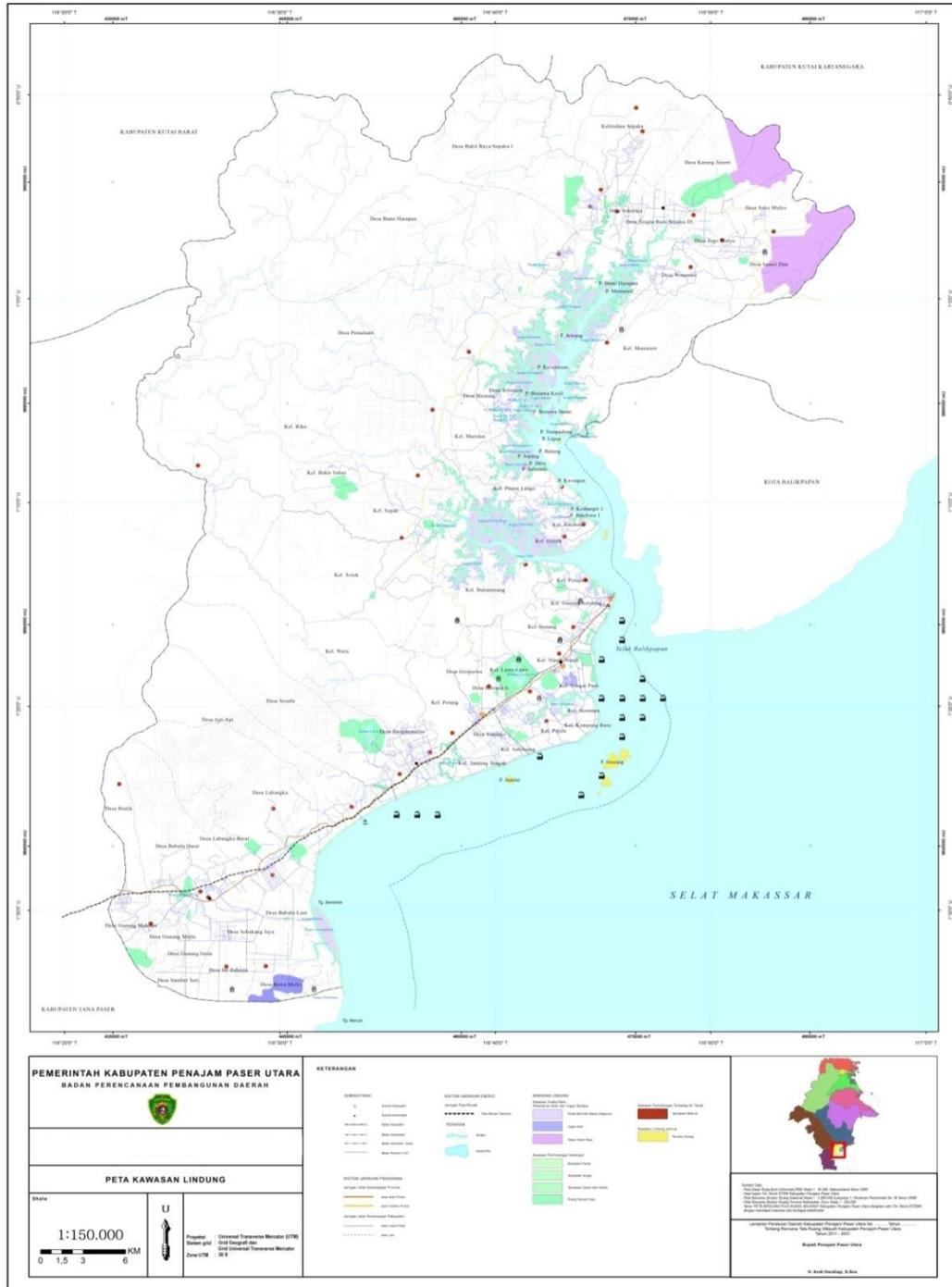
B.1. Karakteristik Tata Guna Lahan

Berdasar penggunaannya, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan Strategis. Berikut adalah uraian untuk masing-masing kawasan.

B.1.1. Kawasan Lindung Kabupaten

Kawasan lindung merupakan wilayah yang mempunyai fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan yang meliputi kawasan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam serta cagar budaya; dan kawasan rawan bencana. Gambar 2.2 menyajikan gambaran kawasan lindung di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Gambar 2.3 Kawasan Lindung Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012



Sumber : RTRW Kab. PPU Tahun 2011 - 2031

B.1.2. Kawasan Budidaya Kabupaten

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang mempunyai fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan manusia. Kawasan ini meliputi kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

B.1.3. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

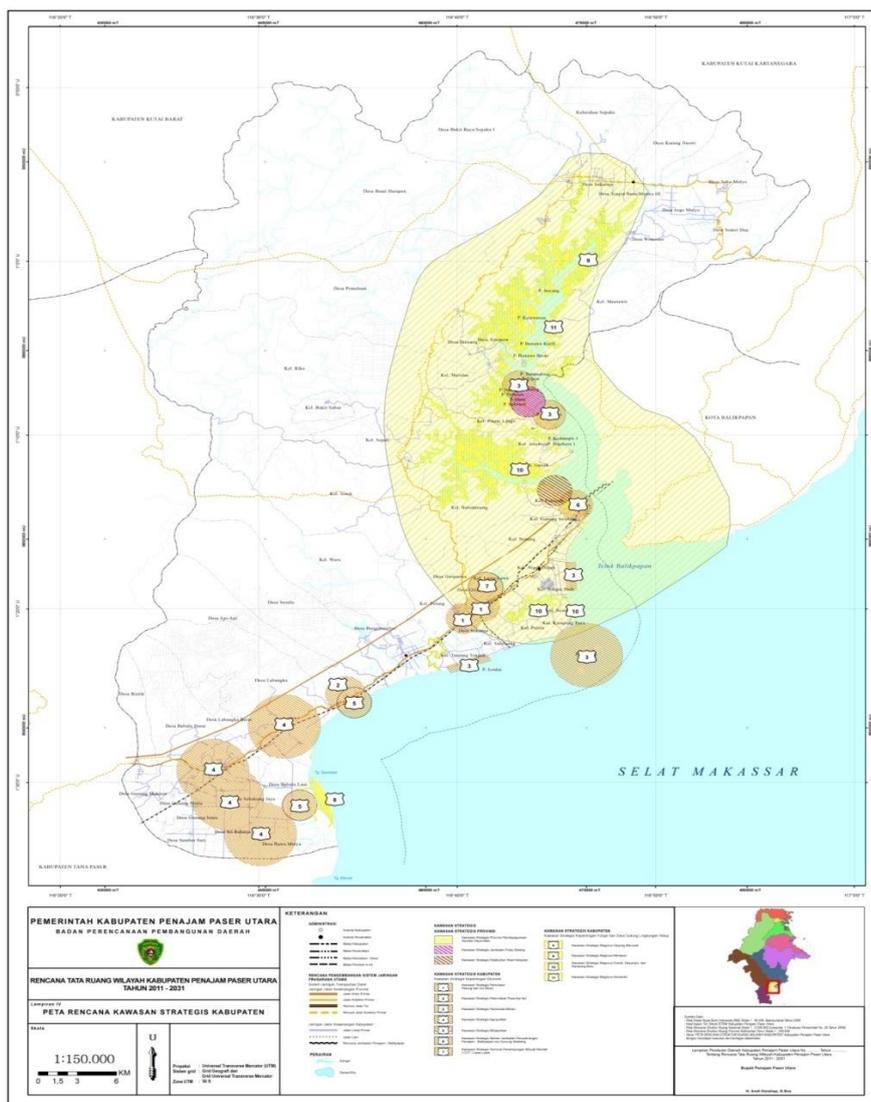
Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Kawasan perkotaan Petung-Giri Mukti berada di Kecamatan Penajam;
- b. Kawasan peternakan Rusa Api Api berada di Desa Api Api Kecamatan Waru;
- c. Kawasan pariwisata bahari berada di Kecamatan Penajam;
- d. Kawasan agropolitan berada di Kecamatan Babulu;
- e. Kawasan Minapolitan berada di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu dan Desa Api-api Kecamatan Waru;
- f. Kawasan sekitar jembatan penyeberangan Penajam – Balikpapan sisi Penajam Paser Utara melalui Kelurahan Gunung Seteleng – Tanjung Batu;
- g. Kawasan Terminal Penampungan Minyak Mentah (*Crude Central Terminal*) berada di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam; dan
- h. Kawasan industri Buluminung dan sekitarnya.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud berupa kawasan konservasi mangrove meliputi:

- a. Kawasan mangrove Tanjung Maruwat berada di Kecamatan Babulu;
- b. Kawasan mangrove Mentawir berada di Kecamatan Sepaku;
- c. Kawasan mangrove Kemantis berada di Kecamatan Sepaku.

Gambar 2.5 Kawasan Strategis Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. PPU Tahun 2011 - 2031

C. Demografi Sosial

C.1. Kependudukan

Penduduk merupakan indikator penting dalam rangka pemenuhan dan pencapaian sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi sektor penting dalam rangka mencapai seluruh tujuan dan harapan pembangunan. Data kependudukan merupakan salah satu informasi yang diperlukan dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi terhadap hasil pembangunan itu sendiri. Beberapa masalah kependudukan yang perlu diperhatikan antara lain mencakup jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan jika merupakan sumber daya manusia yang berkualitas, namun sebaliknya akan menjadi beban pembangunan jika kualitasnya rendah.

Selama lima tahun terakhir (2008-2012) jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan relatif kecil. Pada tahun 2008 jumlah penduduk seluruhnya sebanyak 133.859 jiwa dengan komposisi 69.013 jiwa penduduk laki-laki dan 64.846 jiwa penduduk perempuan. Pada tahun 2012 jumlah penduduk telah meningkat menjadi 153.470 jiwa dengan komposisi 80.692 jiwa penduduk laki-laki dan 72.778 penduduk perempuan. Untuk mengetahui lebih rinci jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada akhir tahun 2008 - 2012 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2008- 2012**

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	Pertumbuhan Penduduk (%)
1	2008	69 013	64 846	133 859	2,44
2	2009	70 657	66 508	137 165	2,47
3	2010	74 951	67 971	142 922	2,79
4	2011	78 337	70 807	149 144	2,88
5	2012	80 692	72 778	153 470	2,90

Sumber: BPS, Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2013

Berdasarkan tabel 2.3 tersebut dapat dikemukakan bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara relatif kecil dari tahun ke tahun. Persentase lebih tinggi terjadi pada tahun 2010 dan tahun 2011 yaitu masing-masing 2,79% dan 2,88% sedangkan pada tahun 2008 dan tahun 2009 pertumbuhan penduduk lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu hanya 2,44% dan 2,47%. Bila dirata-rata maka pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 2,7%.

C.2. Penduduk menurut Kelompok Umur

Untuk melihat lebih detail mengenai gambaran kependudukan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin Tahun 2012 di Kabupaten PPU**

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	7923	7147	15070
5 - 9	8824	7959	16738
10 - 14	9519	8586	18105
15 - 19	6940	6260	13200
20 - 24	4844	4369	9213

25 – 29	6287	5670	11957
30 – 34	7321	6602	13923
35 – 39	7034	6344	13378
40 – 44	5679	5122	10801
45 – 49	5197	4687	9884
50 – 54	3723	3358	7081
55 – 59	2569	2317	4886
60 – 64	2006	1809	3815
65 +	2826	2548	5374
Jumlah	80692	72778	153470

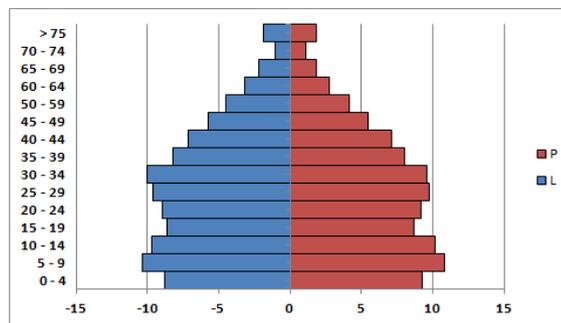
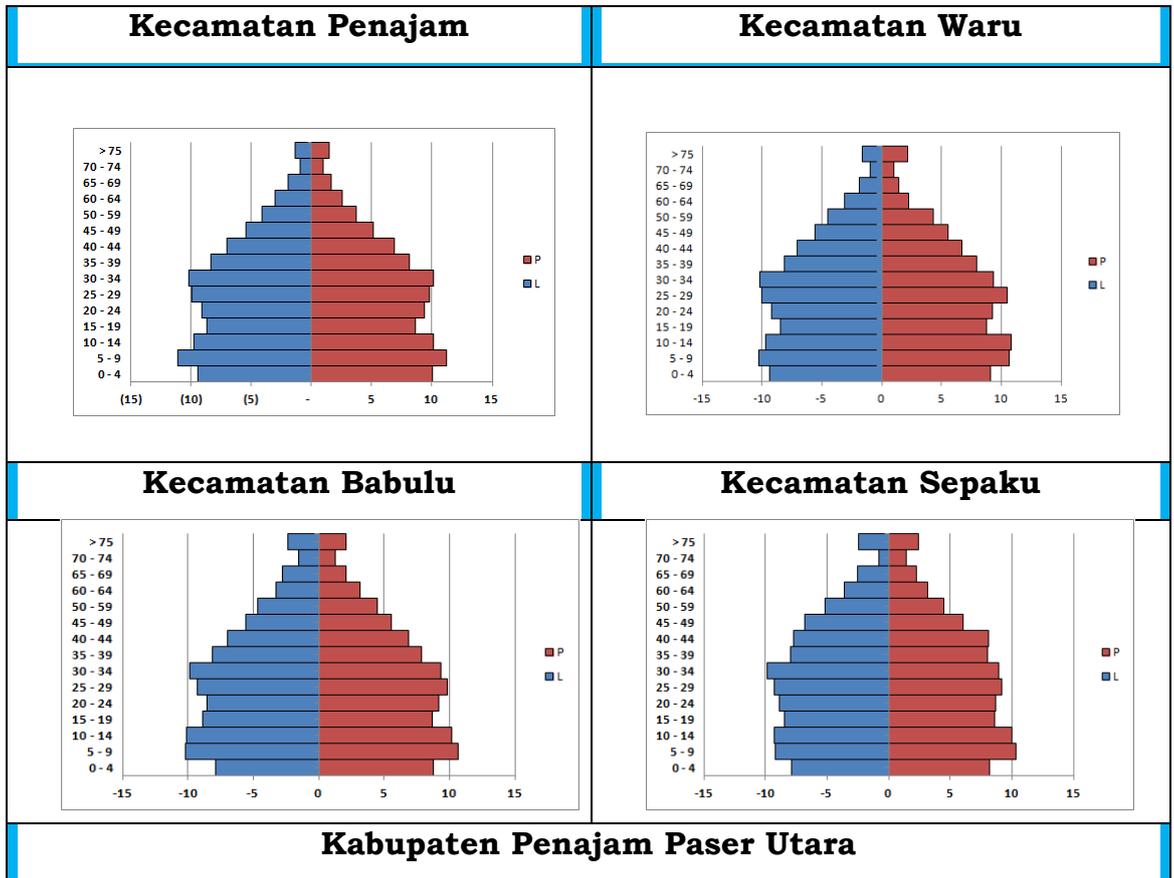
Sumber: BPS, Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2013

Dari data diatas dapat diketahui bahwa lebih dari 70 persen penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan penduduk usia produktif yaitu usia 15-64 tahun. Kondisi tersebut merupakan potensi yang dimiliki Kabupaten Penajam Paser Utara karena dengan formasi tersebut maka berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara melalui kontribusi tenaga kerja di sektor-sektor lapangan usaha.

C.3. Kepadatan Penduduk

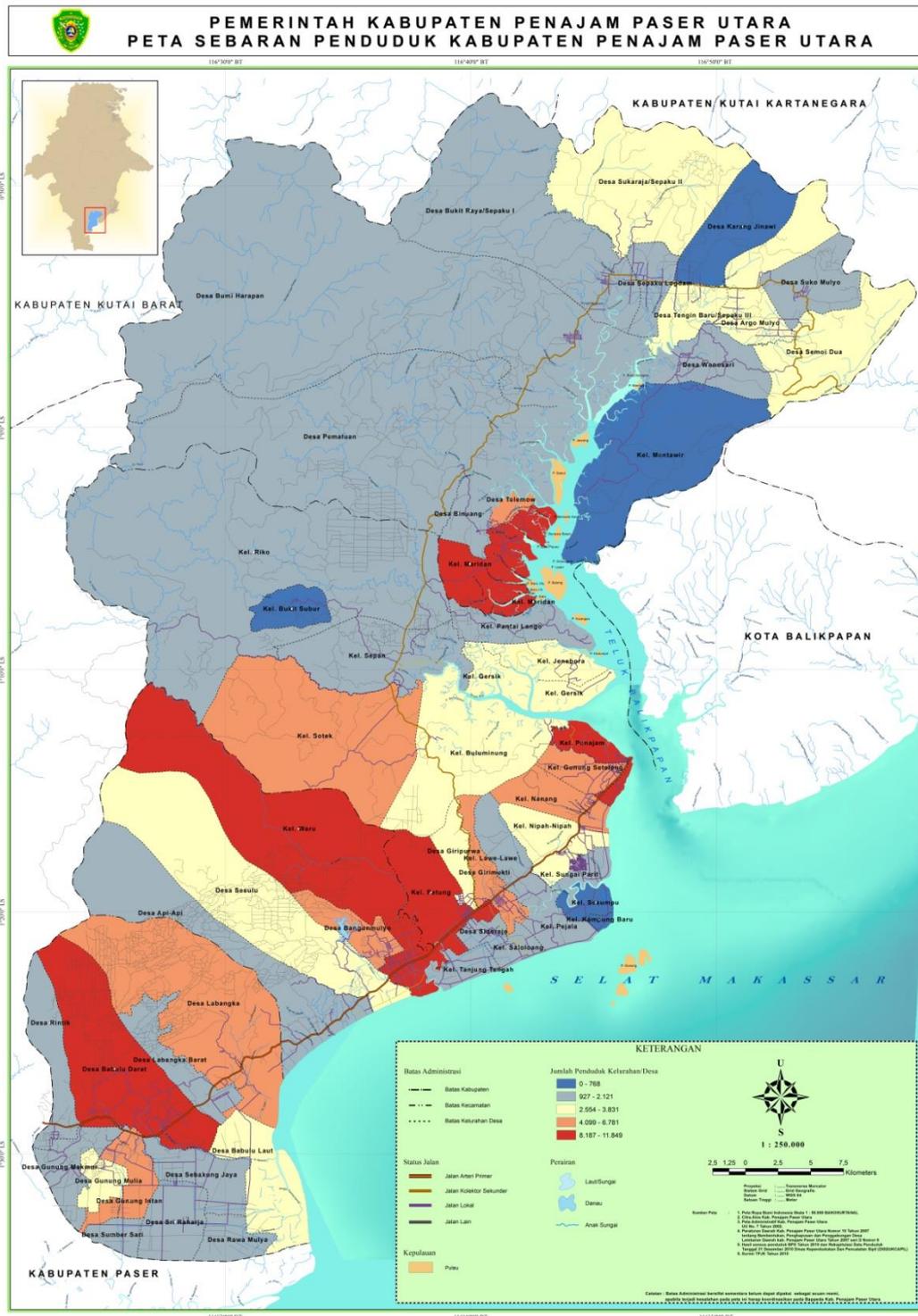
Berdasarkan data kependudukan yang ada perkecamatan, kondisi kependudukan setiap kecamatan dapat digambarkan pada piramida seperti terlihat pada gambar 2.6.

Gambar 2.6 Piramida Penduduk Perkecamatan dan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012



Sumber: Data Kependudukan tahun 2012 dan Hasil analisis

Peta 2.7. Sebaran Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012



Sumber : Hasil analisis data

C.4. Penyebaran Penduduk

Dilihat dari kepadatan penduduknya di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kepadatan yang relatif rendah. Secara rinci kepadatan penduduk disajikan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5 Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten PPU Tahun 2008 - 2012

Kecamatan	Luas Wilayah Km²	Banyaknya Penduduk	Rata-Rata Penduduk Tiap/Km²
Babulu	399,45	31.374	78,54
Waru	553,88	17.101	30,87
Penajam	1207,37	73.598	60,96
Sepaku	1172,36	31.397	26,78

Sumber: BPS, *Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2013*

Mengamati data tabel di atas bisa disimpulkan bahwa dari ke-empat kecamatan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kecamatan Babulu merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi dalam kurun waktu 2008-2012, pada tahun 2012 kepadatan mencapai 78,54 orang/km². Disusul Kecamatan Penajam dengan kepadatan 60,96 orang/km² dan Kecamatan Sepaku adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah diantara kecamatan lain yaitu 30,87 orang/km².

C.5. Jumlah Penduduk menurut Agama

Seperti umumnya wilayah lain di Indonesia, penduduk PPU sebagian besar beragama islam, diikuti kristen dan katholik, hindu dan terakhir budha. Secara rinci jumlah penduduk berdasar agama untuk setiap kecamatan disajikan pada tabel 2.6.

**Tabel 2.6 Penduduk berdasarkan Agama
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012**

No	Kecamatan	Agama (Jiwa)				
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha
1	Penajam	78,544	3,447	986	38	24
2	Waru	18,509	454	87	21	4
3	Babulu	36,137	322	131	11	4
4	Sepaku	32,537	3,397	999	14	0
Jumlah		165,727	7,620	2,203	84	32

Sumber: Dinas Kependudukan dan catatan sipil dan Bappeda diolah

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode 5 tahun terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat selama periode 2008-2013 diuraikan sebagai berikut:

A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

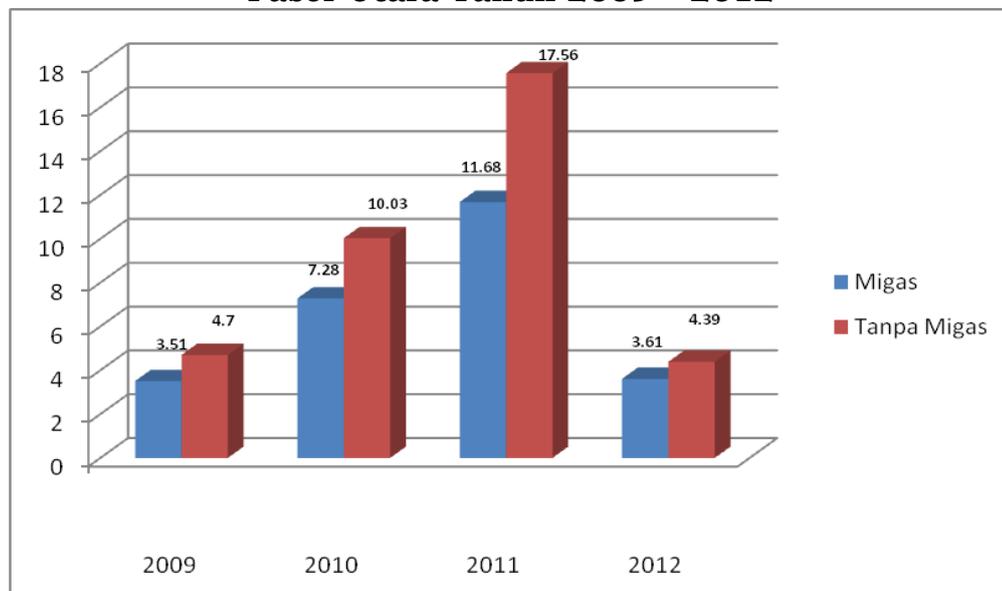
Terdapat beberapa indikator dasar yang disajikan pada aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, yakni pertumbuhan PDRB, indeks pemerataan dan inflasi. Namun, tidak semua data tersedia pada level kabupaten, misalnya data inflasi. Hal yang sama juga berlaku pada data pemerataan pendapatan, ketiadaan data dasar untuk menghitung indeks gini menyebabkan tidak tersajinya data indeks gini. Dengan demikian, pangsa

pembentukan PDB dan pangsa tenaga kerja yang terlibat akan menjadi proksinya.

A.1 Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). Hal ini dikarenakan pertumbuhan ADHK merupakan pertumbuhan riil faktor-faktor produksi tanpa dipengaruhi faktor perubahan harga (inflasi/deflasi). Angka pertumbuhan tersebut menggambarkan peningkatan aktifitas perekonomian di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Selama kurun waktu 2000 – 2012 perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara selalu mengalami pertumbuhan positif, artinya bahwa aktifitas perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara pada kurun waktu tersebut terus mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara disajikan pada gambar 2.8.

Gambar 2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 – 2012



Sumber: BPS, Pendapatan Domestik Regional Bruto 2012

Jika dihitung dengan migas, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2011 adalah sebesar 11,68 persen, dan pada tahun 2012 sebesar 3,61 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2011 merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan yang cukup tinggi pada sektor pengangkutan dan komunikasi. Ini terjadi karena adanya *multiplier effect* yang disebabkan tumbuhnya pertambangan non migas khususnya batu bara di Kabupaten Penajam Paser Utara. Jika dihitung tanpa migas, laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas tahun 2011 sebesar 17,56 persen, dan pada tahun 2012 tumbuh sebesar 4,39 persen.

Dari gambar 2.8 dapat dilihat bahwa terjadi perlambatan ditahun 2012 yang begitu pesat pada pertumbuhan ekonomi migas. Hal ini disebabkan pada sub sektor pertambangan batubara dipasaran global yang menyebabkan usaha tambang berskala kecil yang tercakup dalam kuasa pertambangan daerah banyak yang mengalami penurunan produksi hingga output yang dihasilkan tidak bisa menutupi biaya yang dikeluarkan. Sedangkan perlambatan pertumbuhan ekonomi non migas disebabkan oleh industri pengolahan yang ditutup karena mengalami kerugian dan salah satu industri terbesar di Penajam Paser Utara ditutup. Sedangkan dari sektor migas, walaupun angka pertumbuhan ekonominya tidak setinggi angka dari sektor non migas, tetapi sektor migas masih mendominasi kontribusi pada PDRB kabupaten Penajam Paser Utara. Rincian mengenai perkembangan dan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara dengan migas pada tahun 2000 - 2012 bisa dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7 Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan PDRB dengan Migas dan tanpa Migas di Kabupaten PPU Tahun 2009 – 2012

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	Atas Dasar Harga Konstan 2000 (juta rupiah)	Pertumbuhan PDRB (%)	
			Dengan Migas	Tanpa Migas
2009	2.577.863	1.849.722	3,51	4,7
2010 ^{r)}	2.923.168	1.984.290	7,28	10,03
2011 ^{*)}	3.845.143	2.216.080	11,68	17,56
2012 ^{*)}	4.106.820	2.296.180	3,61	4,39

Keterangan : ^{*)} Angka Sementara ^{r)} Angka Revisi

Sumber: BPS, Pendapatan Domestik Regional Bruto 2012

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sektor migas masih memberikan kontribusi yang begitu besar pada PDRB Kabupaten PPU. Berdasarkan pada fakta ini maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor non migas. Mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi pada sektor non migas berpusat pada pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit dimana tingkat *sustainability* pada kedua aktivitas tersebut sangatlah rendah, maka dibutuhkan penumbuhan perekonomian rakyat pada sektor-sektor strategis yang memiliki tingkat *sustainability* tinggi. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki berbagai sektor unggulan lain di luar sektor migas, pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Sektor-sektor unggulan tersebut antara lain sektor pertanian, industri sekunder (bangunan; listrik, gas dan air bersih; dan industri pengolahan) dan industri tersier (pengangkutan, komunikasi, hotel dan keuangan). Secara rinci penjelasan mengenai sektor-sektor unggulan Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada subbab selanjutnya.

A.2 Pertumbuhan Sektoral dan Struktur Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara

Pertumbuhan ekonomi sektoral merupakan pertumbuhan ekonomi dari sembilan sektor ekonomi. Dan rata-rata dari sembilan sektor ekonomi tersebut membentuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi regional berkaitan erat dengan pertumbuhan masing-masing sektor dan sub sektor. Sektor yang mendominasi perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian, sehingga pergerakan produksi maupun harga pada komoditas minyak mentah sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dari tabel 2.8 dibawah ini dapat dilihat angka pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2012. Angka pertumbuhan yang positif menunjukkan bahwa nilai tambah bruto (NTB) sektor tersebut meningkat, di lain pihak besar kecilnya angka pertumbuhan menunjukkan tingkat laju pertumbuhannya, apabila angka pertumbuhan lebih besar dari angka pertumbuhan tahun sebelumnya artinya laju pertumbuhan tahun ini lebih cepat dibanding tahun sebelumnya, demikian sebaliknya bila lebih kecil berarti pertumbuhannya mengalami perlambatan. Sebaliknya, angka pertumbuhan negatif menunjukkan bahwa NTB sektor tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten PPU
Tahun 2009 – 2012 (%)**

Lapangan Usaha	2009	2010 r)	2011 *)	2012 *)
Primer				
1. Pertanian	-0,97	11,53	4,42	5,76
2. Pertambangan dan Penggalian	1,81	3,09	13,09	1,65

Sekunder				
3. Industri Pengolahan	5,69	7,33	6,29	2,95
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	5,97	7,71	21,84	5,92
5. Bangunan	5,51	8,02	16,93	5,83
Tersier				
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,62	13,72	20,03	5,01
7. Pengangkutan dan Komunikasi	6,18	9,48	39,53	7,79
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	8,3	12,21	14,38	7,71
9. Jasa-jasa	6,77	6,74	7,73	5,93
PDRB Kab. PPU	3,51	7,28	11,68	3,61
PDRB Kab. PPU @	4,7	10,03	17,56	4,39
PDRB Kab. PPU @@	4,7	10,03	10,76	4,84

Keterangan: *)Angka Sementara r)Angka Revisi

@ Tanpa Migas

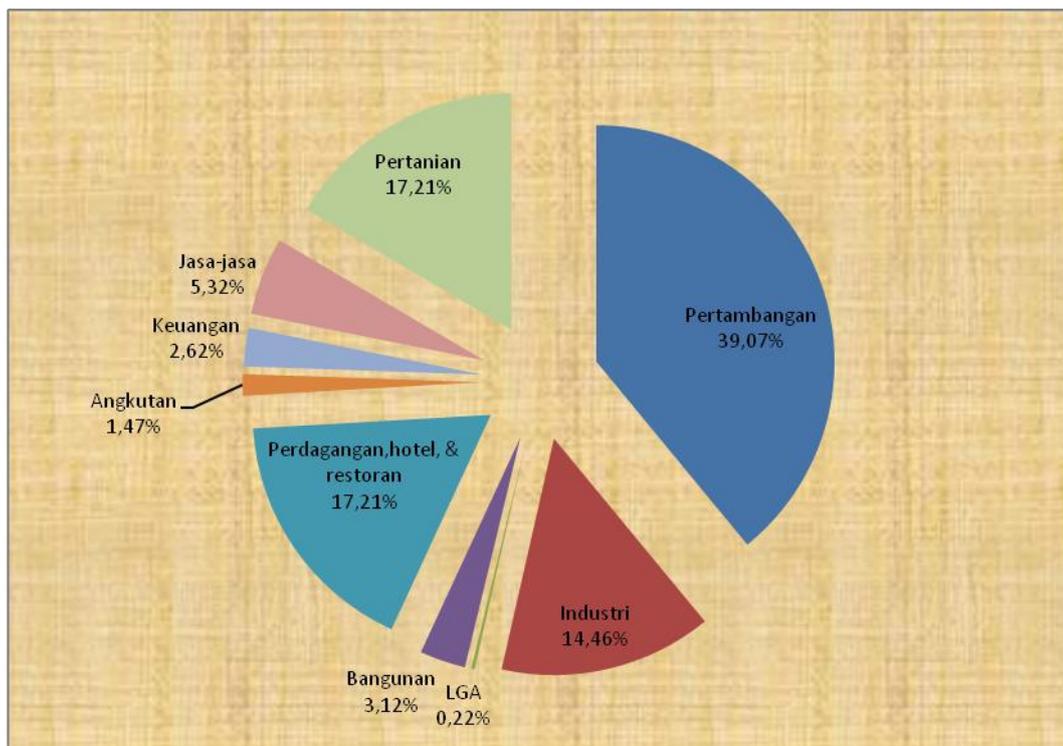
@@ Tanpa Migas dan Batu bara

Sumber: BPS, Pendapatan Domestik Regional Bruto 2012

Jika diamati, pertumbuhan sektor yang paling tinggi terdapat pada sektor industri sekunder dan tersier. Secara lebih rinci, sektor pengangkutan dan komunikasi berada pada peringkat pertama, kemudian disusul oleh sektor industri listrik, gas dan air bersih kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi untuk mengembangkan sektor-sektor tersebut untuk dapat meningkatkan kontribusinya pertumbuhan ekonomi. Mengingat secara letak geografis, Kabupaten Penajam Paser Utara berada dekat dengan Kota Balikpapan yang ekonominya telah maju dan berkembang lebih dulu. Dengan demikian, Kabupaten Penajam Paser Utara dapat berfungsi sebagai wilayah *periphery* yang dapat berfungsi sebagai *supporting system* kegiatan bisnis dan perekonomian Kota Balikpapan. Bersandar pada hal ini maka basis perekonomian masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih sangat terpusat pada industri primer yakni pertanian dapat ditransformasikan dan dikembangkan pada industri

sekunder dan tersier dimana nilai tambahnya relatif lebih tinggi. Untuk mengetahui secara lebih rinci struktur perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada gambar 2.9 di bawah ini yang menunjukkan kontribusi nilai tambah bruto sektoral atas dasar harga berlaku.

Gambar 2.9 Struktur Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012



Sumber : Pendapatan Domestik Regional Bruto 2012

Sejak dimasukkannya produksi minyak mentah dan batu bara ke dalam penghitungan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara, Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang paling dominan di kabupaten ini. Pada tahun 2011 Sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki kontribusi sebesar 39,24 persen. Dibandingkan tahun 2012, kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan sebesar 0,17 persen. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian tahun

2010 sebesar 33,44 persen. Bila dilihat perkembangan antar waktu kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2008 kontribusi yang diberikan mencapai 41,85 persen, tahun 2009 sebesar 37,16 persen, dan tahun 2010 turun lagi menjadi 33,44 persen. Tetapi untuk tahun 2011 mengalami peningkatan dibanding tahun 2010. Sebagai sektor andalan Sektor Pertambangan dan Penggalian, yang mengandalkan produksi minyak mentah dan batu bara, merupakan komoditas yang tidak dapat diperbaharui dan suatu saat pasti akan habis, maka seperti yang telah dibahas sebelumnya, perlu langkah-langkah untuk mendongkrak perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara dari sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertanian yang potensial.

Sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yaitu sebesar 17,21 persen pada tahun 2012, Jika dibandingkan dengan tahun 2011 kontribusi yang diberikan sebesar 16,97 persen maka terjadi kenaikan sebesar 0,24 persen. Sub sektor yang memberikan sumbangan yang cukup besar adalah sub sektor perdagangan dimana pada tahun 2011 di Kabupaten Penajam Paser Utara mulai berkembang pertambangan batu bara sehingga memberikan dampak di sektor perdagangan khususnya ekspor. Sektor Pertanian memiliki kontribusi pada peringkat ketiga terbesar dengan kontribusi terhadap PDRB 2012 sebesar 16,51 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2011 kontribusi yang diberikan sebesar 16,81 persen maka terjadi perlambatan. Pada sektor ini, sub sektor yang memberikan sumbangan yang cukup besar adalah sub sektor tanaman bahan makanan dan perkebunan. Penajam Paser Utara telah dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Kalimantan

Timur. Pada tahun 2012 Penajam Paser Utara mampu memproduksi padi sebanyak 66,179 ribu ton, produksi ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2011 yang hanya mencapai angka sebesar 63,264 ribu ton.

Perkembangan sektor industri pengolahan juga menunjukkan kontribusi yang cukup menyakinkan sebagai salah satu alternatif perluasan ekonomi. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sektor ini hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 14,46 persen pada tahun 2012. Dengan demikian, sektor ini mengalami penurunan kontribusi. Salah satu penyebab menurunnya kontribusi sektor industri pengolahan adalah berhentinya perusahaan industri *plywood* PT ITCI di Kelurahan Maridan, yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di Penajam Paser Utara. Berikut adalah tabel yang menggambarkan persentase struktur ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2009 hingga tahun 2012 (lihat tabel 2.9).

Tabel 2.9 Kontribusi Sektoral terhadap Pembentukan PDRB berdasar Harga Berlaku Kabupaten PPU Tahun 2009-2012 (%)

Lapangan Usaha	2009	2010 r)	2011 *)	2012 *)
1. Pertanian	18,39	19,31	16,81	16,51
2. Pertambangan & Peggalian	35,26	33,44	39,24	39,07
3. Industri Pengolahan	17,21	16,75	14,5	14,46
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,23	0,22	0,21	0,22
5. Bangunan	3,4	3,38	3,14	3,12
6. Perdag, Hotel & Restoran	15,33	16,59	16,97	17,21
7. Pengak, & Komunikasi	1,32	1,31	1,43	1,47
8. Keu, Persew, & Jasa Perush,	2,65	2,74	2,47	2,62
9. Jasa-jasa	6,21	6,25	5,23	5,32
Total	100	100	100	100

Keterangan : *) Angka Sementara r) Angka Revisi

Sumber: Pendapatan Domestik Regional Bruto 2012

Sebagai daerah pemekaran baru dengan kebutuhan pegawai yang cukup banyak, sektor jasa-jasa khususnya sub sektor pemerintahan umum juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian yang cukup besar yaitu sebesar 5,32 persen. Sektor-sektor lainnya memiliki kontribusi yang relatif kecil, dibawah 5 persen, sehingga tidak terlalu mempengaruhi perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara.

A.3 Pendapatan Regional Perkapita

Berbicara mengenai perkembangan besaran PDRB perkapita dan pendapatan perkapita Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat dilepaskan dari perkembangan besaran PDRB dan perkembangan jumlah penduduk pertengahan tahun. Jika PDRB tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan penduduk, maka pendapatan perkapita akan mengalami peningkatan yang lebih cepat juga, namun sebaliknya jika PDRB tumbuh lebih lambat dari pertumbuhan penduduk, maka pertumbuhannya akan melambat juga. Dari besaran PDRB yang tercipta tahun 2011 sebesar 3.845 triliun rupiah, besaran PDRB meningkat sekitar 31,54 persen sedangkan laju pertumbuhan penduduk pertengahan tahun hanya mencapai 3,87 persen. Peningkatan ini berimplikasi pada kenaikan PDRB perkapita Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2012 sebesar 26,76 juta rupiah. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan PDRB per kapita tahun 2011 sebesar 25,90 juta rupiah.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komoditi migas dan hasil-hasilnya terhadap pembentukan PDRB Penajam Paser Utara, dapat kita lihat dengan mengeluarkan migas dari perhitungan PDRB. Dengan cara ini diperoleh besaran PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 2.62 triliun rupiah pada

tahun 2011 dan 2.77 triliun rupiah pada tahun 2012, dari besaran ini dapat diperoleh nilai PDRB perkapita tanpa migas tahun 2011 sebesar 17,62 juta rupiah dan tahun 2012 sebesar 18.04 juta rupiah. Dengan demikian terlihat selisih yang cukup besar antara PDRB perkapita dengan migas dan PDRB per kapita tanpa migas, yaitu sekitar 8,72 juta rupiah. Jika dilihat tahun 2011 dan 2012, PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara cukup besar dikarenakan masuknya sektor pertambangan non migas di dalam penghitungan. Jika dihitung nilai PDRB tanpa migas dan batu bara sebesar 2.51 triliun rupiah, dari besaran ini diperoleh nilai PDRB per kapita tanpa migas dan batu bara sebesar 16,37 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan PDRB perkapita dengan migas, maka akan diperoleh selisih yang cukup besar yaitu sebesar 10,39 juta rupiah. Secara rinci perkembangan PDRB perkapita kabupaten PPU dapat dilihat pada tabel 2.10 dan gambar 2.11.

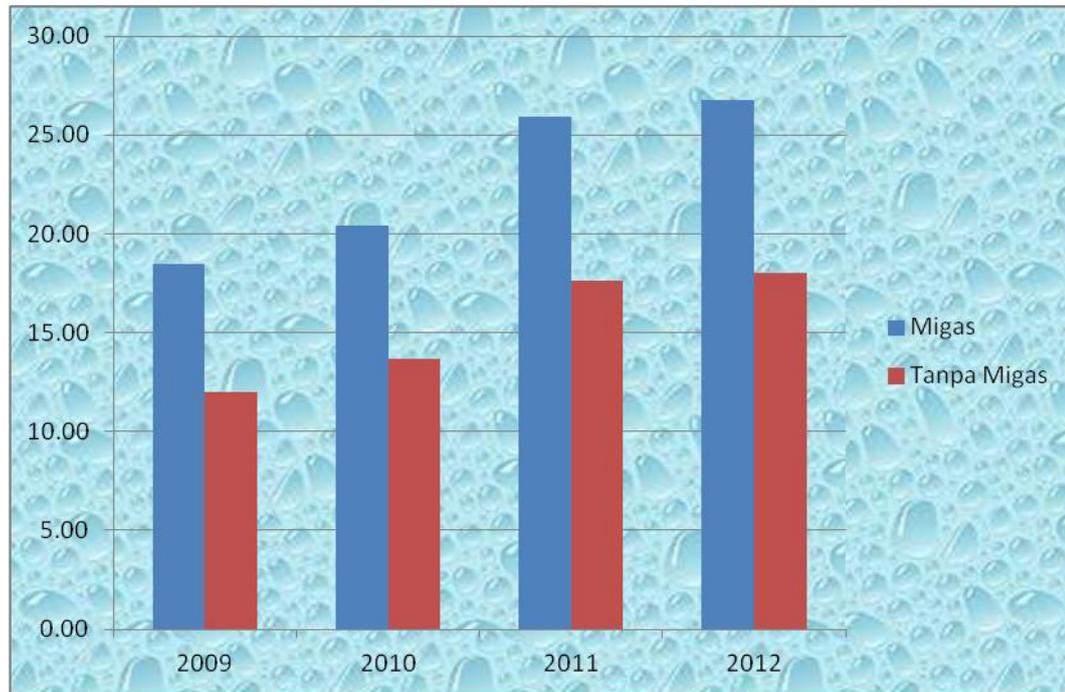
Tabel 2.10 Perkembangan PDRB Perkapita atas dasar Harga berlaku dan Konstan tahun 2000 Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2009 – 2012

Tahun	Jumlah Penduduk Pertengahan	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	
		Migas	Tanpa Migas
2009	139.641	18,46	12,01
2010 ^{r)}	142.922	20,45	13,68
2011 ^{*)}	148.448	25,9	17,62
2012 ^{*)}	153.470	26,76	18,04

Keterangan : ^{*)} Angka Sementara ^{r)} Angka Revisi

Sumber: Pendapatan Domestik Regional Bruto 2012

Gambar 2.10 Perkembangan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2009-2012



Sumber: Pendapatan Domestik Regional Bruto 2012

Dalam kenyataannya, besaran PDRB dan PDRB perkapita yang telah dibahas sebelumnya bukanlah merupakan pendapatan yang sesungguhnya bagi masyarakat Penajam Paser Utara. Karena dalam nilai tersebut masih terdapat pendapatan faktor yang bukan dimiliki oleh penduduk Penajam Paser Utara. Selain itu masih terkandung nilai penyusutan dan pajak tak langsung netto. Apabila pendapatan faktor yang masuk Penajam Paser Utara diperhitungkan dengan pendapatan faktor yang keluar, dan dikurangi dengan penyusutan dan pajak tak langsung netto, maka akan diperoleh nilai pendapatan regional yang merupakan pendapatan riil masyarakat Penajam Paser Utara. Dengan membagi nilai pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, akan diperoleh nilai pendapatan per kapita.

Setelah memperhitungkan nilai pendapatan faktor netto, penyusutan, dan pajak tak langsung netto, maka nilai pendapatan perkapita Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2011 sebesar 22,88 juta rupiah (lihat tabel 2.10). Kemudian nilai ini meningkat 3,31 persen, sehingga nilai pendapatan perkapita Penajam Paser Utara tahun 2012 menjadi 22,88 juta rupiah per orang per tahun. Selisih antara PDRB perkapita dengan pendapatan perkapita terutama disebabkan oleh besaran aliran pendapatan faktor keluar Kabupaten Penajam Paser Utara. Aliran keluar ini sebagai dampak dari banyaknya faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa di Penajam Paser Utara yang belum dimiliki di wilayah ini, sehingga sebagian surplus usaha dan upah/gaji yang tercipta tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Penajam Paser Utara. Faktor inilah yang menyebabkan rendahnya pendapatan perkapita di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 2.11 PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita dengan Migas dan Tanpa Migas Kabupaten PPU Tahun 2009 – 2012

Tahun	Jumlah Penduduk Pertengahan	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)		Pendapatan Perkapita (Juta Rupiah)	
		Migas	Non Migas	Migas	Non Migas
2009	139.641	18,46	12,01	15,78	10,27
2010 ^{r)}	142.922	20,45	13,68	17,49	11,7
2011*)	148.448	25,9	17,62	22,15	15,06
2012*)	153.470	26,76	18,04	22,88	15,43

Keterangan : *) Angka Sementara ^{r)} Angka Revisi

Sumber: Pendapatan Domestik Regional Bruto 2012

Berdasarkan data grafik diatas perkembangan pendapatan perkapita tercipta sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 15,43 juta rupiah. Dengan demikian terlihat adanya ketimpangan yang cukup besar antara pendapatan yang dinikmati oleh penduduk

yang bekerja pada sektor-sektor basis migas dibandingkan dengan penduduk yang bekerja pada sektor-sektor lainnya.

B. Inflasi

Perhitungan inflasi pada tingkat kabupaten tidak dilakukan di semua wilayah, termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh karena itu untuk mendeteksi inflasi di kabupaten Penajam Paser Utara digunakan inflasi kota Balikpapan. Laju inflasi Kota Balikpapan menjadi proksi karena wilayah Penajam Paser Utara yang berdekatan dengan wilayah Kota Balikpapan sehingga laju inflasi di wilayah Penajam Paser Utara relatif sama dengan laju inflasi Kota Balikpapan. Laju inflasi di wilayah Kota Balikpapan dari tahun 2009 hingga tahun 2012 berkisar pada angka 6 persen. Secara lebih rinci, laju inflasi di wilayah Balikpapan pada tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 secara berturut-turut adalah 6,65%; 6,21%; 6,45% dan 6,41%. Angka laju inflasi ini dinilai cukup tinggi bila dibandingkan dengan nilai laju inflasi di wilayah lain di Indonesia.

2.3 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah untuk tahun 2009 hingga tahun 2011 disajikan pada tabel 2.12. Berdasar tabel tersebut dapat dilihat bahwa baik rata-rata lama sekolah maupun angka melek huruf terus mengalami peningkatan walaupun dengan porsi yang cukup kecil.

Tabel 2.12 Angka Melek Huruf dan rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten PPU Tahun 2009-2012

Indikator	Kabupaten PPU*				Propinsi Kalimantan Timur**			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Angka melek huruf	94,93	95,55	95,57	95,77	97,18	97,36	97,26	97,81
Rata-rata lama sekolah	7,58	7,66	7,68	7,71	8,85	8,87	9,19	9,22

Sumber:

* Bappeda PPU, 2012

** Bappeda Kaltim, 2012

2.4 Fokus Seni dan Budaya

Untuk mengukur kinerja fokus kesenian digunakan indikator jumlah grup kesenian per 1.000 penduduk, jumlah gedung kesenian per 1.000 penduduk, jumlah klub olah raga per 1.000 penduduk dan jumlah gedung olah raga per 1.000 penduduk.

Tabel 2.13 Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah grup kesenian per 1.000 penduduk	-	-	-	-	-
Jumlah gedung kesenian per 1.000 penduduk	-	-	-	-	-
Jumlah grup olahraga per 1.000 penduduk	-	-	-	-	32
Jumlah gedung olah raga per 1.000 penduduk	-	-	-	-	32

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU Tahun 2013

2.5 Pelayanan Umum

Pelayanan umum dapat diartikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh pemerintah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Urusan Wajib

Kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

A.1 Pendidikan

Hak untuk memperoleh pendidikan bermutu adalah hak setiap warga negara sehingga negara berkewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikan dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Hal ini telah diamanahkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, dalam kerangka Tujuan Pembangunan Millenium (*Millennium*

Development Goals/MDGs), pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bidang pendidikan sebagai salah satu tujuan utama khususnya pada bidang pendidikan dasar. Untuk mencapai tujuan tersebut, pada tingkat daerah, khususnya pada tingkat kabupaten/kota, pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan dengan memastikan tersedianya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dan juga tersedianya sarana dan prasarana pendidikan (gedung sekolah). Tabel 2.17 sampai tabel 2.20 menyajikan informasi bidang pendidikan di wilayah Penajam Paser Utara.

Pada Tabel 2.14 sampai 2.16 secara umum terlihat kinerja pendidikan menunjukkan perbaikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada setiap jenjang pendidikan mengalami penambahan. Untuk jenjang pendidikan SD mengalami penambahan dari 90,07 persen (2007) menjadi 95,02 persen (2011) atau rata-rata 5,0 persen per tahun. Untuk jenjang pendidikan menengah bertambah dari 54,18 (2007) persen menjadi 73,60 persen (2011) atau rata-rata 3,8 persen per tahun. Pada jenjang pendidikan menengah atas mengalami fluktuasi. Dari 40,05 persen (2007) menjadi 37,03 (2010) dan kemudian meningkat menjadi 45,52 persen (2011) atau rata-rata 1,0 persen per tahun. Jika dilihat per kecamatan maka APS tertinggi untuk sekolah dasar dicapai oleh Sepaku dan tertinggi untuk sekolah menengah dicapai oleh Babulu (lihat table 2.16).

Tabel 2.14 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 - 2011

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1.3.	APS SD/MI	90.07	94.27	94.79	95.12	95.82
2.3.	APS SMP/MTs	54.18	60.40	65.85	72.69	63.66
3.3.	APS SMA/MA	40.05	35.83	34.44	37.03	46.88

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Tahun 2012

Tabel 2.15 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Murni di Kabupaten PPU Tahun 2009-2012

No.	Uraian	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1.	Angka Partisipasi Kasar				
	- SD/MI/Paket A	102,10	114,28	103,80	106,28
	- SMP/MTs/Paket B	100,79	89,97	89,78	91,38
	- SMA/SMK/MA/Paket C	66,79	75,97	70,59	64,58
2.	Angka Partisipasi Murni				
	- SD/MI/Paket A	97,96	95,69	86,92	95,02
	- SMP/MTs/Paket B	85,80	75,97	72,26	70,76
	- SMA/SMK/MA/Paket C	62,16	56,10	53,92	43,10

Sumber: Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. PPU Tahun 2012

Tabel 2.16 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kecamatan di Kabupaten PPU Tahun 2012

Kecamatan	APS tingkat Sekolah Dasar	APS tingkat Sekolah Menengah
Penajam	75.49	45.19
Waru	75.66	54.94
Babulu	73.95	55.72
Sepaku	85.74	51.31
Jumlah	83.03	51.32

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU Tahun 2012

Kinerja pendidikan yang dicapai itu secara langsung terkait dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan. Tabel 2.16 sampai tabel 2.18 menyajikan informasi mengenai fasilitas gedung sekolah dan ketersediaan guru. Dari tabel-tabel itu dapat dilihat bahwa rasio gedung sekolah dasar terus membaik sedangkan untuk SMP mengalami fluktuasi. Untuk jenjang pendidikan dasar (negeri dan swasta), penambahan jumlah sekolah hanya 2 (negeri) dan 1 (swasta) dalam periode 2008-2013. Keberadaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tidak ada di kabupaten Penajam Paser Utara. Namun untuk Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), perkembangan jumlahnya tidak mengalami penambahan, tetap 4 sekolah.

Pada jenjang pendidikan tingkat pertama, jumlah sekolah mengalami penambahan hanya SMPN (Sekolah Menengah Pertama Negeri) sebanyak 2 sekolah. SMPS, MTsN dan MTsS tidak mengalami penambahan. Angka ini mengindikasikan bahwa untuk fasilitas gedung sekolah menengah perbaikan atau penambahan yang dilakukan tidak dapat mengimbangi kerusakan yang terjadi, tetapi tidak demikian dengan tingkat sekolah dasar. Dari wilayah maka capaian rasio murid sekolah per gedung tertinggi adalah kecamatan Sepaku untuk sekolah dasar dan Waru untuk sekolah menengah.

Tabel 2.17 Rasio Jumlah Murid terhadap Gedung Sekolah di Kabupaten PPU Tahun 2008 - 2012

Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
Rasio murid per gedung sekolah SD/MI	25	24	23	23	26
Rasio murid per gedung sekolah SMP/MTs	37	32	30	32	38

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU Tahun 2012

Tabel 2.18 Rasio Murid terhadap Gedung Sekolah di Setiap Kecamatan di Kabupaten PPU Tahun 2012

Kecamatan	Rasio Murid/Gedung Sekolah	
	SD/MI	SMP/MA
Penajam	34	40
Waru	29	36
Babulu	26	42
Sepaku	22	39
Jumlah	26	38

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU

Dari segi jumlah pendidik, terdapat penurunan pada jumlah tenaga pendidik pada jenjang pendidikan SMA/MA. Pada jenjang pendidikan SMA/MA terjadi penurunan jumlah tenaga pendidik dari 293 (2012) menjadi 273 (2012) atau mengalami penurunan sebanyak 20 tenaga pendidik, namun karena jumlah murid juga turun, rasio yang diperoleh tidak mengalami perubahan. Secara umum, indikator rasio jumlah siswa per jumlah guru dalam periode 2007–2011 menunjukkan adanya perkembangan yang relatif konstan. Pada jenjang pendidikan dasar, rasionya mengalami perubahan yang tajam dari 1:274 (2007) menjadi 1:15 (2011). Untuk jenjang pendidikan menengah pertama, dari rasio 1:12,76 (2007) menjadi 1:11 (2011). Sedangkan pada jenjang pendidikan menengah atas, dari rasio 1:13,43 (2007) menjadi 1:11 (2011). Indikator lainnya yaitu Minat Baca Masyarakat, perkembangannya mengalami fluktuasi yang tajam dari 7,05 (2007) menjadi 0,00 (2008 dan 2009), kemudian meningkat drastis menjadi 10 (2010) dan 13 (2011).

**Tabel 2.19 Rasio Guru terhadap Murid di Kabupaten PPU
Tahun 2008 - 2012**

Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
Rasio guru dibanding murid tingkat SD/MI	1 : 274	1 : 15	1 : 16	1 : 15	1 : 15
Rasio guru dibanding murid sekolah tingkat SMP/MTs	1 : 13	1 : 11	1 : 13	1 : 11	1 : 11
Rasio guru murid SMA/MA	1 : 13	1 : 11	1 : 11	1 : 10	1 : 11

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU Tahun 2012

**Tabel 2.20 Rasio Guru terhadap Murid per Kecamatan di
Kabupaten PPU Tahun 2011**

No	Kecamatan	Rasio Guru/Murid		
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA
1	Penajam	1 : 17,92	1 : 12,95	1 : 15,11
2	Waru	1 : 14,99	1 : 13,89	1 : 11,24
3	Babulu	1 : 15,64	1 : 13,30	1 : 13,57
4	Sepaku	1 : 15,67	1 : 14,61	1 : 12,98
	Jumlah	1 : 16,56	1 : 13,51	1 : 13,87

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU Tahun 2012

A.2 Kesehatan

Untuk mencapai keberhasilan program pembangunan dan kemajuan peradaban suatu bangsa, bidang kesehatan menjadi salah satu landasan yang harus kuat untuk memacu gerak roda pembangunan bangsa. Hal ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan juga sangat berkaitan dengan produktivitas baik perorangan maupun kelompok. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan mengamanahkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan yang tinggi yang dapat dicapai melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang mudah, merata dan murah makin meningkat.

Selama 5 tahun terakhir jumlah sarana kesehatan yang tersedia bervariasi. Jumlah puskesmas sebanyak 11 gedung yang tersebar di empat kecamatan tidak mengalami penambahan. Demikian pula halnya dengan puskesmas pembantu, puskesmas keliling tidak mengalami penambahan. Berbeda dengan sarana dan prasarana kesehatan lainnya, jumlah puskesmas pembantu mengalami fluktuasi dari 43 gedung (2006) menjadi 30 gedung (2007-2009). Selanjutnya pada tahun 2010 mengalami penambahan menjadi 44 buah dan kemudian berkurang menjadi 39 buah (2011-2012). Keterjaminan pelayanan akses kesehatan bagi individu maupun masyarakat, selain ditentukan dengan adanya tempat pelayanan kesehatan (RSU, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu) juga ditentukan oleh kehandalan tenaga kesehatan. Dibandingkan dengan kondisi Kalimantan Timur secara keseluruhan maka kondisi sarana kesehatan ini relatif lebih baik. Tabel 2.24 menyajikan rasio penduduk per sarana kesehatan di Penajam Paser Utara dan Kalimantan Timur. Tabel ini mengindikasikan baiknya sarana kesehatan yang ada di Penajam Paser Utara dibandingkan dengan di Kalimantan Timur, setidaknya untuk aspek ketersediaan, namun demikian ketersediaan ini tidak langsung terkait dengan keterjangkauan.

Tabel 2.21 Rasio Penduduk per Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2006 – 2012

No	Tahun	Kabupaten PPU*			Propinsi Kalimantan Timur**	
		Puskesmas	Pustu	Pusling	Puskesmas	Pustu
1	2012	13,952	3,935	13,952	18.477	6.239
2	2011	13,952	3,824	13,558	18.236	6.158
3	2010	12,993	3,248	12,993	17.153	5.729

No	Tahun	Kabupaten PPU*			Propinsi Kalimantan Timur**	
		Puskesmas	Pustu	Pusling	Puskesmas	Pustu
4	2009	12,470	4,572	12,470	15.289	5.163
5	2008	12,169	4,462	12,169	15.096	4.598

Sumber: Bappeda Kalimantan Timur, 2012

Sementara untuk jumlah tenaga kesehatan tahun 2012 masih menunjukkan angka yang kurang ideal (lihat tabel 2.22). Jumlah dokter spesialis ada 5 (spesialis penyakit dalam, spesialis kandungan, spesialis radiologi, spesialis bedah tulang dan spesialis Bedah Mulut). Rasio ideal antara jumlah dokter spesial dan jumlah penduduk adalah 1:16.000. Jumlah dokter umum adalah 13 orang dan perbandingan ideal antara jumlah dokter umum dan jumlah penduduk adalah 1:2500. Jumlah dokter gigi adalah 3 orang dan rasio idealnya adalah 1:9090. Pelayanan kesehatan yang prima dan berkualitas juga diindikasikan dengan banyaknya masyarakat melakukan kunjungan ke rumah sakit. Ini terkait dengan adanya kesadaran tentang kualitas hidup. Dalam kurun tahun 2012, jumlah kunjungan pasien rawat jalan di RSUD Penajam sebanyak 21.749 orang.

Tabel 2.22 Jumlah Tenaga Kesehatan di RSUD Penajam Tahun 2012

No	Uraian	Jumlah	Rasio terhadap jumlah penduduk	Rasio Ideal per 100.000 penduduk*
1	Dokter spesialis	5	30.694	6
2	Dokter umum	13	11.805	40
3	Bidan	29	5.292	11
4	Perawat	65	2.361	22
5	Analisis Lab	6	25.578	-
6	Fisioterapis	3	51.156	100

No	Uraian	Jumlah	Rasio terhadap jumlah penduduk	Rasio Ideal per 100.000 penduduk*
7	Apoteker	2	76.735	40
8	Asisten Apoteker	5	30.694	10
9	Rekam Medik	4	38.367	-
10	Sanitarian	3	51.156	-
11	Teknisi Elektromedis	3	51.156	-
12	Radiografer	4	38.367	-
13	Pelaksana Gizi	4	38.367	-
Jumlah		146		

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2013

Namun dari data tabel 2.22 di atas dapat diketahui bahwa ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara masih di bawah standar ideal, Terutama untuk tenaga kesehatan bidan, sanitarian dan dokter umum. Rendahnya ketersediaan tenaga kesehatan tentunya akan mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Penajam Paser Utara ini. Upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat merupakan salah satu hak dasar rakyat. Hal ini juga merupakan tujuan utama dari pembangunan bidang kesehatan. Pemenuhan kesehatan masyarakat dilakukan dalam bentuk pemberian kemudahan memperoleh akses pelayanan kesehatan yang baik dan terjangkau. Hal ini mengingat bahwa pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi jangka panjang dalam mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan pembangunan ekonomi yang kompetitif serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan demikian, pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan langkah penting yang perlu diperhatikan.

Pada tahapan akhir dari pembangunan kesehatan ini diharapkan menjadi salah satu upaya penanggulangan kemiskinan penduduk dalam jangka panjang. Kondisi derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai implementasi dari pembangunan kesehatan dikemukakan dalam beberapa indikator yang disajikan pada tabel 2.23 berikut ini.

Tabel 2.23 Angka Kelangsungan Hidup, Usia Harapan Hidup dan Balita Gizi Buruk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2012

No.	Uraian	Tahun				Target 2010*
		2009	2010	2011	2012	
1.	Angka kelangsungan hidup bayi	2957	2957	3018	846	-
2.	Angka usia harapan hidup	71,32	71,46	71,63	-	67,9
3.	Angka kematian ibu/1000 kelahiran hidup	10,1	7	13,7	7	15
4.	Kematian bayi pada 1000 kelahiran	2	2	4	6	40

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten PPU, 2010

Dari tabel 2.23 di atas dapat diketahui bahwa pencapaian kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara telah melampaui target kesehatan nasional. Di sisi lain, angka usia harapan hidup meningkat sedangkan angka kematian ibu per 1000 kelahiran menurun. Indikator ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah di bidang kesehatan sudah cukup baik. Walaupun begitu, terdapat indikator lain yang perlu perhatian khusus, indikator tersebut yakni angka kelangsungan hidup bayi dan angka kematian bayi

per 1000 kelahiran. Pada indikator ini terlihat bahwa angka kelangsungan hidup bayi menurun serta kematian bayi pada 1000 kelahiran meningkat. Hal ini menunjukkan perlunya upaya pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan kesehatan di kabupaten ini adalah mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan berkesinambungan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang sehat. Pembangunan kesehatan diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mengutamakan azas keadilan serta pemerataan kebutuhan pelayanan kesehatan sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan sekaligus disertai dengan penanganan permasalahan kesehatan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hanya dengan pelaksanaan upaya kesehatan yang kondusif dan integral maka tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat terwujud.

A.3 Pekerjaan Umum

A.3.1 Sarana dan Prasarana Umum

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Usaha pembangunan yang meningkat menuntut adanya sarana transportasi untuk menunjang mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi barang dari dan ke suatu daerah. Kinerja jaringan jalan sebagai hasil dari manajemen pengelolaan didasarkan kepada beberapa indikator makro yaitu berdasarkan: (1) kemantapan; (2) kondisi dan; (3) pemanfaatan jalan yang ada.

Berdasarkan status jalan, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 3 (tiga) status jalan yakni: (1). Jalan Nasional di Penajam Paser Utara, dimulai dari Penajam – Kademan dengan panjang ruas 59,60 Km (Lampiran Kepmen PU 19 B tabel status jalan nasional bukan jalan tol). (2). Jalan Propinsi, jalan provinsi dimulai dari simpang Silkar Petung – Samboja dengan panjang 89,00 Km (BPS, PPU dalam Angka, 2012). (3). Jalan Kabupaten, merupakan jalan yang bukan nasional dan bukan jalan provinsi. Jalan ini merupakan jalan berupa jalan IKK dan jalan lingkungan. Panjang jalan kabupaten pada tahun 2012 tercatat 900,44 Km.

Berdasar pada standar pelayanan minimal (SPM) bidang jalan (sumber : Buku RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Bab II Hal. 32) bahwa basis pengembangan SPM dibagi atas :

1. Kondisi jalan yang baik (tidak ada lubang)
2. Tidak Macet (lancar sepanjang waktu)
3. Dapat digunakan sepanjang tahun (tidak banjir waktu musim hujan)

Berdasar standar tersebut, kondisi jalan di Penajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel 2.23. Faktor yang mempengaruhi kondisi jalan adalah kualitas material, beban yang diterima dan geometrik jalan serta prosedur saat pelaksanaan. Secara umum hingga tahun 2012 kondisi jalan di Kab.Penajam Paser Utara dalam kondisi baik sepanjang 506,18 Km dan kondisi sedang rusak sepanjang 300,80 Km. Berbeda saat 2 tahun sebelumnya yakni tahun 2010, panjang jalan dengan kondisi baik yakni 255,84 Km, sedangkan jalan kondisi sedang rusak 326,63 Km. Ditilik dari data tersebut bahwa selama selang waktu tersebut hingga saat ini terjadi perbaikan dan pembangunan jalan sehingga mengalami peningkatan kondisi jalan baik sebanyak 2 kali lipat. Beberapa wilayah yang telah mengalami peningkatan jalan dari jalan berupa

agregat menjadi aspal diantaranya simpang tiga kapling – berebere - tanjung jumlai – sidorejo - simpang empat petung. Kemudian peningkatan jalan girimukti luar (Desa Girimukti) dan girimukti dalam (sekarang menjadi Desa Giripurwa) serta Jalan IKK Waru. Seluruh jaringan jalan hampir semuanya di lapiasi agregat dan aspal. Melihat kondisi tersebut bahwa dengan peningkatan jalan maka mobilitas/aksesibility masyarakat semakin lancar dikarenakan kondisi jalan yang sudah baik dan nyaman untuk dilalui lalu lalang kendaraan bermotor roda dua atau lebih.

Tabel 2.24 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2012

No.	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Kondisi Baik	200.6	382.78	255.84	323.16	506.18
2.	Kondisi Sedang Rusak	157.2	259.56	326.63	318.01	300.80
3.	Kondisi Rusak	296.3	76.26	202.44	178.64	68.31
4.	Kondisi Rusak Berat	97.3	41.91	29.13	19.13	25.15
5.	Jalan secara keseluruhan	965.32	908.01	961.54	996.44	1047.94

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2012

Secara umum kondisi jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah dapat menghubungkan seluruh desa yang ada, walaupun pada wilayah tertentu kondisi jalan yang ada masih belum memadai khususnya pada waktu musim penghujan. Wilayah-wilayah tersebut umumnya berada jauh dari pusat pertumbuhan seperti Desa Bukit Subur dan jalan penghubung pada wilayah-wilayah pesisir sehingga memperjauh jarak dari pusat kota kabupaten. Kondisi jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara apabila dilihat dari total panjang jalannya terjadi peningkatan setiap tahun dengan pertumbuhan panjang jalan sebesar 46,64

Km/tahun yang tersebar di 4 kecamatan. Demikian pula apabila dilihat berdasarkan kondisi jalan, terjadi peningkatan jalan dengan kondisi baik dari tahun 2008 sampai tahun 2012 bertambah sepanjang 305,58 Km atau setiap tahun terjadi peningkatan sebesar 61,11 Km/tahun. Penambahan jalan yang baik, terjadi karena adanya kegiatan peningkatan jalan dari agregat B menjadi ATB yang tersebar di 4 kecamatan. Hal ini dapat dirasakan dengan semakin mudahnya akses menuju wilayah-wilayah yang sebelumnya ditempuh dengan waktu yang cukup lama.

Untuk wilayah Kecamatan Penajam, akses jalan menuju Pantai Tanjung Jumalai yang sebelumnya merupakan jalan dengan perkerasan LPB sekarang menjadi ATB. Aksesibilitas menuju tempat wisata juga bertambah mudah dengan adanya 4 ruas jalan penghubung untuk mencapai objek wisata tersebut. Mudahnya pencapaian karena meningkatnya kondisi jalan, sangat dirasakan dengan semakin banyaknya kunjungan wisata terutama pada hari libur yang berdampak pada mulai tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi yang ada disekitar objek wisata tersebut.

Peningkatan lapis permukaan jalan juga dilaksanakan pada wilayah permukiman yang padat penduduk seperti di wilayah perumahan PNS, Girimukti dan Petung. Dengan semakin baiknya kondisi jalan semakin memicu tersebarnya kantong-kantong permukiman baru dan perluasan permukiman yang ada, sehingga penduduk tidak terkonsentrasi pada wilayah hamparan permukiman saja. Adanya persebaran penduduk akibat semakin baiknya pelayanan jalan ini dapat dilihat dengan mulai tumbuh permukiman baru mengikuti badan jalan yang telah ditingkatkan

tersebut. Pada wilayah Kecamatan Babulu peningkatan jalan tidak hanya dibangun pada wilayah permukiman saja, tetapi juga pada kawasan yang menghubungkan pusat-pusat produksi pertanian dan perikanan. Dengan semakin baiknya kondisi jalan di wilayah pertanian, secara tidak langsung memudahkan akses bagi petani untuk dapat mengangkut hasil pertaniannya sehingga memperkecil ongkos angkut yang berdampak pada peningkatan pendapatan.

Apabila dilihat dari proporsi panjang jalan dalam kondisi baik perkecamatan, Kecamatan Penajam mempunyai proporsi yang paling besar yaitu sebesar 45,05% jalan baik dari total jalan yang ada. Sementara yang paling rendah adalah Kecamatan Waru sebesar 11,13%. Umumnya jalan-jalan dalam kondisi kurang baik berada diwilayah-wilayah terpencil yang ada di pedalaman seperti Bukit Subur dan pesisir pantai seperti jalan akses menuju Pantai Lango, Jenebora, Gresik dan Mentawir. Namun apabila dirinci berdasarkan lapis permukaannya, rata-rata panjang jalan yang sudah diaspal dibandingkan dengan total panjang jalan perkecamatan sebesar 18,05%. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak ruas jalan yang ada disetiap kecamatan yang perlu peningkatan lapis perkerasan menjadi aspal dengan panjang total 327,78 Km atau sebesar 81,94% dari total panjang jalan yang ada. Kondisi jalan berdasar jenis permukaan disajikan pada tabel 2.25.

Tabel 2.25 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012

Kecamatan	Jenis Permukaan				Jumlah Total
	Aspal	Kerikil	Tanah	lainnya	
Penajam	73.72	249.71	50.20	2.83	376.45
Waru	12.93	39.02	24.25	0	76.20
Babulu	46.61	118.89	75.99	0.3	241.79
Sepaku	25.31	115.49	13.57	0.13	154.51

Sumber: BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka Tahun 2012.

Masih banyaknya kondisi jalan yang belum teraspal tersebut disebabkan karena kegiatan pembangunan atau peningkatan jalan umumnya terkendala pada pembebasan dan kepemilikan lahan yang umumnya dikuasai oleh perusahaan kayu atau perusahaan perkebunan sawit yang masih aktif beroperasi. Hal ini berdampak pada sulitnya pengelolaan jalan-jalan tersebut karena kelas jalan yang ada tidak sesuai dengan beban yang harus dilewati oleh kegiatan angkutan kendaraan perusahaan. Jalan penghubung antar desa yang kepemilikannya masih dikuasai oleh perusahaan antara lain Jalan Riko - Bongan, Riko - Pantai Lango atau Jenebora-Gresik dan Gunung Steleng - Buluminung.

Jumlah kendaraan di Kabupaten Penajam Paser Utara cenderung meningkat. Jumlah kendaraan pada tahun 2012 sebanyak 3.016. Adapun total panjang jalan pada tahun 2012 adalah sepanjang 1047,44. Bila dihitung rasionya berdasarkan data maka rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah 0,35, yang berarti bahwa jalan yang ada saat ini masih mampu menampung jumlah kendaraan (lihat tabel 2.26).

Tabel 2.26 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Panjang Jalan	965,32	908,01	961,54	996,44	1047,44
2.	Jumlah Kendaraan	2016	2178	2426	2726	3016
3.	Rasio	0,48	0,42	0.396	0.36	0,35

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2012

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum dalam satu tahun terakhir sebanyak 106.197 orang (Website SIPS Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara). Jumlah orang tersebut

sebenarnya menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 170.281 orang (BPS, Penajam Paser Utara dalam Angka, 2012). Asumsi sementara bahwa penurunan ini disebabkan masyarakat peningkatan kesejahteraan/makmur dengan kata lain telah memiliki kendaraan pribadi baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat.

A.3.2 Jaringan Irigasi

Air merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Kebutuhan akan sumber daya air untuk pengairan di wilayah pertanian di Penajam cenderung meningkat karena suplai air untuk pertanian berasal dari tadah hujan. Ketika musim hujan air melimpah namun pada musim kemarau petani kesulitan mendapatkan air. Untuk itu perlu manajemen pengelolaan air yang baik agar pada musim penghujan air tidak meluap dan mengganggu lahan pertanian, sementara pada musim kemarau petani tidak kekurangan air.

Untuk mengatasi permasalahan di atas Pemerintah Daerah telah berupaya membangun jaringan irigasi yang tersebar di wilayah sentra pertanian seperti di Babulu Darat dan Babulu Laut. Jaringan irigasi ini merupakan satu kesatuan sistem pengairan yang terintegrasi yang dibagi berdasarkan saluran primer, sekunder dan tersier. Agar operasi dan pemeliharaan dapat berjalan dengan baik, kegiatan pengelolaan dibagi berdasarkan kewenangan masing-masing yang terdiri dari pemerintah provinsi untuk saluran primer, Pemerintah Kabupaten untuk saluran sekunder dan masyarakat melalui P3A mengelola saluran tersier. Data tentang jaringan irigasi yang tersedia disajikan pada tabel 2.27 sampai 2.29.

Tabel 2.27 Jaringan Irigasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 - 2012

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan			
		2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jaringan primer	-	-	6.363	6.363
2.	Jaringan Sekunder	27.500	17.820	3.577	3.577
3.	Jaringan Tersier	-	-	200	200
4.	Luas lahan budidaya	-	-	12.681	12.681
5.	Rasio	-	-	0.79	0.79

Sumber: BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2012 (kolom 5) dan Dinas Pekerjaan Umum Kab. PPU Tahun 2013 (kolom 3 & 4)

Tabel 2.28 Jaringan Irigasi menurut Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012

No	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi			Total Panjang Jaringan Irigasi	Luas lahan budidaya	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)	(7)	(8=6/7)
1	Penajam	2.080	3.577	-	5.657	2.235	2.53
2	Waru	1.423	-	-	1.423	585	2.43
3	Babulu	2.860	-	-	2.860	7.479	0.38
4	Sepaku	-	-	200	200	2.382	0.083
	Jumlah	6.363	3.577	200	10.140	12.681	0.79

Sumber: BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2012

Tabel 2.29 Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 - 2012

No	Pasokan Irigasi	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Pasok Irigasi per Area	1 lt/dtk	1 lt/dtk	1 lt/dtk	-	-
2.	Pasok Irigasi Relatif	0,75 lt/dtk	0,75 lt/dtk	0,75 lt/dtk	-	-
3.	Pasok Air Relatif	0.60 ltr/dtk	0.60 lt/dtk	0.60 lt/dtk	-	-
4.	Indek Luas Areal	2.027 Km ²	2.102 Km ²	2.141 Km	-	-
5.	Rancangan Luas Areal	11.547 Ha	11.547 Ha	11.547 Ha	-	-

Sumber: BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2012

Jaringan irigasi di Penajam Paser Utara sangat penting untuk membantu menangani banjir yang bersifat rutin. Namun jaringan irigasi yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dengan konsep penanganan banjir itu, akibatnya penanganan banjir masih bersifat sporadis. Hal ini disebabkan Dinas Pekerjaan Umum bidang Pengairan belum mempunyai *masterplan* sistem drainase dan data base pendukung bidang pengairan sebagai bahan mengambil kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan penanggulangan banjir dan pengelolaan jaringan irigasi yang terintegrasi dengan bidang-bidang lainnya. Namun demikian sudah banyak lokasi-lokasi yang telah tertangani dengan dibangunnya saluran drainase khususnya di wilayah perkotaan. Untuk wilayah perkotaan Penajam banjir yang telah berhasil direduksi dengan cara membangun saluran drainase permukiman dan normalisasi saluran, diantaranya: (1) Perumahan BTN KM 01; (2) Perumahan BTN KM 04; (3) Kelurahan Gn. Steleng; (4) Perumahan Sungai Paret; (5) Desa Tunan; (6) Komplek B Petung. Berdasarkan data yang ada, masih terdapat wilayah-wilayah yang mengalami genangan air. Wilayah yang genangan airnya belum tertangani disajikan pada tabel 2.30.

Tabel 2.30 Sebagian Wilayah Genangan yang belum Tertangani Di Kabupaten PPU Tahun 2013

No.	Lokasi	Perkiraan Luas Genangan
1.	Kecamatan Penajam	
a.	Gang Rana Penajam (samping Puskesmas) Lokasi areal permukiman dan lahan kosong diperkotaan Sebab: Tidak ada saluran drainase, elevasi gorong-gorong lebih tinggi dari pada saluran	1 Ha
b.	Belakang Pasar Petung Merupakan areal permukiman dan sawah penduduk Sebab: Saluran terlalu kecil	2 ha
2.	Kecamatan Waru	
	Belakang Pasar Waru (Bangun Mulyo) Merupakan areal permukiman dan sawah penduduk Sebab: Saluran drainase tertutup belukar, sedimentasi tidak ada pemeliharaan rutin, namun untuk kondisi darurat, DPU sudah menurunkan alat dan memperbaiki pintu air saluran sekunder	100 ha
3.	Kecamatan Babulu	
a.	Desa Rawa Mulya Merupakan areal petanian dan perikanan Sebab: Saluran ditutup sebagian masyarakat nelayan darat karena dianggap sebagai penyebab matinya ikan-ikan ditambak warga	300 ha
b.	Desa Sebakung Jaya Menggenangi areal persawahan produktif yang berakibat petani gagal panen Sebab: Bajir periode 10 tahunan, akses output air terlalu sedikit, sungai menyempit dan sedimentasi tinggi	150 ha
4.	Kecamatan Sepaku	
	Desa Bukit Subur Genangan pada areal permukiman penduduk dan ladang petani Sebab: Kondisi hutan di Upstrem banyak digunduli, sehingga kecepatan aliran menjadi tinggi sementara saluran air bertambah sempit dan downstream merupakan muara sungai yang langsung kelaut.	20 ha

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara

A.3.3 Sarana dan Prasarana Sosial

Analisa di bidang sarana dan prasarana sosial meliputi pembahasan mengenai ketersediaan tempat ibadah, tempat pemakaman dan tempat pembuangan sampah. Pembahasan di bidang ini untuk menunjukkan kinerja dan juga evaluasi terhadap pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjawab kebutuhan masyarakat di bidang sarana dan prasarana sosial. Dengan mengetahui informasi yang lengkap terkait dengan gambaran umum sarana dan prasarana sosial di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara maka akan dapat diketahui permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam memberikan pelayanan umum bidang sarana dan prasarana sosial yang optimal. Ketersediaan tempat ibadah beserta rasionya per penduduk dapat dilihat pada tabel 2.31 dan tabel 2.34 dibawah ini:

Tabel 2.31 Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Bangunan tempat Ibadah	Tahun 2012		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1.	Mesjid/Musholla/langgar	459	165.727	1:361
2.	Gereja	36	9.823	1:273
	Jumlah	495	175.550	1:355

Sumber: Laporan Bulanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab. PPU, bulan Des 2012 (kolom 4) dan KDA 2012 (kolom 3)

Tabel 2.32 Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012

No.	Kecamatan	Mesjid			Gereja		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penajam	150	78.544	1:524	17	4.433	1:261

2.	Waru	46	18.509	1:402	1	541	1:541
3.	Babulu	119	36.137	1:304	5	453	1:91
4.	Sepaku	144	32.537	1:226	13	4.396	1:338
	Jumlah	459	165.727	1:361	36	9.823	1:273

Sumber: Laporan Bulanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab. PPU, bulan Des 2012 (kolom 4 & 7) dan KDA 2012 (kolom 3 & 6)

Ketersediaan tempat ibadah untuk penduduk sudah mencapai proporsi yang layak. Berdasarkan standar rasio rumah ibadah per jumlah penduduk diisyaratkan bahwa 1 rumah ibadah dapat mencakup 2.500 orang dan kondisi rumah ibadah pada umumnya sudah dikelola dengan baik khususnya rumah ibadah yang berada ditengah permukiman penduduk. Dalam upaya meningkatkan sarana ibadah tersebut Pemerintah Daerah telah memberikan bantuan berupa dana pembangunan sarana ibadah. Bantuan ini diberikan cuma-cuma dengan besaran yang bervariasi. Diharapkan dengan bantuan ini kondisi rumah ibadah menjadi lebih baik dan layak.

Untuk ketersediaan tempat pemakaman, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara masih menghadapi permasalahan yang terkait dengan pemerataan tempat pemakaman bagi seluruh masyarakat. Menurut tabel 2.31, terlihat bahwa rasio jumlah penduduk terhadap tempat pemakaman umum mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Artinya 1 tempat pemakaman umum menampung lebih sedikit jumlah penduduk dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tabel 2.34 dan 2.35 menyajikan data tempat pemakaman yang ada di wilayah Penajam Paser Utara. Jika dilihat hanya berdasarkan jumlahnya maka angka tersebut sudah mencukupi, namun berdasarkan tingkat penyebarannya, lokasi pemakaman yang ada masih belum merata. Sebagian wilayah permukiman sudah memiliki rasio yang berlebih

tetapi beberapa wilayah lain masih kurang. Untuk mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk 5 tahun kedepan perlu dipersiapkan lokasi-lokasi pemakaman baru yang sesuai dengan proporsi jumlah penduduk, tingkat dan jangkauan pelayanan yang ada disetiap wilayah.

Tabel 2.33 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2012

Tahun	Tempat Pemakaman Umum			Rasio terhadap penduduk
	Jumlah	Luas (satuan)	Daya Tampung	
2009	2	6,79	3.398	1:39,39
2010	6	35,42	17.711	1:8,07
2011	6	35,42	17.711	1:8,42
2012	8	50,84	25.420	1:6,04

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Penajam Paser Utara

Tabel 2.34 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Kecamatan	Jmlh Penduduk	Tempat pemakaman umum (TPU)		Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU)		Jumlah Total		Rasio TPU persatuan penduduk
			Jml	Daya tampung	Jml	Daya tampung	Tempat Pemakaman	Daya tampung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12=4+6+8+10)	(13=5+7+9+11)	(14=4/3)
1	Penajam	83,039	5	15,455	1	-	5	15,455	0.186
2	Waru	19,075	-	-	-	-	-	-	-
3	Babulu	36,605	3	13,363	-	-	3	13,363	0.365
4	Sepaku	36,947		-	-	-	-	-	-
	Jumlah	175,669	8	28,818	7	-	8	28,818	0.164

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. PPU tahun 2013

Tempat pembuangan sampah, berdasarkan data rasio penduduk per tempat pembuangan sampah (TPS) di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara telah terjadi perbaikan. Ini dikarenakan

adanya penurunan cakupan TPS dalam melayani jumlah penduduk. Sebagai contoh, pada tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011, 1 TPS berturut-turut melayani 6.531 penduduk, 4.671 penduduk, 2.391 penduduk dan 1.258 penduduk. Selanjutnya pada tahun 2012, angka ini menjadi semakin membaik karena 1 TPS hanya melayani 874 penduduk (Dinas Pekerjaan Umum Kab. PPU, 2013). Namun, jika data ini berfungsi sebagai satu-satunya basis dalam melihat ketersediaan TPS dalam melayani masyarakat Kab. Penajam Paser Utara tentunya informasi yang didapatkan akan timpang. Dengan demikian, dibutuhkan data yang lebih rinci untuk mencermati ketersediaan TPS dalam melayani masyarakat kabupaten Penajam Paser Utara per kecamatan. Tabel 2.35 akan memberikan data lengkap mengenai jumlah penduduk dan data ketersediaan TPS per kecamatan pada tahun 2012.

Tabel 2.35 Rasio Penduduk per TPS Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	TPS		Rasio Penduduk per TPS
			Jumlah (unit)	Jumlah Daya Tampung (Ton)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3/4)
1.	Penajam	83.039	185	194.26	449
2.	Waru	19.075	7	44.96	2725
3.	Babulu	36.605	3	16.86	12.202
4.	Sepaku	36.947	5	40	7389
	Jumlah	175.666	201	346.08	0.0019

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. PPU tahun 2012

Dapat dilihat pada tabel 2.35 bahwa terjadi penyebaran TPS yang tidak merata di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tabel 2.36 juga menunjukkan daya tampung yang berlebih bagi TPS di kecamatan Babulu, Sepaku dan Waru. Daya tampung TPS di Kecamatan

Penajam relatif sangat baik karena 1 TPS hanya melayani 449 penduduk. Hal ini berbanding terbalik dengan daya tampung TPS di Kecamatan Babulu yang harus melayani 12.202 penduduk. Angka daya tampung yang cukup tinggi ini juga dapat dilihat di Kecamatan Sepaku dimana 1 TPS harus melayani hampir 7400 penduduk. Gambaran demikian dapat diartikan bahwa kegiatan pengelolaan persampahan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum masih belum dapat melayani seluruh wilayah kecamatan. Selain jumlah TPS yang tidak merata, salah satu kendala dalam kegiatan pengelolaan persampahan adalah jauhnya jarak angkut khususnya untuk Kecamatan Sepaku, sehingga pengangkutan sampah untuk dibuang ke TPA Buluminung hanya dapat dilayani seminggu sekali. Kegiatan pengelolaan persampahan dalam hal rasio pengangkutan sampah di Kecamatan Babulu dan Waru juga masih tergolong rendah. Jauhnya rentang kendali pelayanan menyebabkan pada wilayah tertentu kegiatan pengangkutan sampah belum tertangani dengan baik. Kondisi jalan yang ada juga menjadi masalah tersendiri, yang berakibat terbatasnya pelayanan persampahan hanya di 3 Kecamatan yaitu Penajam, Waru dan Babulu. Sementara itu, di wilayah Kecamatan Penajam pun tidak semua dapat terlayani. Pengangkutan sampah baru sebatas wilayah perkotaan sampai ke Sotek dan Riko. Sementara wilayah lainnya seperti di Kelurahan Pantai Lango, Jenebora, Gresik dan Bukit Subur masih belum tersentuh pelayanan persampahan disebabkan kendala jarak yang jauh serta kondisi jalan yang masih belum beraspal. Dari sisi pengelolaan akhir di TPA, masih menggunakan *Controlled Land Fill* yang dilaksanakan rata-rata seminggu sekali atau tergantung kapasitas sampah yang diangkut. Disamping itu, kegiatan persampahan juga terkendala pada masih rendahnya kesadaran

masyarakat untuk memilah dan mereduksi sampah serta membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi, agar kegiatan pengelolaan angkutan sampah dapat berjalan dengan maksimal, sehingga pada siang hari tidak ada lagi sampah yang menumpuk di bak penampungan sampah sementara (TPS).

A.4 Perumahan

Perumahan merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan infrastruktur dan sarana lingkungan, sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai tempat lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan.

A.4.1 Persentase Luas Permukiman yang Tertata

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perumahan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 sudah cukup baik, tetapi belum merata (lihat tabel 2.36). Kecamatan Sepaku memiliki presentasi luas permukiman tertata yang paling tinggi yaitu mencapai 85%, untuk Kecamatan Penajam dan Waru masing-masing tercapai sebesar 74% dan 70%, sedangkan wilayah kecamatan Babulu adalah yang paling rendah dengan capaian 26%. Tidak meratanya luas permukiman yang tertata ini dikarenakan pembangunan masyarakat yang masih bersifat sporasi dan masih mengarah kepada *urban sprowl*, juga dipengaruhi luasan permukiman yang terbangun di wilayah kecamatan tersebut.

Tabel 2.36 Persentase Luas Permukiman yang Tertata Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Kecamatan	Luas Area Permukiman Keseluruhan	Luas Area Permukiman Tertata	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Penajam	4.314	3.190	74
2	Waru	887	617	70
3	Babulu	3.359	871	26
4	Sepaku	3.131	2.674	85
	Jumlah	11.691	7.352	62,88

Sumber: RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011-2031

A.4.2 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih sangat kecil, hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimiliki. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan setiap tahun hanya berkisar pada angka 20-30 buah dengan fluktuasi yang cukup tinggi. Jika tahun 2008 jumlah ijin yang diterbitkan adalah 34, berturut-turut hingga tahun 2012 hanya menerbitkan 11, 18, 25 dan 22 ijin. Jika di proporsikan tahun 2012 hanya 0,7% bangunan yang berijin. Berdasar wilayah maka proporsi ijin tertinggi ada di wilayah kecamatan Penajam dengan proporsi terendah di kecamatan Babulu (lihat tabel 2.37). Rendahnya rasio bangunan ber-IMB ini salah satunya dikarenakan rendahnya kesadaran warga untuk mengurus izin mendirikan bangunan. Bagi masyarakat awam, pembangunan bangunan di tanah sendiri seharusnya tidak memerlukan izin kepada pemerintah. Rendahnya kesadaran ini terkait dengan masih kurangnya upaya sosialisasi atau edukasi mengenai pentingnya memiliki izin mendirikan bangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Disamping itu, rendahnya IMB juga dikarenakan kewajiban yang dimiliki oleh

masyarakat untuk membayar retribusi atas IMB yang telah diterbitkan padahal masih banyak masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara yang tergolong masyarakat dengan pendapatan ekonomi yang rendah. Dampak dari keadaan ini adalah sulitnya mendeteksi ketaatan terhadap dokumen tataruang yang telah ada.

Tabel 2.37 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Kecamatan	Jumlah Bangunan	Jumlah Bangunan ber-IMB	Persentase bangunan ber IMB
1.	Penajam	13.543	15	0,11
2.	Waru	3.626	1	0,02
3.	Babulu	5.871	1	0,01
4.	Sepaku	7.086	5	0,07
	Jumlah	30.126	22	0,07

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2012

A.5 Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang terkait dengan upaya untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang termasuk penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang terkait dengan upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program. Terakhir, pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Salah satu cakupan penting dalam penataan ruang wilayah adalah penentuan dan penataan ruang terbuka hijau.

A.5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara luas ruang terbuka hijau masih sangat rendah bila dibandingkan dengan keseluruhan luas wilayah. Dari tahun 2010 hingga tahun 2012 jumlah luas ruang terbuka hijau tidak menambah, luasnya hanya 1,67% dari keseluruhan luas wilayah atau 5.323 km persegi dari 318.445 km persegi. Padahal idealnya ruang terbuka hijau seharusnya sebesar 30% dari luas keseluruhan wilayah. Tabel 2.38 menyajikan secara lebih rinci rasio ruang terbuka hijau menurut kecamatan pada tahun 2012. RTH tertinggi ada di kecamatan Penajam dengan RTH terendah di kecamatan Sepaku. Tingginya RTH di kecamatan Penajam terkait dengan definisi RTH yang bias kepada perkotaan, dimana RTH adalah kawasan hijau yang dapat digunakan sebagai areal bermain seklaigus paru-paru kota. Jika konsep paru-paru kota lebih dikedepankan maka di wilayah pedesaan tentunya lebih banyak memiliki areal RTH.

Tabel 2.38 Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Luas Ruang Terbuka Hijau	Persentase RTH
1.	Penajam	91.187	2.123	2,32
2.	Waru	39.802	765	1,92
3.	Babulu	45.207	790	1,74
4.	Sepaku	142.249	1.645	1,15
	Jumlah	318.445	5.323	1,67

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW, 2013)

A.6 Perencanaan Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang dijadikan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, telah menyiapkan dokumen-dokumen pendukung seperti: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2009-2013 yang diatur menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009, RKPD, Renstra SKPD, dan RENJA SKPD. Berdasar evaluasi terhadap RPJMD periode 2009-2013 terdapat beberapa persoalan terkait dengan perencanaan di wilayah Penajam Paser Utara, diantaranya adalah Koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD yang cukup lemah. Kondisi ini bermula dari lemahnya pemahaman masing-masing SKPD terhadap pentingnya perencanaan yang bersifat komprehensif, sehingga dokumen RPJMD menjadi semacam kumpulan dari Renstra, bukan sebuah perencanaan komprehensif atas tujuan dari Kabupaten Penajam Paser Utara. Lemahnya pemahaman itu berdampak sangat luas baik pada perencanaan tahunan kabupaten maupun masing-masing SKPD. Dari evaluasi RPJMD tersebut didapati ketidak terkaitan antara SKPD yang satu dengan SKPD yang lain, ketidaktepatan tujuan dan program dari masing-masing SKPD dan adanya persoalan yang tidak tercover oleh SKPD manapun. Dampak yang terlihat adalah rendahnya capaian kinerja RPJMD periode tersebut (Evaluasi RPJMD, 2012).

A.7 Perhubungan

A.7.1 Angkutan Umum

Jumlah penumpang dari tahun 2008 sampai dengan 2012 mengalami penurunan sebesar rata-rata 8,3%. Kemungkinan besar hal ini disebabkan karena kondisi angkutan umum yang

masih belum layak atau karena mudahnya masyarakat dalam mendapatkan kredit kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Hal ini dapat dilihat dari pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat. Berdasarkan data yang ada dari tahun 2010-2011 terjadi peningkatan sebesar 26,48%. Meningkatnya jumlah penumpang klotok dan speed boat dikarenakan meningkatnya koneksitas antara Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap Kota Balikpapan. Hal ini menunjukkan makin terintegrasinya Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap Kota Balikpapan (lihat tabel 2.39).

Tabel 2.39 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2008-2011 Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Uraian	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah penumpang Bis	210.676	216.105	198.362	170.281
2.	Kendaraan Bermotor	21.341	23,830	24,385	30,500
3.	Jumlah penumpang ASDP	45.443	58.396	58.396	51.968
4.	Jumlah penumpang Klotok	16.947	14.627	17.157	17.488
5.	Jumlah penumpang Speed boat	8.888	11.136	11.307	11.252
6.	Total Jumlah Penumpang	281.954	300.264	285.222	250.989

Sumber: Dinas Perhubungan, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Dalam Angka Penajam Paser Utara, Tahun 2012

Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam hal penataan, pengaturan dan pengendalian

trayek angkutan umum, sehingga dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan Tahun 2012 sebanyak 4 izin, dengan satu izin di perkotaan dan 3 izin di pedesaan. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan maupun penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2008-2010). Adapun rasio izin trayek terhadap jumlah angkutan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2008-2012, masing-masing adalah seperti terlihat pada tabel 2.40.

Tabel 2.40 Rasio Ijin Trayek terhadap jumlah angkutan

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Izin Trayek perkotaan	1	1	1	1	1
2.	Izin Trayek pedesaan	3	3	3	3	3
3.	Jumlah Izin Trayek	4	4	4	4	4
4.	Jumlah penduduk	133.859	137.165	142.922	149.144	175.999
5.	Rasio Izin Trayek	0.0000290	0.0000291	0.000027	0.0000268	0.0000227

Sumber : Dinas Perhubungan, Budaya dan Pariwisata Kab. PPU

Pada tabel 2.40 di atas ditunjukkan jumlah izin trayek baik di perkotaan maupun di pedesaan serta rasio izin trayek per jumlah penduduk. Izin trayek perkotaan dan pedesaan memiliki jumlah yang sama dari tahun 2008 ke tahun 2012, yakni 1 izin trayek untuk perkotaan dan 3 izin trayek untuk pedesaan. Jumlah izin trayek yang selalu sama dari tahun 2008 hingga tahun 2012 menunjukkan peran angkutan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara yang belum signifikan dalam menunjang kehidupan

masyarakat. Ini dikarenakan mengingat luas dan kondisi wilayah dengan penyebaran yang tidak merata serta tipologi mobilitas masyarakat yang masih minim, menyebabkan masih banyak daerah yang belum terlayani oleh angkutan umum yang rutin beroperasi. Wilayah-wilayah tersebut umumnya merupakan wilayah pedalaman dan pesisir pantai yang jauh dari akses jalan nasional atau jalan propinsi. Mengingat masih banyaknya wilayah belakang yang belum terakses angkutan umum lewat darat, sehingga masyarakat pada wilayah pesisir umumnya menggunakan sarana angkutan laut atau sungai seperti di Wilayah Pantai Lango, Jenebora, Maridan dan Mentawir. Hal ini didukung oleh kondisi sosial budaya masyarakat yang umumnya mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan.

A.7.2 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Seluruh angkutan umum di Kabupaten wajib memiliki sertifikat pengujian kendaraan bermotor (uji Kir). Berdasarkan data yang ada di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, pengujian kendaraan 50% sudah menggunakan sistem yang otomatis tidak manual lagi. Namun pada pengujian tertentu masih menggunakan sistem manual. Tabel 2.41 menyajikan persentase kendaraan yang melakukan uji Kir.

Tabel 2.41 Persentase Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Penajam Paser Utara

Angkutan umum	2008	2009	2010	2011	2012
Mobil penumpang umum	100	100	95,09	95,87	94,84
Mobil bus	100	100	84,15	93,90	96,34
Mobil barang	100	100	97,75	97,87	103,95
Kereta tempelan	-	-	-	100	100
Jumlah	100	100	92,33	96,91	98,78

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013

Jumlah kendaraan yang melakukan KIR pada Tahun 2012 sebesar 103,95% atau lebih banyak dari jumlah kendaraan yang ada karena pelaksanaan kegiatan KIR per kendaraan dilakukan 2 x setahun sehingga dimungkinkan jumlah kendaraan KIR lebih besar dari 100%. Dari tabel diatas juga dapat disimpulkan bahwa masih banyak kendaraan yang hanya melakukan kegiatan KIR setahun 1 kali saja.

Jumlah kendaraan, dari berbagai jenis yang melakukan uji Kir mengami penurunan, padahal dari aspek jumlah kendaraan hanya kendaraan mobil barang yang mengalami peningkatan dari 1.814 di tahun 2008 menjadi 2.881 di tahun 2012, sementara untuk kendaraan umum dan bis justru turun, masing masing dari 102 menjadi 97 dan 100 menjadi 82. Ini artinya terjadi penurunan kinerja uji Kir terhadap kendaraan.

Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah jauhnya rentang kendali pelayanan bagi masyarakat khususnya wilayah-wilayah yang jauh dari Kota Penajam dan wilayah yang mempunyai aksesibilitas yang masih minim karena kondisi jalan yang belum mantap. Selain itu, waktu tunggu Uji Kir yang masih lama sekitar \pm 55 menit/ unit kendaraan, juga memberikan kendala bagi masyarakat yang ingin melakukan Uji KIR.

A.7.3 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 36 pelabuhan laut. Pelabuhan tersebar di beberapa lokasi namun ada pula yang keberadaannya berada dalam satu kawasan yaitu di Kawasan Industri Kabupaten Penajam Paser Utara di Buluminung. Pelabuhan yang ada umumnya merupakan pelabuhan khusus dan pelabuhan milik perusahaan swasta baik yang bergerak di bidang perkebunan sawit, galangan kapal dan pasir kwarsa. Sementara

untuk pelabuhan batu bara tersebar di beberapa daerah yang letaknya berdekatan dengan lokasi penambangan.

Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan umum adalah pelabuhan Klotok dan *Speedboat*. Namun demikian kondisi pelabuhan klotok sangat memprihatinkan, baik dari sisi pelayanan maupun kondisi fisik bangunan yang jauh dari standar bagi kenyamanan dan keselamatan penumpang karena tidak dilengkapi dengan sarana penunjang yang layak. Hal ini disebabkan karena kepemilikan dan kegiatan operasional pelabuhan dikuasai oleh perorangan, sehingga menyulitkan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan prasarana angkutan klotok tersebut. Walaupun dengan fasilitas pendukung yang sangat minim, masyarakat masih menggunakan klotok sebagai sarana utama untuk menyeberang ke Balikpapan atau sebaliknya. Hal ini disebabkan karena angkutan klotok lebih murah, waktu tempuh yang tidak terlalu lama ($\pm 45 - 60$ menit), lebih cepat dibandingkan dengan Kapal Ferry penyeberangan dengan waktu tempuh secara keseluruhan rata-rata 2-3,5 jam dan relatif lebih aman khususnya pada musim hujan atau gelombang besar.

Pelabuhan penyeberangan *speedboat* kondisi fisik dan pelayanannya lebih baik. Pelabuhan ini telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung seperti ruang tunggu yang memadai dan dilengkapi kamar kecil, jembatan apung untuk naik turun penumpang walaupun kondisinya mulai rusak. Antrian penumpang juga sudah dilakukan dengan karcis masuk serta dilengkapi dengan petugas jaga. Namun demikian, sebagaimana pelabuhan-pelabuhan lainnya, masih banyak calo-calo yang mengambil kesempatan untuk mengambil penumpang tanpa melalui antrian sehingga kondisi pintu masuk pelabuhan menjadi

kurang nyaman karena banyaknya calo yang menawarkan jasa dan tentunya dengan harga yang lebih tinggi.

Mengimbangi lonjakan penumpang angkutan umum dari Balikpapan ke Penajam atau sebaliknya via kapal Ferry, Departemen Perhubungan Pusat telah membangun dermaga sandar yang baru untuk mengurangi waktu tunggu kapal ketika bongkar muat. Diharapkan pelabuhan ini dapat memangkas waktu tempuh secara keseluruhan sampai 50% dari waktu tempuh yang ada sekarang, sehingga mobilitas dan pergerakan barang dan penumpang menjadi lebih lancar.

Disamping pelabuhan laut, Kabupaten Penajam Paser Utara hanya memiliki 1 terminal bis dan tidak memiliki satupun pelabuhan udara. Hal ini cukup dimengerti karena Kota Balikpapan yang berjarak dekat dengan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki pelabuhan udara yang cukup besar (Dinas Perhubungan, Budaya dan Pariwisata, Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013).

A.8 Lingkungan Hidup

Ada beberapa macam bidang yang dapat mencakup analisa penguatan kualitas lingkungan hidup yakni penanganan sampah, akses masyarakat terhadap air minum, pencemaran air serta implementasi AMDAL.

A.8.1 Persentase Penanganan Sampah

Sampah yang ditangani sudah sebesar 99,67% ini menunjukkan bahwa penanganan sampah sudah baik, namun penanganan sampah yang baik ini hanya terbatas pada wilayah Penajam, Waru, dan Babulu saja, sedangkan wilayah Sepaku belum tertangani. Sebagaimana umumnya di wilayah pedesaan, sampah

masih dianggap belum menjadi permasalahan terkait dengan luas wilayahnya, dengan demikian pencatatan tentang jumlah sampah yang diproduksi pun belum tersedia. Indikasi ini harus menjadi perhatian mengingat sampah yang saat ini diproduksi semakin lama semakin menuju pada sampah plastik yang memiliki daya rusak tinggi bagi lingkungan.

A.8.2 Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Air bersih adalah kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Penajam Paser Utara berasal dari air tanah dalam dan air permukaan. Saat ini pemenuhan kebutuhan air bersih untuk rumah tangga di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagian besar bergantung pada air hujan, air sungai dan sumur bor serta air ledeng/PDAM. Berdasarkan dokumen Master Plan Air Minum Kabupaten Penajam Paser utara, sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara dibagi 4 (empat) lokasi yakni :

1. Sistem penyediaan air bersih di Kecamatan Penajam
2. Sistem penyediaan air bersih di Kecamatan Waru
3. Sistem penyediaan air bersih di Kecamatan Babulu
4. Sistem penyediaan air bersih di Kecamatan Sepaku

Sistem penyediaan air bersih non perpipaan bersumber dari sumur gali, sumur pompa dan sungai.

Saat ini sedang dibangun Embung Lawe-Lawe dengan daya tampung air 1,3 juta kubik yang nantinya akan memenuhi dan mengoptimalkan kebutuhan air bersih wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya wilayah Gunung Steleng, Penajam, Nenang, Nipah-Nipah, Sei Parit hingga Petung dan sekitarnya.

Selain itu juga sedang di bangun WTP (*Water Treatment Process*) Lawe-Lawe untuk meningkatkan kapasitas produksi saat ini adalah 100 ltr/det menjadi 250 – 300 l/det. Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih berupa pemasangan pipa induk diameter 12 inc, disepanjang Lawe-Lawe, Penajam, Nenang, Nipah-Nipah hingga Sei Parit.

Berdasarkan data Suseda Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 bahwa sebanyak 41,92% rumah tangga menggunakan air kemasan. Ini dikarenakan bertumbuhnya depo-depo air isi ulang dan terjangkaunya harga untuk konsumen dan kemudahan untuk membeli air kemasan serta pelayanan produk-produk air dalam kemasan (lihat tabel 2.42).

Tabel 2.42 Persentase Rumah Tangga (RT) menurut Sumber Air Minum Tahun 2011

No	Sumber Air Minum	Persentase
1.	Air Dalam Kemasan	41,92
2.	Leding	8,30
3.	Pompa	17,09
4.	Sumur terlindung	9,45
5.	Sumur Tak terlindung	11,09
6.	Mata Air Terlindung	0,62
7.	Mata Air Tak Terlindung	0,36
8.	Lainnya	11,18
9	Jumlah	100

Sumber: Suseda Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2012

Pengelolaan air bersih oleh PDAM belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten, keterbatasan ini disebabkan masih rendahnya kapasitas daya tampung air baku dan instalasi pengolahan yang merubah air baku menjadi air bersih.

Kondisi geografis dengan lahan yang berbukit dan dibelah oleh sungai diantara kantong-kantong permukiman dan jarak antar permukiman yang jauh, menyebabkan sulitnya distribusi air yang

terpusat di Lawe-Lawe Kecamatan Penajam. Pemerintah Daerah berupaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang ada disetiap kecamatan dengan membuat WTP tersendiri. Instalasi pengolahan air bersih selain Lawe-lawe yang telah dibuat berada di Kecamatan Sepaku, Babulu dan Waru.

Keberadaan instalasi pengolahan air minum yang berada di kecamatan ini juga masih belum menjangkau seluruh wilayah kecamatan dan masih terbatas pada wilayah sekitar ibukota kecamatan saja dan kapasitasnya pun masih terbatas.

Beberapa wilayah yang berada jauh dari jangkauan pelayanan air PDAM seperti di Maridan Kecamatan Sepaku, sumber air bersih masyarakat diambil dari embung-embung milik perusahaan yang beroperasi diwilayah sekitarnya. Keberadaan embung air tersebut memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, mengingat wilayah tersebut berada dipinggir pantai dan merupakan daerah pesisir sehingga air tawar sangat sulit didapat melalui sumur pantek.

Semakin ekspansifnya pemanfaatan lahan yang disebabkan banyaknya kegiatan pertambangan dan perkebunan sawit, telah mengancam keberadaan embung-embung tersebut. Hal ini tidak hanya mengancam embung-embung kecil yang tersebar di beberapa wilayah, namun juga mengancam Bendungan Lawe-lawe yang sedang dikerjakan sebagai sumber air baku utama bagi daerah ibukota kabupaten dan daerah sekitarnya. Daerah *cathment area*/tampungan air sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dengan keberadaan bendung dan embung, sebagian banyak di eksploitasi untuk diambil batubaranya.

Hal ini berdampak semakin berkurangnya kemampuan *cathment area* tersebut untuk dapat menampung dan menyimpan air serta berakibat turunnya kualitas baku mutu air. Semakin tercemar air

baku tersebut akan semakin mahal pengolahannya sehingga harga per m³ yang harus dibebankan kepada pelanggan PDAM akan semakin mahal.

A.8.3 Pencemaran Status Mutu Air

Dari 16 sungai yang dimiliki Kabupaten Penajam Paser Utara, hanya terdapat 10 sungai yang kualitasnya dipantau (Pengolahan data lingkungan hidup, 2012). Artinya hasil pemantauan status mutu air hanya sebesar 62,50%. Mengenai pencemaran status mutu air di sungai Kabupaten Penajam Paser Utara masih dalam ambang pengendalian, artinya air sungai yang ada masih dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mandi dan minum. Kondisi air masih dalam batas ambang baku mutu. Tetapi untuk mengantisipasi pencemaran mutu air jumlah perusahaan yang ada dekat sungai harus segera diantisipasi.

A.8.4 Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal dan Kasus Lingkungan Hidup

Jumlah perusahaan yang telah melakukan wajib amdal sebesar 35, namun hanya 23 perusahaan dari 35 perusahaan tersebut yang kegiatannya diawasi. Artinya, pengawasan terhadap amdal sudah cukup baik, walaupun saat ini hanya mencapai angka 65,71%. Pengawasan terhadap perusahaan yang telah melakukan amdal wajib dilakukan mengingat hal ini dapat mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi. Sedangkan dari jumlah kasus lingkungan yang telah ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 2 kasus dari 3 kasus lingkungan yang ada.

A.9 Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi kependudukan, Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Berdasarkan perda tersebut, dokumen kependudukan yang dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri (1). Dokumen kependudukan dan (2). Surat Keterangan Kependudukan. Selain pelayanan administrasi kependudukan tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara juga melayani: (1). Pelayanan pengolahan data kependudukan. (2). Pelayanan perpindahan penduduk masal (3). Penyusunan daftar penduduk potensial pemilih pemilu. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah mengeluarkan standar rentang waktu proses pengerjaan dokumen kependudukan.

Sampai dengan bulan April Tahun 2013, total jumlah penduduk berjumlah 176.407 ribu jiwa dan penduduk yang wajib memiliki KTP berjumlah 117.984 jiwa. Mengingat luas wilayah dan kondisi geografis sehingga untuk memperpendek jarak pelayanan bagi penduduk yang berada di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, Pemerintah Daerah telah mengambil kebijakan terkait pembuatan KTP dapat dilaksanakan di 4 Kantor Kecamatan yang ada. Adapun pelayanan lainnya masih tetap dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kegiatan perekaman E-KTP dimulai pada tahun 2012 dengan kegiatan yang meliputi: (1) tanda tangan, (2) sidik 10 jari, (3) foto dan (4) iris mata. Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Penajam Paser Utara

mendapat jatah 108.871 Jiwa, namun yang dapat terekam baru 98.837 jiwa atau 90,78%. Sehingga masih ada 10.034 orang penduduk yang belum dilakukan perekaman E-KTP. Belum tercapainya rekaman E-KTP tersebut disebabkan karena: (1) orang bepergian/pendidikan dan; (2) kesadaran masih kurang (orang tua). Untuk meningkatkan kinerja E-KTP telah dilakukan (1). Penyisiran ke desa-desa dan kelurahan (2). Sosialisasi tentang administrasi kependudukan.

Dalam rangka pelayanan yang dilakukan maka, kinerja kependudukan dapat dikatakan telah cukup baik pada aspek KTP tetapi masih sangat kurang dalam hal pelayanan terhadap akte kelahiran (lihat tabel 2.43). lemahnya kinerja ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan. Dari Dinas kependudukan kinerja pelayanan dirasa cukup baik dengan lama waktu kepengurusan ijin yang relatif tidak terlalu lama, rata-rata mencapai 14 hari (lihat tabel 2.44).

Tabel 2.43 Capaian indikator kinerja pelayanan kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013

No.	Indikator Kinerja	Capaian
1.	Rasio penduduk ber KTP	78,87
2.	Rasio penduduk ber KK	67,90
3.	Rasio bayi berakte kelahiran	5,45

Sumber: Hasil analisis

**Tabel 2.44 Jangka Waktu Penerbitan Dokumen Kependudukan
Kabupaten Penajam Paser Utara**

No.	Dokumen Kependudukan	Jangka Waktu Penerbitan
1	KK dan KTP	14 hari kerja
2	Surat keterangan pindah	14 hari kerja
3	Surat keterangan pindah datang	14 hari kerja
4	Surat keterangan pindah keluar negeri	14 hari kerja
5	Surat keterangan datang dari luar negeri	14 hari kerja
6	Surat keterangan Tempat Tinggal Orang Asing	14 hari kerja
7	Surat Keterangan Kelahiran	14 hari kerja
8	Surat Keterangan Lahir Mati	14 hari kerja
9	Surat Keterangan Kematian	03 hari kerja
10	Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan	07 hari kerja
11	Surat Keterangan Pembatalan Perceraian	07 hari kerja

Sumber: Perda Kabupaten Penajam Paser Utara No. 17 tahun 2007

A.10 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A.10.1 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tingkat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2012 tercatat sebanyak 16 Kejadian yang dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Republik Indonesia khususnya pada Polres Penajam Paser Utara. Kejadian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagian besar disebabkan oleh pencabulan dan pemukulan.

A.10.2 KB dan Keluarga Sejahtera

Akseptor Keluarga Berencana pada tahun 2011 sebanyak 23.566 orang, mengalami penurunan pada tahun 2012 sebanyak 23.553 orang. Namun demikian indikator lainnya menunjukkan kinerja yang baik. Jumlah rata-rata anak per keluarga sebanyak 2 orang, jumlah peserta KB Aktif yang menggunakan metode kontrasepsi

jangka pendek (pil, suntik, kondom) meningkat dari 18.564 peserta pada tahun 2010 menjadi 19.038 peserta pada tahun 2012. Jumlah pasangan usia subur di Penajam Paser Utara meningkat dari tahun 2010 sebanyak 26.064 pasangan menjadi 27.830 orang pada tahun 2012. Salah satu faktor meningkatnya peserta program KB adalah dengan penambahan jumlah pelayanan posyandu dan penyuluh keluarga berencana yang aktif dalam melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman arti pentingnya program keluarga berencana.

A.11 Sosial

Pelayanan sosial merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan sosial di Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 2009-2013 dapat diamati terhadap angka jumlah keluarga fakir miskin, anak terlantar. Pada jumlah anak terlantar, terjadi peningkatan sebesar 56 jiwa. Namun jika dibandingkan pada tahun 2009 dan 2010, jumlah anak terlantar pada tahun 2013 jauh lebih rendah. Terjadi penurunan jumlah anak terlantar sebanyak 143 jiwa selama empat tahun, yaitu sejak tahun 2009 hingga 2012. (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara, 2013).

Penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan kecenderungan yang menurun. Tahun 2008 jumlah penduduk miskin Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak

12.386 RTS dari total jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara dan sampai tahun 2012 hanya mengalami penurunan sebanyak 10.628 RTS. Namun demikian, persentase penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara jauh lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur sebanyak 247,9 ribu jiwa. Akan tetapi perlu dicermati bahwa persentase jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial hanya 67 persen. Sedangkan jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial hanya 31 persen.

A.12 Ketenagakerjaan

Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2011 sebesar 2,88% berdampak pada jumlah angkatan kerja yang juga mengalami peningkatan (lihat table 2.45).

Tabel 2.45 Keadaan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 – 2013

Karakteristik	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Tenaga kerja (Perusahaan)	2,586	2,586	11,298	9,805	6,152
Angkatan kerja	91,819	92,999	95,371	114,919*	-
Bukan angkatan kerja	45,346	49,923	53,773	60,747*	-
Bekerja	55,680	62,290	67,034	-	-
Pencari kerja	3,689	5,442	1,478	1,352	654
TPAK (%)	64.08	67.91	66.55	-	-
Pengangguran terbuka	(1,597)	6,508 (1,959)	5,855 (723)	(570)	(754)

* Sumber: Dukcapil Kab. Penajam Paser Utara

Berdasarkan tabel 2.47, pada tahun 2011 terlihat bahwa jumlah tenaga kerja perusahaan mengalami peningkatan pesat sebesar 8.712 tenaga kerja, kemudian mengalami penurunan pada tahun

berikutnya secara terus menerus masing-masing 1.493 tenaga kerja pada tahun 2012 dan 5.146 tenaga kerja pada tahun 2013. Menurunnya jumlah tenaga kerja di perusahaan dan jumlah pencari kerja mengindikasikan dua hal. Hal pertama adalah meningkatnya jumlah wirausahawan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sedangkan hal kedua adalah data yang ditunjukkan di atas tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan tidak semua para pencari kerja mendaftarkan dirinya di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sehingga jumlah mereka tidak dapat terdeteksi secara baik.

Angkatan kerja menurut lapangan pekerjaan dibedakan dalam tiga sektor, yaitu sektor primer yang mencakup pertanian, perburuhan, kehutanan dan perikanan; sektor sekunder mencakup pertambangan, manufaktur, bangunan, listrik dan air, pengangkutan, perhubungan dan gas; sektor tersier mencakup perdagangan, rumah makan, hotel, keuangan, asuransi, jasa-jasa kemasyarakatan, sosial dan pribadi. Tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2009-2013 memang relatif cukup tinggi, akan tetapi distribusi jumlah angkatan kerja bekerja masih terkonsentrasi pada sektor pertanian (lihat tabel 2.45). Selain terkonsentrasi dari segi struktur pembentukannya yang memperlihatkan ketimpangan sektoral dalam pola penyerapan angkatan kerja, kemampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja bekerja di kabupaten ini juga relatif terbatas. Beberapa sektor ekonomi seperti sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, serta sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan hanya menyerap angkatan kerja bekerja tidak melebihi dari 33% dibanding sektor pertanian. Struktur kontribusi pertumbuhan

kesempatan kerja secara sektoral di Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2009–2011 ditunjukkan oleh tingginya tingkat angkatan kerja pada sektor primer dan sektor tersier.

Tabel 2.46 Angkatan Kerja yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2011

Sektor	Tahun		
	2009	2010	2011
Primer (A)	30,183	29,653	31,891
Sekunder (M)	10,916	12,599	13,134
Tertier (S)	14,581	20,038	22,009

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Tahun 2013

A.13 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kinerja Pembangunan pada pelayanan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2012 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel 2.47 berikut.

Tabel 2.47 Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Indikator	Rumus	2009	2010	2011	2012
1	Persentase Koperasi Aktif		20.8	18.9	19	21
2	Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{\text{Jml usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100$	8.6	19.1	16.4	10.9

Sumber: Dinas KUKM Perindag Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012

Tabel 2.46 menunjukkan jumlah koperasi aktif dari tahun 2009 ke tahun 2012 mengalami peningkatan dengan fluktuasi di tengahnya. Pada tahun 2009-2012 rata-rata jumlah koperasi aktif tercatat 38 unit. Persentase koperasi aktif yang hanya mencapai 20% menunjukkan terdapat persoalan yang cukup penting untuk dilakukan pendalaman. Sebagai badan usaha yang penting, tetapi yang aktif hanya sedikit. Pemahaman mengenai makna koperasi baik di sisi masyarakat maupun pembina merupakan persoalan yang dihadapi oleh banyak wilayah terkait dengan pengembangan koperasi. Dampak dari kurangnya pemahaman ini adalah pola-pola pembinaan koperasi oleh pemerintah selama ini masih ada yang dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anggota. Sering kali program-program yang dibiayai oleh pemerintah tidak tepat sasaran atau tidak bisa dinikmati oleh warga koperasi seluruhnya. Contohnya penyaluran dana bergulir oleh pemerintah melalui koperasi. Kinerja pinjaman lunak tanpa agunan ini secara ekonomi belum bisa mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi, sehingga saat ini pemerintah melalui perbankan menyalurkan dana bergulir pada koperasi untuk memperkuat permodalan koperasi, terutama unit simpan pinjam/KUD. Selanjutnya, koperasi juga harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menciptakan jalinan kerjasama melalui jaringan usaha koperasi, menggalang solidaritas serta melakukan *joint venture* antar koperasi dan dengan non koperasi.

A.14 Penanaman Modal

Dukungan dalam peningkatan penanaman modal di Kabupaten Penajam Paser Utara terlihat dari kemudahan prosedur administrasi dalam mengurus investasi melalui pelayanan perizinan satu atap melalui Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu. Ketersediaan pelayanan penunjang

yang dimiliki daerah terlihat dari ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Kinerja pembangunan pada pelayanan umum urusan penanaman modal di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2012 pada masing-masing indikator.

Tabel 2.48 Jumlah Investor, Nilai Investasi, Daya Serap Tenaga Kerja dan Nilai Realisasi PMDN

No	Indikator	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	5	3	8	3
2.	Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta)	520.796	35.034	8.828	165.526
3.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	185	682	50	2.786
4.	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	1.110.65	-95.21	- 66.69	-64.01

Sumber: Badan Penanaman Modal Provinsi Kaltim, Tahun 2012

Kinerja investasi, dari aspek jumlah investor maupun nilai investasinya fluktuatif. Hal ini disebabkan karena keluarnya ijin tersebut tidak dapat dikeluarkan pada Tahun berjalan yang disebabkan oleh masih belum adanya kepastian prosedur terkait standarisasi berapa lama waktu yang dikeluarkan untuk mengurus kelengkapan ijin tersebut. Dari sisi kelembagaan, Pemerintah Daerah baru membentuk dinas perijinan pada Tahun 2013. Diharapkan dengan adanya dinas perijinan ini diharapkan proses perijinan dapat berjalan dengan lebih cepat dan transparan sehingga dapat meningkatkan investasi di daerah Penajam Paser Utara.

Dilihat dari daya serap per tenaga kerja menunjukkan perbaikan, dari 185 di tahun 2009 menjadi 2.786. penyerapan tenaga kerja per nilai investasi yang tinggi menunjukkan bahwa investasi yang ditanamkan sesuai dengan kondisi ketenaga kerjaan lokal. Kondisi

ini harus dipertahankan dalam kebijakan yang akan datang, dimana investasi lebih diarahkan pada investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak, agar tercipta proses *multiplier effect* yang lebih tinggi.

A.15 Kebudayaan

Melalui Perpres No. 92 tahun 2011 fungsi kebudayaan diintegrasikan dengan pendidikan. Berikut diuraikan kinerja kebudayaan di kabupaten Penajam Paser Utara.

A.15.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Seni dan budaya Kabupaten Penajam Paser Utara pun tidak terlepas dari kebudayaan suku Dayak Paser. Dalam 5 tahun terakhir ini telah diselenggarakan festival seni dan budaya diantaranya adalah, Pesta Adat Nondo; Pesta Pantai Sipakario; Pesta Pantai Lango; Tari Uok Botung; Tari Jepen Ampiek Muslimah; Tari Kode Bura (Kera Putih). Pada tahun 2013 ini dilaksanakan Festival Parade Seni Budaya dan Pawai Kendaraan Hias yang dilaksanakan setiap tahunnya sebagai upaya untuk mengembangkan kreativitas dan sebagai ajang pameran pembangunan kepada masyarakat. Dan pada tahun 2012 telah dilaksanakan Dialog Budaya dengan menghadirkan tokoh masyarakat, seniman dan budayawan. Hasil rumusan Dialog Budaya tersebut nantinya akan dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah secara menyeluruh terhadap pembangunan dan pelestarian Seni Budaya yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Jumlah festival seni dan budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara berjumlah 8 dari tahun 2009 hingga tahun

2011. Namun pada tahun 2012 jumlah festival seni dan budaya berkurang menjadi 6. Walaupun festival seni berkurang namun pelaksanaan festival seni di Kabupaten Penajam Paser Utara telah berjalan dengan baik bahkan melewati target yang ditetapkan. Akan tetapi alangkah baiknya jika festival seni dan budaya dapat dilaksanakan dengan frekuensi yang lebih sering karena dapat memberikan ruang bagi kearifan lokal sehingga akan memperkuat ciri khas bangsa Indonesia di tengah gempuran kebudayaan asing. Di sisi lain, pelaksanaan festival seni dan budaya tentunya akan terkait dengan perkembangan ekonomi. Festival seni dan budaya dapat menunjang kegiatan pariwisata sehingga dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2012, Dinas Perhubungan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara menggelar Lomba Tari Japin Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara dan Lomba Tari Garapan Tradisional Pesisir dan Pedalaman yang diselenggarakan untuk menyeleksi Duta Seni Kabupaten Penajam Paser Utara. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat kabupaten bertujuan untuk mencari bibit-bibit siswa berprestasi bidang kesenian, baik pelajar di tingkat Sekolah Dasar/MI, SMP/MTs hingga SMA/MA serta SMK.

A.15.2 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara berjumlah dua (2) dan angka ini terus sama dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Terkait dengan hal ini maka perlu diupayakan peningkatan jumlah sarana

penyelenggaraan festival seni dan budaya sehingga masyarakat umum khususnya generasi muda dapat lebih terintegrasi dengan kebudayaan lokal. Seni dan budaya merupakan salah satu pilar ketahanan nasional. Degradasi seni dan budaya di era globalisasi seperti ini secara lambat laun akan menggantikan budaya lokal dengan budaya asing.

A.15.3 Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Salah satu cagar budaya yang dilindungi di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Meriam Jepang yang merupakan peninggalan bersejarah pada masa penjajahan Jepang yang terletak di Kelurahan Gunung Steleng. Meriam ini pada masa lalu dipergunakan sebagai alat pertempuran pada masa penjajahan Jepang yang dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang sejarah perjuangan bangsa ini.

A.16 Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi kepemudaan di Penajam Paser Utara ada yang merupakan organisasi Nasional (Pemuda Pancasila, GP Ansor, Laskar Merah Putih, FKPPi, AMPG, dll) dan ada juga organisasi Regional (GEPAK, GASAK-LIBAS) serta organisasi Kedaerahan (Persatuan Pemuda-Pemudi Bajao, dll). Jumlah organisasi pemuda tahun 2009 dan 2010 sebanyak 39 dan pada tahun 2011 dan tahun 2012 sebanyak 40. Peningkatan jumlah organisasi pemuda ini tentunya dapat menunjang peran pemuda dalam proses pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Disamping itu, banyaknya jumlah organisasi pemuda Penajam Paser Utara menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam

pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

A.17 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 2009-2013 pada masing-masing indikator disajikan pada tabel 2.49.

Tabel 2.49 Aspek Pelayanan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Tahun 2013

No	Indikator	Satuan	T A H U N			
			2009	2010	2011	2012
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	kegiatan	29	36	54	6
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	kegiatan	12	12	12	8

Sumber: Kantor Kesbangpol Kabupaten Penajam Paser Utara, 2013

Tabel 2.48 menggambarkan bahwa peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat seperti kegiatan pembinaan terhadap LSM, Organisasi Masyarakat dan OKP. Selama tiga tahun yaitu 2009 hingga tahun 2011 kegiatan pembinaan terus meningkat sebanyak 25 kegiatan. Namun pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 48 kegiatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan menurunnya jumlah organisasi profesi, yayasan dan organisasi kemasyarakatan.

A.18 Otonomi Daerah tentang Perangkat Daerah

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan otonomi daerah terkait dengan perangkat daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 2009-2013 ditunjukkan pada tabel 2.50.

Tabel 2.50 Aspek Pelayanan Umum bidang Otonomi Daerah tentang Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	T A H U N				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	%	1:2858	1:1681	1:1381	1:1226	1:880
2	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	%	76.98	73.88	77.77	67.11	65.58
3	Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan	%	1:8	1:7	1:9	0	0
6	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	Ada/tidak	-	-	-	-	Ada
7	Penegakan PERDA	%	0	0	191.75	72.75	14
8	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	0	0	1	1	1
9	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP dan Kantor Kesbangpol, 2013

Berdasarkan tabel 2.50 diatas, dapat dilihat bahwa rasio satpol PP dan Linmas terus menurun, artinya cakupan pelayanan oleh petugas menjadi semakin baik. Selama lima tahun terakhir jumlah

Satpol PP mengalami peningkatan sebanyak 153 jiwa. Hal ini berdampak baik dalam membantu mengatasi masalah keamanan masyarakat. Selain polisi pamong praja, perlindungan masyarakat (Linmas) juga berperan aktif dalam peningkatan upaya menjaga keamanan masyarakat. Selama lima tahun terakhir, tercatat terjadi penambahan jumlah Linmas sebanyak 104 orang. Bentuk pengamanan lain adalah berupa keberadaan pos sistem keamanan lingkungan (Siskamling) yang berada di setiap desa/kelurahan. Selama tiga tahun yaitu 2009-2011, jumlah siskamling terus mengalami peningkatan sebanyak 84 unit dari kondisi masing-masing tahun 2009 sebanyak 382 unit, tahun 2010 sebanyak 402 unit dan tahun 2011 sebanyak 466 unit.

Kualitas pelayanan pemerintahan dan perizinan dapat ditunjukkan oleh kesediaan sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintah dan jumlah penegakan perda. Pada tahun 2013, sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintah telah dibentuk dan dioperasikan. Di sisi lain jumlah penegakan perda mengalami penurunan. Pada tahun 2011 dan 2012, penegakan perda telah dilakukan secara baik sehingga upaya ini telah mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan perda. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penegakan perda dapat dilihat dari jumlah pelanggaran perda yang terus menurun. Indikator berikutnya adalah tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten merupakan persentase dari jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dibandingkan jumlah pelanggaran K3. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sudah mencapai 100%, dengan rincian jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dan jumlah pelanggaran K3 masing-masing 291 pelanggaran. Cakupan sarana prasarana perkantoran

pemerintahan desa yang baik pun juga telah mencapai angka 100 persen.

A.19 Ketahanan Pangan dan Ketersediaan Pangan Utama

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2008–2012 ketersediaan pangan rata-rata 72.962.000 kg/tahun atau 249 kg/orang/tahun dalam bentuk beras. Dari aspek jumlah menunjukkan bahwa pangan yang ada telah mencukupi keperluan masyarakat Penajam Paser Utara yang memerlukan 130 kg/orang/tahun beras. Dengan demikian kalau dilihat dari keperluan dan ketersediaan beras yang ada masih ada kelebihan beras sebesar 119 kg/orang/tahun. Melihat kondisi yang demikian itu maka Kabupaten Penajam Paser Utara tidak kekurangan beras, tetapi beras yang beredar justru beras merk lain yang bukan berasal dari Kabupaten Penajam Paser Utara. Kondisi ini disebabkan karena banyak gabah yang dijual ke luar daerah. Diharapkan kedepan beras yang ada di Penajam Paser Utara sudah mampu bersaing dengan beras dari daerah lain dan memiliki merk seperti beras babulu, beras waru, beras sepaku dan beras penajam. Produksi padi dan jumlah jiwa yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara selama 5 tahun terakhir dari 2008–2012 dapat dilihat pada tabel 2.51. Dilihat dari jumlah produksi yang dihasilkan, maka Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan kabupaten yang sangat kelebihan produksi beras jika hanya untuk dikonsumsi oleh penduduknya sendiri. Kondisi ini dapat dilihat sebagai peluang yang sangat baik dengan kedekatan Penajam Paser Utara dengan Balikpapan. Sebagai kota yang berkembang cepat, Balikpapan tentu memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah dengan areal pertanian yang tentu makin sempit. Adalah sebuah peluang besar bagi Penajam Paser Utara

untuk menjadi pemasok beras bagi kota Balikpapan. Namun demikian hingga hari ini peluang ini belum tergarap secara baik. Sebuah bukti kecil menunjukkan, dipasar kota Balikpapan beredar beras dengan merek “beras PPU”, namun tidak ada informasi dari warga Penajam Paser Utara tentang beras tersebut. Artinya terdapat peluang yang besar di luar tetapi tidak dipahami oleh penduduk Penajam Paser Utara dan justru dimanfaatkan oleh pihak di luar Penajam Paser Utara.

Tabel 2.51 Produksi Padi dan Ketersediaan Padi per jiwa

Tahun	Produksi (kg)	Jumlah Jiwa	Produksi padi per jiwa (kg)
2008	79.729.000	133.859	595,61
2009	62.301.000	137.165	454,20
2010	87.879.000	142.922	614,87
2011	65.378.000	149.144	438,35
2012	69.523.000	175.666	395,76

Sumber: Dinas DP3K Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013

A.20 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

LSM diposisikan sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat. LSM dapat pula mengembangkan programnya sendiri dan bersinergi dengan program pemerintah.

Jumlah LSM dihitung berdasarkan jumlah LSM aktif dalam satu (1) tahun. Besarnya jumlah LSM aktif akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah. Besarnya jumlah LSM aktif juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah. Jumlah LSM yang aktif di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2011 ke tahun 2012, hal ini disebabkan adanya peraturan baru mengenai penerimaan dana hibah/bansos sesuai dengan Permendagri no 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang mengatur pemberian bantuan ke LSM tidak bisa diberikan setiap tahunnya.

A.21 Statistik

Sejalan dengan tugas penyediaan data, badan Statistik bekerja sama dengan instansi terkait telah menerbitkan dokumen resmi yang harus tersedia pada suatu wilayah. Dokumen Kabupaten dalam Angka sebagai dokumen data resmi tersedia di kabupaten Penajam Paser Utara secara lengkap. Sejalan dengan kelengkapan yang diharuskan ada dalam sebuah dokumen, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka telah memenuhi standar isi yang ditetapkan. Namun demikian masih terdapat data detail yang memang tidak tersedia dalam Statistik tetapi tersedia di SKPD yang mampu. Aspek penting lain dari data statistik adalah terjadinya perbedaan data yang ada di SKPD dengan yang ada di dokumen Statistik. Hal ini terjadi akibat dari metode pengumpulan

data yang berbeda. Perbedaan itu muncul diakibatkan dari tujuan pengumpulan yang memang berbeda. Statistik memiliki standar metodologi yang telah baku demi mendapatkan data yang dapat diperbandingkan secara regional maupun nasional. Sementara itu data di SKPD lebih berkaitan dengan tujuan pengambilan kebijakan yang mendesak dan detail.

A.22 Komunikasi dan Informatika

A.22.1 Komunikasi Dan Informasi

Layanan komunikasi dan informasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan intelektual masyarakat yang bertujuan mengurangi kesenjangan digital antara kabupaten dan kota. Serta diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal perkembangan teknologi yang semakin pesat, sehingga dengan keberadaan layanan komunikasi dan informasi ini dapat mendukung kemajuan usaha diberbagai sektor bagi masyarakat Penajam Paser Utara.

A.22.2 Jumlah jaringan komunikasi

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat dalam program pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan layanan jasa akses telekomunikasi sangat diperlukan keterlibatan berbagai unsur seperti pemerintah, kalangan pengusaha, maupun masyarakat. Perkembangan jaringan komunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang tinggi ini dengan banyaknya jaringan komunikasi (telepon) diantaranya AXIS Telekom Indonesia (AXIS), Bakrie Telecom (Esia), Hutchison 3 (Tri), Indosat (StarOne, Matrix, IM3 dan Mentari), Telkomsel (Flexi, HALO, SimPATI dan AS) dan XL, dari semua operator tersebut tidak semua dapat di manfaatkan di 4 kecamatan di kabupaten

Penajam Paser Utara hanya jaringan Indosat (Mentari) dan Telkomsel (HALO, SimPATI dan AS) yang dapat di manfaatkan. Jumlah jaringan telpon genggam di Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 8 dan angka ini tetap sama dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Sedangkan jumlah jaringan telpon stasioner berjumlah 55 dan angka ini pun terus sama dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Dengan banyaknya jaringan komunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara membuka peluang usaha dari berbagai sektor baik dari sektor Perbankan, Pertanian, perdagangan, perindustrian, jasa karena memberikan kemudahan dalam melakukan interaksi di masyarakat, kita bisa tepat berkomunikasi tanpa harus memperhitungkan ruang dan waktu.

Laju perkembangan teknologi komunikasi hingga saat ini sangat tinggi. Penyediaan layanan komunikasi melalui teknologi telepon kabel atau non kabel menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan khususnya telepon genggam atau biasa disebut handphone/selluler. Dibuat pendekatan rata-rata bahwa untuk saat ini dalam satu rumah tangga (RT) memiliki 4 buah HP. Jadi dari jumlah rumah tangga sebanyak 38.881 dan perkiraan rumah tangga saat ini yang memiliki HP adalah 4 buah. Pendekatan ini 38.881 di kali 4 dengan hasil 155.524. Dengan perbandingan jumlah penduduk sebanyak 175,666 jiwa maka, persentase penduduk dalam penggunaan HP di Kab. Penajam Paser Utara adalah 88,53%.

A.22.3 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

Angka rasio warnet/wartel per 1000 penduduk pada tahun 2012 di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami kenaikan. Sebelumnya pada tahun 2010, rasio warnet/wartel per 1000 penduduk hanya 0,27 dan pada tahun 2011 rasio ini hanya

mencapai angka 0.26 lalu pada tahun 2012 rasio ini meningkat hingga mencapai angka 0,29. Sejalan dengan banyaknya jaringan telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara maka akan membuka peluang usaha bagi para wirausahawan dengan memanfaatkan jaringan komunikasi.

A.22.4 Jumlah surat kabar nasional/lokal

Surat kabar yang ada beredar di kalangan masyarakat Penajam Paser Utara diantaranya Kompas, Jawa Pos, Kaltim Post, Tribun Kaltim. Kesemuanya itu memberikan informasi yang terjadi di dalam dan luar negeri sehingga masyarakat dapat memilih dengan bijak informasi yang dibutuhkan untuk keperluan informasi baik bisnis maupun sosial.

A.22.5 Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Terdapat 7 stasiun televisi siaran gratis di Indonesia yang salurannya dapat ditangkap di Kabupaten Penajam Paser Utara melalui antena UHF/VHF (terrestrial) yaitu TVRI, Indosiar, MetroTV, RCTI, SCTV, Trans TV, B Channel. Sedangkan untuk stasiun televisi siaran gratis lokal yang salurannya dapat ditangkap di Kabupaten Penajam Paser Utara melalui antena UHF/VHF (terrestrial) BTV (Balikpapan TV).

A.22.6 Jumlah Web Site Milik Pemerintah

Web Site yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara diantaranya :

- www.penajamkab.go.id
- www.bkd.penajamkab.go.id
- www.bappeda.penajamkab.go.id.

Dengan adanya web site milik pemerintah dapat dengan mudah memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat tanpa

dibatasi dengan ruang dan waktu, namun informasi yang disampaikan tersebut tentunya harus Up to date.

A.22.7 Jumlah Pameran/ Expo

Kegiatan Pameran/Expo yang pernah dilaksanakan di Kabupaten Penajam adalah Penajam Fair yang dilaksanakan setiap tahun dan menjadi agenda tahunan dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang bertujuan:

- Untuk memberikan informasi seluas luasnya kepada masyarakat tentang hasil pembangunan yang dicapai selama berdirinya Penajam Paser Utara.
- Meningkatkan peran aktif masyarakat terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan untuk peluang investasi atau permodalan bagi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Karena dengan kegiatan ini adalah akses pemasaran ke daerah lain melalui penjualan produk maupun transaksi bisnis.
- Merupakan sarana informasi pembangunan promosi dan potensi sumber daya alam, pembangunan agribisnis dan industri, serta produk unggulan daerah agar lebih dikenal lebih luas, sehingga dapat menarik investor untuk menamkan investasi di Penajam Paser Utara.

Pada tahun 2013 Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melaksanakan Penajam Fair dengan kerjasama PT ADW Bersaudara Group yang kerap menyelenggarakan kegiatan serupa di Indonesia yang di ikuti oleh sebanyak 83 organisasi dengan 160 stand. Akan tetapi total pameran dan expo yang dilaksanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara hanya sebanyak 1 kegiatan dan angka ini terus sama dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Diharapkan pada saat mendatang jumlah pameran dan expo dapat bertambah sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi

masyarakat melalui pemberian ruang bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam memasarkan produknya.

A.23 Perpustakaan

Belum tersedia perpustakaan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, saat ini Pemerintah Daerah baru mengembangkan perpustakaan yang terdapat di sekolah-sekolah baik di tingkat dasar maupun lanjutan. Sarana dan prasarana penunjang pendidikan berupa perpustakaan pada tahun 2009 untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK sejumlah 136 unit diantaranya terdapat RKB yang dijadikan perpustakaan. Seiring dengan meningkatnya jumlah peserta didik, maka sebagian perpustakaan di tahun 2011 dan 2012 dikembalikan fungsinya sebagai RKB sehingga jumlah perpustakaan menjadi 65 unit. Namun ada upaya setiap sekolah untuk membangun RKB dan Perpustakaan baru guna memenuhi sarana penunjang pendidikan.

B. Urusan Pilihan

B.1 Pertanian

Pertanian Tanaman Pangan

Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai potensi cukup besar untuk tanaman pangan. Berdasarkan release Kalimantan Timur Dalam Angka 2012, Kabupaten Penajam Paser Utara menempati posisi kedua se Kalimantan Timur setelah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam besaran produksi padi (sawah & ladang), bahkan secara produktivitas menempati urutan pertama.

Gambar 2.11 Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, Tahun 2012

Namun pada tahun 2012, produksi padi sawah mengalami penurunan dari tahun 2008 yaitu dari sebanyak 76.301 ton menjadi 66.179 ton, atau turun sebesar 13,27%. Demikian halnya dengan produksi panen padi ladang mengalami penurunan dari tahun 2008 yaitu dari sebanyak 3.425 ton menjadi 3.344 ton, atau turun sebesar 2,36%. Adapun produksi palawija mengalami penurunan produksi cukup tinggi dari tahun 2008, yaitu dari sebanyak 10.843 ton menjadi 2.333 ton, atau turun sebesar 78,48%. Penurunan produksi pertanian tanaman pangan tersebut sangat dipengaruhi oleh penurunan luas panen tiap komoditi. Hal ini disebabkan adanya lahan pertanian yang mengalami konversi lahan menjadi lahan non pertanian seperti untuk pemukiman, perkebunan bahkan untuk kegiatan pertambangan (lihat tabel 2.52, 2.53 dan 2.54).

Tabel 2.52 Luas Panen & Produksi Padi Sawah

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Luas Panen (Ha)	14.807	11.686	15.854	12.202	13.089
Produksi (Ton)	76.301	60.276	83.686	63.264	66.179
Produktivitas (Ton/Ha)	5,15	5,16	5,28	5,18	5,06

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan & Kelautan, 2013

Tabel 2.53 Luas Panen & Produksi Padi Ladang

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Luas Panen (Ha)	1.420	926	1.709	732	1.120
Produksi (Ton)	3.425	2.238	4.189	2.063	3.344
Produktivitas (Ton/Ha)	2,41	2,42	2,45	2,82	2,99

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan & Kelautan, 2013

Tabel 2.54 Luas Panen & Produksi Palawija

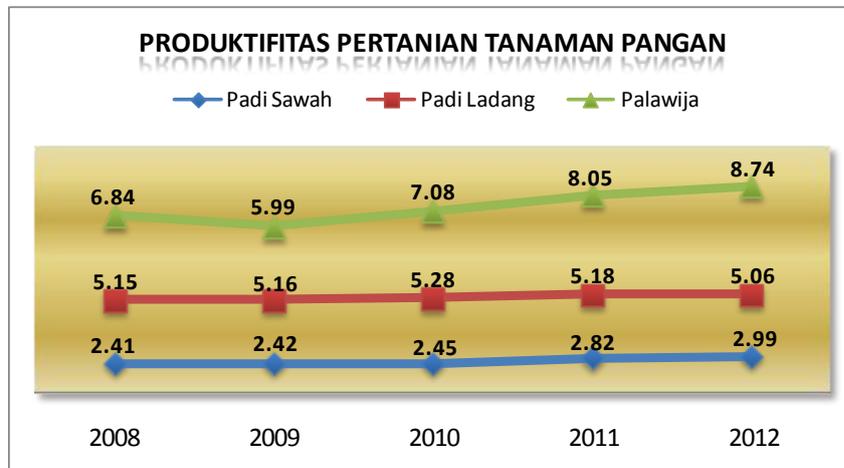
Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Luas Panen (Ha)	1.586	750	544	320	267
Produksi (Ton)	10.843	4.495	3.850	2.575	2.333
Produktivitas (Ton/Ha)	6,84	5,99	7,08	8,05	8,74

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan & Kelautan, 2013

Namun demikian, secara umum produktivitas pertanian tanaman pangan masih mengalami peningkatan dari tahun

dasar (tahun 2008), walaupun dengan peningkatan yang sangat kecil, kecuali produktivitas Padi Ladang, walaupun penurunannya tidak signifikan (lihat gambar 2.12).

Gambar 2.12 Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan



Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam membangun perekonomian. Pembangunan di Penajam sendiri masih akan berbasis pada pertanian karena sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor ini. Dengan dikembangkannya kegiatan pertanian di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara maka akan lancar pula kegiatan jasa dan bisnis yang berbasis agribisnis. Pertanian yang maju akan terlihat pada meningkatnya produktivitas pertanian. Di sisi lain, meningkatnya produktivitas pertanian akan menjadi penyangga ketahanan pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Permasalahan produktivitas pertanian tidak saja bersumber dari ketersediaan lahan secara kuantitas namun juga kualitas. Degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup menyebabkan menurunnya kualitas tanah, air dan sumber daya alam lainnya. Degradasi sumber daya alam terjadi akibat dua hal, faktor manusia dan faktor alam. Degradasi tersebut sering dipengaruhi

oleh salah satunya adalah faktor manusia itu sendiri. Dari sisi manusia, masalah degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup umumnya disebabkan oleh pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak berwawasan lingkungan. Di sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura misalnya salah satu permasalahan dalam peningkatan produktivitas petani dan pertanian adalah menurunnya tingkat kesuburan tanah.

Kesulitan petani umumnya adalah memperoleh akses permodalan dari sektor perbankan karena status kepemilikan lahan petani yang masih belum bersertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan. Selain itu juga keterbatasan akses permodalan disebabkan oleh kurangnya informasi tentang permodalan melalui perbankan. Namun pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada kelompok petani yang berada di kabupaten ini. Pelayanan ini dapat terlihat pada upaya untuk membantu kelompok petani. Pada tahun 2010 hanya terdapat 32 kelompok petani dari 589 keseluruhan kelompok petani yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Namun pada tahun 2012, terdapat 374 kelompok petani dari 589 kelompok petani yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Artinya, cakupan bina kelompok tani mengalami peningkatan dari 5,43 % di tahun 2010 menjadi 63,50 % di tahun 2011. Ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap petani cukup tinggi terutama petani yang masih memiliki modal yang terbatas. Pengembangan teknologi tepat guna bagi pertanian tentunya banyak dilaksanakan diberbagai institusi baik instansi teknis pemerintah maupun instansi akademik dan penelitian pengembangan (litbang). Namun yang tidak kalah

pentingnya adalah bagaimana mentransfer dan mensosialisasikan berbagai inovasi kepada para petani. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia pelaku usahatani yaitu petani itu sendiri. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ditandai oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah sehingga dapat mempengaruhi tingkat keberdayaan petani pada khususnya.

Peternakan

Produksi sektor peternakan dalam hal ini adalah jumlah Ternak yang Dipotong dan Produksi Telur Unggas. Keduanya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 produksi ternak sebanyak 48.512 ekor dan produksi telur unggas sebanyak 20,87 juta telur, mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi sebanyak 161.606 ekor ternak atau naik \pm 120% dan 45,98 juta telur atau naik \pm 233%.

Perkebunan

Produksi sektor perkebunan dalam hal ini adalah perkebunan oleh perusahaan baik swasta besar maupun swasta kecil dan perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat. Produksi sektor perkebunan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 produksi perkebunan total mencapai 245.524,8 ton dengan luas lahan perkebunan mencapai 55.154,9 Ha. Kemudian pada tahun 2012 produksi meningkat menjadi 538.327 ton atau mengalami peningkatan sebesar 119,26% dengan luasan lahan perkebunan 66.051 Ha atau meningkat sebesar 19,76%. Tanaman perkebunan baik luas maupun produksi didominasi oleh tanaman Kelapa Sawit dan Karet. Selebihnya adalah Kelapa, Kopi, Lada dan Kakao. Secara produktivitas, sektor perkebunan mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2009 dengan produktivitas 4,45

meningkat menjadi 8,15 pada tahun 2012 atau mengalami peningkatan sebesar 83,09%.

B.2 Kehutanan: Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar 0,87%. Angka ini menunjukkan masih banyak lahan kritis yang belum direhabilitasi. Lahan kritis harus direhabilitasi agar lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian maupun perkebunan. Semakin luas lahan kritis berarti semakin banyak lahan yang tidak dapat dimanfaatkan, untuk memanfaatkan lahan tersebut perlu dikembangkan peternakan. Kotoran ternak dapat dimanfaatkan untuk kesuburan tanah, sehingga lahan kritis bisa menjadi subur dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan maupun kehutanan. Pada tahun 2013, di Kabupaten Penajam Paser Utara jumlah lahan kritis adalah 293.840,23 kilometer persegi sedangkan hanya 4.040 kilometer persegi lahan kritis yang telah direhabilitasi. Hal ini menandakan perlunya upaya lebih dari pemerintah daerah untuk merevitalisasi lahan kritis agar lahan ini mampu dimanfaatkan bagi kegiatan pertanian dan perkebunan sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

B.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

Tidak ada pertambangan yang tanpa ijin beroperasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, semua pertambangan telah memiliki ijin. Pertambangan yang ada di Penajam Paser Utara berjumlah 172 perusahaan terdiri dari 1 perusahaan minyak, 2 perusahaan gas, 148 perusahaan batu baru, dan 21 perusahaan galian C (Dinas Pertambangan Kab. Penajam Paser Utara, 2012). Dengan demikian perusahaan yang ada sudah memiliki kesadaran tentang

hukum, terutama untuk mengurus ijin pertambangan. Namun demikian terdeteksi masalah ijin yang berlokasi di wilayah yang tidak tepat, misalnya di kawasan keramaian atau kawasan konservasi.

Pada aspek energi, jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dari PLN adalah 33 ribu rumah tangga. Sebanyak 21 ribu rumah tangga yang menggunakan meteran listrik PLN dengan daya terpasang paling banyak adalah 450 watt. Sedangkan sisanya sebanyak 12 ribu rumah tangga atau 35,86 persen yang menggunakan listrik PLN tanpa meteran (Suseda Kabupaten Penajam Paser Utara, 2012).

B.4 Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan mengalami kenaikan dari 102,26% tahun 2011 menjadi 1.207,36% tahun 2012. Kenaikannya sebesar 1.105,10%. Pengelolaan perikanan di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah mulai baik. Konsumsi ikan sendiri untuk masyarakat Penajam Paser Utara sebesar 101,39% atau 182,50 kg/orang/tahun, sudah berada di atas target, yang diharapkan 180 kg/orang/tahun. Hal ini terjadi karena produksi ikan yang ada sudah banyak tersedia meskipun demikian yang menjadi lauk-pauk masyarakat Penajam Paser Utara pada umumnya tidak hanya ikan melainkan tempe, tahu, telur, ayam dan daging.

Bantuan yang diberikan kepada kelompok nelayan masih rendah yaitu sebesar 10,94% dan hal ini akan berpengaruh pada produksi perikanan. Sedangkan produksi kelompok nelayan sebesar 4,42% ini kecil sekali dikarenakan nelayan masih kekurangan modal

untuk memiliki kapal yang lebih besar untuk menangkap ikan di laut (Pengolahan Data Perikanan, 2012).

Produksi perikanan dalam hal ini berupa perikanan laut dan perikanan darat. Produksi perikanan laut berupa produksi ikan yang diperoleh dari laut. Sedangkan produksi perikanan darat berupa produksi ikan yang diperoleh dari perairan umum (bukan laut), tambak dan kolam/keramba. Sejak tahun 2008, produksi perikanan mengalami peningkatan yaitu dari sebanyak 9.496,9 ton menjadi 12.973,9 ton pada tahun 2011 atau mengalami peningkatan sebesar 36,61%. Khusus pada tahun 2011, produksi perikanan didominasi oleh produksi perikanan darat, dimana hasil produksi petani perikanan kolam mengalami peningkatan yang signifikan.

B.5 Ketransmigrasian

Tidak ada data disebabkan dari pertama berdirinya Kabupaten Penajam Paser Utara tidak pernah menerima transmigrasi.

2.6 Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan propinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, persaingan dalam lingkup nasional, atau persaingan dalam lingkup internasional. Sebagaimana yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 2 ayat (3), disebutkan bahwa daya saing merupakan kombinasi antara faktor ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik, sumber daya manusia dan teknologi, yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain.

Isu penguatan daya saing daerah dalam mendukung otonomi daerah, menjadi isu yang strategis bagi daerah. Permasalahan yang krusial dalam membangun daya saing daerah adalah bagaimana daerah dapat mengungkit sumber daya yang dimilikinya (baik yang bersifat *tangible/intangible*) untuk dapat dikembangkan menjadi *distinctive capability* yang mengarahkan pada suatu kompetensi inti dan dengan sendirinya diharapkan daerah memiliki suatu daya saing yang bersifat unik. Kunci dari proses membangun daya saing ini adalah pada identifikasi sumber daya dan mengungkit sumber daya baru jika daerah tidak memiliki sumber daya yang dapat diungkit menjadi daya saing daerah.

Beranjak dari pemahaman di atas, sebagaimana yang telah diuraikan pada aspek-aspek sebelumnya, bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi daya saing daerah yang cukup tinggi karena memiliki keberadaan sumber daya alam (*natural resources*) melimpah seperti mineral & batubara, minyak bumi & gas, pertanian, perkebunan, serta kehutanan. Dengan ditunjang oleh posisi strategis Kabupaten Penajam Paser Utara secara geografi yang berada pada jalur lintas transportasi Kalimantan, dimana menjadi jalur penghubung antara Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, juga berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan, sebagai kota yang berdimensi Jasa dan Industri serta sebagai pintu gerbang Propinsi Kalimantan Timur dengan keunggulan infrastruktur khususnya dibidang transportasi udara dan laut serta dibidang informasi dan teknologi, yang pada akhirnya semakin memperkuat daya saing Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal aksesibilitas informasi dan transportasi.

Berdasarkan Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, nilai aspek daya saing daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan dari sebesar 0,7360 pada tahun 2009 menjadi sebesar 0,7416 pada tahun 2012. Kabupaten Penajam Paser Utara menempati peringkat ke 6 dari 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur. Pada tahun 2012 Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri menempati ranking ke 6 dari 14 wilayah di Kalimantan Timur dalam hal aspek daya saing daerah (Bappeda Kaltim, 2012).

Daya saing daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dicermati dari kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan ekonomi daerah ini sendiri dapat dianalisa dari empat (4) aspek penting. Aspek yang pertama adalah kemampuan ekonomi daerah, aspek ke dua infrastruktur, aspek ke tiga iklim investasi dan aspek ke empat sumber daya manusia.

A. Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus Kemampuan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat dari indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan nilai tukar petani. Namun data pendapatan rumah tangga yang akurat cukup sulit diperoleh sehingga dilakukan pendekatan melalui data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan (pangan) dan bukan makanan (non pangan) dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Secara rata-rata, pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Penajam Paser Utara masih lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata Kalimantan Timur, namun secara berkesinambungan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2009 total pengeluaran rumah tangga per bulan sebesar Rp. 424.018 dan pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 646.929. Hal ini menandakan adanya peningkatan kesejahteraan tiap rumah tangga di Kabupaten Penajam Paser Utara setiap tahun (lihat gambar 2.8).

Gambar 2.13 Total Pengeluaran Rumah Tangga per Bulan



Sumber: BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Angka, 2012

Selain itu, walaupun terjadi kenaikan pada angka pengeluaran rumah tangga, namun perlu diperhatikan bahwa angka ini masih sangat rendah bila dibandingkan dengan angka pendapatan per kapita. Artinya, Kabupaten Penajam Paser Utara masih belum memiliki daya saing yang tinggi sehingga mengakibatkan wilayahnya belum mampu mengoptimalkan kegiatan bisnis dan ekonomi. Di sisi lain, pengeluaran yang rendah menandakan permintaan yang rendah dan hal ini berdampak pada kemauan investasi yang juga rendah. Secara tidak langsung, hal ini berdampak pada lemahnya daya saing Kabupaten Penajam Paser Utara bila dibandingkan dengan kota-kota lain di Propinsi Kalimantan Timur. Tidak terdapat data mengenai nilai tukar petani di Penajam Paser Utara.

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Sebagai daerah baru hasil pemekaran, Kabupaten Penajam Paser Utara masih membutuhkan prasarana dasar untuk menunjang kegiatan diberbagai sektor. Adanya pusat-pusat pertumbuhan baru akibat pemekaran wilayah yang belum didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai, berakibat pada belum maksimalnya pengelolaan potensi dasar wilayah untuk berbagai kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan berbagai potensi yang ada, berupaya untuk membangun prasarana dasar wilayah berupa prasarana transportasi, listrik, air bersih dan fasilitas publik lainnya.

Berdasarkan identifikasi kondisi lahan yang ada, Penajam Paser Utara memiliki kawasan produktif yang masih sangat luas untuk dikembangkan. Dari luas kawasan budidaya yang meliputi 288.623 Ha, baru 12,03% yang dimanfaatkan (Pola ruang RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2030). Luas wilayah industri berdasarkan Pola Ruang RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2030 adalah seluas 842 Ha, sedangkan luas budi daya adalah seluas 288.621 ha. Jadi rasio luas wilayah industri per luas budidaya adalah sebesar 0,29 %. Dari rasio tersebut dapat disimpulkan bahwa luasan kawasan industri hanya seluas 0,29 % dari luas total seluruh budi daya yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sementara itu, kawasan gerakan tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas \pm 8.400 Ha. Wilayah yang rawan banjir pada umumnya berada di wilayah pesisir Kecamatan Babulu, Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku serta Kelurahan Bukit Subur sedangkan lahan yang rawan gerakan

tanah yaitu di sekitar Kelurahan Bumi Harapan dan Kelurahan Bukit Raya (sumber : Review RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara). Di sisi lain, Luas lahan kering tanaman pangan yang terdapat dalam pola ruang RTRW 2013 sebesar 22.285 Ha. Sedangkan, luas wilayah perkotaan berdasarkan pola ruang RTRW 2013-2030 adalah seluas 7.359 Ha, sehingga rasionya sebesar 2,55 %.

Sarana pengembangan daya saing didukung pula oleh keberadaan institusi pendukung seperti perbankan. Pada tahun 2008, jumlah Bank yang beroperasi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara hanya berjumlah 9 (sembilan) Bank, yaitu Bank Kaltim, Bank BRI, Bank BNI 46, Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Kaltim Syariah dan Bank Ibbadurrahman. Searah dengan perkembangan perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara, maka terjadi penambahan jumlah Bank menjadi sebanyak 7 (tujuh) unit yaitu: Bank Kaltim, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, Bank Ibbadurrahman dan Bank Danamon Simpan Pinjam (KUKM Perindag, 2012).

Pada tahun 2012, jumlah Restoran/Rumah Makan yang beroperasi adalah sebanyak 35 Rumah Makan yang terdiri dari 19 Rumah Makan di Kecamatan Penajam, 5 Rumah Makan di Kecamatan Waru, 6 Rumah Makan di Kecamatan Sepaku dan 5 Rumah Makan di Kecamatan Babulu. Dari sejumlah rumah makan tersebut, hanya terdapat 1 (satu) rumah makan yang berkelas Restoran, yaitu Pondok Ikan Bakar Asian di Kecamatan Penajam. Sejak tahun 2009 sampai tahun 2012, tercatat terjadi penurunan angka jumlah rumah makan di Kabupaten Penajam Paser Utara (Dispenda, 2013). Beberapa alasan terjadinya penutupan rumah makan tersebut karena beberapa pemilik

mengalihkan jenis usahanya. Beberapa diantaranya karena sampai akhir tahun 2012, belum melakukan pembayaran pajak Restoran/Rumah Makan.

Pada tahun 2008, jumlah Hotel dan Penginapan sebanyak 7 buah dengan rincian 3 buah hotel yaitu Hotel Al Banjari, Hotel Tiara dan Hotel Kalimantan serta 4 buah penginapan yaitu Penginapan Tabalong, Penginapan Mulia, Penginapan Tunas Mekar dan Penginapan Silkar Indah. Seiring dengan perkembangan denyut nadi perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga tingkat kebutuhan akan kamar juga meningkat. Hal ini ditunjukkan pada pertambahan jumlah Hotel dan Penginapan sampai pada tahun 2012 jumlah Hotel bertambah 4 Hotel yaitu Hotel Paviliun, Hotel Venus, Hotel Sekumpul dan Hotel 3 Be Garden, sedangkan jumlah Penginapan bertambah 2 Penginapan yaitu Penginapan Mega Buana dan Wisma Bunyi Nyiur. Sehingga total Hotel dan Penginapan pada Tahun 2012 berjumlah 13 Hotel/Penginapan (Dishubbudpar, 2012).

2.7 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi terutama didukung oleh faktor keamanan dan peraturan tentang perijinan dan perpajakan. Pada aspek keamanan, rasio tindak kriminal menunjukkan kondisi keamanan di Kabupaten Penajam Paser Utara masih mengalami fluktuasi, sebagaimana uraikan pada tabel 2.55.

**Tabel 2.55 Angka Kriminalitas Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2009-2013**

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Kriminal	209	171	158	176	209
Jumlah Penduduk	137.162	142.922	149.144	153.470	137.165
Rasio	0,0015	0,0012	0,0010	0.0011	0,0015

Sumber: Kepolisian

Walaupun kondisi keamanan di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami fluktuasi, namun terjadi peningkatan angka kriminalitas pada tahun 2012 dan 2013. Peningkatan tindak kriminalitas sedikit banyak menunjukkan angka ekonomi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih rendah. Rendahnya kesejahteraan ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong bagi terjadinya tindak kejahatan. Selain itu, naiknya angka kriminalitas pada tahun 2012 dan 2013 juga berdampak pada iklim investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Naiknya angka kriminalitas di suatu daerah tentunya akan mempengaruhi keputusan para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Ini dikarenakan kondisi keamanan akan berpengaruh pada kegiatan ekonomi dan bisnis dan pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut pula.

Jumlah demonstrasi sebagai pendeteksi keamanan yang lain menunjukkan bahwa keamanan di Penajam Paser Utara relatif baik. Hanya terdapat beberapa demonstrasi kecil selama 5 tahun berselang. Aksi demonstrasi yang terjadi umumnya dilakukan oleh

perwakilan kelompok masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah atau oleh buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun demikian, demonstrasi yang terjadi tidak sampai merugikan banyak pihak karena dilakukan secara terkendali dan tidak sampai terjadi secara anarkis dan berlebihan. Berbagai aksi unjuk rasa yang selama ini di Kabupaten Penajam Paser Utara relatif dapat berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian sebagaimana terjadi pada berbagai peristiwa demonstrasi yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Jumlah unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara dari kurun waktu 2008–2010 mengalami penurunan yaitu sebanyak 12 kali pada tahun 2008 dan turun menjadi 5 kali unjuk rasa pada tahun 2010, namun kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi sebanyak 10 kali unjuk rasa (Polres Kabupaten PPU, 2012).

Pada aspek perijinan, Penajam Paser Utara telah memulai pelayanan perijinan yang lebih baik yakni melalui perijinan satu atap (lihat point perijinan). Perijinan yang dipermudah itu diikuti dengan beban yang relatif ringan bagi pelaku usaha di Penajam Paser Utara dengan sedikitnya pemungutan pajak dan retribusi (lihat bab III). Hanya ada 9 macam Pajak, dengan penambahan yaitu Pajak Parkir dan Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan) di Penajam Paser Utara.

Fasilitas perijinan itu didukung oleh kondisi masyarakat yang telah mulai maju dengan ditunjukkan oleh status desa di Penajam Paser Utara yang telah mencapai desa Swakarsa dan Swasembada (lihat point status desa). Persentase Kelurahan/Desa Swasembada mengalami peningkatan sejak tahun 2008 yaitu sebesar 59,57%, menjadi sebesar 62,96% pada tahun 2012 yaitu dari sebanyak 54

Kelurahan/Desa, sebanyak 34 Kelurahan/Desa berstatus Swasembada (BPMPD Kabupaten Penajam Paser Utara 2013).

2.8 Fokus Sumber Daya Manusia

A. Rasio Tingkat Pendidikan Penduduk

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Data terakhir yang dapat dijadikan acuan bagi penghitungan rasio tingkat pendidikan penduduk adalah data pada tahun 2012, dimana telah di verifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagaimana hasil penerapan KTP elektronik (*e-KTP*). Jumlah lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2011 adalah sebanyak 3.908 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 153.470, sehingga diperoleh Rasio Lulusan sebesar 254,64 atau dapat diartikan bahwa pada setiap 10.000 penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 254 orang yang berpendidikan S1/S2/S3 (Dukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara, 2013).

B. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong maju atau sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting, dimana semakin tinggi persentase rasio ketergantungan

menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dengan demikian, semakin besar beban yang ditanggung, maka semakin kecil peluang menyisihkan pendapatan.

Tabel 2.56 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Penajam Paser Utara

URAIAN	TAHUN				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Penduduk Usia <15 thn + Usia > 64	45.489	45.346	49.923	53.773	55.287
Jumlah Penduduk 15 s/d 64	88.370	91.819	92.999	95.371	98.183
Rasio Ketergantungan	51,48	49,37	53,68	56,38	56,31

Sumber: BPS. Penajam Paser Utara, 2013

Demografi Kabupaten Penajam Paser Utara, sejak tahun 2008 sampai 2011 mengalami peningkatan nilai Rasio yang artinya mengalami penambahan beban penduduk yang ditanggung. Pada tahun 2011, dengan nilai Rasio Ketergantungan sebesar 56,38 menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara (dianggap produktif), mempunyai tanggungan sebanyak 56 orang (dianggap belum dan tidak produktif).

C. Rencana Pengembangan Kawasan

Rencana pengembangan kawasan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada kurun waktu 2014 - 2018 diarahkan kepada pengembangan wilayah pesisir, namun juga tidak mengesampingkan pengembangan pada wilayah-wilayah lainnya.

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang termasuk paling banyak ditinggali manusia. Wilayah ini pula yang umumnya merupakan wilayah yang pertama dikembangkan. Hal ini disebabkan potensinya dalam berbagai aspek, termasuk ketersediaan sumber daya air, kekayaan alam, ekosistem yang melimpah (merupakan habitat dari ratusan bahkan ribuan spesies), letak geografis yang strategis sebagai jalur lalu lintas perairan, fungsi ekologis sebagai penahan (buffer) ombak dari laut, dan lain-lain.

Alternatif pengelolaan wilayah pesisir yang dikembangkan, salah satunya adalah konsep penataan & pengembangan wilayah dengan pendekatan *water front city*, yaitu perencanaan dan pengelolaan kota pesisir yang mengedepankan fungsi air sebagai sumber daya utama sekaligus daya tarik wisata bagi pengembangan kota tersebut. Sumber daya air (dalam hal ini perairan pesisir - pantai dan estuari) dijadikan titik sentral pengembangan aspek-aspek lain dalam pembangunan, seperti kegiatan ekonomi, industri, aktivitas sosial, arsitektur kota, pariwisata, dan lain-lain.

Pembangunan kota-kota pesisir dengan konsep penataan & pengembangan wilayah dengan pendekatan *water front city* ini berpijak pada paradigma dan cara pandang yang baru terhadap sumber daya air, yaitu sebagai sumber daya primer untuk pengembangan sebuah kawasan. Dengan cara pandang yang baru

ini konservasi sumber daya air menjadi kepentingan semua pihak di kawasan tersebut.

Konsep pengembangan wilayah yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara, dapat dijabarkan kedalam 4 Zona yaitu :

1. **Zona SATU** adalah wilayah sepanjang jalur teluk balikpapan yang berada di wilayah Kecamatan Sepaku yaitu sepanjang Mentawir, Semoi-Sepaku dan wilayah Maridan (ITCI). Kawasan ini merupakan wilayah yang dikhususkan untuk perkembangan kegiatan industri perkayuan, perkebunan kelapa sawit (beserta produk turunannya), peternakan, dan sebagian berfungsi sebagai pelabuhan batubara, secara fungsi merupakan masuk zona "*working waterfront*".
2. **Zona KEDUA** adalah zona Industri, pelabuhan dan penelitian meliputi wilayah sepanjang teluk Balikpapan yang berada di wilayah Kelurahan Buluminung, Gersik, Jenebora, Pantai Lango dan sekitarnya. Akses penghubung yang digunakan adalah Jembatan Pulau Balang. Investasi yang telah masuk antara lain adalah pelabuhan CPO Astra, Supply Base Eiscal, Pelabuhan Pemda, Pelabuhan atau Terminal Khusus Batubara PT. Penajam Prima Coal, PT. BMS, PT. Cipaganti Resources dan Perusda Benuo Taka. Investasi yang akan masuk antara lain : Pabrik Ethanol , Smelter Nikel, dan Pusat Penelitian Kelautan BPPT.
3. **Zona KETIGA** adalah gabungan antara:
 - a) *Mixed Used Waterfront* adalah *waterfront* yang merupakan kombinasi dari perumahan, perkantoran, restoran, pasar, rumah sakit, pendidikan dan/atau tempat-tempat kebudayaan.

b) *Recreational Waterfront* adalah adalah semua kawasan *waterfront* yang menyediakan sarana-sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi, seperti taman, arena bermain, tempat pemancingan, dan fasilitas untuk kapal pesiar.

c) *Residential Waterfront* adalah perumahan, apartemen, dan resort yang dibangun di pinggir perairan

Lokasinya adalah sepanjang jalur coastal road yang berada di wilayah Nipah-nipah, Sungai Parit, hingga wilayah pelabuhan penyeberangan ferry. Bahkan dalam perencanaan ke depan akan diperluas hingga ke Pantai Tanjung Jumalai.

Penghubung yang direncanakan adalah Jembatan PPU – Balikpapan, Jalur Nipah nipah – Melawai, menghubungkan dua Coastal Road antar dua wilayah.

4. **Zona EMPAT** adalah zona yang meliputi wilayah pesisir pantai yang langsung menghadap dengan Selat Makassar, wilayah tersebut meliputi Kecamatan Babulu dan Waru yang secara khusus akan menjadi pengembangan sektor budidaya perikanan dan sejenisnya, termasuk juga akan dikembangkan sebagai sentral pertanian yang diharapkan akan jadi lumbung pangan bagi Kalimantan Timur.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Perencanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah karena kebijakan pembangunan harus menyesuaikan dengan kemampuan pendanaannya. Dalam penentuan pagu indikatif program prioritas, gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaannya menjadi dasar utama penentuan target sasaran maupun program pembangunan. Untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunandalam jangka menengah, diperlukan prediksi penerimaan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai upaya untuk memprediksi dengan baik sumber-sumber penerimaan di masa datang maka diperlukan gambaran umum kinerja keuangan melalui realisasi APBD sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun di masa lalu.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip *money follow function* sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan warna baru landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan

keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negeri/Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

Tabel 3.1**Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah)**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)
2009	51,610,027,656.83	669,554,925,193.83	7.71
2010	30,022,503,839.60	892,389,481,722.60	3.36
2011	29,357,613,834.91	1,197,891,254,519.91	2.45
2012	37,233,206,197.99	1,502,746,672,283.99	2.48
2013	51,204,182,224.70	1,328,318,638,464.70	3.85
Rata-rata	39,885,506,750.81	1,118,180,194,437.01	3.97

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan tabel 3.1 dapat tergambar rata-rata derajat desentralisasi fiskal tahun 2009-2013 adalah sebesar 3,97%. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun sebelumnya meningkat pesat yaitu sekitar Rp. 13.970.976.026,- dengan derajat desentralisasi fiskal daerah sebesar 1,37%, namun jika dibandingkan dengan kondisi selama 5 (lima) tahun terlihat penurunan Nilai Pendapatan Asli Daerah sekitar Rp. 405.845.432,- dengan derajat desentralisasi fiskal daerah sebesar 3.86%.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sub bab berikut menguraikan mengenai pendapatan daerah dan pengeluaran daerah.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Secara kumulatif, pendapatan di pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh dana perimbangan yang berasal dari elemen dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak; serta dari pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari elemen lain-lain PAD yang sah (lihat tabel 3.1).

Hal menarik yang dapat diamati dari pembentukan pendapatan di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu yaitu besarnya transfer pusat yang berasal dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak yang mencapai rata-rata 81.6% dari keseluruhan pendapatan. Besar kecilnya dana transfer ditentukan oleh besarnya hasil pengelolaan kekayaan alam daerah baik dari pertambangan maupun dari pajak dan kehutanan. Melihat skema bagi hasil yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara masih sangat bertumpu pada hasil kekayaan alam.

Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah)

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata Pertumbuhan
PENDAPATAN	669,554,925,193.83	892,389,481,722.00	1,197,891,254,519.91	1,502,746,672,283.99	1,328,318,638,464.70	20.34
PENDAPATAN ASLI DAERAH	51,610,027,656.83	30,022,503,839.60	29,357,613,834.91	37,233,206,197.99	51,204,182,224.70	5.08
Pajak Daerah	511,758,709.00	775,449,174.46	839,182,869.56	3,127,732,855.33	3,127,732,855.33	83.11
Hasil Retribusi Daerah	4,258,978,927.00	2,797,373,227.03	7,801,515,184.38	2,864,359,333.49	3,104,788,785.95	22.42
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8,678,860,417.91	5,777,386,353.16	6,523,450,879.60	5,896,352,101.17	6,048,635,160.75	-6.89
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	38,160,429,602.92	20,672,295,084.95	14,193,464,901.37	25,344,761,908.00	36,356,899,511.70	11.21
DANA PERIMBANGAN	564,326,797,537.00	808,798,277,883.00	1,084,593,290,685.00	1,265,765,277,086.00	1,066,500,255,872.00	19.60
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	526,123,151,349.00	767,631,986,326.00	924,251,082,665.00	1,073,042,007,086.00	870,544,568,872.00	15.88
Dana Alokasi Umum	22,709,263,000.00	-	118,428,287,000.00	169,033,829,000.00	194,579,185,000.00	-10.54
Dana Alokasi Khusus	10,452,358,188.00	4,837,805,157.00	7,953,600,000.00	1,241,022,000.00	1,376,502,000.00	-15.70
Dana Penyesuaian	5,042,025,000.00	36,328,486,400.00	33,960,321,020.00	22,448,419,000.00	-	120.02
Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	53,618,100,000.00	53,568,700,000.00	83,940,350,000.00	199,748,189,000.00	210,614,200,368.00	50.00
PENDAPATAN HIBAH					81,170,568.00	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0	0	0	-	81,170,568.00	
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi /Swasta Dalam Negeri	0	0	0	-	-	
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat	0	0	0	-	106,585,514,800.00	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0	-	34,480,615,000.00	
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari Pihak Ketiga	53,618,100,000.00	53,568,700,000.00	83,940,350,000.00	199,748,189,000.00	69,466,900,000.00	32.34

Analisa terhadap perkembangan pendapatan dapat dijelaskan antara lain:

1. Pendapatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini didukung dengan peningkatan pada sektor pendukung seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
2. Realisasi PAD selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Yang mengalami penurunan dari 5 (lima) tahun sebelumnya adalah pada hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
3. Realisasi dana perimbangan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun terjadi penurunan realisasi dan rata-rata pertumbuhan pada sektor Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Penyesuaian.
4. Realisasi Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah dari pihak ketiga adalah mengalami peningkatan pada 4 (empat) tahun sebelumnya dan pada tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup tinggi.

Tabel 3.3 Perkembangan Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 (%)

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
PENDAPATAN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.71	3.36	2.45	2.48	3.85
Pajak Daerah	0.99	2.58	2.86	8.40	6.11
Hasil Retribusi Daerah	8.25	9.32	26.57	7.69	6.06
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.82	19.24	22.22	15.84	11.81
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	73.94	68.86	48.35	68.07	71.00
DANA PERIMBANGAN	84.28	90.63	90.54	84.23	80.29
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	93.23	94.91	85.22	84.77	81.63
Dana Alokasi Umum	4.02	-	10.92	13.35	18.24
Dana Alokasi Khusus	1.85	0.60	0.73	0.10	0.13
Dana Penyesuaian	0.89	4.49	3.13	1.77	-
Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.01	6.00	7.01	13.29	15.86
PENDAPATAN HIBAH	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi/Swasta Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari Pihak Ketiga	100.00	100.00	100.00	100.00	32.98

Tabel 3.4 Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah)

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata Pertumbuhan
BELANJA TIDAK LANGSUNG	226,661,790,406.64	280,322,109,418.00	316,321,488,859.00	340,543,751,235.48	409,953,838,527.00	16.14
Belanja Pegawai	160,197,063,207.00	210,846,901,740.00	238,687,781,027.00	261,775,642,527.48	317,785,917,258.00	18.97
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0.00
Belanja Hibah	10,592,630,400.00	26,109,300,000.00	20,604,243,000.00	29,997,289,138.00	41,664,596,000.00	52.47
Belanja Bantuan Sosial	20,489,476,039.64	10,414,372,000.00	15,638,240,000.00	616,000,000.00	597,000,000.00	-24.54

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten	-	-	-	46,767,000,000.00	-	0.00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Partai Politik	35,098,308,500.00	32,533,760,678.00	41,313,474,832.00	957,037,352.00	49,856,325,274.00	1257.86
Belanja Tidak Terduga	284,312,260.00	417,775,000.00	77,750,000.00	430,782,218.00	-	79.90
BELANJA LANGSUNG	639,991,733,630.36	755,279,842,078.73	785,684,678,277.52	958,319,988,862.59	984,205,130.32	-13.97
Belanja Pegawai	45,828,214,463.00	49,442,312,550.00	61,767,141,439.00	69,414,674,088.00	93,796,231,175.00	20.08
Belanja Barang dan Jasa	201,196,387,246.36	193,136,385,389.73	197,639,455,731.00	205,043,964,346.54	240,589,949,011.32	4.85
Belanja Modal	392,967,131,921.00	512,701,144,139.00	526,278,081,107.52	683,861,350,425.05	649,844,024,944.00	14.52

3.1.2 Neraca Daerah

Pengelolaan aset daerah diatur dalam PP No.6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi (1) perencanaan kebutuhan penganggaran, (2) pengadaan, (3) penggunaan, (4) pemanfaatan, (5) pengamanan dan pemeliharaan, (6) penilaian, (7) penghapusan, (8) pemindahtanganan, (9) penatausahaan, dan (10) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pengelolaan aset daerah di tahun-tahun mendatang diharapkan dapat mendukung tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dari banyak permasalahan yang menjadi penghambat, ternyata masalah penyajian aset daerah merupakan salah satu faktor penyebab. Dilihat dari Neraca Daerah, ternyata lebih dari 34% dari nilai kekayaan daerah berupa aset tetap. Namun demikian jika dicermati sebagian besar dari aset tersebut tidak jelas asal usulnya, nilainya maupun status kepemilikannya.

Penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah:

1. Kebanyakan Pengelola Aset di daerah (sesuai istilah dalam Permendagri 17/2007), belum memahami perbedaan definisi aset/barang daerah dengan barang inventaris.
2. Orientasi pengadaan barang selama ini hanya membeli dan bukan mengelola, sehingga tidak pernah dilakukan

pengadministrasian dan pengendalian secara layak (misalnya tidak pernah dilakukan pengecekan/inventarisasi secara periodik).

3. Konsepsi penyajian aset/barang daerah tidak sama dengan membuat laporan barang inventaris. Biasanya nilai yang dicantumkan dalam Neraca bukan nilai perolehan tetapi nilai pasar/taksiran. Sementara menurut kaidah akuntansi sesuai PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang boleh disajikan dengan menggunakan nilai wajar/taksiran hanya saat menyusun neraca awal saja (khususnya untuk aset yang lama).
4. Pada saat merencanakan anggaran tidak dilakukan verifikasi secara memadai sehingga menyebabkan kesalahan dalam memberikan kode rekening atas Belanja Modal (BM). Seharusnya setiap BM harus menambah aset tetap, namun karena belanja barang yang dilakukan tidak digunakan/dimiliki untuk operasional oleh pemerintah daerah sendiri namun disumbangkan/dihibahkan kepada pihak ketiga, sehingga BM tersebut tidak menambah jumlah aset daerah.

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mengoptimalkan pengelolaan barang daerah adalah:

1. Melakukan kegiatan penataan aset;
2. Melakukan penghapusan barang daerah;
3. Melakukan instalasi program SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) di SKPD;
4. Mengikutsertakan pengelola aset dalam diklat aset daerah;
5. Menaikkan insentif pengurus barang daerah;
6. Melakukan inventarisasi dan klarifikasi aset daerah sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK.

7. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.5
Neraca Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah)

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
ASET						
ASET LANCAR	298,820,249,529.62	229,328,717,775.47	350,365,758,574.52	435,589,174,158.04	326,804,923,634.77	7.22
Kas	279,752,683,923.93	98,927,042,164.16	168,112,473,500.34	363,447,479,692.82	268,284,785,801.41	23.83
Piutang	7,662,365,785.00	123,983,640,849.00	87,097,516,436.60	21,628,924,075.79	44,404,622,613.13	379.62
Persediaan	4,196,275,304.00	3,244,022,099.31	4,429,616,594.56	6,114,987,888.33	9,557,169,475.22	27.05
Belanja dibayar dimuka	370,512,833.33	747,884,583.00	85,154,082,455.73	44,397,782,501.10	4,558,345,745.01	2812.56
INVESTASI JANGKA PANJANG	62,569,187,382.40	79,628,889,304.89	75,371,463,269.19	9,617,605,839.00	9,948,041,894.00	-15.47
Investasi Non Permanen		7,458,220,700.00	10,725,412,932.00			-14.05
Investasi Permanen	57,153,130,673.40	72,170,668,604.89	64,646,050,337.19	73,237,409,330.00	75,609,099,699.13	8.09
ASET TETAP	1,601,769,242,160.00	2,152,163,156,303.50	2,588,499,844,913.93	3,250,665,108,337.81	3,808,828,833,545.99	20.05
Tanah	260,301,727,329.00	307,137,815,988.00	343,955,816,418.00	395,834,949,097.00	423,203,641,436.00	12.99
Peralatan dan mesin	137,908,744,697.00	202,748,244,833.50	259,454,944,545.50	370,821,482,183.18	486,776,094,178.86	37.29
Gedung dan bangunan	437,347,310,197.00	475,143,172,866.00	540,276,116,084.39	730,179,554,855.55	705,655,980,390.13	13.54
Jalan, irigasi dan jaringan	490,981,801,827.00	722,670,513,769.00	785,085,792,351.20	1,051,223,299,719.44	1,470,084,510,539.04	32.39
Asset tetap lainnya	24,533,273,221.00	37,033,976,821.00	43,271,518,244.00	49,418,077,264.00	35,906,357,196.00	13.66
Konstruksi dalam pengerjaan	250,696,384,889.00	407,429,432,026.00	616,455,657,270.84	653,187,745,218.64	687,202,249,805.96	31.25
ASET LAINNYA	9,336,126,386.00	35,121,432,072.37	45,788,504,513.97	38,900,846,437.02	68,537,694,202.49	91.93
Tagihan penjualan angsuran	-	-				
Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-	-				
Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-				
Aset tak berwujud	-	15,117,049,400.00	24,052,142,150.00	22,041,561,000.00	62,189,367,671.37	58.22

Asset lain-lain	9,336,126,386.00	20,004,382,672.37	21,736,362,363.97	16,859,285,437.02	6,349,926,531.12	9.54
JUMLAH ASET	1,909,925,618,075.62	2,416,613,306,151.34	2,984,654,108,002.42	3,725,155,128,932.87	4,204,171,451,383.25	21.93
KEWAJIBAN	38,204,395,277.00	35,869,992,857.37	36,501,015,210.37	44,940,542,762.36	10,735,555,675.01	-14.34
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	38,204,395,277.00	35,869,992,857.37	36,501,015,210.37	44,940,542,762.36	10,735,555,675.01	-14.34
Utang perhitungan pihak ketiga				549,458,876.00	106,667,444.00	-20.15
Uang muka dari kas daerah						
Pendapatan diterima dimuka						
Utang jangka pendek lainnya				44,391,083,886.36	10,628,888,231.01	-19.01
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang jangka panjang						
JUMLAH KEWAJIBAN	38,204,395,277.00	35,869,992,857.37	36,501,015,210.37	44,940,542,762.36	10,735,555,675.01	-14.34
EKUITAS DANA						
EKUITAS DANA LANCAR	1,934,290,410,181.20	2,460,372,809,598.86	332,581,336,388.32	390,648,631,395.68	316,069,367,959.76	-15.23
SILPA	286,356,638,004.29	101,147,122,430.16	173,458,148,958.55	362,724,088,279.47	267,955,498,353.85	22.45
Cadangan piutang	8,032,878,618.33	124,731,525,432.00	172,251,598,892.41	66,026,706,576.89	48,962,968,358.14	350.84
Cadangan persediaan	4,196,275,304.00	3,244,022,099.31	4,429,616,594.56	6,114,987,888.33	9,557,169,475.22	27.05
Pendapatan yang ditangguhkan	234,457,603.00	206,643,358.75	226,394,129.00	173,932,537.35	222,620,003.56	0.63
Dana yang disediakan untuk hutang jangka pendek	(33,511,302,035.00)	(22,210,122,950.00)	(17,784,422,186.20)	(44,391,083,886.36)	(10,628,888,231.01)	4.98
EKUITAS DANA INVESTASI	1,668,981,462,686.40	2,253,253,607,773.39	2,690,943,319,673.12	3,372,420,969,943.83	3,962,925,269,341.61	24.32
Diinvestasikan dalam asset tetap	1,601,769,242,160.00	2,152,163,156,303.50	2,588,499,844,913.93	3,250,665,108,337.81	3,808,828,833,545.99	24.35
Diinvestasikan dalam asset lainnya	4,643,033,144.00	21,461,562,165.00	27,072,011,490.00	38,900,846,437.02	68,539,294,202.49	127.06
Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	-	-	75,371,463,269.19	82,855,015,169.00	85,557,141,593.13	3.30
JUMLAH EKUITAS DANA	3,603,271,872,867.60	4,713,626,417,372.25	3,023,524,656,061.44	3,763,069,601,339.51	4,278,994,637,301.37	8.28
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3,641,476,268,144.60	4,749,496,410,229.62	3,060,025,671,271.81	3,808,010,144,101.87	4,289,730,192,976.38	7.99

Sumber: CALK Kab. PPU

Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*).

Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang rasio cepat adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio likuiditas neraca keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Analisis Rasio Keuangan Tahun 2010 s/d 2012
Kabupaten Penajam Paser Utara**

No	Uraian	2010	2011	2012
		%	%	%
1	Rasio lancar (current ratio)	639,33	959,88	969,26
2	Rasio quick (quick ratio)	630,29	947,74	955,65
3	Rasio total hutang terhadap total aset	1,44	1,19	1,18
4	Rasio hutang terhadap modal	1,46	1,21	1,19
5	Rata-rata umur piutang	-	-	-
6	Rata-rata umur persediaan	-	-	-
7	Perputaran total aktiva (total assets turn over)			

Sumber: Neraca Penajam Paser Utara, diolah

Pada tabel 3.6 dapat terlihat bahwa rasio lancar Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun anggaran 2010 s/d 2012 sangat tinggi yakni 639,33%, 959,88% dan 969,26%. Rasio lancar ini menunjukkan bahwa Penajam Paser Utara memiliki aset yang sangat cukup untuk melunasi hutangnya. Di sisi lain, rasio cepat Kabupaten Penajam Paser Utara juga sangat tinggi. Besaran rasio cepat pada tahun anggaran 2010 s/d 2012 yakni 630,29%, 947,74% dan 955,65%. Dari angka ini dapat memperlihatkan kecepatan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam membayar atau melunasi utang lancarnya. Namun rasio lancar dan rasio cepat yang sangat tinggi dan terus naik dari tahun ke tahun juga

menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kurang efisien dalam mengelola aktiva lancar dan persediaannya. Dengan kata lain, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kesehatan keuangan yang belum baik.

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas yaitu yang menunjukkan hubungan antara kas dan asset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya.

a. Rasio Lancar

Rasio lancar adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Rasio lancar digunakan untuk mengungkapkan jaminan keamanan (margin of safety) perusahaan terhadap kreditor jangka pendek. Jika perbandingan utang lancar melebihi aktiva lancarnya (rasio lancar menunjukkan angka dibawah 1), maka perusahaan dikatakan mengalami kesulitan melunasi utang jangka pendeknya. Jika rasio lancarnya terlalu tinggi, maka sebuah perusahaan dikatakan kurang efisien dalam mengurus aktiva lancarnya.

**Tabel 3.7 Rasio Lancar Tahun 2010-2012
Kabupaten Penajam Paser Utara (Rp Juta)**

Uraian	2010	2011	2012
Aktiva Lancar	2,984,654,108,002.42	3,725,155,128,932.87	4,204,171,451,383.25
Kewajiban jangka pendek	36,501,015,210.37	44,940,542,762.36	10,735,555,675.01
Rasio lancar (aktiva lancar:kewajiban jangka pendek)	81.77	82.89	391.61

Sumber: CALK Kabupaten Penajam Paser Utara, diolah

Pada tabel 3.7 dapat terlihat bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk pada kategori kurang efisien dalam mengurus aktiva lancar termasuk didalamnya adalah kas atau uang tunai, investasi jangka pendek, piutang wesel, piutang dagang, persediaan, piutang penghasilan dan persekot atau biaya dibayar dimuka.

b. Quick Ratio

Rasio cepat adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar untuk menutupi utang lancar. Rasio ini mengindikasikan kapasitas sebuah perusahaan untuk tetap beroperasi dan bertahan dalam kondisi keuangan yang buruk. Idealnya, rasio lancar berada pada angka 1:1 atau minimal 0,8:1, kurang dari itu perusahaan dianggap tidak memiliki masalah keuangan.

**Tabel 3.8 Quick Ratio Tahun 2010-2012
Kabupaten Penajam Paser Utara (Rp Juta)**

Uraian	2010	2011	2012
Aktiva Lancar	2,984,654,108,002.42	3,725,155,128,932.87	4,204,171,451,383.25
Persediaan	4,429,616,594.56	6,114,987,888.33	9,557,169,475.22
Kewajiban Jangka Pendek	36,501,015,210.37	44,940,542,762.36	10,735,555,675.01
Quick Ratio {(aktiva lancar-persediaan):kewajiban jangka pendek)}	81.65	82.75	390.72

Sumber: CALK Kabupaten Penajam Paser Utara, diolah

2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila sekiranya perusahaan dilikuidasi.

a. Rasio total hutang terhadap total asset

Tabel 3.9 Rasio Total hutang terhadap Total Aset Tahun 2010-2012 Kabupaten Penajam Paser Utara (Rp Juta)

Uraian	2010	2011	2012
Total hutang	36,501,015,210.37	44,940,542,762.36	10,735,555,675.01
Total Aset	2,984,654,108,002.42	725,155,128,932.87	4,204,171,451,383.25
Rasio total hutang terhadap total aset (Total Hutang:Total Aset)	0.0122	0.0121	0.0026

Sumber: CALK Kabupaten Penajam Paser Utara, diolah

b. Rasio hutang terhadap Modal

Rasio hutang modal menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepala pihak luar dan merupakan rasio yang mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai dari hutang.

Tabel 3.10 Rasio Total hutang terhadap Modal Tahun 2011-2013 Kabupaten Penajam Paser Utara (Rp Juta)

Uraian	2011	2012	2013
Total hutang	36,501,015,210.37	44,940,542,762.36	10,735,555,675.01
Ekuitas dana lancar	332,581,336,388.32	390,648,631,395.68	316,069,367,959.76
Ekuitas dana investasi	2,690,943,319,673.12	3,372,420,969,943.83	3,962,925,269,341.61
Total Ekuitas (Ekuitas dana lancar+ekuitas dana investasi)	3,023,524,656,061.44	3,763,069,601,339.51	4,278,994,637,301.37
Rasio total hutang terhadap Modal Total Hutang:Total Ekuitas)	0.012	0.012	0.003

Sumber: CALK Kabupaten Penajam Paser Utara, diolah

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang

ada padanya. Aktiva yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Dana kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif.

a. Rata-rata umur piutang

Rasio ini mengukur efisiensi pengolahan piutang perusahaan, serta menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Rata-rata umur piutang ini dihitung dengan membandingkan jumlah piutang dengan penjualan perhari. Dimana penjualan perhari yaitu penjualan dibagi 360 atau 365 hari.

**Tabel 3.11 Rata-rata umur piutang Tahun 2011-2013
Kabupaten Penajam Paser Utara (Rp Juta)**

Uraian	2011	2012	2013
Saldo awal piutang	123,983,640,849.00	87,097,516,436.60	21,628,924,075.79
Saldo akhir piutang	87,097,516,436.60	21,628,924,075.79	44,404,622,613.13
Rata-rata piutang pendapatan daerah {(saldo awal piutang + saldo akhir piutang):2}	105,540,578,642.80	54,363,220,256.20	33,016,773,344.46
Pendapatan daerah	1,197,891,254,519.91	1,502,746,672,283.99	1,328,318,638,464.70
Perputaran piutang (pendapatan daerah/rata-rata piutang pendapatan daerah)	11.35	27.64	40.23
Rata-rata umur piutang (365:perputaran piutang)	32.16	13.20	9.07

Sumber: CALK Kabupaten Penajam Paser Utara, diolah

b. Rata-rata umur persediaan

Rasio perputaran persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan barang dagang. Rasio ini merupakan indikasi yang

cukup populer untuk menilai efisiensi operasional, yang memperlihatkan seberapa baiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada persediaan.

**Tabel 3.12 Rata-rata umur persediaan Tahun 2011-2013
Kabupaten Penajam Paser Utara (Rp Juta)**

Uraian	2011	2012	2013
Saldo awal persediaan	3,244,022,099.31	4,429,616,594.56	6,114,987,888.33
Saldo akhir persediaan	4,429,616,594.56	6,114,987,888.33	9,557,169,475.22
Rata-rata persediaan {(saldo awal persediaan + saldo akhir persediaan):2}	3,836,819,346.94	5,272,302,241.45	7,836,078,681.78
Nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun (Rata-rata nilai persediaan x 12 bulan)	46,041,832,163.22	63,267,626,897.34	94,032,944,181.30
Perputaran persediaan (Nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun : Rata-rata nilai persediaan)	12	12	12
Rata-rata persediaan (365:perputaran persediaan)	30.42	30.42	30.42

Sumber: CALK Kabupaten Penajam Paser Utara, diolah

c. Perputaran total aktiva

Rasio ini berguna untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan menggunakan aktiva secara efektif untuk meningkatkan pendapatan. Kalau perputarannya lambat (rendah), kemungkinan terdapat kapasitas terlalu besar atau ada banyak aktiva tetap namun kurang bermanfaat, atau mungkin disebabkan hal lain seperti investasi pada aktiva tetap yang berlebihan dibandingkan dengan nilai output yang akan diperoleh. Jadi semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif penggunaan aktiva tetap tersebut.

**Tabel 3.13 Perputaran Total Aktiva 2011-2013
Kabupaten Penajam Paser Utara (Rp Juta)**

Uraian	2011	2012	2013
Pendapatan Asli Daerah	29,357,613,834.91	37,233,206,197.99	51,204,182,224.70
Aset Tetap	2,588,499,844,913.93	3,250,665,108,337.81	3,808,828,833,545.99
Perputaran total aktiva (PAD : Aset tetap)	0.011	0.011	0.013

Sumber: CALK Kabupaten Penajam Paser Utara, diolah

3.1.3 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat criteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern.

**Tabel 3.14 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah
2010-2012 Kabupaten Penajam Paser Utara**

Tahun	Opini
2010	W D P
2011	W D P
2012	W D P

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Secara umum, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengarah pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

1. Peningkatan kemampuan dan SDM Pengelola pendapatan daerah;
2. Pemantapan kelembagaan dan system operasional pemungutasn pendapatan daerah;
3. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang

memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah, dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;

4. Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, dan SKPD Pengelola Pendapatan Daerah;
5. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah;
6. Peningkatan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan system administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
7. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
8. Peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah;
9. Penerapan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui skema kerjasama.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Merujuk pada realisasi belanja Kabupaten Penajam Paser Utara selama tiga tahun terakhir, dapat diketahui bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terus mengalami kenaikan dengan rata-rata proporsi terhadap total pengeluaran per tahun sebesar 35,10%. Namun yang perlu dicermati justru trend yang semakin meningkat sehingga pada tahun 2013 telah terealisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 40,69% dari total pengeluaran.

**Tabel 3.15 Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011-2013
(Juta rupiah)**

Uraian	2011	2012	2013
BELANJA TIDAK LANGSUNG	224,615,009,967.00	234,396,832,627.48	283,672,704,113.00
Belanja gaji dan tunjangan	147,224,706,237.00	164,843,154,870.48	176,578,604,422.00
Belanja tambahan penghasilan	73,704,858,431.00	64,812,632,194.00	102,172,381,450.00
Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	2,047,855,000.00	1,890,000,000.00	2,133,427,000.00
Belanja pemungutan pajak daerah	1,637,590,299.00	2,851,045,563.00	2,788,291,241.00
BELANJA LANGSUNG	3,100,329,305,003.42	3,869,204,064,972.87	4,369,964,562,357.25
Belanja honorarium PNS	32,038,393,050.00	29,509,390,600.00	38,196,398,650.00
Belanja uang lembur	765,846,000.00	965,139,500.00	1,049,623,600.00
Belanja beasiswa pendidikan PNS	750,000,000.00	2,259,773,800.00	1,642,449,400.00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8,965,796,400.00	12,617,989,300.00	14,175,275,400.00
Belanja premi asuransi kesehatan	633,737,300.00	633,701,000.00	614,012,000.00
Belanja makanan dan minuman pegawai	9,353,666,711.00	11,808,659,553.00	13,640,598,447.00
Belanja pakaian dinas dan atributnya	1,349,987,600.00	1,325,084,550.00	1,531,173,311.00
Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1,267,527,954.00	1,332,630,250.00	2,020,026,055.00
Belanja perjalanan dinas	60,531,731,986.00	83,596,567,487.00	92,923,554,111.00
Belanja perjalanan pindah tugas	18,510,000.00	-	-
Belanja pemulangan pegawai	-	-	-

Belanja modal (kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan, dll)	2,984,654,108,002.42	3,725,155,128,932.87	4,204,171,451,383.25
TOTAL	3,324,944,314,970.42	4,103,600,897,600.35	4,653,637,266,470.25

Tabel 3.16 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah)

Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan apartur	Total pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
2009	206,025,277,670.00	660,988,382,027.00	31.17
2010	260,289,214,290.00	817,309,783,006.73	31.85
2011	300,454,922,466.00	825,125,305,525.50	36.41
2012	331,190,316,615.48	935,523,416,347.59	35.40
2013	411,582,148,428.00	1,011,505,079,962.32	40.69

Tabel 3.17 Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah)

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012
A	Belanja Tidak Langsung				
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	99.900.920.215,00	121.979.109.069	147.224.706.237,00	164.843.154.870,48
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	55.758.393.490,00	73.280.548.686,00	73.704.858.431,00	64.812.632.194,00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.040.243.500,00	2.000.123.800,00	2.047.855.000,00	1.890.000.000,00
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	2.497.506.002,00	2.501.921.725,00	1.637.590.299,00	2.851.045.563,00
B	Belanja Langsung				
1	Belanja Honorarium PNS**)	22.244.455.650,00	22.435.938.900,00	32.038.393.050,00	29.509.390.600,00
2	Belanja Uang Lembur**)	639.514.963,00	661.752.000,00	765.846.000,00	965.139.500,00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	3.382.850.810,00	905.300.000,00	750.000.000,00	2.259.773.800,00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	10.477.655.000,00	10.208.962.000,00	8.965.796.400,00	12.617.989.300,00

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012
5	Belanja premi asuransi kesehatan	1.018.825.000,00	1.373.427.500,00	633.737.300,00	633.701.000,00
6	Belanja makanan dan minuman pegawai****)	1.579.223.750,00	517.464.000,00	674.500.000,00	823.653.800,00
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	1.470.017.750,00	1.864.235.960,00	1.349.987.600,00	1.325.084.550,00
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	582.570.500,00	1.954.272.300,00	1.267.527.954,00	1.332.630.250,00
9	Belanja perjalanan dinas**)	50.186.887.500,00	53.257.991.928,00	60.531.731.986,00	83.596.567.487,00
10	Belanja perjalanan pindah tugas	20.640.000,00	25.690.000,00	18.510.000,00	-
11	Belanja Pemulangan Pegawai	0	0	0	0
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	112.504.431.657,00	100.842.140.482,00	202.956.189.728,52	117.071.692.806,00
	TOTAL	364.304.135.787,00	393.808.878.350,00	534.567.229.985,52	484.532.455.720,48

Sumber : Bagian Keuangan Setkab Penajam Paser Utara

3.2.2 Analisa Pembiayaan

Periode tahun 2011 – 2013 mencatat bahwa kondisi pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selalu mengalami defisit. Secara keseluruhan, pembiayaan daerah terus membaik.

Tabel 3.18 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011-2013 (Rp juta)

No	Uraian	2011	2012	2013
1	Pendapatan	1,197,891,254,519.91	1,502,746,672,283.99	1,328,318,638,464.70
	Dikurangi realisasi:			
2	Belanja daerah	3,324,944,314,970.42	4,103,600,897,600.35	4,653,637,266,470.25
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	534,567,229,985.52	484,532,455,720.48	-
	Defisit Riil	(2,661,620,290,436.03)	(3,085,386,681,036.84)	(3,325,318,628,005.55)

**Tabel 3.19 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 s/d 2012
Kabupaten Penajam Paser Utara (Rp juta)**

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	233.544	483.815	286.356	101.147	173.458
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	483.815	286.356	101.147	173.458	362.724

Sumber : BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara

Pada tahun anggaran 2008 terlihat bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) cukup besar yakni 483.815.372.507,00 Sedangkan pada tahun anggaran 2012, terdapat surplus Silpa sebesar 362.724.088.279,00. Adanya sisa lebih pembiayaan anggaran menunjukkan pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sangat baik. Namun, adanya Silpa yang tinggi justru mengindikasikan buruknya kinerja pengelolaan keuangan daerah. Tingginya Silpa membuktikan bahwa penyerapan anggaran di daerah itu sangat rendah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran yakni lemahnya perencanaan program, kinerja birokrasi yang menurun serta upaya kesengajaan untuk memperbesar Silpa.

**Tabel 3.20 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 (Rp juta)**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	233.544	483.815	286.356	101.147	173.458
a	Pelampauan penerimaan PAD	0	0	0	0	0
b	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	0	0	0	0	0
c	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0	0	0	0	0
d	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	0	0	0	0	0
e	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0
f	Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	0

3.3 Kerangka Pendanaan

Pada bagian kerangka pendanaan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan

Analisis terhadap pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu

1. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
2. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
3. Kebijakan dibidang keuangan negara

Tabel 3.21
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2014 – 2018

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Asli Daerah	43.516.452.959	48.850.317.858	54.837.961.106	61.559.517.115	69.104.942.471
Hasil Pajak Daerah	5.229.648.584	5.870.653.012	6.590.226.137	7.397.998.220	8.304.779.916
Hasil Retribusi Daerah	3.215.529.788	3.609.661.209	4.052.101.802	4.548.772.879	5.106.321.538
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.619.244.869	7.430.573.814	8.341.348.340	9.363.757.615	10.511.484.847
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	28.452.029.718	31.939.429.823	35.854.284.827	40.248.988.401	45.182.356.170
Dana Perimbangan	1.301.523.031.029	1.461.052.301.883	1.640.135.270.714	1.841.168.658.216	2.066.842.954.070
Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	1.110.372.483.296	1.246.472.197.565	1.399.253.820.384	1.570.762.073.703	1.763.292.303.540
Dana Alokasi Umum	189.757.376.435	213.016.170.310	239.125.823.017	268.435.767.811	301.338.268.412
Dana Alokasi Khusus	1.393.171.297	1.563.934.008	1.755.627.314	1.970.816.702	2.212.382.118
Lain-lain Pedapatan Daerah Yang Sah	341.900.687.138	383.807.872.814	430.851.673.530	483.661.690.476	542.944.695.834
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-
Bagi Hasi Pajak Dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	92.462.774.997	103.796.050.494	116.518.459.440	130.800.269.621	146.832.618.755
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	25.200.595.169	28.289.462.962	31.756.937.061	35.649.423.704	40.019.017.199
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	224.237.316.971	251.722.359.358	282.576.277.029	317.211.997.151	356.093.059.879
JUMLAH	1.686.940.171.125	1.893.710.492.555	2.125.824.905.350	2.386.389.865.807	2.678.892.592.374

(2) Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

**Tabel 3.22 Proyeksi Pembiayaan 2014 – 2018
(Juta Rp)**

Uraian	Tahun Dasar 2012	PROYEKSI				
		2014	2015	2016	2017	2018
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	362.724.088.279	262.762.337.911	240.987.546.238	216.106.927.055	187.841.389.459	155.891.738.633
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah Dan Obligasi	0	0	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0	0
Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0

3.3.2 Proyeksi belanja wajib dan mengikat

**Tabel 3.23 Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat
(Rp Juta)**

	Uraian	Tahun 2012	Rata-rata pertumbuh an	Nilai Pertumbuh an per Tahun	Tahun (n+1) 2013	Tahun (n+2) 2014	Tahun (n+3) 2015	Tahun (n+4) 2016	Tahun (n+5) 2017
A	Belanja tidak langsung	234396	13.87%	32510.73	266906.7252	299417.45	331928.176	364438.9008	396949.626
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	164183	18.25%	29963.4	194146.3975	224109.795	254073.193	284036.59	313999.988
2	Belanja Tambahan Penghasilan	64812	6.78%	4394.254	69206.2536	73600.5072	77994.7608	82389.0144	86783.268
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH*	1890	-2.42%	-45.738	1844.262	1798.524	1752.786	1707.048	1661.31
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah	2851	13.26%	378.0426	3229.0426	3607.0852	3985.1278	4363.1704	4741.213

	Uraian	Tahun 2012	Rata-rata pertumbuhan	Nilai Pertumbuhan per Tahun	Tahun (n+1) 2013	Tahun (n+2) 2014	Tahun (n+3) 2015	Tahun (n+4) 2016	Tahun (n+5) 2017
B	Belanja langsung	250130	11.84%	29615.39	279745.392	309360.784	338976.176	368591.568	398206.96
1	Belanja Honorarium PNS	29509	11.92%	3517.473	33026.4728	36543.9456	40061.4184	43578.8912	47096.364
2	Belanja Uang Lembur	965	15.103%	145.744	1110.74395	1256.4879	1402.23185	1547.9758	1693.71975
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2259	37.02%	836.2818	3095.2818	3931.5636	4767.8454	5604.1272	6440.409
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	12617	8.67%	1093.894	13710.8939	14804.7878	15898.6817	16992.5756	18086.4695
5	Belanja premi asuransi kesehatan	633	-6.34%	-40.1322	592.8678	552.7356	512.6034	472.4712	432.339
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	823	-4.93%	-40.5739	782.4261	741.8522	701.2783	660.7044	620.1305
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1325	-0.86%	-11.395	1313.605	1302.21	1290.815	1279.42	1268.025
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1332	68.57%	913.3524	2245.3524	3158.7048	4072.0572	4985.4096	5898.762
9	Belanja perjalanan dinas	83596	19.28%	16117.31	99713.3088	115830.618	131947.926	148065.2352	164182.544
10	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	117071	16.194%	18958.48	136029.4777	154987.955	173946.433	192904.911	211863.389
	TOTAL	484532	11.49%	55672.73	540204.7268	595877.454	651550.18	707222.9072	762895.634

Sumber: APBD Penajam Paser Utara, diolah

Keterangan: *Nilai yang tertuang pada proyeksi maupun matriks program dan pendanaan sifatnya adalah Pagu Indikatif yang suatu saat bisa berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Pada tabel 3.23 dapat terlihat secara umum belanja pegawai mengalami peningkatan baik pada sektor belanja langsung dan sektor belanja tidak langsung. Walaupun rata-rata pertumbuhan sektor belanja tidak langsung mengalami penurunan pada tahun anggaran 2011-2012, tetapi rata-rata pertumbuhan pada tahun

anggaran 2009 sampai dengan 2012 tetap menunjukkan hasil yang positif. Rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung adalah 13.87% atau kira-kira sebesar Rp 32.510.730.000 per tahun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja langsung adalah 11.84% atau kira-kira sebesar Rp 29.615.390.000 per tahun. Peningkatan belanja aparatur baik pada sektor belanja langsung dan belanja tidak langsung menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara belum mampu meningkatkan efisiensi pembelanjaan pada pos belanja aparatur. Aneka penghematan harus dilakukan, seperti pengurangan belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan, belanja honorarium PNS, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja perjalanan dinas dan belanja modal. Terutama karena beberapa instrumen tersebut tidak berkorelasi langsung dengan peningkatan produktivitas birokrasi publik. Jika pengeluaran belanja aparatur dapat dibuat lebih efisien, maka hal ini dapat mengurangi defisit anggaran keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara. Di sisi lain, efisiensi belanja aparatur dapat memberikan keleluasaan bagi pemerintah Kabupaten penajam Paser Utara untuk mampu mengalokasikan pendapatan pada hal yang lebih penting seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat. Postur APBD demikian tidak mampu mendukung program pemerintah yang seharusnya lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan.

(3) Proyeksi sisa Lebih riil Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Berdasarkan perhitungan pada Tabel berikut maka dapat di proyeksikan besaran SiLPA dari tahun 2013-2018 setiap tahunnya. Dilihat pada tabel di bawah ini bahwa di tahun 2012 pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai SiLPA sebesar Rp 362.724.088.279,- sedangkan pada tahun 2014

mempunyai SiLPA sebesar Rp 262.762.337.911,- seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.24

Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Tahun 2014 – 2018						
Uraian	Tahun Dasar 2012	PROYEKSI				
		2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan		1,686,940,171,125.00	1,893,710,492,555.00	2,125,824,905,350.00	2,386,389,865,807.00	2,678,892,592,374.00
Pencairan dana cadangan		0	0	0	0	0
Sisa lebih riil perhitungan anggaran		262,762,337,911.00	240,987,546,238.00	216,106,927,055.00	187,841,389,459.00	155,891,738,633.00
Total penerimaan		1,949,702,509,036.00	2,134,698,038,793.00	2,341,931,832,405.00	2,574,231,255,266.00	2,834,784,331,007.00
Dikurangi :						
Belanja dan pengeliatan pembiayaan yang wajib dan mengikat		595,877,454,000.00	651,550,180,000.00	707,222,907,200.00	762,895,634,000.00	-
Kapasitas riil kemampuan keuangan		1,353,825,055,036.00	1,483,147,858,793.00	1,634,708,925,205.00	1,811,335,621,266.00	2,834,784,331,007.00

Tabel 3.25

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No	Uraian	PROYEKSI				
		2014	2015	2016	2017	2018
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1,353,825,055,036.00	1,483,147,858,793.00	1,634,708,925,205.00	1,811,335,621,266.00	2,834,784,331,007.00
	Rencana alokasi prioritas I dan II					
II	Belanja langsung seluruh bidang urusan	309,360,784,000.00	338,976,176,000.00	368,591,568,000.00	398,206,960,000.00	-
II.a	Jumlah prioritas I	1,353,825,055,036.00	1,483,147,858,793.00	1,634,708,925,205.00	1,811,335,621,266.00	2,834,784,331,007.00
II.b	Sisa belanja langsung untuk prioritas II (II-II.a)	(1,044,464,271,036.00)	(1,144,171,682,793.00)	(1,266,117,357,205.00)	(1,413,128,661,266.00)	(2,834,784,331,007.00)
III	Pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	595,877,454,000.00	651,550,180,000.00	707,222,907,200.00	762,895,634,000.00	-
IV	Jumlah prioritas III (I-II-III)	448,586,817,036.00	492,621,502,793.00	558,894,450,005.00	650,233,027,266.00	2,834,784,331,007.00
	Surplus anggaran riil atau berimbang (I-II-III-IV)	-	-	-	-	-

Tabel 3.26

**Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2014-2017
Kabupaten Penajam Paser Utara**

No	Uraian	PROYEKSI			
		2014	2015	2016	2017
I	Total penerimaan	1,949,702,509,036.00	2,144,672,759,939.60	2,359,140,035,933.56	2,595,054,039,526.92
II	Belanja langsung (IIa+IIb)	1,663,185,839,036.00	1,822,124,034,793.00	2,003,300,493,205.00	2,209,542,581,266.00
IIa	Belanja langsung seluruh bidang urusan (prioritas I dan II)	1,353,825,055,036.00	1,483,147,858,793.00	1,634,708,925,205.00	1,811,335,621,266.00
IIb	Belanja langsung wajib dan mengikat	309,360,784,000.00	338,976,176,000.00	368,591,568,000.00	398,206,960,000.00
III	Belanja tidak langsung (IIIa+IIIb)	748,004,267,036.00	331,928,176,000.00	364,438,900,800.00	396,949,626,000.00
IIIa	Belanja tidak langsung (prioritas III)	448,586,817,036.00	492,621,502,793.00	558,894,450,005.00	650,233,027,266.00
IIIb	Belanja tidak langsung wajib dan mengikat	299,417,450,000.00	331,928,176,000.00	364,438,900,800.00	396,949,626,000.00
IV	Pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	595,877,454,000.00	651,550,180,000.00	707,222,907,200.00	762,895,634,000.00
V	Surplus/defisit (I-II-IV)	(1,057,365,051,036.00)	(660,929,630,853.40)	(715,822,265,271.44)	(774,333,801,739.08)

BAB IV

ANALISIS ISU STRATEGIS

Untuk sampai pada isu strategis Kabupaten Penajam Paser Utara, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi di wilayah Penajam Paser Utara dari berbagai aspek. agar dapat diperoleh kesinambungan dan keterkaitan antar sektor maupun antar instansi maka pembahasan dalam bab IV ini disusun berdasar kelompok masalah yang dihadapi. Dengan cara ini persoalan yang dianalisis dapat bersifat menyeluruh dan makro sesuai dengan tujuan penyusunan RPJMD itu sendiri yakni menyelesaikan urusan kabupaten untuk lima tahun kedepan. Sesuai dengan panduan Permendagri Nomor 54, pembahasan dilakukan berdasar fokus kajian yakni fokus kesejahteraan, fokus pelayanan dan fokus daya saing. Bagian 4.1 mendiskusikan masalah untuk masing-masing kelompok dan 4.2 menyajikan isu strategis yang muncul dari masing-masing kelompok masalah. Analisis masalah dan isu strategis tentunya melibatkan isu di luar Penajam Paser Utara yang berpengaruh terhadap Penajam Paser Utara. Bab 4.3 menyajikan Isu strategis eksternal. Bagian 4.4 menyajikan analisis SWOT makro dan 4.5 menyajikan Road MAP RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara.

4.1. Permasalahan Pembangunan

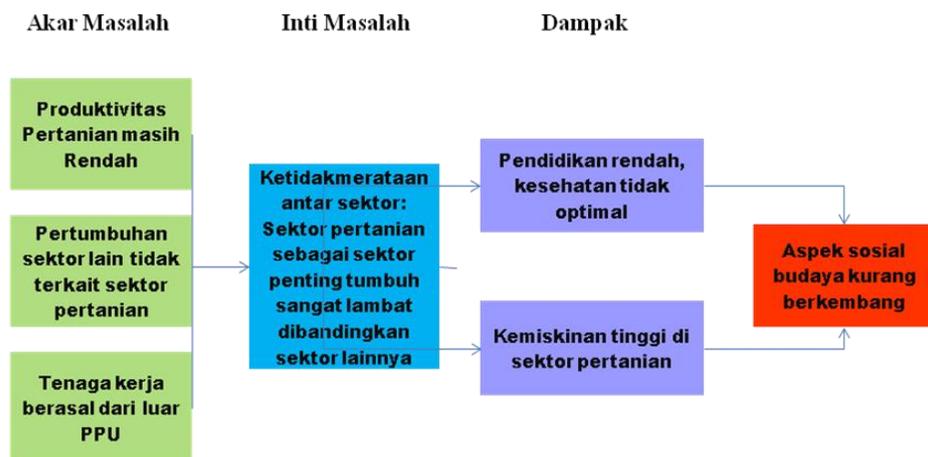
Analisis permasalahan dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasar analisis pada Bab II dan Bab III, terdapat sejumlah masalah yang muncul dalam proses pembangunan yang dilakukan

di wilayah Penajam Paser Utara. Berikut diuraikan permasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Penajam Paser Utara.

A. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Sebagaimana dijelaskan pada bab II bagian aspek kesejahteraan masyarakat, kondisi perekonomian Penajam Paser Utara selama 5 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun demikian masih terdapat beberapa persoalan yang harus mendapat perhatian. Dari data yang ditampilkan dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Penajam Paser Utara selama 5 tahun terakhir cukup tinggi baik untuk pertumbuhan PDRB dengan migas maupun nonmigas (lihat gambar 2.5). Pertumbuhan yang dicapai Penajam Paser Utara jauh lebih tinggi dari yang dicapai oleh Propinsi Kalimantan Timur maupun pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian terdapat masalah penting yang tampak dari analisis tersebut yakni terjadinya ketimpangan yang cukup menyolok antar golongan masyarakat dan antar sektor. Masalah pemerataan ekonomi yang dapat dideteksi itu dapat digambarkan dalam gambar 4.1.

Gambar 4.1. Analisis permasalahan pemerataan Ekonomi



1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Dari gambar 4.1 tersebut dapat dijelaskan bahwa persoalan utama pemerataan pembangunan di wilayah Penajam Paser Utara adalah kurang meratanya sektor yang berkembang. Sektor pertanian sebagai sektor yang menyerap penduduk terbesar dan penyumbang PDRB ke dua tertinggi (**lihat tabel 2.11**), tetapi pertumbuhannya sangat rendah dibandingkan dengan sektor lainnya (**lihat tabel 2.10**). Penyebab dari hal tersebut adalah karena sektor lain yang tumbuh (industri, perdagangan, jasa) tidak terkait dengan sektor pertanian tetapi sektor pertambangan yang merupakan penyumbang PDRB tertinggi. Tidak berkembangnya sektor pertanian disebabkan karena kinerja sektor pertanian yang tidak cukup baik. Dari evaluasi terhadap RPJMD periode sebelumnya diketahui bahwa peningkatan produksi padi yang ditargetkan lebih dari 10% selama 5 tahun hanya tercapai 2,5%, sementara perkebunan hanya kelapa sawit yang target produksinya tercapai, sementara yang lain justru ada yang mengalami penurunan (**Evaluasi RPJMD PPU, 2012**). Aspek lain yang menjadi akar masalah dari kesenjangan sektoral itu adalah bahwa tidak banyak generasi muda yang tertarik di sektor pertanian sehingga pengembangan (inovasi) di sektor ini menjadi lemah. Akibat dari keadaan ini maka pendapatan mereka yang bergerak di pertanian lebih rendah dari sektor lain. Selanjutnya, kemiskinan di sektor pertanian jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Kemiskinan yang tinggi di sektor ini berdampak pada kinerja pendidikan dan kesehatan yang kurang baik pula. Data menunjukkan bahwa kinerja pendidikan di wilayah pedesaan yang merupakan basis pertanian lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perkotaan (**lihat tabel 2.18**).

Dari analisis masalah tersebut muncul isu strategis untuk pemerataan ekonomi yang harus diatasi yaitu kesenjangan antar sektor dan lemahnya sektor pertanian yang disebabkan oleh rendahnya produktivitas pertanian. Isu strategis lain untuk pemerataan pembangunan adalah banyaknya tenaga kerja berkerja di sektor non pertanian (terdidik) yang berasal dari luar daerah.

Untuk mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar sektor maka sektor pertanian perlu didorong dalam peningkatan produktifitas yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana dibidang pertanian, peningkatan SDM bidang pertanian, pemanfaatan teknologi pertanian, sedangkan pertumbuhan sektor lainnya seperti perdagangan, industri dan jasa harus mendukung sektor pertanian.

Selain itu dengan besarnya serapan tenaga kerja di sektor pertanian yang saat ini terfokus hanya pada proses produksi pertanian, maka perlu dikembangkan industri rumah tangga dan industri skala besar dibidang pengolahan hasil pertanian sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang ada disektor pertanian.

2. Kesejahteraan Sosial

Persoalan kesenjangan antar sektor yang tinggi itu berdampak pada aspek kesejahteraan sosial yang kurang maksimal. Mengacu pada indikator IPM sebagai indikator kesejahteraan maka pada aspek pendidikan, angka melek huruf yang dicapai pada tahun 2011 baru mencapai 95,57 sedikit lebih rendah dari rata-rata Kalimantan Timur yang mencapai angka 97,26. Demikian juga dengan angka rata-rata lama sekolah yang

tahun 2011 baru mencapai 7,68 tahun sementara Kalimantan Timur telah mencapai angka 9,19 tahun (**lihat tabel 2.14**).

Pada aspek kesehatan, komponen utama pembentuk IPM yakni rata-rata angka harapan hidup di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan kinerja yang cukup baik. Jika tahun 2008 angka harapan hidup yang dicapai adalah 67 tahun, maka pada tahun menjadi 72,7 tahun.

3. Seni Budaya dan Olah Raga

Dampak selanjutnya dari pembangunan sosial adalah kondisi seni dan budaya masyarakat. Dari analisis yang telah dilakukan pada bab II dan dokumen evaluasi RPJMD yang telah dilakukan, teridentifikasi beberapa persoalan terkait aspek ini.

Pada aspek olahraga, menggunakan kinerja prestasi olah raga, capaian Penajam Paser Utara selama 5 tahun sebelumnya tidak cukup baik. Dari 90 cabang yang ditargetkan berprestasi hanya dapat dicapai 54 cabang. Buruknya kinerja ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana olah raga yang ada dan rendahnya partisipasi anak muda pada olah raga. Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dibangun, hingga akhir tahun 2012 hanya 5 unit dari 385 unit yang ditargetkan. Konsentrasi dan prioritas yang terletak pada pengadaan peralatan olahraga membuat pembangunan sarana dan prasaran tidak tersentuh. Selama 5 tahun keterlibatan pemuda pada kegiatan ini hanya meningkat dengan 1% dari yang ditargetkan 30%. Lemahnya keterlibatan pemuda disebabkan karena kurangnya program yang mendorong munculnya keterlibatan itu (Evaluasi RPJMD 2012).

Berbeda dengan keolahragaan yang kurang berhasil, pada aspek seni dan budaya, kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hampir seluruh indikator yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian capaian itu hampir seluruhnya menumpuk di tahun terakhir RPJMD, ini mengindikasikan kurang baiknya perencanaan yang dibuat, baik perencanaan program kegiatan maupun perencanaan penganggaran (**Evaluasi RPJMD 2012**).

B. Aspek Pelayanan Umum

Dalam Permendagri nomor 54 diamanatkan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan (lihat lampiran 1 Permendagri nomor 54). Berbagai urusan tersebut dianalisis dalam beberapa kelompok permasalahan agar diperoleh permasalahan pembangunan kabupaten Penajam Paser Utara yang komprehensif. Melalui analisis terhadap data Bab II dan III, terdapat 10 kelompok urusan yang menjadi fokus analisis masalah yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial, pelayanan, pertanian, kehutanan, pekebunan dan perindustrian serta pertambangan.

1. Pendidikan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II bagian pendidikan, Angka partisipasi kasar maupun angka partisipasi murni pada semua jenjang pendidikan tahun 2012 mengalami penurunan. Rendahnya angka partisipasi sekolah (APS) pada tingkat SMP dan SMA serta angka partisipasi masyarakat (APM) tingkat SMP dan SMA (**lihat tabel 2.17**), mengindikasikan suatu persoalan tersendiri bahwa akses masyarakat PPU terhadap pelayanan pendidikan masih rendah. Selain kedua indikator

tersebut sebenarnya masih terdapat dua indikator lainnya yang dapat menunjukkan permasalahan akses terhadap layanan pendidikan di Penajam Paser Utara, yaitu angka putus sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Data terkait dua indikator tersebut sayangnya tidak tersedia, namun secara kualitatif keduanya merupakan persoalan nyata yang dapat dijumpai di masyarakat Penajam Paser Utara (**informasi FGD**). APM pada tingkat SD di Penajam Paser Utara sudah cukup tinggi sementara APM untuk tingkat SMP dan SMA masih dapat dikatakan rendah. Ini menunjukkan sebuah indikasi kuat bahwa masih banyak warga Penajam Paser Utara yang tidak melanjutkan ataupun putus sekolah terutama pada tingkat pendidikan menengah. Indikasi ini juga diperkuat dengan masih rendahnya angka partisipasi sekolah menengah dibandingkan dengan angka partisipasi sekolah dasar (**lihat tabel 2.18**). Rumitnya masalah pendidikan di PPU digambarkan oleh gambar 4.2.

Gambar 4.2 Permasalahan Pendidikan di Kabupaten PPU



Ketersediaan fasilitas layanan pendidikan bukan menjadi penyebab utama rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan. Ini terlihat dari rasio jumlah penduduk usia sekolah SD/SMP/SMA dengan bangunan gedung sekolah yang tersedia sudah dapat dikatakan ideal. Hanya saja kondisi dari fasilitas pendidikan menyebabkan proses belajar mengajar terganggu. Masih banyak gedung sekolah dalam kondisi tidak baik (buruk) dan perlu peningkatan dengan melakukan perbaikan gedung sekolah. Begitu pula kondisi ruang kelas masih banyak yang perlu diperbaiki baik lantai, dinding maupun atapnya termasuk kursi dan meja belajar **(informasi FGD)**. Disamping itu terdapat cukup banyak fasilitas belajar yang kurang berfungsi akibat dari tiadanya infrastruktur pendukungnya. Misalnya terdapat bantuan dari pemerintah pusat untuk laboratorium, namun lab ini kurang berfungsi sebab kebutuhan lab akan listrik yang tinggi tidak dapat dipenuhi oleh Penajam Paser Utara yang fasilitas listriknya masih kurang baik.

Kondisi geografis dan infrastruktur yang belum memadai juga merupakan salah satu penyebab rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan. Letak sekolah yang jauh dari pemukiman penduduk desa, belum banyaknya transportasi umum dan infrastruktur jalan yang belum memadai menyebabkan masyarakat sulit menjangkaunya. Kondisi ini mengakibatkan terbatasnya pilihan anak usia SMP/SMA untuk bersekolah **(informasi FGD)**.

Penyebab rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih penting untuk diperhatikan adalah terkait dengan

kemampuan ekonomi masyarakat. Ini terindikasi dari masih tingginya persentase penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu sebesar 10,47% (2010). Keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas cenderung lebih memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih pokok, yaitu pangan, sandang, dan papan, sementara kebutuhan pendidikan anak menjadi kurang diperhatikan. Sebagian besar anak usia sekolah dari kalangan keluarga tidak mampu cenderung lebih memilih bekerja untuk mendapatkan penghasilan (uang) daripada melanjutkan sekolah. Semula persoalan ini lebih terkait dengan ketidakmampuan ekonomi keluarga, namun dalam perkembangannya telah menjadi persoalan sosiokultural yaitu fenomena pekerja anak yang banyak dijumpai terutama di kawasan pelabuhan atau dermaga yang telah dianggap sebagai sesuatu yang wajar, biasa terjadi, dan bukan sebuah permasalahan (**Evaluasi RPJMD 2012**).

Disamping akses masyarakat terhadap pendidikan yang masih rendah, kualitas tenaga pendidik juga menjadi persoalan tersendiri bagi Penajam Paser Utara. Apabila dilihat rasio guru terhadap siswa yang rata-rata tiap guru membawahi 17 siswa sudah dapat dikatakan mendekati ideal, namun jumlah guru yang memiliki kompetensi masih sedikit.

Aspek-aspek diatas mengakibatkan kualitas pendidikan di kabupaten Penajam Paser Utara kurang merata. Bagi masyarakat yang kemampuan ekonomi terbatas cenderung memilih bekerja daripada sekolah dan bagi masyarakat yang mampu cenderung menyekolahkan anaknya ke sekolah yang lebih baik di perkotaan atau di luar PPU (**informasi FGD**).

2. Kesehatan

Seperti yang diamanatkan oleh UU No 23 tahun 1992 tentang kesehatan, Kabupaten Penajam Paser Utara berupaya mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan dapat tercapai oleh masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang mudah, merata dan murah semakin meningkat. Akan tetapi, saat ini usaha tersebut masih terhambat oleh beberapa persoalan, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 4.3.

Gambar 4.3 Problema Sektor Kesehatan di Wilayah PPU



Ketersediaan fasilitas pelayanan menjadi salah satu permasalahan utama di Penajam Paser Utara. Seperti yang diinformasikan oleh **tabel 2.23**, sarana dan prasarana kesehatan di Penajam Paser Utara selama periode 2006-2012 menunjukkan kinerja yang menurun. Rasio penduduk terhadap jumlah Puskesmas dan Puskesmas Keliling meningkat dari 12.169 penduduk per sarana kesehatan di tahun 2008 menjadi 13.952

penduduk per sarana kesehatan. Kondisi ini terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan penambahan sarana kesehatan yang memadai. Seperti yang ditunjukkan oleh tabel 2.5 selama periode 2008-2012 penduduk bertambah secara konstan dengan 2,69 % rata-rata per tahun, sementara jumlah pukesmas fluktuatif. Selama periode 2007 hingga 2012 jumlah puskesmas berturut-turut adalah 30 (2007 hingga 2009), 44 (2010), dan 39 (2011-2012).

Selain ketersediaan sarana kesehatan, kabupaten Penajam Paser Utara juga memiliki permasalahan pada tenaga kesehatan. Hampir semua jenis tenaga paramedis mengalami kekurangan dibandingkan jumlah ideal per 100.000 penduduk. Sebagai contoh untuk tenaga dokter umum, perbandingan ideal setiap dokter umum mestinya melayani 2.500 penduduk tetapi di Penajam Paser Utara satu dokter umum melayani 11.805 per 100.000 dokter melayani 40 pasien, tetapi di Penajam Paser Utara melayani 60 pasien. Untuk dokter Spesialis satu dokter idealnya melayani 9.090 orang, tetapi di Penajam Paser Utara harus melayani 30.694 orang pasien. Kurangnya tenaga paramedis ditambah wilayah yang luas menjadikan jangkauan tenaga paramedis ini menjadi semakin sempit.

Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan masih ditambah dengan persoalan kesadaran masyarakat yang relatif rendah dalam menjalankan perilaku hidup sehat. Kesadaran yang rendah itu bermula dari relatif rendahnya pengetahuan penduduk akan perilaku hidup sehat, yang semua itu bermula dari kemiskinan yang menjerat mereka. Masalah ini menjadi semakin rumit ketika infrastruktur untuk menjangkau wilayah yang luas itu kurang tersedia. Ketersediaan infrastruktur

ini semakin membatasi jangkauan pelayanan kesehatan kepada penduduk yang paling membutuhkan (**informasi FGD**).

Berbagai persoalan diatas bermuara pada rendahnya mutu hidup bayi di Penajam Paser Utara (**lihat tabel 2.25**). Jika pada tahun 2009 capaian kelangsungan hidup bayi berada pada angka 2.957, maka pada tahun 2012 menurun menjadi 846, atau turun hingga lebih sepertiga capaian tahun 2009. Sedangkan pada angka kematian bayi pada 1000 kelahiran, Penajam Paser Utara berhasil mencapai angka sebesar 2 kematian/1000 kelahiran pada tahun 2009. Tetapi, pada tahun 2012 capaian tersebut meningkat menjadi 6 kematian/1000 kelahiran. Angka ini menjadikan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai wilayah penyumbang kematian bayi terbesar di Provinsi Kalimantan Timur.

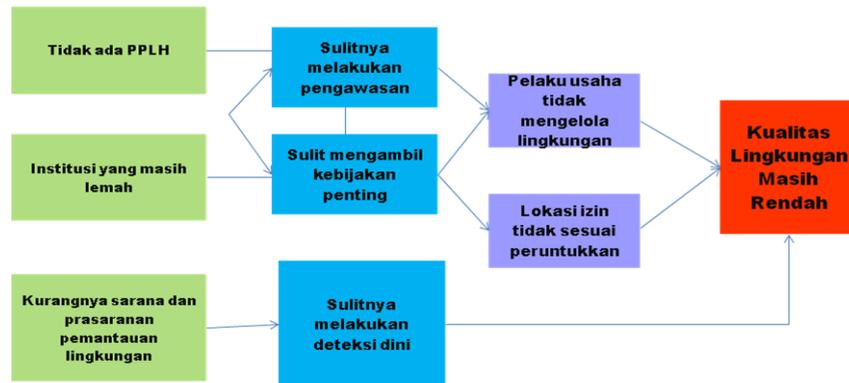
Analisis yang telah dilakukan menghasilkan isu strategis bidang kesehatan yakni masih tingginya angka kematian bayi yang disebabkan oleh rendahnya jangkauan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga paramedis serta rendahnya pengetahuan masyarakat akan perilaku hidup sehat. Persoalan ini diperburuk oleh ketersediaan transportasi publik yang sangat minim menjadikan jangkauan pelayanan kesehatan menjadi semakin terbatas.

3. Lingkungan Hidup

Sebagai wilayah yang sedang mengalami perkembangan, Penajam Paser Utara menghadapi sejumlah permasalahan lingkungan hidup. Kehadiran perusahaan di satu sisi membantu pertumbuhan dan pembangunan Penajam Paser Utara, namun di sisi lain berpotensi merusak lingkungan sekitar. Tantangan dalam

mengelola perusahaan terkait upaya pelestarian lingkungan hidup dapat dilihat pada gambar 4.4.

Gambar 4.4 Permasalahan Lingkungan Hidup di Wilayah PPU



Meningkatnya jumlah penduduk dan industri di wilayah Penajam Paser Utara penting untuk dikendalikan agar tidak berdampak negatif bagi lingkungan hidup. Akan tetapi, kondisi faktual menunjukkan bahwa kualitas lingkungan di wilayah Penajam Paser Utara buruk. Sungai tercemar limbah perusahaan, hutan konservasi rusak akibat pembukaan lahan besar-besaran untuk pertambangan dan pelabuhan, hingga rusaknya 6000 hektar hutan mangrove merupakan persoalan lingkungan yang sedang dihadapi Kabupaten Penajam Paser Utara. Indikator dari buruknya lingkungan itu dapat dideteksi dari luasnya lahan kritis sebesar 293.840,23 kilometer persegi, pemukiman yang kurang tertata, pengelolaan sampah yang kurang, ketersediaan air bersih untuk penduduk.

Jika dicermati, persoalan lingkungan yang sedang dihadapi Kabupaten Penajam Paser Utara berawal dari dua hal, yakni belum tersedianya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan lemahnya pemerintah sebagai sebuah institusi dalam menjaga kualitas lingkungan. Hingga 2012, Kabupaten Penajam Paser

Utara hanya memiliki 1 PPLH, oleh karenanya, survei lapangan untuk mengukur kualitas lingkungan dilaksanakan dengan meminta PPLH provinsi. Hal ini membuat Kabupaten Penajam Paser Utara tidak leluasa dalam melakukan pengawasan lingkungan mengingat Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebutuhan yang sama. Akibatnya, seperti yang telah diinformasikan pada Bab II di atas, pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara baru mampu mengawasi 23 dari 35 perusahaan yang ada, atau 65,71% dari total perusahaan keseluruhan. Dari segi lingkungan, dari 16 sungai, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara baru berhasil mengawasi 10 sungai.

Tiadanya pengawasan dari pemerintah dan sulitnya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam membuat dan melaksanakan kebijakan membuat perusahaan berhasil menghindar dari kewajiban pengelolaan lingkungan, bahkan ada yang menyelewengkan ijin usaha yang dimiliki. Sampai beberapa waktu lalu, media lokal banyak memberitakan ketidakmampuan dan ketidaksesuaian penggunaan ijin usaha sejumlah perusahaan dalam mengelola sumber daya alam. Ini dapat dimisalkan pada PT Pasir Prima Coal Indonesia yang meninggalkan lokasi pertambangan tanpa melakukan kewajiban reklamasi, PT Singlurus yang membangun tempat penumpukan batu bara dekat dengan bibir Sungai Sekambing sehingga terjadi pencemaran lingkungan, atau PT Pelindo dan PT Dermaga yang merusak Hutan Mangrove sehingga satwa dilindungi terancam punah.

Dua kelemahan itu masih ditambah dengan tiadanya sarana pemantau lingkungan. Sesungguhnya upaya untuk memaksa perusahaan tambang melakukan rehabilitasi telah dilakukan melalui upaya penentuan dan penetapan Dana Jaminan

Reklamasi yang harus disetorkan kepada rekening pemerintah daerah. Namun demikian terdapat kenyataan bahwa perusahaan yang telah menempatkan dana reklamasi itu justru lebih sering meninggalkan lokasinya tanpa reklamasi karena merasa telah memberikan jaminan. Hal ini terjadi akibat dari jumlah jaminan yang lebih kecil dari jumlah biaya reklamasi yang harus dikeluarkan. Perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi itu tidak dapat segera diketahui karena keterbatasan sumber daya manusia dan kelemahan sistem informasi yang ada. Dengan demikian Badan Lingkungan Hidup tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi kerusakan lingkungan dengan cepat.

Bercermin dari permasalahan yang sedang di hadapi, isu strategis yang terdapat pada urusan lingkungan hidup adalah terus menurunnya kualitas lingkungan. Isu strategis tersebut muncul dari dua masalah utama yakni lemahnya status kelembagaan lingkungan dan tidak tersedianya pejabat yang memadai. Masalah lainnya adalah kebijakan yang diambil kurang memiliki kemampuan untuk melakukan “pemaksaan” terhadap perusahaan tambang. Masalah ini ditambah dengan rendahnya sarana kerja yang tersedia.

4. Pelayanan

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II bagian otonomi daerah tentang perangkat daerah, sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2013 telah dibentuk dan dioperasikan. Namun dalam penyelenggaraan layanan administrasi masih memiliki sejumlah kelemahan. Di tengah

perkembangan teknologi informasi, seharusnya pelayanan perizinan, pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan yang lainnya dapat terlaksana secara lebih cepat dan akurat. Namun pada kenyataannya daya dukung teknologi informasi pada sistem pelayanan publik belum mampu dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini menyebabkan beberapa proses perijinan menjadi lamban termasuk juga proses penerbitan dokumen kependudukan yang rata-rata masih 14 hari (lihat tabel 2.45).

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara yang baru dibentuk pada tahun 2013 berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 9 tahun 2013 hingga kini juga belum dapat secara maksimal melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan perijinan masih dilakukan oleh masing-masing dinas instansi terkait. Tujuan dibentuknya BPPT dan Penanaman Modal adalah untuk menyederhanakan proses perijinan agar lebih cepat, mudah dan murah. Namun hal itu belum terwujud dikarenakan belum siapnya sumber daya manusia pelaksananya, perangkat pendukung dan sistem Informasi manajemennya. Hampir semua sumber daya manusia belum sadar sebagai pelayan masyarakat serta arti pentingnya pelayanan (**informasi FGD**). Standar pelayanan publik sebagai acuan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat belum disusun oleh semua SKPD yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, begitu pula Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai alat ukur penilaian publik terhadap kinerja pemerintah juga belum dilakukan oleh semua SKPD (**Evaluasi RPJMD 2012**). Hal ini menunjukkan belum adanya kesadaran sumber daya manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara akan arti pentingnya pelayanan.

Aspek lain yang juga menyebabkan kualitas pelayanan belum baik adalah belum adanya kesadaran masyarakat akan mekanisme pelayanan (**informasi FGD**). Hal ini disebabkan karena belum adanya informasi mengenai mekanisme dan prosedur pelayanan sehingga masih banyak masyarakat bingung bagaimana mengurus sebuah perijinan. Disamping itu karena kondisi geografis Penajam Paser Utara, keterbatasan sarana infrastruktur terutama telekomunikasi dan listrik serta sistim IT yang belum menjangkau sampai kecamatan maupun desa, menyebabkan terhambatnya aksesibilitas masyarakat terhadap informasi pelayanan. Akibatnya proses pelayanan menjadi terganggu.

Koordinasi antar instansi penyedia pelayanan yang masih kurang juga merupakan salah satu penyebab kualitas pelayanan yang masih kurang. Sebagai contoh, untuk pelayanan kesehatan, pemerintah daerah telah menyediakan asuransi untuk masyarakat. Namun demikian akibat dari rumitnya sistem dan prosedur yang harus dijalankan menjadikan asuransi itu kurang optimal untuk dilaksanakan (**informasi FGD**). Permasalahan pelayanan disajikan secara ringkas dalam gambar 4.5.

Aspek pelayanan langsung yang sangat penting dan menjangkau seluruh SKPD adalah buruknya pelayanan penyediaan data dan informasi dari SKPD. Data dan informasi merupakan dasar pengambilan keputusan, namun demikian data yang dibutuhkan seringkali tidak tersedia. Pelayanan data yang buruk ini tidak hanya dialami oleh masyarakat yang hendak mengakses data, tetapi bahkan antar instansi. Buruknya pelayanan data bersumber dari ketidak pahaman masing-masing instansi akan pentingnya data yang harus disediakan dan disajikan.

Gambar 4.5 Permasalahan Pelayanan di Kabupaten PPU



5. Sosial

Berdasar kriteria Bidang sosial, terdapat 8 kelompok penyandang masalah sosial, yakni anak, wanita, lanjut usia, keluarga, tuna sosial, korban penyalahgunaan NAPZA, penyandang cacat, masyarakat. Pada kelompok anak, ada balita dan anak terlantar, anak nakal dan anak jalanan serta anak cacat. Terdapat dua masalah wanita yakni masalah wanita rawan sosial ekonomi dan wanita korban kekerasan. Yang harus diperhatikan dalam kelompok lansia adalah lansia itu sendiri dan lansia yang menjadi korban kekerasan. Penyandang cacat terdapat cacat fisik maupun cacat mental. Tuna susila di dalamnya ada tuna susila itu sendiri dan pengemis, gelandangan serta eks napi. Pada kelompok keluarga terdapat keluarga miskin, keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni, keluarga yang tinggal di wilayah

rawan bencana. Berdasarkan pada kriteria ini maka masalah sosial memang harus menjadi urusan lintas sektor dan lintas bidang.

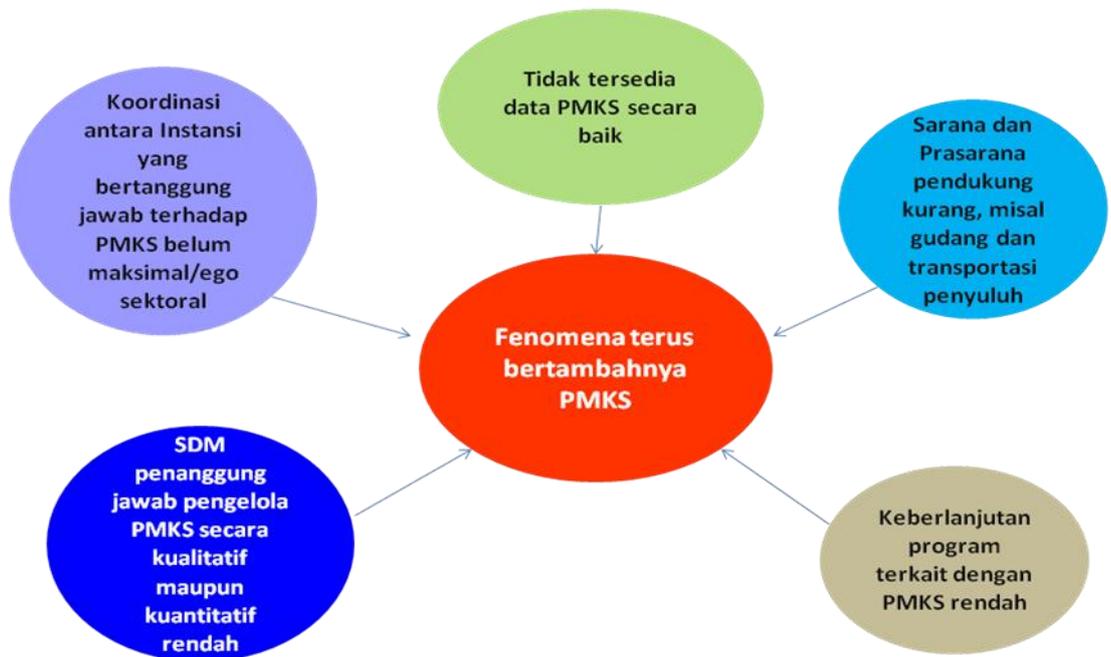
Demikian banyak persoalan sosial yang harus dikelola bidang sosial ini, namun kelemahan utama yang kemudian ditemukan adalah sangat minimnya data yang dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk melakukan perencanaan.

Dengan data yang demikian lemah teridentifikasi masalah krusial dalam pengelolaan urusan sosial ini adalah seolah jumlah penyandang masalah sosial ini terus bertambah sekalipun pembinaan dan bantuan terus dilakukan walaupun dalam jumlah yang relatif terbatas. Berdasar evaluasi RPJMD 2012 dan analisis dalam Bab II ditemukan bahwa persentase penyandang PMKS yang memperoleh bantuan sosial hanya 67 persen, sementara kemampuan untuk menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial baru 31%. Terdapat banyak persoalan yang menyebabkan seolah masalah PMKS ini tak ada habisnya (lihat gambar 4.6).

Aspek pertama terkait dengan masalah sosial di PPU adalah sangat minimnya data PMKS. Data PMKS mestinya tersedia di banyak instansi, misalnya KB & PP mestinya memiliki data PMKS wanita, BPMPD memiliki data pemberdayaan masyarakat. Namun demikian sebagaimana dianalisis pada aspek pelayanan bahwa pelayanan dalam hal data ini seluruhnya lemah. Seandainya pun terdapat data pada SKPD terkait, koordinasi atas data ini buruk. Tidak adanya data ini sungguh berdampak buruk pada seluruh

aspek mulai dari perencanaan hingga implementasi program dan pelacakan hasilnya.

Gambar 4.6 Persoalan Sosial di Kabupaten PPU



Ketiadaan data itu kemudian dipersulit dengan kenyataan lemahnya koordinasi antar instansi yang memiliki saling keterkaitan, masing-masing instansi hanya berfikir tentang tupoksinya tanpa mengambil pengetahuan bagaimana keterkaitan antara SKPD yang diampunya dengan SKPD lainnya. Misalnya, ketika Dinas sosial telah melakukan pembinaan, kemudian diserahkan kembali kepada masyarakat, mestinya menjadi tugas BPMPD untuk melakukan pemberdayaan, namun demikian koordinasi antar instansi ini tidak muncul. Akibatnya setiap program berhenti dan tidak memiliki keberlanjutan setelah program berakhir.

Keberlanjutan program dalam berbagai bentuk, ternyata menjadi masalah hampir semua instansi yang berkaitan dengan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat (**informasi FGD**). Lemahnya keberlanjutan program juga terkait dengan lemahnya desain program yang tidak memiliki *exit strategy*. Akibat dari keadaan ini, jika pembinaan dilakukan terhadap penyandang masalah sosial, maka penyandang masalah ini akan kembali menjadi penyandang, itulah sebabnya jumlah PMKS tidak pernah kunjung berkurang.

Desain program yang buruk, koordinasi yang buruk salah satunya bermuara pada kualitas dan kuantitas tenaga kerja (SDM) yang menangani masalah PMKS. Dikeluhkan oleh instansi yang menangani PMKS bahwa aparat yang ada sangat kurang, jangankan untuk mengumpulkan data, untuk melakukan pembinaan pun tidak tersedia aparat yang cukup (**informasi FGD**). kekurangan aparat ini masih ditambah dengan kualitas aparat yang juga lemah. Banyak aparat yang berhubungan langsung dengan program penanganan terhadap PMKS ini hanya beprinsip sekedar menjalankan tugas, sehingga hasil kerjanya pun kurang optimal. Latar belakang pendidikan, pandangan kurang menyenangkan atas persoalan PMKS dan keterbatasan infrastruktur tampanya menjadi penghambat bagi aparat untuk berkinerja optimal.

Informan dalam FGD menyatakan bahwa sarana dan prasarana sosial termasuk gedung, kendaraan dan panti sosial sampai saat ini masih menjadi masalah yang menghambat kerja. Keberadaan sarana dan prasarana transportasi berupa kendaraan sangat dibutuhkan mengingat letak PMKS ada di pelosok desa

yang berjauhan. Jumlah panti asuhan yang baru terbatas 7 panti (data BPS 2012) dan rata-rata hanya bisa menampung 20-50 belum dapat menampung semua PMKS yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kepala keluarga yang bertempat tinggal di lingkungan yang tidak layak masih berjumlah 679 (data BPS 2012) ini belum termasuk anak terlantar, lanjut usia terlantar dan jenis PMKS yang lainnya. Aspek-aspek diatas yang menyebabkan penanganan PMKS di Kabupaten Penajam Paser Utara belum dapat mencapai target yang ditentukan (hasil RPJMD 2012).

Berbagai aspek itu berpengaruh terhadap jumlah PMKS yang ditangani, dengan demikian dirasakan bahwa penyandang masalah sosial bukan berkurang tetapi bertambah walaupun pembinaan dan bantuan terus menerus diberikan. Dari analisis ini terlihat dengan jelas isu strategis persoalan sosial adalah tidak tersedianya data yang memadai, buruknya koordinasi dan keberlanjutan program serta lemahnya SDM dan sarana serta prasarana.

6. UMKM dan Koperasi, Industri dan Perdagangan

UMKM dan koperasi sejatinya membahas semua aktivitas usaha yang terkait dengan pengembangan UMKM dan koperasi baik untuk sektor pertanian maupun non pertanian. Namun demikian urusan pertanian dibahas secara detail dalam urusan pertanian. Untuk itu bagian ini membahas UMKM dan Koperasi secara umum dengan spesifikasi dalam pengembangan industri dan perdagangan.

Jika diamati dari peran sektor industri dan perdagangan baik dalam pembentukan PDRB maupun pertumbuhannya

menunjukkan kinerja yang sangat baik (**lihat tabel 2.10 dan 2.11**). Sektor industri tahun 2012 memiliki peran 14,50% dengan pertumbuhan 6,29%, sementara sektor perdagangan berperan 16,96% dengan pertumbuhan 20,03%. Namun demikian pertumbuhan kedua sektor yang sangat pesat itu kurang melibatkan masyarakat kebanyakan. Peran yang demikian besar hanya dihasilkan oleh satu industri pengolahan di Penajam Paser Utara yakni industri pengolahan kelapa sawit yang mengolah sawit mentah menjadi CPO. Sementara itu industri lainnya terutama industri kecil dan menengah hampir tidak tumbuh di wilayah ini. Padahal sebagai daerah pinggiran kota Balikpapan baik potensi alam maupun potensi pasar untuk industri kecil (terutama pengolahan produk pertanian) sangat terbuka lebar.

Industri sawit yang hanya ada satu pabrik itu sesungguhnya juga memiliki kelemahan yang sangat besar, dengan hanya satu pemain maka pabrik ini akan menjadi penentu bagi petani kelapa sawit, petani sama sekali tidak memiliki daya tawar, apalagi dengan produk yang tidak mungkin diolah sendiri seperti buah sawit segar. Kelemahan lain dari industri ini adalah bahwa CPO yang dihasilkan langsung dikapalkan tanpa diolah lebih lanjut sehingga sesungguhnya nilai tambah dari produk sawit itu tidak dinikmati oleh penduduk PPU.

Kurang berkembangnya industri pengolahan, utamanya yang berskala UMKM bermula dari kelemahan dalam implementasi perencanaan pembangunan yang dilakukan. Pada periode RPJMD 2008-2012 telah digariskan niatan untuk menjadikan Penajam Paser Utara sebagai daerah agroindustri. Namun demikian niatan itu baru muncul dalam misi saja, sebab

dalam implementasinya, tidak terdapat cukup program dan kebijakan yang mendukung misi tersebut (**Evaluasi RPJMD, 2012**). Salah satu indikator yang saat ini terlihat adalah bahwa koperasi maupun UMKM yang ada di PPU tidak berkembang (**lihat point UMKM dan Koperasi**).

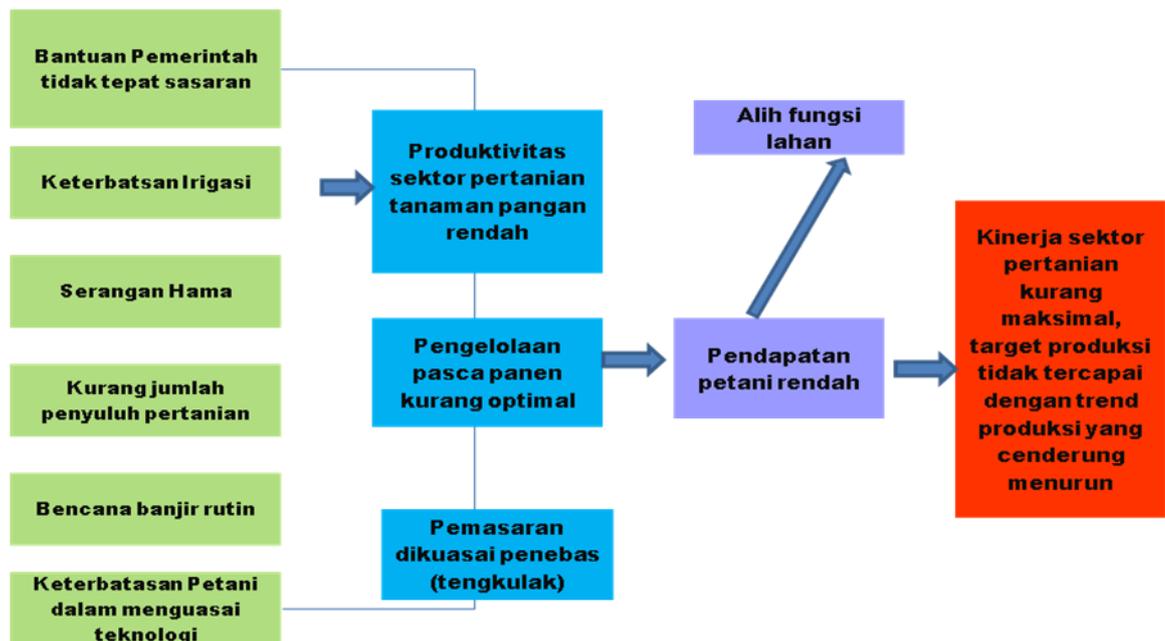
Selalu disebutkan bahwa masalah utama UMKM dan Koperasi adalah kekurangan modal, namun demikian alasan ini harus dilihat lebih jeli. Sudah sangat banyak modal diberikan melalui berbagai skema bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah, namun UMKM dan koperasi tetap kurang berkembang (**lihat bab 2 tentang Koperasi dan UMKM**). Salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan dalam pengembangan UMKM dan koperasi adalah jiwa kewirausahaan. Besar dugaan bahwa UMKM dan koperasi yang ada kurang memiliki jiwa kewirausahaan. Masalah ini masih ditambah dengan pemahaman pembina terhadap keberadaan UMKM dan koperasi yang kurang baik, melingkapi lemahnya pengembangan UMKM dan koperasi.

Perdagangan yang berkembang sangat pesat di Penajam Paser Utara terkait dengan kegiatan perdagangan besar seperti kelapa sawit dan batubara serta minyak bumi. Dengan demikian setara dengan industri perkembangan perdagangan itu kurang memiliki keterkaitan dengan kegiatan penduduk Penejam Paser Utara sendiri. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas perdagangan di Penajam Paser Utara yang umumnya adalah perdagangan dengan skala sangat kecil, misalnya pasar ikan yang hanya terdiri dari beberapa penjual. Sementara aliran barang melalui pelabuhan laut (ferry) hampir selalu padat dengan barang dagangan skala besar.

7. Pertanian Tanaman Pangan

Urusan pertanian secara umum di wilayah Penajam Paser Utara terbagi ke dalam dua kategori besar yakni pertanian tanaman pangan dan pertanian perkebunan. Baik pertanian tanaman pangan maupun perkebunan saat ini sedang berhadapan dengan kinerja yang terus memburuk, kecuali untuk tanaman kelapa sawit dan karet. Gambar 4.7 menyajikan persoalan yang melingkupi pertanian tanaman pangan di wilayah Penajam Paser Utara sehingga kinerjanya menjadi tidak optimal.

Gambar 4.7 Problema Sektor Pertanian Tanaman Pangan di wilayah PPU



Pendapatan yang relatif rendah di pertanian tanaman pangan tidak menciptakan insentif yang cukup bagi petani untuk mengembangkan pertaniannya lebih maju. Buruknya kinerja sektor pertanian itu dapat dilihat dari kinerja pertanian tanaman

pangan yang selama tahun 2008-2012 tidak mampu mencapai target peningkatan produksi, tetapi justru menurun produksinya. Produksi padi yang ditargetkan meningkat dengan 10,3% hanya tercapai sebesar 2,12%. Dampak lain yang kemudian muncul adalah terjadinya alih fungsi lahan, baik untuk perkebunan kelapa sawit maupun untuk perkebunan karet atau menjadi lahan lainnya misalnya bangunan. Selama 5 tahun terakhir luas areal tanam padi mengalami penyusutan sebesar 17,11% (**Evaluasi RPJMD, 2012**).

Tidak menariknya sektor pertanian tanaman pangan di Penajam Paser Utara bermula dari tiga aspek penting yang teridentifikasi yakni rendahnya produktivitas padi, tidak adanya industri pengolahan yang mengolah tanaman pangan agar lebih bernilai tambah atau awet dan buruknya pemasaran yang ada. Pada periode 2008-2012 produktivitas tanaman padi yang merupakan komoditi terpenting baru mencapai 5 ton/ha. Pada sisi lain industri yang berkembang di Penajam Paser Utara tidak terkait dengan tanaman pangan, sampai saat ini tidak ada industri yang bergerak untuk mengolah hasil dari tanaman pangan agar meningkat nilai tambahnya atau menjadikan tanaman pangan menjadi lebih awet. Kondisi yang demikian diperburuk dengan kenyataan tidak adanya marketing yang dapat membawa insentif bagi petani Penajam Paser Utara. Salah satu kasus yang berhasil diketahui adalah bahwa di Balikpapan beredar beras kualitas baik dengan klaim cap dari Penajam Paser Utara, namun ketika dikonfirmasi kepada petani atau pedagang di Penajam Paser Utara tidak ada yang mengerti adanya beras tersebut. Ini artinya terdapat peluang besar Penajam Paser Utara menjadi pemasok pangan bagi Balikpapan, tetapi rendahnya aksesibilitas pasar bagi

pelaku ekonomi di Penajam Paser Utara membuat mereka yang terlibat di dalamnya tetap tidak memiliki insentif (**informasi FGD**).

Ketiga persoalan itu bermula pada berbagai persoalan yang ada dan melingkupi pertanian di Penajam Paser Utara, baik aspek kebijakan, aspek petani maupun aspek di luar kekuasaan manusia yakni bencana. Aspek kebijakan setidaknya berkaitan dengan pola bantuan yang diberikan kepada masyarakat petani yang selama ini dirasa kurang tepat sasaran, misalnya yang dibutuhkan urea yang diberikan bibit, yang dibutuhkan saluran pemasaran yang diberikan bantuan pupuk. Disamping itu sarana dan prasarana irigasi juga relatif terbatas. Selanjutnya adalah tenaga penyuluh yang jumlah dan kualitasnya kurang memadai untuk wilayah yang demikian luas. Penyuluh yang handal sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan yang cukup tinggi dalam diri petani pada penguasaan produksi maupun pemasaran. Bencana yang datang secara rutin berupa banjir yang belum kunjung dapat diatasi membuat petani sulit untuk mengembangkan pertaniannya secara optimal. Disamping itu perubahan iklim yang saat ini terjadi membuat banjir musiman ini sulit untuk dideteksi. Bencana lain yang sering terjadi juga adalah datangnya hama untuk tanaman padi.

Persoalan yang dihadapi oleh tanaman pangan setara dengan yang dihadapi oleh sub sektor perikanan. Dengan potensi perikanan utama di dua desa yakni Babulu Laut di Babulu dan Desa Api-Api kecamatan Waru sub sektor ini berhadapan dengan rendahnya pendapatan nelayan. Penyebab dari hal tersebut setara dengan pertanian tanaman pangan yakni kurangnya pengelolaan pasca panen, yaitu usia tambak yang sudah tua, kurangnya

penyuluh perikanan, serangan hama dan penyakit juga bantuan yang kurang tepat sasaran.

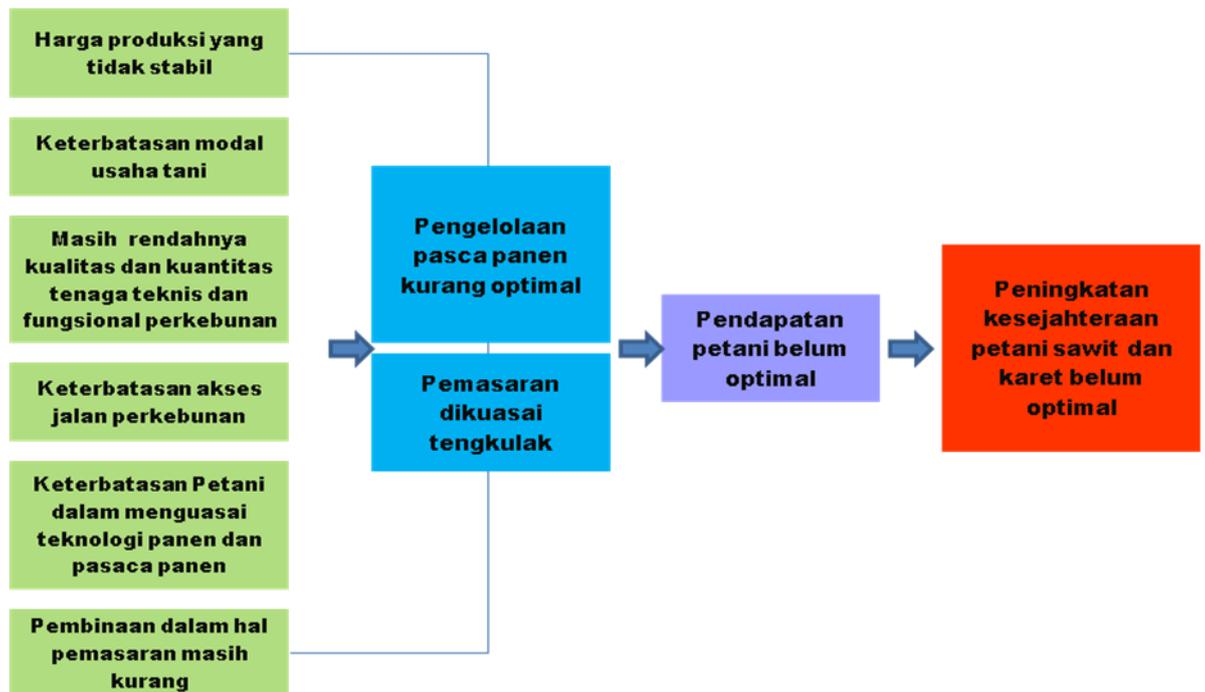
8. Perkebunan

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki beberapa komoditi perkebunan yang menjadi andalan, yaitu: kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kopi, lada dan kakao. Namun demikian dengan indikator kinerja pertumbuhan produksi, hanya kelapa sawit dan karet yang kinerjanya cukup baik, komoditi lainnya target pertumbuhan yang diharapkan tidak tercapai, bahkan kinerja produksinya pun memburuk (**Evaluasi RPJMD, 2012**).

Kinerja produksi kelapa sawit yang baik itu belum diikuti dengan kegiatan yang baik untuk menciptakan nilai tambahnya. Sampai saat ini hanya ada dua pabrik pengolah sawit menjadi CPO, selebihnya dikirim keluar daerah. Pengadaan industri pengolahan sawit tentu akan menciptakan nilai tambah yang baik bagi Penajam Paser Utara. Sejalan dengan kelapa sawit, komoditi karet juga lemah dalam aspek pengolahan pasca panennya sehingga petani tidak menikmati nilai tambah yang mestinya bisa dihasilkan jika terdapat aktivitas pengolahan karet.

Tanaman lain diluar karet dan sawit berhadapan dengan berbagai persoalan yang membuat potensi yang ada belum termanfaatkan. Secara detail persoalan yang terkait dengan perkebunan di Penajam Paser Utara disajikan pada gambar 4.8. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa persoalan utama yang dihadapi tetap pada rendahnya kesejahteraan petani kebun, namun penyebabnya sedikit berbeda.

Gambar 4.8 Persoalan Pembangunan Perkebunan di kabupaten PPU



Kinerja perkebunan non sawit dan karet ini dapat ditelusuri pada dokumen evaluasi RPJMD tahun 2012. Lemahnya kinerja perkebunan ini dideteksi karena lemahnya aspek pasca panen, baik pengolahan maupun pemasarannya. Namun demikian buruknya pasca panen ini juga bermuasal dari aspek yang lebih luas yakni harga produk, permodalan, kurangnya tenaga penyuluh dan keterbatasan akses serta penguasaan teknologi oleh petani yang lemah (lihat gambar 4.8).

Lada sebagai komoditi potensial kurang berkembang dan bahkan mengalami penurunan, penyebab utamanya adalah bahwa komoditi ini hanya menghasilkan pendapatan setahun sekali, berbeda dengan sawit yang bisa menghasilkan uang kas setiap bulan, walaupun jika ditotal pendapatan dari lada untuk luasan yang sama jauh lebih tinggi. Kelapa sebagai tanaman tradisional masih belum dilirik oleh masyarakat sebab pemanfataanya masih

juga bersifat tradisional. Kecilnya aktivitas pengolahan produk kelapa agar lebih bernilai tambah membuat produk ini kurang dikelola oleh petani.

9. Kehutanan

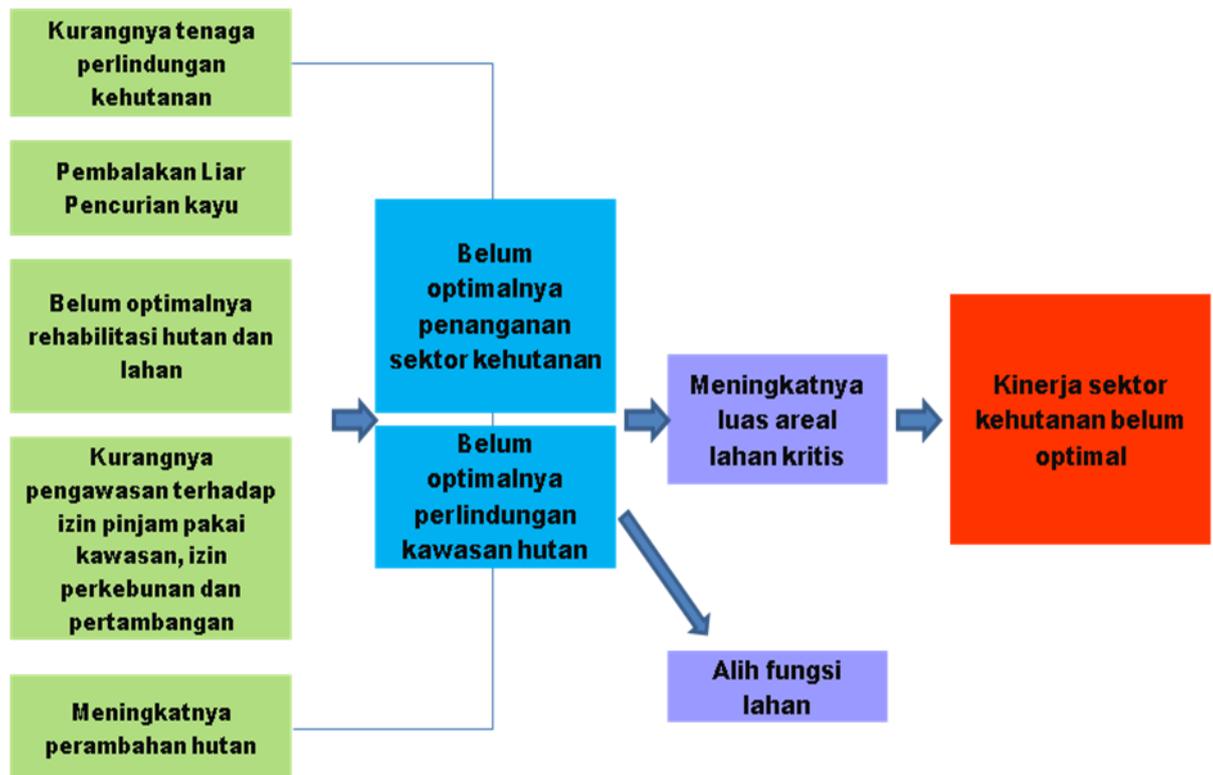
Pada sub sektor kehutanan, masalah yang dihadapi adalah terus meningkatnya luas lahan kritis di dalam hutan. Dampak dari masalah ini adalah rendahnya kinerja sektor kehutanan. Terdapat dua point penting yang menyebabkan meningkatnya luas lahan kritis yakni belum optimalnya pengelolaan bidang kehutanan dan belum optimalnya perlindungan kawasan hutan. Kedua masalah itu berawal dari beberapa persoalan yang saling terkait yakni kurangnya tenaga perlindungan hutan yang menyebabkan terjadinya pembalakan kayu. Pembalakan kayu leluasa dilakukan sebab penduduk sekitar hutan belum dilibatkan secara baik pada upaya perlindungan hutan.

Disamping aspek tersebut, kurangnya penegakan hukum atas ijin pinjam pakai di kawasan hutan juga menyebabkan bertambahnya lahan kritis dengan cepat. Pinjam pakai kawasan hutan untuk aktivitas pertanian, perkebunan maupun pertambangan tanpa kontrol dan penegakan aturan yang tegas hanya membawa pada kerusakan lahan yang berdampak pada meluasnya lahan kritis.

Perluasan lahan kritis semakin tak terhindarkan manakala kemampuan untuk melakukan rehabilitasi juga terbatas. Akibatnya total jumlah lahan kritis tidak pernah berkurang karena jumlah lahan kritis yang mampu direhabilitasi jumlahnya selalu

lebih kecil dari jumlah lahan kritis yang baru. Secara keseluruhan persoalan kehutanan itu disajikan pada gambar 4.9.

Gambar 4.9 Permasalahan pada Sub Sektor Kehutanan



C. Daya Saing

Investasi merupakan aspek yang perlu diberdayakan di daerah, karena salah satu inti otonomi adalah pemberdayaan daerah dimana merupakan suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan aspirasi masyarakat sendiri. Dalam konteks otonomi, investasi swasta merupakan salah satu pendorong pembangunan, sehingga Kabupaten Penajam Paser Utara harus mampu bersaing menarik investasi sebanyak mungkin sebagai

upaya pemanfaatan potensi daerah secara maksimal dan juga sebagai penggerak pembangunan daerah, demikian pula dengan investasi pemerintah. Oleh karena itu kombinasi investasi pemerintah dan swasta diharapkan mampu meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Agar muncul investasi di suatu daerah yang dibutuhkan adalah daya tarik investasi yang ditentukan oleh daya saing suatu daerah.

Dari aspek daya saing perekonomian, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memiliki daya saing yang cukup tinggi. Tahun 2011 daya saing Penajam Paser Utara adalah 0,7586 yang menempati urutan ke 4 di seluruh Propinsi Kalimantan Timur (**Bappeda Kalimantan Timur, 2012**). Daya saing yang cukup baik itu sudah semestinya dipertahankan dan ditingkatkan, mengingat wilayah lain juga terus berbenah untuk meningkatkan daya saing. Dari analisis yang dilakukan dalam bab sebelumnya aspek daya saing di wilayah Penajam Paser Utara dipengaruhi oleh 4 faktor utama (lihat gambar 4.10). Dari 4 aspek utama itu terdapat aspek yang sudah cukup baik tetapi terdapat beberapa aspek yang berpotensi untuk menurunkan daya saing.

Analisis tidak sepenuhnya mengikuti panduan dalam Perendagri nomor 54, namun demikian secara keseluruhan, setiap aspek dalam Permendagri nomor 54 telah diakomodasi. Dalam Permendagri nomor 54, diamanatkan analisis terhadap kemampuan ekonomi daerah yang dideteksi dari kemampuan konsumsi dan nilai tukar petani, aspek ini diakomodasi pada aspek pasar. Analisis berikutnya dalam Permendagri nomor 54 adalah aspek fasilitas dan infrastruktur yang diakomodasi pada aspek ke dua yakni sarana dan prasarana. Berikutnya adalah

aspek sumber daya manusia yang diakomodasi pada aspek input dan Iklim investasi yang diakomodasi pada aspek kebijakan.

Gambar 4. 10 Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap Daya Saing di Wilayah PPU



a. Aspek Input

Yang dimaksud input dalam analisis ini adalah input untuk meningkatkan kinerja daya saing. Pada aspek input, dianalisis 4 aspek yakni produktivitas sektoral, areal produktif, areal bencana dan sumber daya manusia.

Produktifitas Sektoral.

Pada tahun 2012, produktifitas Padi Sawah cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun sejak tahun 2008, dari sebesar 5,15 Ton/Ha menjadi 5,06 Ha/Ton pada tahun 2012. Penurunan ini mengindikasikan adanya masalah dalam pembangunan pertanian tanaman pangan terutama padi sawah. Masalah ini diduga berasal dari terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian sawah dengan irigasi yang baik menjadi areal lain

misalnya menjadi lahan perkebunan atau bahkan pertambangan dan wilayah perkotaan. Produktifitas padi Ladang mengalami peningkatan sangat kecil sejak tahun 2008 sebesar 2,41 Ton/Ha, menjadi 2,99 Ton/Ha pada tahun 2012. Peningkatan ini menandakan adanya peluang cukup baik dari sisi produktifitas untuk dapat dioptimalkan produktifitasnya.

Produktifitas perkebunan yang terbagi menjadi 6 kelompok utama perkebunan hanya menunjukkan tren yang baik pada jenis komoditi Kelapa Sawit dan Karet, sedangkan yang lainnya cenderung kurang baik seperti Kelapa dan Lada, bahkan tren buruk dapat ditemui pada jenis komoditi Kopi dan Kakao (**Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Angka 2012**). Membaiknya kinerja sektor kelapa sawit dan karet semata-mata karena permintaan pasar yang cukup tinggi juga berdampak pada penghasilan petani, sementara itu untuk kopi kakao maupun lada yang sesungguhnya memiliki pasar yang sangat baik tetapi karena aspek pemasaran yang lemah dan uang cash yang hanya dapat diperoleh pada saat tertentu sementara kebijakan yang diambil pemerintah tidak memiliki dorongan untuk menuju ke arah yang bersangkutan maka sub sektor yang potensial ini menjadi tidak berkembang.

Pada aspek produktivitas sektoral teridentifikasi lemahnya sektor pertanian yang sesungguhnya merupakan sumber pendapatan penduduk. Kelemahan itu berawal dari lemahnya jaringan pemasaran dan industri pengolahan pasca panen pagi produk (terutama produk perkebunan) yang dihasilkan penduduk, pada sisi lain penduduk (petani) menghendaki mendapatkan uang cash dengan cepat.

Areal Produktif

Rasio luas wilayah produktif pada tahun 2012 adalah sebesar 12,03%. Angka ini menandakan bahwa luasan produktif yang telah dimanfaatkan hanya sedikit sehingga masih cukup banyak lahan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktifitas. Hal ini juga dapat dibuktikan dari luasan wilayah industri yang telah dimanfaatkan hanya seluas 842 Ha dari total wilayah industri seluas 288.623Ha, atau hanya sebesar 29% yang telah dimanfaatkan untuk areal industri. Ini merupakan potensi yang luar biasa besar bagi Kabupaten Penajam Paser Utara untuk meningkatkan daya saing, mengingat posisinya yang sangat dekat dengan Balikpapan. Wilayah produktif yang masih ada dapat ditingkatkan penggunaannya agar Penajam Paser Utara mampu menjadi penyangga kota besar Balikpapan. Apalagi jika dikaitkan dengan aspek bencana, terdapat titik tertentu di Penajam Paser Utara yang potensial terhadap bencana, seperti wilayah pesisir yang pada saat air pasang terdapat wilayah yang tergenang. Namun demikian wilayah-wilayah semacam ini telah diantisipasi oleh penduduk dan masyarakat dengan sangat baik, sehingga tidak terdapat masalah yang serius di dalamnya (lihat Sub Bab 2.1).

Sumber Daya Manusia

Rasio lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk Penajam Paser Utara pada tahun 2012 adalah 254,64. Atau dengan kata lain bahwa tiap pada setiap 10.000 penduduk, terdapat 254 orang yang berpendidikan S1/S2/S3. Angka ini dipandang masih sangat kecil karena hanya terdapat sekitar 2,54% yang berpendidikan tinggi. Kondisi ini berpengaruh negatif atau berpotensi menurunkan kemampuan daya saing daerah. Rasio

ketergantungan penduduk Penajam Paser Utara pada tahun 2011 adalah sebesar 56,38. Artinya bahwa setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 56 orang belum/tidak produktif. Rasio ketergantungan ini dipandang berpengaruh negatif terhadap daya saing daerah karena beban tanggungan penduduk yang tinggi sehingga dapat mengurangi produktifitas penduduk lainnya **(lihat sub Bab 2.1).**

Mengamati data dan analisis yang ada, pada aspek input sesungguhnya Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi yang sangat besar terutama untuk meningkatkan kinerja sektor pertaniannya. Namun demikian terdapat sejumlah masalah yang menghambat sektor ini untuk dapat ditingkatkan. Produktivitas sektor pertanian yang rendah, lemahnya lini produk pertanian dan pemasaran pertanian membuat input pertanian yang sangat baik ini tidak berkembang. Perkembangan pertanian yang kurang baik itu didukung oleh rendahnya pendidikan dan tingginya angka ketergantungan di sektor petanian itu sendiri. Oleh karena itu peningkatan sektor pertanian sebagai bahan utama untuk pengembangan industri pertanian haruslah dibangun dan diberdayakan. Sementara itu kecenderungan pasar sangat gencar untuk mengejar investasi di bidang pertambangan dan kelapa sawit. Sementara ke dua sektor tersebut di Penajam Paser Utara telah mulai bermasalah, baik pada aspek perijinannya maupun pada aspek lingkungan.

b. Sarana dan Prasarana

Terkait dengan daya asing, maka sarana dan prasarana yang ada di wilayah Penajam Paser Utara untuk mendukung daya saing masih dirasakan kurang. Antrean yang panjang di

pelabuhan dan kondisi jalan yang buruk, ketersediaan air bersih yang terbatas dan ketersediaan listrik yang kurang optimal adalah beberapa indikator yang terdeteksi melemahkan daya saing di wilayah Penajam Paser Utara (**lihat sub perhubungan, ESDM pada Bab II**).

Sebagai daerah perlintasan antar provinsi, arus barang dan jasa yang melintas di Kabupaten Penajam Paser Utara cenderung meningkat. Namun demikian sarana transportasi yang tersedia belum cukup memadai. Terdapat banyak pelabuhan di Penajam Paser Utara namun demikian hanya ada satu pelabuhan kelothok, satu pelabuhan Speedboad dan satu pelabuhan ferry yang melayani transportasi publik. Kondisi pelabuhan speed boad cukup baik, tetapi pelabuhan kelothok tidak memadai dan pelabuhan ferry sangat padat sehingga waktu tempuh masih sangat lama. Saat ini sedang dibangun tempat sandar ferry sehingga ke depan ini merupakan peluang.

Berdasarkan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan yang sebesar 2,8 : 1, yang berarti bahwa dalam 2,8 Km terdapat 1 kendaraan yang melintas, artinya ketersediaan/kecukupan jalan terhadap jumlah kendaraan masih cukup memadai. Dengan ketersediaan jalan yang memadai maka tingkat kemacetan di Kabupaten Penajam hampir tidak ada. Namun permasalahan yang masih terjadi adalah masih banyak kerusakan disepanjang jalan Nasional maupun jalan Propinsi, sehingga mengganggu kelancaran dan kenyamanan serta waktu tempuh antar wilayah (lihat tabel 2.26 dan 2.27).

Air bersih, listrik adalah sebagian dari pelayanan yang harus ada untuk meningkatkan daya saing. Pada kedua aspek ini di wilayah Penajam Paser Utara masih perlu ditingkatkan.

Untuk infrastruktur lainnya seperti bank, hotel maupun restoran sebagai pendukung investasi telah mulai berkembang di wilayah ini. Hal ini terlihat dari pertumbuhan sektor ini yang terus mengalami peningkatan (**lihat tabel 2.10**)

c. Kebijakan terkait dengan Iklim Investasi

Iklim Investasi dalam upaya peningkatan daya saing daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Ketaatan Terhadap RTRW, Kemudahan Perijinan, Gangguan Keamanan dan Ketertiban, serta Desa Swasembada dan kebijakan mengenai Pajak & Retribusi Daerah.

Ketaatan terhadap RTRW

RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara telah dibuat sejak tahun 2004 dan diperkuat secara hukum melalui Peraturan Daerah Kab. Penajam Paser Utara nomor 11 tahun 2004 tentang RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam perkembangan berikutnya RTRW Kab. Penajam Paser Utara mengalami revisi mengikuti perubahan RTRW Propinsi Kaltim dan sampai saat ini revisi tersebut masih dalam tahap pengesahan pihak DRPD Kab. Penajam Paser Utara untuk di sahkan menjadi sebuah Peraturan Daerah. Dengan pengesahan RTRW Kab. Penajam Paser Utara tersebut maka sangat berpotensi untuk memberikan kepastian hukum bagi calon investor untuk melakukan investasi di Kab. Penajam Paser Utara.

Perijinan

Sebagai langkah mempermudah perijinan di Kab. Penajam Paser Utara, maka sejak akhir tahun 2012 telah terbentuk satuan kerja khusus yang menangani perijinan yaitu Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T). Beberapa perijinan yang akan ditangani oleh BPMP2T adalah SIUP, TDP, IUI, TDI, IMB dan HO (ijin gangguan). Keberadaan BPMP2T pada masa mendatang diharapkan dapat memangkas birokrasi perijinan yang melibatkan lebih dari satu satuan kerja, sehingga percepatan proses perijinan dapat tercapai dan menjadi potensi pendukung peningkatan daya saing daerah.

Gangguan keamanan

Angka gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sampai tahun 2011 masih belum memberikan nilai yang menggembirakan, yaitu sebesar 11,73 pada setiap 10.000 penduduk. Upaya penurunan angka gangguan kamtibmas ini dapat menjadi salah satu isu strategis yang perlu ditangani pada masa yang akan datang karena berpengaruh negatif terhadap upaya peningkatan daya saing daerah.

Pajak dan Retribusi

Pengenaan pajak dan retribusi yang berlebihan dan tidak masuk akan mengurangi minat masyarakat untuk melakukan investasi. Terkait dengan aspek ini maka di wilayah Penajam Paser Utara hanya terdapat 7 jenis pajak dan beberapa jenis retribusi diantaranya yang terpenting adalah retribusi untuk IMB. Kecilnya jenis retribusi dan pajak yang dipungut ini merupakan peluang untuk pengembangan investasi ke depan.

d. Pasar

Kondisi pasar di Kabupaten Penajam Paser Utara dideteksi dari beberapa faktor yakni pengeluaran konsumsi rumah tangga dan nilai tukar, namun tidak terdapat data nilai tukar.

Pengeluaran rumah tangga di kabupaten Penajam Paser Utara terus menunjukkan peningkatan (**lihat tabel 2.54**), namun demikian angka ini jauh lebih kecil dari pada angka pendapatan per kapita. Ini mengindikasikan bahwa terdapat banyak manusia yang berkerja di Penajam Paser Utara tetapi tidak berkonsumsi di Penajam Paser Utara. Bagi daya saing maka ini adalah peluang untuk meningkatkan pendapatan namun pengembangan investasi akan lebih cepat jika diarahkan pada pasar di Penajam Paser Utara, misalnya membangun industri atau pertanian untuk memenuhi kebutuhan kota Balikpapan.

D. Keuangan Daerah

Dari aspek keuangan daerah, Penajam Paser Utara sebagaimana daerah lain masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat (lihat analisis BAB III). Dari analisis pada Bab 3 terlihat rata-rata penerimaan dari pusat masih diatas 95% sedangkan PAD kurang dari 5%. Ketergantungan yang tinggi itu akibat dari melimpahnya sumber daya alam yang ada di Penajam Paser Utara baik dari minyak maupun pertambangan. Salah satu akibat yang tampak adalah kurangnya upaya PAD. Perolehan PAD yang didominasi dari pajak dan retribusi perolehannya setiap tahun fluktuatif (lihat BAB III). Kondisi ini menandakan kurangnya upaya untuk mengelola potensi yang telah ada. Sedikit apapun sumber pajak dan retribusi jika dikelola dengan cukup baik pasti akan mengalami peningkatan atau setidaknya tidak mengalami penurunan, sebab sumber penerimaan ini berasal dari meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat, yang di Penajam Paser Utara terus menunjukkan perbaikan. Untuk itu diperlukan kinerja yang lebih optimal dalam menggali potensi ekonomi daerah dan memanfaatkan potensi yang

dimiliki dengan maksimal sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini perlu dilakukan agar daerah memiliki kesiapan guna mengantisipasi menurunnya kinerja Sumber Daya Alam yang berimbas pada penurunan dana bagi hasil Sumber Daya Alam.

4.2. Isu Strategis Internal Penajam Paser Utara

Berdasar analisis masalah yang telah dilakukan pada sub bab 4.1, berikut diidentifikasi isu strategis secara internal yang ada dan dapat dikelola oleh kabupaten Penajam Paser Utara. Isu ini harus mendapat perhatian untuk dikelola pada RPJMD yang akan datang sehingga tujuan pembangunan dan visi misi yang dicanangkan oleh Bupati dapat dicapai dengan baik.

A. Kesejahteraan Masyarakat

a. Pemerataan

Isu strategis pemerataan pembangunan di Penajam Paser Utara adalah ketidakmerataan pertumbuhan antar sektor, sektor pertanian sebagai sektor yang paling penting sebagai sumber penghasilan penduduk tumbuh sangat lambat dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor pertambangan sebagai sektor yang lebih banyak menyerap tenaga kerja dari luar dengan nilai tambah yang kecil bagi penduduk setempat tumbuh dan berperan sangat besar dalam PDRB.

b. Kesejahteraan Sosial

Dari aspek kesehatan, Penajam Paser Utara memiliki kinerja yang cukup baik, namun dari segi pendidikan wilayah Penajam Paser Utara kinerjanya masih lebih rendah dari rata-rata

Kalimantan Timur. Berbagai problem pendidikan menjadi penyebabnya (lihat pada isu strategis pendidikan dan kesehatan)

c. Seni Budaya dan Olah raga

Kinerja olah raga yang kurang akibat dari kurang terintegrasinya program dan penyediaan sarana untuk peningkatan prestasi olah raga. Pada aspek budaya kinerjanya memang telah cukup baik, namun demikian kinerja budaya itu masih dapat ditingkatkan untuk mendukung pengembangan aspek lain, misalnya pariwisata.

B. Pelayanan Umum

a. Urusan Pendidikan

Tingkat pendidikan di Penajam Paser Utara telah cukup baik, namun belum merata pada seluruh wilayah. Ketidakmerataan kinerja pendidikan itu ada karena persoalan akses yang tidak merata pula. Akses yang kurang merata dari sisi pemerintah disebabkan oleh kualitas guru dan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak merata. Pada sisi lain keterisolasian dan kemiskinan membuat masyarakat kurang memahami arti penting pendidikan.

b. Urusan Kesehatan

Setara dengan pendidikan, bidang kesehatan juga berhadapan dengan tidak meratanya kinerja kesehatan di seluruh wilayah. Ketidakmerataan ini juga disebabkan oleh sarana kesehatan yang terbatas, jumlah tenaga paramedis yang belum memenuhi standar juga pengetahuan dan perilaku masyarakat yang kurang paham akan pentingnya berperilaku hidup sehat.

Kembali akses masyarakat menjadi masalah juga untuk kesehatan.

c. Urusan Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan cenderung terus memburuk. Dua aspek penting menjadi penyebabnya yakni ketidaktaatan pelaku usaha terhadap ijin yang telah diberikan dan pemberian ijin yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kedua masalah ini teridentifikasi disebabkan oleh lemahnya kedudukan lembaga yang bertanggungjawab terhadap aspek lingkungan hidup.

d. Urusan Pelayanan

Secara umum kualitas pelayanan di kabupaten Penajam Paser Utara masih kurang baik. Mekanisme koordinasi yang buruk (ego sektoral), pola pikir aparat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kurang memahami makna penting pelayanan adalah aspek penting yang ditemukan pada sisi penyedia layanan. Pada sisi pengguna layanan juga terdapat pengetahuan yang kurang bahwa mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan prima. Dua aspek ini menjadi lebih buruk karena ditambah dengan kurang tersedianya sistem dan sarana pelayanan yang memadai.

e. Urusan Sosial

Jumlah PMKS dirasakan terus meningkat. Isu ini berawal dari tidak adanya atau tidak tersedianya data yang memadai tentang PMKS. Data yang tidak tersedia itu diperberat dengan tidak adanya koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan pembinaan PMKS. Selanjutnya pembinaan yang dilakukan pun keberlanjutannya rendah. Selanjutnya masalah ini menjadi

semakin kompleks ketika sumber daya manusia pengelolannya kurang memahami makna penting dari pembinaan PMKS.

f. Urusan UMKM dan Koperasi, Industri dan Perdagangan

Industri pengolahan yang berkembang hanya satu yakni pengolahan sawit menjadi CPO, sementara industri pengolahan yang berbasis rakyat seperti UMKM dan koperasi hampir tidak berkembang. Kondisi ini jika tidak diatasi akan menjadi pisau bermata dua yang merugikan. Di satu sisi industri CPO itu monopsoni terhadap petani sawit, pada sisi lain nilai tambah sawit tidak dinikmati oleh penduduk Penajam Paser Utara. Sementara potensi UMKM dan koperasi yang sangat besar hampir tidak tersentuh oleh program pembangunan.

Setara dengan industri, perdagangan di Penajam Paser Utara juga diwarnai oleh perdagangan besar yang memperdagangkan barang dengan nilai tambah kecil bagi Penajam Paser Utara, seperti CPO, minyak bumi dan batu bara. Dengan demikian sejalan dengan isu pemerataan, untuk industri, perdagangan, UMKM dan koperasi terdeteksi isu strategis ketimpangan antar pelaku usaha.

g. Urusan Pertanian

Penurunan produktivitas tanaman padi (pangan) merupakan isu strategis yang harus mendapat perhatian di masa datang. Urusan ini bukan semata urusan dinas Pertanian namun harus menjadi urusan lintas sektor. Sangat mustahil bagi Dinas Pertanian untuk meningkatkan produktivitasnya sendirian.

h. Urusan Perkebunan

Terdapat setidaknya 5 komoditi sangat penting dan potensial di Penajam Paser Utara, namun hanya karet dan sawit yang kinerjanya baik, sementara kopi, lada dan kelapa dalam memiliki kinerja yang sangat buruk. Isu pemasaran dan pengolahan pasca panen menjadi penyebab buruknya kinerja sektor perkebunan, padahal dari sektor inilah sebagian besar penduduk Penajam Paser Utara hidup dan bergantung. Dengan demikian isu strategis bidang perkebunan adalah timpangnya pertumbuhan sub sektor yang sangat penting bagi penduduk ini.

i. Urusan Kehutanan

Isu strategis sektor kehutanan berkisar pada kecepatan perluasan areal lahan kritis sehingga program dan kebijakan rehabilitas yang dilakukan tidak dapat menutup lahan kritis yang ada. Alih fungsi lahan, pembalakan dan minimnya keterlibatan penduduk sekitar hutan teridentifikasi menjadi penyebabnya.

j. Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi ikan di Penajam Paser Utara cukup baik, namun demikian nilai tambahnya belum dapat dinikmati oleh penduduk Penajam Paser Utara. Sebagian besar produksi ikan dari Penajam Paser Utara langsung dikirim dalam keadaan tanpa diolah ke wilayah lain. Perikanan merupakan potensi besar untuk dikembangkan dan ditingkatkan nilai tambahnya. Untuk itu maka kebijakan industri pengolahan ikan menjadi isu yang sangat strategis terkait dengan perikanan.

C. Daya Saing

Daya saing Penajam Paser Utara cukup baik dibandingkan dengan kabupaten lain di Propinsi Kaltim, namun demikian daya saing itu lebih berkaitan dengan sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Kedua sektor tersebut lebih banyak membawa nilai tambah bagi mereka yang berada di luar Penajam Paser Utara sebab keduanya keluar dari Penajam Paser Utara dalam bentuk mentah. Untuk itu sangat penting untuk dikembangkan potensi daya saing yang berdasar pada lokalitas dan membawa nilai tambah bagi penduduk Penajam Paser Utara.

a. Input

Lemahnya pengelolaan industri pertanian membuat produk pertanian kurang memiliki nilai tambah, sehingga masyarakat tidak memiliki insentif untuk mengembangkan sektor pertanian yang sesungguhnya sangat potensial di Penajam Paser Utara. Kelemahan ini diperburuk dengan kualitas SDM di sektor pertanian yang relatif rendah dengan tingkat ketergantungan yang tinggi.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana jalan cukup tersedia, namun jalan yang ada dalam kondisi rusak, disamping itu pelabuhan angkut barang yang belum memadai membuat arus barang dari dan ke wilayah Penajam Paser Utara terhambat. Fasilitas listrik dan air sebagai penunjang investasi masih lemah. Keberadaan perbankan maupun hotel dan restoran menunjukkan peningkatan

c. Kebijakan Iklim Investasi

Terdapat potensi yang baik pada aspek Tata ruang dan perijinan, namun demikian dari analisis mendalam pada aspek tata ruang terdeteksi masalah masih lemahnya penegakan aturan penggunaan lahan untuk kesesuaian dengan tata ruang.

d. Pasar

Dari pola pengeluaran penduduk, terdeteksi lemahnya pasar bagi produk di wilayah Penajam Paser Utara, namun demikian Penajam Paser Utara sebagai daerah yang sangat dekat dengan kota Balikpapan, Penajam Paser Utara dapat mengambil peluang pasar Balikpapan sebagai tujuan pasar produknya.

D. Keuangan Daerah

Terdapat dua isu utama untuk keuangan daerah yakni, ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pemerintah pusat baik dana bagi hasil maupun dana alokasi. Isu kedua adalah lemahnya pengelolaan sumber penerimaan daerah baik yang berasal dari pajak, retribusi maupun dari pendapatan lain yang sah. Selain itu, keberadaan BUMD yang sementara ini adalah Perusda Benuo Taka dan PDAM dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

4.3 Isu Strategis Eksternal

Isu strategis eksternal merupakan isu yang berada di luar kewenangan kabupaten Penajam Paser Utara, namun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap apa yang akan terjadi di

Penajam Paser Utara. Isu ini harus juga dipertimbangkan sebab di satu sisi bisa menjadi penghambat pembangunan tetapi pada sisi lain bisa menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses pembangunan di Penajam Paser Utara. Berikut adalah beberapa isu yang teridentifikasi berpengaruh terhadap pembangunan Penajam Paser Utara.

1. Rencana Pembangunan Centralized Crude Terminal (CCT) di PPU

Wilayah Kelurahan Lawe-Lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), diusulkan oleh Pemerintah kabupaten untuk dijadikan sebagai kawasan strategis nasional, menyusulkan akan dibangun pusat penampungan minyak mentah atau Centralized Crude Terminal (CCT) terbesar kedua di Asia setelah negara Bahrain. Rencana pembangunan *Centralize Crude Terminal (CCT)* atau tempat penampungan minyak mentah oleh PT.Pertamina diperkirakan akan menelan anggaran sebesar USD 650 juta itu. Sejauh ini sudah melakukan beberapa kajian teknis, termasuk proses perijinan diatas lahan seluas 750 hektar, jumlah tangki yang akan dibangun sebanyak 25 unit dengan kapasitas 880 ribu barel minyak mentah per tangkinya. Pembangunan CCT tersebut nantinya akan mampu menampung 17,720 juta barel minyak mentah yang melayani suplay minyak ke Dumai, Riau, Plaju, Sumatera Selatan, Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Cilacap, Jawa Tengah, dan Sorong, Papua, serta tidak menutup kemungkinan dijual ke kilang-kilang minyak milik negara lain terdekat di Indonesia seperti Filipina, Malaysia, dan Australia.

Minyak yang disimpan di tangki-tangki tersebut, 60 persen berasal dari luar Indonesia alias minyak impor seperti Vietnam, China, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Brunei, Azerbaijan, bahkan dari Afrika yaitu Nigeria, Libya, Sudan, dan Angola. Sedangkan 40 persen sisanya berasal dari berbagai lapangan minyak Indonesia seperti dari Warukin dan Tanjung Provinsi Kalsel, serta Kaltim yakni, Sepingga, Bekapai, Handil, Senipah, Sangasanga, Badak, dan Sangatta di Kutai Kartanegara, dan dari Pulau Bunyu dan Tarakan.

2. Rencana pembangunan kilang minyak oleh PT. Medco

PT Medco Energi Internasional Tbk, kadang dikenal sebagai **Medco Energi** adalah perusahaan publik di Indonesia yang bergerak dalam bidang energi terintegrasi. Perusahaan ini bermula dari sebuah perusahaan kontraktor pertikelir di bidang jasa pengeboran minyak dan gas bumi di daratan (*onshore drilling*). Bidang Usaha MedcoEnergi termasuk dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, industri hilir: produksi LPG, distribusi bahan bakar diesel dan pembangkit tenaga listrik. Saat ini MedcoEnergi beroperasi di 10 wilayah kerja minyak dan gas di Indonesia dan operasi internasional di Oman, Yaman, Libya dan Amerika Serikat. Saat ini PT. Medco berencana membangun kilang di Penajam, dengan kapasitas yang sama dengan yang dibangun Pertamina sebagai tempat penampungan minyak.

3. Rencana Pembangunan Indonesian Marine Science and Technology Park (IMSTep)

Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) akan membangun Indonesian Marine Science and Technology Park

(IMSTep) di kawasan industri Buluminung, Kecamatan Penajam, sebagai pusat penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (puspitek) di bidang kelautan. IMSTep di Penajam Paser Utara pembangunannya akan dimulai tahun 2015 dan ditargetkan rampung tahun 2019. IMSTep ini bukan hanya untuk penelitian, namun juga untuk kursus dan training. Selain itu, juga sebagai pusat unggulan yang melakukan produksi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pusat penelitian kelautan bukan hanya untuk para peneliti di Indonesia, namun juga internasional, sehingga akan memberikan dampak yang cukup besar bagi kemajuan Penajam Paser Utara.

4. Rencana Pembangunan Pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan

Pada dasarnya, fungsi pelabuhan adalah sebagai tempat distribusi barang/produk/bahan baku/SDA (Sumber daya Alam) dan distribusi orang/SDM (sumber daya Manusia) yang prosesnya melalui laut. Untuk distribusi barang/produk/bahan baku/SDA (Sumber daya Alam), pelabuhan memiliki keunggulan absolut yaitu biaya rendah dan volume besar (dibandingkan angkutan lainnya, pesawat, truk dan lain lain).

Hubungan atau logika keterkaitan antara pelabuhan dan perekonomian adalah pelabuhan yang menciptakan biaya transportasi yang rendah, menghasilkan biaya produksi yang rendah, menghasilkan harga jual barang yang rendah, meningkatnya keunggulan bersaing, sehingga perekonomian akan bertumbuh dengan cepat. Juga semakin tinggi mobilitas faktor-faktor produksi (khususnya SDM) maka semakin tinggi

perekonomian suatu daerah. Jadi pelabuhan sangat penting dalam menstimulus perekonomian daerah.

Konsep pengembangan pelabuhan seharusnya dilihat sebagai suatu sub sistem dengan infrastruktur penunjang lainnya. Infrastruktur ini berupa pelabuhan itu sendiri (fasilitas penunjang, manajemen dan teknologi informasi), pusat pertumbuhan industri/perdagangan (kawasan ekonomi khusus, zona ekspor import, dan sejenisnya), infrastruktur penunjang (jalan tol, jalan arteri, listrik, air, telekomunikasi, SDM), konektivitas (global, regional, nasional, daerah) dan aspek ekonomi (indikator ekonomi makro dan mikro). Setiap sub sistem ini harus dibangun dan terkoneksi satu dengan yang lainnya. Jika ini tercapai maka pelabuhan akan memberikan akselerasi yang lebih tinggi terhadap perekonomian daerah. Jadi pengembangan pelabuhan, tidak bisa dilakukan secara parsial atau hanya mengembangkan fasilitas pelabuhan saja tanpa melihat perkembangan sub sistem infrastruktur lainnya. Sehingga hal tersebut dapat menciptakan multiplier effect yang positif baik di bidang pengembangan wilayah maupun sektor ekonomi.

5. Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas yang akan diterapkan di Indonesia dinilai dapat mengancam eksistensi perusahaan lokal. Sebagai konsekuensi ini, produk impor akan lebih mudah masuk dan membanjiri pasar domestik. Pasar dunia cenderung semakin terbuka dan bebas hambatan. Hal ini merupakan fenomena wajar, karena setiap negara akan melakukan kegiatan perdagangan internasional dengan memaksimalkan ekspor.

Setiap hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif diupayakan untuk dikurangi atau dihapuskan, melalui perjanjian bilateral, regional maupun multilateral.

Peran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah melakukan pembangunan secara komprehensif, khususnya dalam melihat dampak perdagangan bebas terhadap pengembangan ekonomi wilayah. Dimana pengembangan ekonomi wilayah ini memiliki peran penting dalam peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja.

6. Pembangunan Jembatan Pulau Balang

Pembangunan jembatan Pulau Balang, merupakan solusi menghubungkan pinggiran Balikpapan dan Penajam (tanpa mengganggu pusat yang berada di belakangnya dan tanpa menyebabkan kemacetan lalu lintas), sehingga menaikkan pertumbuhan kedua kota, tetapi yang utama adalah Penajam. Hal ini juga akan menjadikan rute Trans-Kalimantan semakin pendek, menyebabkan penghematan yang signifikan dalam bahan bakar dan biaya pemeliharaan jalan serta meningkatkan pengembangan di wilayah pinggiran serta membuka akses wilayah.

7. Rencana Pembangunan Jalan Tol

Pembangunan infrastruktur jalan adalah sebuah kebutuhan mutlak bagi pengembangan transportasi, peningkatan ekonomi dan pengembangan wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam upaya pemenuhan infrastruktur jalan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuat berbagai kebijakan untuk menarik pihak swasta berinvestasi di bidang jalan bebas hambatan/ freeway/tol. Dengan melibatkan sektor

swasta ini diharapkan percepatan penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Pemerintah Provinsi Kaltim merencanakan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan/Freeway/Tol sepanjang 241 kilometer yang meliputi ruas jalan Penajam - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangata - Maloy/Samarinda - Tenggarong.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW-N) telah ditetapkan Sistem Jaringan Jalan Bebas Hambatan/ Freeway/ Tol di Provinsi Kalimantan Timur adalah ruas jalan :

- a. Penajam - Balikpapan
- b. Balikpapan - Samarinda
- c. Samarinda - Tenggarong

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. : 567/KPTS/M/2010 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional. Tanggal 10 Nopember 2010, maka ruas jalan Balikpapan - Samarinda ditetapkan sebagai Jalan Nasional Jalan Tol Sesuai dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memulai Pembangunan Jalan Bebas Hambatan/ Freeway/ Tol ruas jalan Balikpapan - Samarinda sepanjang 99,02 Kilometer.

8. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan isu strategis seluruh dunia. Isu ini telah berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan dan sektor kehidupan. Perubahan iklim telah menyebabkan cuaca berubah tanpa dapat diprediksi, banjir dan bencana lain terus terjadi. Atas perubahan ini, pemerintah kabupaten tidak mampu melakukan apapun kecuali hanya melakukan adaptasi

untuk merubah perilaku masyarakat agar dapat mengurangi dampak yang terjadi.

9. **Pengembangan Jalur Rel Kereta Api di Pulau Kalimantan**

Dengan semakin terbatasnya kapasitas layanan jalan, kereta api semakin menunjukkan keunggulan kompetitifnya. Keunggulan ini tak lepas dari perkembangan teknologi perkeretaapian sehingga semakin cepat, aman, hemat energi dan ramah lingkungan. Selain itu dari sisi daya angkut kereta api tetap merupakan moda yang paling unggul. Sejalan dengan prospek cerah perkeretaapian, sudah sewajarnya keunggulan-keunggulan di atas dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya dalam penyelenggaraan transportasi nasional yang terintegrasi. Untuk itu penyelenggaraan perkeretaapian nasional di masa depan harus diwujudkan menjadi *leading transportation mode* khususnya sebagai pembentuk kerangka atau lintas utama transportasi nasional yang mampu menjamin pergerakan orang dan barang di seluruh wilayah.

Selain untuk mengangkut orang-orang yang ingin melakukan perjalanan, kereta api merupakan moda transportasi yang efektif untuk mengangkut barang atau muatan dalam jumlah besar untuk jarak jauh. Kenyataannya kereta api seperti kalah bersaing dengan moda transportasi darat lain khususnya untuk mengangkut barang-barang komoditas. Masalah tersebut bisa disebabkan beberapa faktor, antara lain kebutuhan transportasi dalam perekonomian yang tidak statis, makin selektifnya dunia usaha dan orang-orang yang bepergian dalam memilih moda transportasi, serta kurangnya dukungan dan perhatian dari pemerintah terhadap pengembangan

infrastruktur kereta api khususnya untuk mendukung industri dalam negeri.

Pengembangan jalur kereta api di Pulau Kalimantan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pergerakan barang dan merangsang pertumbuhan wilayah dengan koridor selatan dan tengah, khususnya untuk angkutan batubara.

Pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian di Kalimantan meliputi:

1. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota. Pembangunan jalur lintas utama dengan prioritas tinggi pada lintas: Banjarmasin – Balikpapan – Samarinda – Bontang – Tenggarong – Kotabangun, Banjarmasin – Palangkaraya, Pontianak – Mempawah – Singkawang. Pembangunan jalur dengan lintas potensi batubara: Puruk Cahu – Bangkuang, Bangkuang – Lupak Dalam, Kudangan – Kumai, Muara Wahau – Lubuk Tutung, Bontang – Sangkulirang – Tanjung Redep, Tanjung Barabai Martapura – Banjarmasin, Tanjung – Buntok – Muara Teweh.

2. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan wilayah sumberdaya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan meliputi: Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Samarinda dan Balikpapan (Kalimantan Timur).

Pemerintah daerah diharapkan mampu turut mendorong dalam pengembangan angkutan perkereta apian, upaya yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya adalah bekerjasama dengan pihak swasta (diutamakan swasta nasional) guna membangun jaringan kereta api diwilayahnya atau dikota-kota

besar yang ada diwilayahnya. Hal lain yang dapat dilakukan adalah upaya mendukung program pemerintah pusat untuk mengembangkan jaringan kereta api dengan penyediaan infrastruktur pendukungnya.

4.4 Analisis SWOT Isu Strategis

Analisis SWOT dilakukan atas berbagai isu strategis yang ada agar dapat dideteksi secara makro isu strategis yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Tabel 4.1 menyajikan Matriks SWOT dan isu strategis yang dapat diambil.

Tabel 4.1 Matriks SWOT Makro Kabupaten Penajam Paser Utara

	<p>Strength (Kekuatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potensi bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan • Potensi wilayah strategis 	<p>Weakness (Kelemahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potensi belum berkembang akibat dari kurangnya industri • Kualitas SDM dan sistem masih kurang • Kesejahteraan masyarakat yang timpang
<p>Opportunity (Peluang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana pembangunan Centralized Terminal di PPU • Rencana pembangunan kilang minyak oleh 	<p>Solusi Strategis (menggunakan kekuatan untuk menangkap peluang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan infrastruktur dasar penunjang 	<p>Menggunakan peluang untuk mengatasi kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri pengolah produk pertanian (kelapa sawit)

<p>PT Medco di PPU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana pembangunan Indonesia Marine Science and Teknologi Park di PPU • Rencana pembangunan pelabuhan oleh kementerian perhubungan • Pembangunan jembatan Pulau Balang • Rencana pembangunan jalan Tol Pengembangan jalur kereta api di Pulau Kalimantan 	<p>pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kawasan industri Buluming • Pemanfaatan Sumber daya alam untuk kesejahteraan • Pengembangan Wilayah dengan pendekatan Water Front city 	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi sentra penggemukan sapi • Peningkatan kemampuan SDM • Penyelenggaraan tatakelola pemerinatahan yang baik • Pemberdayaan dan peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat
<p>Threat (Ancaman)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan iklim • Perdagangan bebas 	<p>Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi potensi SDA untuk kesejahteraan yang berwawasan lingkungan • Pengembangan agroindustri, agroforestri dan minapolitan, agropolitan 	

1. Penataan dan Pengembangan Ekonomi Wilayah Pesisir Dengan Pendekatan *Water Front City*

Pengembangan Penajam Paser Utara diarahkan dengan konsep penataan dan pengembangan ekonomi wilayah pesisir dengan pendekatan *water front city*. Konsep tersebut didasari oleh pertimbangan karakteristik alam yang dimiliki. Keberadaan Kabupaten Penajam Paser Utara yang berada di tepi pantai yang selama ini menjadi bagian belakang kota harus dibalik orientasinya, sehingga tepian pantai adalah bagian muka dari wajah kota yang harus kelihatan cantik. Pengembangannya berupa pengembangan kawasan perdagangan/jasa, pariwisata dan fasilitas pelabuhan. Dengan demikian, secara keseluruhan struktur tata ruang di daerah ini polanya akan berorientasi ke pantai atau laut. Selain itu, karakter air dan lingkungannya menjadi ciri dari pemanfaatan ruang-ruang Kabupaten Penajam Paser Utara, dan harus dimanfaatkan keberadaannya melalui pemanfaatan pola ruang kota, sehingga memberikan nilai tambah yang tinggi bagi kesejahteraan warga.

2. Sentra Penggemukan Sapi Trunen

Sentra penggemukan sapi merupakan program yang telah ada di kabupaten Penajam Paser Utara. Namun demikian dalam perjalan program ini kurang dapat berkembang. Sesungguhnya program ini sangat tepat untuk dijalankan di Penajam Paser Utara mengingat potensi yang cukup besar, namun demikian berbagai persoalan yang membelitnya membuat program ini tidak berkembang.

Program perkandangan untuk penggemukan sapi ditujukan untuk mengoptimalkan hasil produksi peternakan dan pemenuhan kebutuhan daging bagi masyarakat. Hal tersebut

dilakukan dengan konsep manajemen/pengelolaan usaha peternakan yang optimal dan bersinergi dengan dengan baik terhadap lingkungan.

Disain pengembangan peternakan dibuat dan di desain secara baik untuk kenyamanan ternak agar dapat berproduksi dengan optimum dan mudah dalam pengoperasian bagi karyawan dan pekerjaanya. Sarana dan prasarana penunjang dibangun untuk memudahkan dalam penanganan (handling) ternak. Tenaga kerja berintegrasi/menggunakan tenaga kerja dari lingkungan sekitar lokasi peternakan, sehingga terjadi kondisi sosial kemasyarakatan yang baik serta keamanan yang terjamin.

Limbah peternakan ditangani dengan baik, dan digunakan secara optimal untuk pemupukan lahan penghijauan di lokasi peternakan serta dijual untuk umum guna memenuhi kebutuhan pupuk organik yang semakin lama semakin bertambah.

3. Pembangunan Pabrik Kelapa sawit

Pembangunan perkebunan kelapa sawit pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi pedesaan. Sasaran pembangunan sektor perkebunan tersebut adalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Dengan demikian jumlah masyarakat miskin terutama di pedesaan dapat dikurangi. Tujuan pokok proyek perkebunan yang dilaksanakan itu adalah; pertama, meningkatkan produktivitas kebun-kebun rakyat dengan cara penyuluhan teknologi baru pertanian kepada mereka; dan kedua, menjadikan sistem perkebunan tersebut sebagai program

pemerataan baik dari segi penduduk maupun sebagai pemerataan pembangunan. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang penting dan strategis di daerah, karena peranannya yang cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama bagi petani perkebunan. Hal ini cukup beralasan karena Kabupaten Penajam Paser Utara memang cocok dan potensial untuk pembangunan pertanian perkebunan. Untuk masa-masa akan datang luas areal kelapa sawit akan terus berkembang, karena tingginya animo masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit. Perkembangan luas areal perkebunan tersebut tentu akan diikuti oleh peningkatan produksi tandan buah segar (TBS). Dari potensi yang ada, pembangunan perkebunan kelapa sawit di Penajam Paser Utara juga akan membuka peluang pembangunan industri hulu-hilir kelapa sawit, membuka peluang usaha, tumbuhnya diversifikasi usaha, dan meningkatkan sumber devisa bagi Kabupaten Penajam Paser Utara. Pembangunan ini juga akan membuka peluang kerja di daerah dan akan menumbuhkan sektor ekonomi lainnya yang pada gilirannya akan memunculkan daerah-daerah baru sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Dengan demikian kelapa sawit diharapkan menjadi sektor basis ekonomi pedesaan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pabrik yang akan dibangun memiliki kapasitas produksi sebesar 45 ton TBS per jam.

4. Pengembangan Kawasan Industri Buluminung

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang di kembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang memiliki izin usaha kawasan industri.

Dengan adanya badan yang mengelola suatu kawasan industri diharapkan suatu kawasan industri memperoleh penanganan yang profesional sehingga setiap kebutuhan yang diperlukan oleh investor di dalam kawasan industri dapat dipenuhi dan ada yang mengurus, sehingga investor akan memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam kegiatan usahanya, serta dapat berkonsentrasi secara baik dalam proses produksinya tanpa adanya hambatan-hambatan yang berarti.

Keberadaan kawasan industri di daerah dapat berperan sebagai penggerak ekonomi daerah. Dengan berdirinya pabrik-pabrik di dalam kawasan industri akan memberikan efek multiplier yang sangat besar dan dapat mendukung peningkatan ekonomi daerah. Sumbangan dari kawasan industri dalam memajukan ekonomi daerah antara lain adalah meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD), terserapnya tenaga kerja, timbulnya wirausaha-wirausaha baru, naiknya daya beli masyarakat, berkembangnya pasar dan lembaga keuangan, dan lain-lain.

Sejalan dengan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memanfaatkan Kawasan Industri Buluminung sebagai sarana meningkatkan iklim investasi yang lebih baik guna meningkatkan daya saing terhadap kota-kota lainnya dalam menarik investor. Agar kawasan industri berperan secara optimal dalam ikut serta meningkatkan minat investasi, maka diperlukan adanya dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah. Langkah-langkah yang dapat ditempuh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memasukkan kawasan industri di dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah di bidang investasi, termasuk dengan

memberikan perlakuan khusus kepada investor yang menanamkan modalnya di dalam lokasi kawasan industri.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN SASARAN

5.1. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2013-2018, adalah: **“Mewujudkan masyarakat kabupaten Penajam Paser Utara yang Sejahtera, Berkualitas, Mandiri dalam kehidupan damai, Berkeadilan dan Agamis.”** Penjabaran arti dari visi tersebut antara lain:

1. Mewujudkan masyarakat yang Sejahtera adalah: kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara telah terpenuhi secara lahir dan batin, masyarakat yang telah mencapai kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dan seluruh potensi hidup yang telah berkembang baik dipandang dari aspek materi maupun spritual
2. Mewujudkan masyarakat yang Berkualitas adalah: masyarakat yang memiliki mutu tinggi ditinjau dari segi pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, olah raga, seni budaya dan agama di dukung oleh tata pemerintahan yang baik
3. Mewujudkan masyarakat yang Mandiri adalah: masyarakat yang mampu membiayai sendiri semua kebutuhan dan aktifitas yang dilakukannya, tidak bergantung pada orang lain
4. Mewujudkan masyarakat dalam kehidupan damai adalah: masyarakat yang berada dalam suasana tanpa kekerasan, adanya harmoni, toleransi, saling menghargai dan relasi yang setara antar individu maupun komunitas yang hidup bersama untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu wilayah tertentu pula
5. Mewujudkan masyarakat yang Berkeadilan adalah: lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, tidak berat sebelah, berpihak kepada kebenaran, menghargai hak dan kewajiban

6. Mewujudkan masyarakat yang Agamis adalah: kehidupan masyarakat Penajam Paser Utara senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur, masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya.

5.2. Misi

Misi untuk mencapai cita-cita dalam visi di tuangkan dalam tekad Panca Karya, antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan SDM dengan penguasaan Iptek dan Imtaq

Meliputi:

- a) Bidang Pendidikan

Untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan dan efisien dengan menyelenggarakan pendidikan gratis serta membangun sarana dan prasarana pendidikan di daerah, yang berbasis kepada standar mutu pendidikan serta pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2014 – 2018 adalah:

1. Peningkatan APK tingkat pendidikan SMP dan SMA masing-masing menjadi 100% dan 82.59%;
2. Peningkatan APM tingkat pendidikan SMP dan SMA masing-masing menjadi 84.26% dan 65.92%;
3. Peningkatan nilai rata-rata mata pelajaran bagi peserta Ujian Nasional di semua tingkatan;
4. Terbangunnya sekolah yang memiliki daya saing;
5. Mendorong terbentuknya sekolah akademi/politeknik Perguruan Tinggi;
6. Terbangunnya Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten;

7. Peningkatan kualitas dan pemerataan sebaran guru;
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan.

b) Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi

Dimaksudkan untuk pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni serta untuk memperkaya khazanah artistic dan intelektual bagi tumbuh kembangnya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif masyarakat yang disertai pengembangan inovasi yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2014 – 2018 adalah:

1. Peningkatan pendidikan keagamaan formal dan non formal;
2. Pembinaan dan pengembangan ragam kesenian daerah berbagai komunitas;
3. Meningkatnya kreatifitas dan inovasi terciptanya teknologi tepat guna dalam segala bidang;
4. Terbangunnya taman pintar;
5. Terbangunnya fasilitas olahraga

2. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Berdaya Guna dan Berhasil Guna, Bebas dari KKN

Meliputi:

- a) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, diarahkan untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat hukum, transparan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan,

maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2014 -2018 adalah:

- Terbentuknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru/menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan daerah ditargetkan sebanyak 13 gedung organisasi perangkat daerah, 10 rumah jabatan, dan 6 UPTD hingga akhir tahun RPJMD;
- Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan melalui Peningkatan penerapan E-Government di SKPD;
- Terbangunnya koneksi database antar seluruh Unit Kerja;
- Peningkatan pengendalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Optimalisasi potensi Pendapatan Daerah (Dana Perimbangan).

b) Membangun sistem pemerintahan yang berasaskan Good Government sehingga melahirkan pemerintahan transparan dipercaya rakyat.

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan sistem pemerintahan yang berasaskan Good Government, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013 -2018 adalah

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat melalui peningkatan integritas pelayanan publik dan kemudahan berusaha
2. Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas dan standarisasi proses penyelenggaraan pemerintahan melalui penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi setiap unit kerja

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik dan lebih terjangkau dengan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di setiap instansi penyedia layanan
 4. Terbangunnya Website instansi pemerintah dalam rangka peningkatan penyediaan informasi
- c) Membentuk formasi jabatan berdasar kapasitas profesionalisme, formasi jabatan bukan atas dasar suka dan tidak suka, hal ini dilakukan untuk menghindari munculnya penyalahgunaan wewenang yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah, menekan sekecil mungkin kesenjangan antara pimpinan dan bawahan secara berkeadilan

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan formasi jabatan berdasar kapasitas profesionalisme, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah

1. Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat
 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang dicerminkan dengan peningkatan indeks efektifitas pemerintahan dan indeks pemerintahan yang akuntabel.
 3. Terbangunnya sistem rekrutmen, yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi
- d) Memperkuat fakta integritas yang dimaksudkan untuk memperkecil peluang aparatur pemerintah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan keuangan Negara.
- Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan memperkuat fakta integritas formasi jabatan berdasar

kapasitas profesionalisme, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah: Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN yang dicerminkan dengan perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) daerah dan peningkatan Opini audit BPK berpredikat WTP pada tahun 2014

- e) Bidang politik, hukum dan keamanan yang diarahkan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tentram, damai serta pencegahan tindak terorisme melalui upaya deradikalisasi yang antara lain dilakukan dengan kegiatan pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pendayagunaan dan penguatan kelembagaan antar instansi.

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:

- a. Meningkatnya keamanan dan ketertiban
- b. Berkurangnya angka kriminalitas

3. Memelihara, meningkatkan dan membangun infrastruktur daerah

Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah secara adil dan merata merupakan prioritas dalam misi pembangunan lima tahun ke depan, antara lain:

- a) Memberikan keseimbangan pembangunan desa dan kabupaten/kota secara proporsional dengan pola *Triangle*, yaitu proyek pembangunan desa harus bisa menunjang pembangunan kabupaten/kota begitu pula sebaliknya. Pembangunan infrastruktur di daerah ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan program MP3EI di wilayah Penajam Paser Utara. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Terbangunnya jalan lingkaran Riko – Pantai Lango – Pulau Balang.
 - 2) Terbangunnya jalan Pantai Lango – Gersik – Jenebora – Buluminung
 - 3) Terbangunnya jalan Perkotaan Penajam – Gunung Steleng – Buluminung
 - 4) Peningkatan jalan perkotaan Gunung Makmur - Gunung Intan – Permukiman Sebakung Jaya
 - 5) Terbangunnya jalan 2 jalur kawasan pariwisata Tanjung Jumalai
 - 6) Peningkatan jalan perkotaan Sepaku – Permukiman Argo Mulyo
 - 7) Peningkatan jalan – jalan lingkungan
 - 8) Terbangunnya jalan 2 jalur ibukota kecamatan
 - 9) Terbangunnya terminal type B
 - 10) Terbangunnya sarana dan prasarana perkantoran bagi dinas/kantor dan lembaga teknis lainnya
 - 11) Terbangunnya Gedung UPTD PU di 4 kecamatan
 - 12) Terbangunnya kompleks rumah jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten
 - 13) Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan *Supply Base* dan *Coal Terminal*
 - 14) Terbangunnya *prototype* pasar Babulu, Waru dan Sepaku
 - 15) Mendorong pembangunan jalan lintas Penajam Paser Utara dan Kutai Barat
- b) Pembangunan fasilitas pelayanan publik secara adil dan merata, meliputi pembangunan sarana kesehatan, listrik, jaringan air bersih, jembatan pembangunan jalan perkebunan dan pembangunan jalan usaha tani di pedesaan dan sanitasi. Indikator pencapaian tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong percepatan pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Sepaku
 - 2) Peningkatan puskesmas rawat inap
 - 3) Pembangunan penerangan jalan umum (PJU) di Ibukota Kecamatan dan pusat- pusat pedesaan dan kelurahan.
 - 4) Peningkatan jaringan perpipaan air bersih :
 - a. Jaringan perpipaan Penajam di Kecamatan Penajam;
 - b. Jaringan perpipaan Waru di Kecamatan Waru;
 - c. Jaringan perpipaan Babulu di Kecamatan Babulu; dan
 - d. Jaringan perpipaan Sepaku di Kecamatan Sepaku
 - 5) Pembangunan *water treatment plan* skala lokal untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dengan memanfaatkan sumber air baku yang ada di sekitarnya dan penggunaan teknologi pengelolaan air layak minum.
 - 6) Mewujudkan infrastruktur pertanian untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan.
 - a. Pembangunan jalan usaha tani
 - b. Pembangunan irigasi pertanian
 - 7) Menciptakan pembangunan jalan produksi perkebunan untuk mendukung peningkatan produksi perkebunan
 - 8) Pembangunan sanitasi permukiman
 - 9) Terbangunnya Bendungan sebagai penunjang pertanian maupun air bersih
- c) Menerapkan prioritas proyek pembangunan berdasarkan kebutuhan riil dalam masyarakat bukan atas kepentingan pribadi dan kelompok yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Indikator pencapaian tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
1. Penataan dan pengembangan ekonomi wilayah pesisir dengan pendekatan *water front city*;
 2. Pengembangan Kawasan Industri Buluminung dan sekitarnya;

3. Pembangunan jembatan Penajam - Balikpapan antar *coastal road*;
 4. Pengembangan Infrastruktur pariwisata:
 - a. Kawasan Wisata Tanjung Jumlai
 - b. Kawasan Wisata Nipah – nipah
 - c. Pengembangan obyek wisata Penajam Marina Beach
 5. Pengembangan Kawasan Agroforestri dan Agroindustri;
 6. Pengembangan Kawasan Agropolitan;
 7. Pengembangan Kawasan Minapolitan;
 8. Pengembangan Kawasan Riset Baik Pertanian, Perikanan, dan Kelautan.
4. Memberdayakan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat
- Beberapa aspek penting dalam Peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat mencakup beberapa bidang antara lain:
- a) Bidang kesehatan, dititikberatkan melalui pendekatan preventif terpadu, tidak hanya kuratif, sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dan pencapaian keseluruhan sasaran dalam *Millenium Development Goals* 2015. Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang kesehatan, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:
 1. Peningkatan rasio jumlah tenaga dokter tiap 100.000 penduduk hingga 40 dokter;
 2. Peningkatan klasifikasi RSUD menjadi tipe B, minimal 6 orang Spesialis dan 2 orang sub spesialis;
 3. Peningkatan rasio tenaga medis terhadap jumlah penduduk;
 4. Peningkatan usia harapan hidup hingga usia 73 pada tahun 2018;
 5. Berkurangnya balita kurang gizi hingga 0% pada tahun 2016;

6. Berkurangnya balita gizi buruk hingga 0% pada tahun 2015;
7. Penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan hingga 2 kasus kematian pada tahun 2018;
8. Terjadinya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

b) Pemberdayaan ekonomi bidang pertanian dalam arti luas melalui program agropolitan dan minapolitan, serta mendorong penguatan modal pemberdayaan ekonomi bidang industry kecil dan menengah untuk dapat menciptakan lapangan kerja

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang pemberdayaan ekonomi bidang pertanian, peternakan dan perikanan, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:

1. Pengembangan kawasan minapolitan di Babulu Laut pada tahun 2014-2016;
2. Peningkatan SDM petani nelayan di Pusritek KKP;
3. Pengembangan kawasan agropolitan di Babulu Darat pada tahun 2014-2015;
4. Pengembangan budidaya lahan kering komoditas singkong gajah hingga tahun 2018;
5. Terbangunnya pasar migropolitan terpadu di Babulu Darat pada tahun 2016;
6. Pengembangan budidaya lahan kering komoditas perkebunan hingga tahun 2018

c) Bidang perekonomian untuk mempercepat pembangunan industri manufaktur, membangun iklim investasi yang sehat, peningkatan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda,

serta peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah.

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang perekonomian untuk mempercepat pembangunan industry manufaktur, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:

1. Pengelolaan klinik agropolitan untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi pedesaan baik yang bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan maupun perikanan;
2. Berkembangnya Koperasi aktif sebanyak 78 unit pada tahun 2018;
3. Pengembangan ekonomi produktif;
4. Bertambahnya nilai bantuan Kredit Usaha Rakyat sebesar 5% setiap tahunnya.

d) Bidang kesejahteraan rakyat, dimaksudkan untuk pembangunan bidang agama, pemuda dan olahraga, serta pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:

1. Peningkatan pembinaan dan memperkuat pemberdayaan organisasi-organisasi perempuan untuk mendorong peran kaum perempuan dalam pembangunan daerah;
2. Penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga 1.733 jiwa pada tahun 2018;
3. Penurunan tingkat kenakalan remaja;
4. Penurunan tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
5. Peningkatan peserta KB aktif hingga 31.053 jiwa pada tahun 2018.

- e) Peningkatan efektifitas program pengendalian kemiskinan, dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan yang pro rakyat serta perluasan kebijakan yang afirmatif untuk menanggulangi kemiskinan.

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang efektifitas program pengendalian kemiskinan, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:

1. Peningkatan jumlah bantuan untuk keluarga miskin (gakin);
2. Penurunan jumlah keluarga miskin (gakin) sebanyak 500 KK pada tahun 2018.

5. Optimalisasi potensi SDA untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan

Meliputi:

- a) Energi, mendukung kebijakan energi nasional yang dapat menjamin kelangsungan pasokan energi di seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, pembangunan energi terbarukan dengan memanfaatkan potensi yang tersedia, efisiensi konsumsi, penghematan energi, meningkatnya produksi serta pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis
- Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang energi, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:
1. Rasio elektrifikasi desa/kelurahan
 2. Persentase penggunaan energi baru terbarukan
 3. Terjalannya investasi di bidang kelistrikan daerah
 4. Terbangunnya sarana prasarana penunjang pemenuhan kebutuhan energy alternatif

- b) Pariwisata, menggali potensi pariwisata yang mempunyai nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan potensi pariwisata yang sudah ada dalam usaha membuka dan mengembangkan lapangan pekerjaan

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang pariwisata, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:

1. Peningkatan kunjungan wisatawan domestik hingga 25 %
2. Penambahan 1 destinasi wisata di PPU
3. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
4. Terciptanya brand pariwisata PPU
5. Peningkatan investasi kepariwisataan
6. Pengembangan obyek wisata budaya bahari

- c) Ketahanan pangan, diarahkan untuk meningkatkan penyediaan bahan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri, terutama padi, jagung, kedelai, kelapa sawit, kelapa dalam, singkong, daging dan ikan, meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, serta perlindungan pemberdayaan petani dan nelayan

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang ketahanan pangan, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:

1. Peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 20% dengan tetap mengacu pada kelestarian lingkungan
2. Berdirinya klinik agropolitan untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi pedesaan baik yang bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan maupun perikanan
3. Terbangunnya Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BPPTP) pada tahun 2014

4. Peningkatan produktivitas pangan utama hingga 7 ton/ha pada tahun 2014
 5. Terbangunnya lumbung pangan padi di setiap desa
 6. Peningkatan diversifikasi produk makanan berbasis jenis makanan lokal
 7. Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan perikanan darat/budidaya
 8. Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura
 9. Peningkatan populasi hewan ternak besar dan kecil
 10. Peningkatan produksi daging dan telur
 11. Peningkatan produksi tanaman perkebunan hingga tahun 2018
- d) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, menekankan daya upaya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengendalian kerusakan lingkungan secara keseluruhan, untuk meningkatkan daya dukung lingkungan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan dan disertai dengan upaya pengelolaan resiko bencana dan dampak perubahan iklim global.
- Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:
1. Peningkatan jumlah perusahaan yang melaksanakan AMDAL
 2. Penurunan tingkat pencemaran air, udara dan lingkungan
 3. Minimalisasi kerusakan kawasan hutan
 4. Minimalisasi ijin penambangan yang tidak berwawasan lingkungan
 5. Deteksi dini bencana
 6. Penurunan angka resiko bencana

7. Terbangunnya fasilitas pendukung penanggulangan bencana
8. Peningkatan luas konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan

5.3. Tujuan dan Sasaran

Dari uraian penjelasan mengenai Visi Misi Bupati terpilih, jelas terlihat bahwa Visi dan Misi itu sesungguhnya bermuara pada satu tujuan yakni kesejahteraan masyarakat Penajam Paser Utara. Tujuan yang tertuang dalam visi itu agar dapat dicapai harus dikaitkan dengan permasalahan yang ada di kabupaten Penajam Paser Utara seperti yang telah dianalisis dalam Bab IV. Ketika dipetakan maka terdapat sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara salah satunya adalah aspek pendanaan. Mengingat keterbatasan sumber pembiayaan daerah dalam pengalokasian anggaran, maka perlu mempertimbangkan penggunaan dana investasi dari swasta ataupun perorangan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasar analisis permasalahan daerah yang ada, untuk mengatasi permasalahan dimaksud dijabarkan kedalam 5 (lima) tujuan utama. Kelima tujuan itu harus bersinergi dengan misi Bupati terpilih. Memetakan kelima tujuan besar pembangunan dan misi Bupati, secara keseluruhan semuanya saling terkait. Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa masing-masing misi memiliki tujuan spesifik, untuk itu maka tabel 5.1 menyajikan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten Penajam Paser Utara yang paling dekat satu sama lain.

**Tabel 5.1 Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara**

Misi			Tujuan	Sasaran	
1	Meningkatkan kemampuan SDM dengan penguasaan IPTEK dan Imtaq	1	Meningkatkan kualitas SDM Penajam Paser Utara	1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia
2	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, berdaya guna dan berhasil guna, bebas dari KKN	2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dalam suasana kondusif	2	Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN
				3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja
3	Memelihara, meningkatkan dan membangun infrastruktur daerah	3	Terciptanya Infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata	4	Terbangunnya Sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan publik yang memadai
4	Memberdayakan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat	4	Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat	5	Meningkatnya daya beli masyarakat
				6	Menurunnya tingkat pengangguran
				7	Menurunnya tingkat kemiskinan
				8	Menurunnya indeks gini
				9	Peningkatan ekonomi berbasis pertanian
5	Optimalisasi potensi SDA untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan	5	Pemanfaatan Potensi SDA yang Ramah Lingkungan	10	Peningkatan produksi serta pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis
				11	Peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan bencana
				12	Peningkatan Ketahanan Pangan

No	PRIORITAS NASIONAL RPJMN (9 NAWACITA)		PRIORITAS RPJM PROVINSI		PRIORITAS RPJMD
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara	1	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	1	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
2	Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	2	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	2	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
3	Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	3	Peningkatan produksi pangan	3	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
4	Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	4	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	4	Percepatan penanggulangan kemiskinan
5	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan	5	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	5	Kedaulatan pangan
		6	Percepatan pengentasan kemiskinan		

6	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	7	Pengembangan ekonomi kerakyatan	6	Peningkatan kualitas infrastruktur yang adil dan merata
7	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional	8	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja	7	Pengembangan ekonomi kerakyatan
		9	Percepatan transformasi ekonomi	8	Percepatan pembangunan kawasan industry/ekonomi
8	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik	10	Pengembangan agribisnis	9	Pengembangan energy ramah lingkungan
9	Melakukan revolusi karakter bangsa	11	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	10	Pelestarian lingkungan hidup
		12	Pemenuhan kebutuhan energy ramah lingkungan		

Tema Tahun I (2014) : Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis sumber daya alam terbarukan didukung peningkatan manajemen sumber daya aparatur

Tema Tahun II (2015) : Peningkatan daya saing daerah melalui penguatan komoditas unggulan kewilayahan yang didukung infrastruktur memadai

Tema Tahun III (2016) : Meningkatkan daya dukung dan peningkatan konektifitas penunjang perekonomian daerah

Tema Tahun IV (2017) : Penguatan infrastruktur wilayah dalam mendukung pengembangan industri yang berwawasan lingkungan

Tema Tahun V (2018) : Penguatan ekonomi masyarakat kabupaten Penajam Paser Utara yang Sejahtera, Berkualitas, Mandiri dalam kehidupan damai, Berkeadilan dan Agamis, melalui dukungan industry dan inovasi teknologi

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah bagaimana tujuan pembangunan yang telah dicanangkan dapat dicapai. Untuk menghasilkan strategi yang tepat dan bersinergi antara masalah yang dihadapi RPJMD ini *Foccus Group Discussion* (FGD) dengan menggunakan metode analisis *Fish Bone*. Dalam analisis tersebut dipertimbangkan aspek yang mempengaruhi permasalahan utama dalam pembangunan. Metode fishbone dapat mengidentifikasi berbagai sebab potensial satu efek atau masalah, dan menganalisis masalah tersebut melalui *brainstorming*. Tabel 6.1 sampai 6.5 menyajikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk masing-masing misi.

Tabel 6.1
Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara
Misi Pertama

Misi 1: Meningkatkan kemampuan SDM dengan penguasaan IPTEK dan Imtaq				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas SDM Penajam Paser Utara	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Pelaksanaan Program Wajib Belajar dan Peningkatan kapasitas pendidik

Tabel 6.2
Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara
Misi Kedua

Misi 2: Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, berdaya guna dan berhasil guna, bebas dari KKN				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dalam suasana kondusif	Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN	Opini BPK	Pelaksanaan Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan	Peningkatan kapasitas dan manajemen sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah
		Indeks Persepsi Korupsi		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	Peningkatan Manajemen Pelayanan Publik/Masyarakat	Peningkatan kapasitas dan tertatanya akuntabilitas kinerja

Tabel 6.3
Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara
Misi Ketiga

Misi 3 : Memelihara, meningkatkan dan membangun infrastruktur daerah				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya Infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata	Terbangunnya Sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan publik yang memadai	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	Percepatan Peningkatan dan pencapaian target Pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas publik	Peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah
		Presentase gedung perkantoran yang terbangun		

Tabel 6.4
Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara
Misi Keempat

Misi 4: Memberdayakan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat	Meningkatnya daya beli masyarakat	Tingkat inflasi	Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan dasar Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan Dasar bagi masyarakat Penajam Paser Utara
	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	Perluasan kesempatan kerja	Peningkatan kesempatan kerja
	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan	Masyarakat yang berdaya	Peningkatan pemberdayaan masyarakat
	Menurunnya indeks gini	Indeks Gini	Minimalisasi ketimpangan wilayah	Peningkatan peran serta Gender dalam pembangunan
	Peningkatan ekonomi berbasis pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP)	Kualitas petani yang berdaya saing	Pembangunan ekonomi daerah

Tabel 6.5
Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara
Misi Kelima

Misi 5: Optimalisasi potensi SDA untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pemanfaatan Potensi SDA yang Ramah Lingkungan	Peningkatan produksi serta pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis	Pertumbuhan ekonomi tanpa migas	Peningkatan Optimalisasi Penggunaan Energi Secara Efektif & Efisien	Pengembangan Sumber Energi Baru Terbarukan dan ramah lingkungan
		Pertumbuhan ekonomi dengan migas		

	Meningkatkan kualitas lingkungan dan pengelolaan bencana	Lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	Pengendalian perusakan lingkungan
		Energi baru terbarukan	Pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan	Perlindungan Sumber Daya Alam
	Peningkatan ketahanan pangan	Kontribusi sector pertanian dalam arti luas	Pengembangan kawasan budidaya	Peningkatan produktivitas

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini disampaikan kebijakan umum dan program pembangunan prioritas dalam pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

No	Kebijakan Umum	Program Pembangunan
1	Pelaksanaan Program Wajib Belajar dan Peningkatan kapasitas pendidik	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun
		Program Pendidikan menengah
		Program Pendidikan Luar Biasa
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan
		Program Pendidikan non formal
		Program Pendidikan Anak Usia Dini
		Program Perencanaan Sosial Budaya
		Program peningkatan peran serta kepemudaan
		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
		Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemuda Dan Olahraga
2	Peningkatan kapasitas dan manajemen sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
		Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH
		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
		Program Penataan Administrasi kependudukan

No	Kebijakan Umum	Program Pembangunan
		<p>Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan</p> <p>Program peningkatan kualitas pelayanan informasi</p> <p>Program perbaikan system administrasi kearsipan</p> <p>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</p> <p>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</p> <p>Program pengembangan wawasan kebangsaan</p> <p>Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</p> <p>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</p> <p>Program pendidikan politik masyarakat</p> <p>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</p> <p>Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat</p>
3	Peningkatan kapasitas dan tertatanya akuntabilitas kinerja	<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</p> <p>Program pengelolaan data dan dokumentasi kepegawaian</p> <p>Program penataan sistem manajemen aparatur</p> <p>Program Penataan Akuntabilitas Kinerja</p> <p>Program Penataan dan Penguatan Organisasi</p> <p>Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</p>
4	Peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	<p>Program pembangunan infrastruktur perdesaan</p> <p>Program Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)</p> <p>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</p> <p>Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar</p> <p>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya</p> <p>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit</p> <p>Program penyediaan dan pengolahan air baku</p> <p>Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah</p> <p>Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</p>

No	Kebijakan Umum	Program Pembangunan
		Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
		Program pembangunan Turap/talud/bronjong
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
		Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan
		Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, Pengairan
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
		Program Pengembangan Perumahan
		Program pengembangan lingkungan sehat
		Program Pengendalian Banjir
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
		Program peningkatan kinerja dalam pengelolaan persampahan
		Program pengembangan lingkungan sehat
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
		Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
		Program Pengelolaan Areal Pemakaman
		Program Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
		Program Pengembangan sistem Informasi Pertanahan
		Program perencanaan pembangunan daerah
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
		Program Perencanaan tata ruang
		Program Pemanfaatan Ruang
		Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

No	Kebijakan Umum	Program Pembangunan
		Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
5	Peningkatan kesempatan kerja	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
6	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
		Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
		Program peningkatan kesempatan kerja
7	Peningkatan peran serta gender dalam pembangunan	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
		Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
		Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
		Program pengembangan lingkungan sehat
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usila
		Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
		Program Pengawasan/Pengendalian Kesehatan Makanan
		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
8	Pembangunan ekonomi daerah	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
		Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja
		Program pelayanan kontrasepsi
		Program Keluarga Berencana
		Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
		Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

No	Kebijakan Umum	Program Pembangunan
		Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
9	Pengembangan sumber energy baru terbarukan dan ramah lingkungan	Program kerjasama pembangunan Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha kecil Menengah Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program peningkatan peran perempuan di pedesaan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan kesejahteraan petani Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

No	Kebijakan Umum	Program Pembangunan
10	Pengendalian perusakan lingkungan	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
		Program pendataan & pengembangan bidang migas
		Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
11	Perlindungan sumber daya alam	Program pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
		Program Rehabilitasi hutan dan lahan
		Program perlindungan dan kosevasi sumber daya hutan
		Program peningkatan kualitas dan akses sumber daya lingkungan hidup
		Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
		Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
		Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
Program Pengembangan Kemitraan		
12	Peningkatan produktivitas	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
		Program peningkatan produksi pertanian
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
		Program pengembangan budidaya perikanan
		Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap
		Program peningkatan kesadaran dan penegakkan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut

No	Kebijakan Umum	Program Pembangunan
		Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
		Program Peningkatan Kegiatan Kelautan dan wawasan Maritim Kepada Masyarakat
		Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
		Program peningkatan kapasitas aparatur teknis petani/nelayan
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian, Peternakan, perikanan, perkebunan
		Program Peningkatan kesejahteraan petani
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan/pertanian

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN

Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMD 2013-2018 baik yang bersifat program prioritas maupun program dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana tertuang pada tabel T III C 91 Indikasi Rencana Program prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Selain program pembangunan diatas, juga terdapat program-program yang bersifat pendukung operasional SKPD sehingga SKPD bisa menggunakan program tersebut. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut pada tabel 8.1.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggungjawab	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012/2013)			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				Keterangan	Nilai	Rp	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Inspektorat	Kasus	11			15		15				15				15
		17 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas	Inspektorat	Jumlah tenaga pemeriksa (auditor) Auditor pertama Ketua Tim Pengendali teknis	20 17 2	247.025.400	26 22 3	500.000.000	26 22 3	742.920.000	26 20 4	600.000.000	26 20 4	700.000.000	26 20 4	800.000.000	26 20 4	3.342.920.000
		18 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Sekretariat Daerah	Kendaraan dinas operasional paten (unit)			0	-	0	-	4	1.000.000.000	0	-	0	-	4	1.000.000.000
		19 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Sekretariat Daerah	Jumlah pengaduan yang tertangani (%)	-	330.000.000	85%	330.000.000	85%	363.000.000	85%	399.300.000	85%	439.230.000	85%	483.153.000	85%	2.014.683.000
		20 Program Penataan Administrasi kependudukan	Dukcapil	Jumlah orang yang wajib KTP yang memiliki KTP-EL Jumlah akta yang diterbitkan	80%	100.000.000	85%	500.000.000	90%	2.399.380.000	90%	500.000.000	95%	800.000.000	95%	850.000.000	95%	5.049.380.000
		21 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Peningkatan koleksi buku (judul)	0	-	0	-	100	184.850.000	600	690.000.000	0	-	250	80.000.000	950	954.850.000
			Disdikpora	Pembangunan Taman Pintar			0	-	0	-	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	3.000.000.000
		22 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Pembinaan dan pengawasan kearsipan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100%	230.000.000	100%	230.000.000
			Dinas Perpustakaan dan Arsip	Tersedianya sarana layanan informasi perpustakaan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100%	180.000.000	100%	180.000.000
			Dinas Perpustakaan dan Arsip	Sertifikasi JFT (pustakawan)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	25.000.000	2	25.000.000
		23 Program perbaikan system administrasi kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Penyusunan Pedoman Kearsipan (JRA)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	250.000.000	2	250.000.000
		24 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	150.000.000	1	150.000.000
		25 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Satuan Polisi Pamong Praja	Penurunan jumlah pelanggaran Perda	30	100.000.000	30	100.000.000	25	1.621.935.000	24	100.000.000	20	100.000.000	10	100.000.000	10	2.021.935.000
		26 Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kesbangpol	Masyarakat berwawasan kebangsaan	0	187.758.700	1250	1.062.078.000	1095	306.765.000	970	306.765.000	970	927.078.000	970	927.078.000	5255	3.529.764.000
		27 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesbangpol	Pendataan orkemas up to date	0	89.046.600	12	108.000.000	24	94.400.000	24	100.000.000	24	138.500.000	24	138.500.000	108	579.400.000
		28 Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya pengendalian dan keamanan lingkungan (%) Jumlah anggota linmas di tiap kecamatan maupun desa/kelurahan	70 570	-	80 20	800.000.000 500.000.000,00	85 20	-	85 20	900.000.000 500.000.000,00	90 20	1.000.000.000 500.000.000,00	90 20	1.000.000.000 500.000.000,00	90 20	3.700.000.000 2.000.000.000
		29 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kesbangpol	Terselesaikannya permasalahan aktual	0	511.521.000	65	918.658.500	65	703.070.000	77	1.000.000.000	77	1.352.868.800	77	1.456.121.000	77	5.430.718.300
			Satuan Polisi Pamong Praja	Tercapainya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan (%)	0	-	75	400.000.000	80	342.435.000	90	500.000.000	90	500.000.000	90	500.000.000	90	2.242.435.000
		30 Program pendidikan politik masyarakat	Kesbangpol	Terakomodirnya hak-hak keuangan partai politik	0	975.365.200	12	1.086.800.000	10	87.010.000	10	100.000.000	10	579.610.000	10	2.281.170.000	10	4.134.590.000
		31 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Penurunan pelanggaran Perda	35	100.000.000	30	100.000.000	30	729.045.000	25	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	1.129.045.000
			Kesbangpol	Peningkatan jumlah forum kemitraan	-	271.916.000	104	725.550.000	102	306.765.000	102	430.550.000	102	455.550.000	102	360.550.000	102	2.278.965.000
		32 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Kesbangpol	Penurunan jumlah kasus PEKAT	0	105.383.000	1540	8.850.000.000	1940	151.960.000	1040	151.960.000	1640	8.965.000.000	1340	8.820.000.000	1340	26.938.920.000
			Satuan Polisi Pamong Praja	Penertiban PEKAT					93.080.000	80	400.000.000							
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	4	Predikat akuntabilitas kinerja	33 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	120	3.570.520.000	200	6.000.000.000	1.000	82.530.000	150	82.530.000	400	10.000.000.000	450	15.000.000.000
				34 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Prosentase aparatur yang dibina	100%	6.766.360.000	100%	7.800.000.000	100%	4.702.620.000	100%	4.702.620.000	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000
				35 Program pengelolaan data dan dokumentasi kepegawaian	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Prosentase data kepegawaian yang mutakhir dan akurat	80%	815.000.000	80%	1.100.000.000	80%	1.010.245.000	95%	1.200.000.000	95%	1.600.000.000	95%	6.210.245.000
				36 Program penataan sistem manajemen aparatur	Sekretariat Daerah	Data & Peta kompetensi Pegawai	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	500.000.000
						Dok. Anjab	3		3		3		3		3		3	
						Dok. ABK	3		3		3		3		3		3	
						Dok. SKM	3		3		3		3		3		3	
				37 Program Penataan Akuntabilitas Kinerja	Sekretariat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	500.000.000
						Dok. Lakip	1		1		1		1		1		1	
						Dok. Tapkin	1		1		1		1		1		1	
						Aplikasi sistem manajemen berbasis web	1		1		1		1		1		1	
				38 Program Penataan dan Penguatan Organisasi	Sekretariat Daerah	Penyesuaian lembaga sesuai dengan kewenangannya (Peraturan Bupati)	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	5	120.000.000	5	120.000.000	23	560.000.000
						Predikat Akuntabilitas (Dokumen LAKIP dll)	CC	88.000.000	CC	140.000.000	CC	204.000.000	CC	200.200.000	CC	242.242.000,00	CC	1.006.662.000
				39 Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat Daerah	Jumlah kerjasama yang terbentuk	0	150.000.000	2 kali	150.000.000	2 kali	150.000.000	10 kali	150.000.000	10 kali	150.000.000	10 kali	750.000.000
				40 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat Daerah	Jumlah peraturan Bupati yang dihasilkan	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	2.500.000.000
					Sekretariat Dewan	Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan	11	200.000.000	12	200.000.000	13	200.000.000	13	300.000.000	13	300.000.000	13	1.300.000.000
4	Terbangunnya Sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan	5	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	41 Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan pasar kecamatan (unit)	0	-	2	3.200.000.000,00	2	8.477.000.000	2	10.000.000.000	0	-	6	21.677.000.000

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggungjawab	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012/2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
				Keterangan	Nilai	Rp	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
publik yang memadai				Dinas Kesehatan	Perencanaan Rumah Sakit Pratama (dokumen)	0	-	0	-	0	-	1	250.000.000	0	-	0	-	1	250.000.000				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasionalisasi UPT (kecamatan)	0	-	4	12.000.000.000	4	24.000.000.000	4	20.000.000.000	4	20.000.000.000	4	20.000.000.000	4	20.000.000.000	4	96.000.000.000		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanganan Jalan Dan Saluran Irigasi dan Penataan Ruang	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	80%	12.000.000.000	80%	12.000.000.000	80%	24.000.000.000		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan desa/kantor desa	0	-	0	-	0	-	2	2.000.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	2	2.000.000.000		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah titik sumur bor	0	-	0	-	0	-	6	1.500.000	0	0	0	0	0	-	6	1.500.000		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanganan Jalan Dan Saluran Irigasi dan Penataan Ruang	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	80%	12.000.000.000	80%	12.000.000.000	80%	24.000.000.000		
				42	Program Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Terpeliharanya prasarana dan fasilitas penerangan jalan (titik)	124	-	-	-	-	-	-	-	-	124	566.598.000	124	650.000.000	124	1.216.598.000	
				43	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Tersedianya dokumen rencana pembangunan terminal tipe B	0	-	0	-	0	-	1	250.000.000	0	-	0	-	0	-	1	250.000.000
							Terpeliharanya prasarana dan fasilitas perhubungan :																
							Jembatan apung speedboat	2	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	0	-	1	500.000.000	2	1.100.000.000		
				Pembangunan jembatan pangkal	0	-	1	200.000.000	0	-	1	500.000.000	0	-	0	-	0	-	2	700.000.000			
				44	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Review dokumen perencanaan : RISPAM PPS	0	-	0	-	0	1.633.100.000	1	600.000.000	0	-	0	-	1	600.000.000		
				45	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Dinas Kesehatan	Jumlah puskesmas dan pusban yang melakukan pelayanan optimal : Puskesmas (operasional)	11	6.000.000.000	11	700.000.000	11	7.500.000.000	13	8.000.000.000	13	8.000.000.000	13	8.000.000.000	13	8.000.000.000	13	32.200.000.000
							Puskesmas pembantu	38	2.200.000.000	38	2.200.000.000	40	2.200.000.000	40	2.200.000.000	44	2.200.000.000	44	2.200.000.000	44	2.200.000.000	44	11.000.000.000
				46	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	RSUD/Dinas Kesehatan	Ketersediaan alat-alat kesehatan (unit) / (%)	0	-	52	17.000.000.000	1	19.000.000.000	100	21.000.000.000	100	22.000.000.000	100	26.000.000.000	56	105.000.000.000		
				47	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rumah tangga pengguna air bersih (SR)	500	5.000.000.000	600	6.000.000.000	700	18.087.800.000	750	7.500.000.000	750	7.500.000.000	0	-	750	39.087.800.000		
				48	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan WTP perdesaan	0	-	0	-	20	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	20	200.000.000
							WTP perdesaan	0	-	5	15.000.000.000	5	15.000.000.000	10	30.000.000.000	2	9.000.000.000	3	13.500.000.000	25	82.500.000.000		
							Pembangunan WTP	0	-	1	2.500.000.000	1	14.525.000.000	1	15.000.000.000	1	14.678.000.000	1	14.678.000.000	1	46.703.000.000		
							Terbangunnya IPLT	0	-	0	-	1	4.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	4.000.000.000
							Pipa distribusi (km)	25	10.000.000.000	2	2.500.000.000	6	14.525.000.000	5	14.950.000.000	3	14.717.800.000	0	-	16	46.692.800.000		
				DPUPR, BPMD, Dikes, DLH	Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola air bersih secara swadaya	0	-	0	-	0	-	54	200.000.000	54	200.000.000	54	200.000.000	54	200.000.000	54	600.000.000		
				49	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengaliran lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jaringan irigasi pembangunan dan pemeliharaan (km)	80	800.000.000	80	800.000.000	80	34.007.580.000	135	148.500.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	415	203.307.580.000		
				50	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbangunnya embung/bendungan	0	-	0	-	1	3.452.800.000	1	16.000.000.000	1	67.345.643.000	0	-	1	86.798.443.000		
							Terbangunnya pengendali daya rusak air di Pantai Kab. PPU	0	-	0,5	1.673.000.000	1	3.231.650.000	0	-	0	-	0	-	3,5	4.904.650.000		
				51	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbangunnya saluran drainase	0	-	0	-	42	35.904.020.000	63	56.710.000.000	2	3.350.000.000	2	3.350.000.000	109	99.314.020.000		
							Drainase/gorong-gorong pada kawasan perumahan dan pemukiman warga (meter)	0	-	0	-	800	1.000.000.000	800	1.000.000.000	800	1.000.000.000	800	1.000.000.000				
				52	Program pembangunan Turap/talud/bronjong	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbangunnya turap/talud/bronjong	0	-	0	-	571 Meter	2.440.500.000	0	-	0	-	0	-	571	2.440.500.000		
				53	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan jalan (km)	250	250.000.000.000	376,10	148.482.000.000	616	300.916.420.000	624	197.400.000.000	0	-	0,0	-	1616	646.798.420.000		
							Peningkatan jalan (km)	0	-	0,00	-	0	-	0	-	80	50.000.000.000	80,0	50.000.000.000	80	100.000.000.000		
Pembangunan jembatan (m)	200	20.000.000.000	300				1.500.000.000	424	10.600.000	300	10.600.000	0	-	0	-	1024	1.510.600.000						
Dokumen perencanaan jembatan	0	-	0				-	0	-	3	1.750.000	0	-	0	-	3	1.750.000						

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggungjawab	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012/2013)			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Keterangan	Nilai	Rp	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		54	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang terpeliharaan (km)	0	0	20,3	4.000.000.000	20	10.000.000.000	20	10.000.000.000	20	10.000.000.000	20	10.000.000.000	100,30	44.000.000.000
		55	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbaikan jalan (km)	0	-	50	2.500.000.000	10	25.884.811.480	10	5.000.000.000	10	5.000.000.000	10	5.000.000.000	90	43.384.811.480
		56	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, Pengairan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Updating data TPJK dan data base ingasi (dok)	1	50.000.000	1	1.500.000.000	1	2.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	12.500.000.000
		57	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasional lab dan alat berat (bulan)	0	-	12	5.000.000.000	12	6.113.390.000	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	12	17.113.390.000
		58	Program Pengembangan Perumahan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya kajian perumahan dan permukiman	0	-	0	-	0	-	0	-	1	200.000.000	0	-	1	200.000.000
		59	Program pengembangan lingkungan sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah KK beresiko sanitasi	80%	4.000.000.000	925	4.000.000.000	925	109.300.000	925	4.000.000.000	925	4.000.000.000	925	4.000.000.000	4625	4.000.000.000
		60	Program Pengendalian Banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang tanggul sungai yang terpelihara (km)	0	-	0	-	0	601.540.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	9	5.101.540.000
					Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai sehingga berfungsi sesuai dengan peruntukannya	0	-	0	-	0	-	1	8.000.000.000	0	-	0	-	1	8.000.000.000
		61	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan WTP mobile	-	-	-	3.029.000.000	-	17.228.200.000	-	-	-	-	-	-	-	20.257.200.000
		62	Program peningkatan kinerja dalam pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	sampah terangkut (ton)	346	7.800.000.000	346	10.000.000.000	346	11.580.067.170	10.000	9.000.000.000	11.000	10.000.000.000	12.000	11.000.000.000	33.692	51.580.067.170
		63	Program pengembangan lingkungan sehat	Dinas Lingkungan Hidup	Terbangunnya rumah kompos (unit)	0	-	2	150.000.000	1	45.000.000	1	60.000.000	-	-	1	100.000.000	5	355.000.000
		64	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Alat penguji kendaraan, terminal dan pelabuhan, fasilitas keselamatan jalan APPL	0	-	1	2.000.000.000	1	430.280.000	1	500.000.000	90%	295.000.000	90%	510.000.000	90%	3.735.280.000
		65	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	Dinas Perhubungan	Jumlah rambu	500	200.000.000	500	200.000.000	500	1.524.680.000	500	200.000.000	0	-	50	100.000.000	1550	2.024.680.000
					Marka Jalan (m)	5000	500.000.000	5000	500.000.000	5000	-	5000	500.000.000	0	-	6500	250.000.000	21500	1.250.000.000
		66	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah kendaraan yang diuji KIR	2000	100.000.000	3950	160.000.000	4250	-	4500	180.000.000	4800	190.000.000	5.100	210.000.000	22.600	740.000.000
		67	Program peningkatan pelayanan angkutan	Dinas Perhubungan	Pengawasan ijin angkutan operasional	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3	150.000.000	3	150.000.000
		68	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Terkelolanya areal pemakaman di 4 kecamatan (lokasi)	5	250.000.000	8	3.400.000.000	15	2.517.501.000	15	3.400.000.000	14	3.000.000.000	16	4.000.000.000	16	16.317.501.000
		69	Program Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penataan ruang terbuka hijau (lokasi)	0	-	12	10.000.000.000	12	4.414.444.655	15	10.000.000.000	12	10.000.000.000	12	10.000.000.000	63	44.414.444.655
		70	Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Sekretariat Daerah	Prosentase pembebasan tanah	0	-	0	-	80	1.500.000.000	90	2.000.000.000	90	2.000.000.000	90	2.000.000.000	90	7.500.000.000
				Sekretariat Daerah	Pembebasan lahan NSTP (Ha)	0	-	0	-	62	30.000.000.000	62	30.000.000.000	0	-	0	-	62	30.000.000.000
				Disdikpora	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	0	-	0	-	1	2.443.740.000	0	-	0	-	1	3.500.000.000	2	5.943.740.000
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sertifikasi lahan aset pemerintah	0	-	0	-	0	-	0	-	15 dokumen	313.750.000	15 dokumen	350.000.000	15 dokumen	663.750.000
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Inventarisasi Tanah	0	-	0	-	0	-	0	-	1 dokumen	523.410.000	1 dokumen	550.000.000	1 dokumen	1.073.410.000
		71	Program Pengembangan sistem informasi Pertanahan	Sekretariat Daerah	Sistem informasi pertanahan	0	-	0	-	0	-	1	150.000.000	0	-	0	-	1	150.000.000
		72	Program perencanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	11	300.000.000	11	400.000.000	11	1.551.500.000	11	600.000.000	11	600.000.000	11	600.000.000	11	3.751.500.000
					Penguatan SiDa	0	-	1	300.000.000	1	146.880.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	1.046.880.000
				Sekretariat Daerah	Koordinasi pengendalian pembangunan	4	900.000.000	4	900.000.000	4	900.000.000	4	900.000.000	4	900.000.000	4	1.000.000.000	4	4.600.000.000
					Jumlah kegiatan yang dilelang (paket)	400	4.000.000.000	500	4.000.000.000	400	4.000.000.000	400	4.000.000.000	400	4.000.000.000	400	4.000.000.000	2100	20.000.000.000
		73	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Pengembangan kawasan industri	0	-	0	-	1	4.764.520.000	0	-	0	-	0	-	4	500.000.000
					Sistem perencanaan ekonomi yang berkelanjutan (dokumen)	0	-	0	-	0	-	4	500.000.000	0	-	0	-	4	500.000.000
6	Persentase gedung perkantoran yang terbangun	74	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana	2	600.000.000	4	1.200.000.000	6	1.800.000.000	6	1.800.000.000	6	1.800.000.000	0	-	22	6.600.000.000
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan kawasan dan rumah-rumah dinas, pendopo, guest house, kolam renang dan perkantoran terpadu serta sarana dan prasarana pemerintahan	0	-	0	-	1	94.467.163.000	0	-	0	-	0	-	1	94.467.163.000
					Perencanaan pembangunan gedung Dinas Pendidikan	0	-	1	600.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	600.000.000
					Dokumen perencanaan kantor lurah (Prototipe)	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	0	-	0	-	1	100.000.000
					Perencanaan pembangunan sarana olahraga pemuda (dokumen)	0	-	1	590.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	590.000.000
					Pembangunan gedung perkantoran	0	0	3	6.782.832.130	6	-	6	101.311.450.850	6	112.379.039.168	8	77.070.000.000	8	297.543.322.148

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggungjawab	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012/2013)			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Keterangan	Nilai	Rp	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
5	Meningkatnya daya beli masyarakat	7	Tingkat inflasi (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan rumah dinas /jabatan	0	0	0	-	11	11	35.626.051.300	11	14.250.419.720	0	-	11	49.876.471.020			
					Pembangunan sekolah terpadu Tahap II	0	-	1	5.000.000.000	1	8.475.000.000	1	9.366.800.000	0	-	1	22.841.800.000				
					Pembangunan Masjid Agung (multiyears)	0	-	1	5.000.000.000	1	13.825.000.000	1	13.035.000.000	0	-	1	31.860.000.000				
					Pembangunan GOR	0	-	1	2.000.000.000	1	15.827.000.000	1	15.827.000.000	1	15.035.000.000	1	48.689.000.000				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan PPI	0	-	0	-	1	5.527.000.000	1	6.027.000.000	0	-	1	10.000.000.000	1	21.554.000.000		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pembangunan rumah MBR (unit)	0	-	0	-	0	-	0	-	50	10.000.000.000	0	-	50	10.000.000.000		
				75	Program Perencanaan tata ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan SDM sektor jasa konstruksi (Bintek)	0	-	2	423.896.000	2	2.681.970.000	3	350.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	11	3.535.866.000
				76	Program Pemanfaatan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Regulasi pengaturan tata ruang (koordinasi)	16	80.000.000	18	90.000.000	20	-	25	125.000.000	25	150.000.000	25	200.000.000	113	565.000.000
							Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya (koordinasi)	16	80.000.000	18	90.000.000	20	-	25	125.000.000	25	150.000.000	25	200.000.000	113	565.000.000
							Pengendalian pemanfaatan ruang (koordinasi)	16	80.000.000	18	90.000.000	20	-	25	125.000.000	25	150.000.000	25	200.000.000	113	565.000.000
77	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya (%)	55	100.000.000	55	100.000.000	55	175.380.000	55	100.000.000	60	120.000.000	70	150.000.000	70	645.380.000				
			Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	0	-	-	-	0	-	7	100.000.000	0	-	0	-	7	700.000.000				
78	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen penunjang perencanaan pembangunan	9	1.500.000.000	9	1.500.000.000	9	833.000.000	9	2.000.000.000	9	2.000.000.000	9	2.000.000.000	9	8.333.000.000				
			Indikator ekonomi daerah (dok)	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	0	-	0	-	1	50.000.000				
79	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan	Pertumbuhan jumlah pedagang	1.475	261.944.000	1.500	150.000.000	1.525	3.606.390.000	1.550	210.000.000	1.575	240.000.000	1.600	270.000.000	1.600	4.476.390.000				
			Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan	Penurunan kasus pelanggaran terkait kelayakan peredaran barang dan usaha perlindungan konsumen (kasus)	176	83.786.500	140	100.000.000	110	87.880.000	90	150.000.000	70	175.000.000	60	200.000.000	60	712.880.000		
6	Menurunnya tingkat pengangguran	8	Tingkat pengangguran (%)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	40	100.000.000	58	100.000.000	72	915.040.000	80	100.000.000	88	100.000.000	132	100.000.000	430	1.315.040.000		
					Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah kasus ketenagakerjaan yang terselesaikan (%)	100	50.000.000	100	50.000.000	100	868.820.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	500	1.068.820.000
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program peningkatan kesempatan kerja	Rasio daya serap tenaga kerja dan tingkat partisipasi tenaga kerja (%)	0	-	50	100.000.000	50	191.565.000	60	100.000.000	70	100.000.000	80	100.000.000	80	591.565.000	
					Program pengembangan wilayah transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rasio validasi data kawasan transmigrasi	4 kecamatan	100.000.000	-	-	0	-	0	-	1	10.700.000	1	71.100.000	1	81.800.000
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program transmigrasi lokal	Rasio validasi data kawasan transmigrasi	4 kecamatan	100.000.000	-	-	0	-	0	-	1	10.700.000	1	71.100.000	1	81.800.000	
7	Menurunnya tingkat kemiskinan	9	Tingkat kemiskinan (%)	Dinas Kesehatan	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	9	100.000.000	8	150.000.000	7	113.850.000	5	250.000.000	3	300.000.000	2	350.000.000	2	1.163.850.000		
					Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah balita gizi buruk (kasus)	280	596.931.500	250	596.931.500	220	285.660.000	185	314.226.000	160	345.648.600	150	380.213.460	150	1.922.679.560
				Dinas Kesehatan	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Meurunnya angka kematian ibu melahirkan (kasus)	7	198.800.000	6	198.800.000	5	258.419.000	3	284.260.900	3	312.686.990	2	343.955.689	2	1.398.122.579	
						Angka Harapan Hidup	72,36	200.000.000	72,36	200.000.000	72,36	200.000.000	72,36	200.000.000	72,36	200.000.000	72,36	200.000.000	72,36	800.000.000	
						Angka kematian bayi neo natal (kasus)	20	3.676.527.000	18	3.676.527.000	16	-	12	-	10	-	10	-	10	3.676.527.000	
						Angka Kematian bayi (1-11 bulan)	10	3.000.000.000	10	3.000.000.000	7	-	5	4.500.000.000	3	4.500.000.000	3	4.500.000.000	3	16.500.000.000	
						RSUD/Dinas Kesehatan	Meningkatnya kemampuan diagnosa keperawatan	0	0	70	320.000.000	80	-	85	395.000.000	90	430.000.000	95	472.000.000	95	1.617.000.000
				Dinas Kesehatan	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan (orang)	3200	2.000.000.000	3200	2.000.000.000	3200	367.073.500	3200	2.000.000.000	3000	1.500.000.000	3000	1.500.000.000	3000	7.367.073.500	
				Dinas Kesehatan	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Cakupan pelayanan desa KLB (%)	60	100.000.000	60	100.000.000	70	850.114.000	80	100.000.000	90	150.000.000	100	200.000.000	100	1.400.114.000	
						Meningkatnya jumlah vaksinasi penyakit menular	0	-	477	90.000.000	530	-	583	108.900.000	575	119.790.000	600	131.769.000	2765	450.459.000	
				Dinas Kesehatan	Program pengembangan lingkungan sehat	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang lingkungan sehat (orang/tahun)	1100	300.000.000	1100	300.000.000	1100	109.300.000	1100	300.000.000	1100	300.000.000	1100	300.000.000	5500	1.309.300.000	
				Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia	Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat (th)	72	500.000.000	72	500.000.000	72	65.780.000	72	500.000.000	73	500.000.000	73	500.000.000	362	2.065.780.000	
				Dinas Kesehatan	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Sosialisasi kesehatan di Puskesmas	11	1.100.000.000	11	1.100.000.000	11	163.935.500	11	1.100.000.000	11	1.100.000.000	11	1.100.000.000	55	4.563.935.500	
Dinas Kesehatan	Program Pengawasan/Pengendalian Kesehatan Makanan	Sertifikat laik sehat (ijin)	80	100.000.000	80	100.000.000	80	9.264.000	80	100.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000	400	409.264.000					
Dinas Kesehatan	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Rasio dokter/penduduk	1:2821	1.000.000.000	1:2821	1.000.000.000	1:2821	22.106.918.750	1:2821	1.000.000.000	1:2821	1.000.000.000	1:2821	1.000.000.000	1:2821	26.106.918.750					
RSUD/Dinas Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penurunan jumlah rujukan (pasien)	40	650.000.000	655	350.000.000	920	1.784.147.600	910	423.500.000	900	465.850.000	890	512.435.000	890	3.535.932.600					
Dinas Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Peningkatan jumlah ketersediaan obat (jenis)	338	2.000.000.000	338	2.500.000.000	338	3.386.440.000	338	3.500.000.000	338	3.500.000.000	338	4.000.000.000	338	16.886.440.000					

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggungjawab	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012/2013)			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
				Keterangan	Nilai	Rp	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
8	Menurunnya indeks gini	Indeks Gini	98	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	Menurunnya jumlah PMKS	45	100.000.000	40	100.000.000	30	350.845.000	21	100.000.000	15	100.000.000	10	100.000.000	116	750.845.000		
			99	Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Tenaga Pendamping bagi kelompok bina keluarga	82	-	2	249.000.000	2	-	2	249.000.000	2	249.000.000	2	249.000.000	2	249.000.000	10	996.000.000
			100	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah PIK Remaja	19	-	2	31.800.000	2	-	2	31.800.000	2	31.800.000	2	31.800.000	2	31.800.000	10	127.200.000
			101	Program pelayanan kontrasepsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Peningkatan capaian KB aktif (alakan)	500	-	500	617.540.000	500	64.368.000	500	617.540.000	500	617.540.000	500	617.540.000	500	617.540.000	2500	2.534.528.000
			102	Program Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah kesadaran ber KB	24074	-	24555	618.090.000	25047	462.130.000	25548	618.090.000	26058	618.090.000	26580	618.090.000	26580	618.090.000	26580	2.934.490.000
			103	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah pendampingan korban KDRT dan kekerasan anak	10	-	10	347.160.000	10	291.860.000	10	347.160.000	10	347.160.000	10	347.160.000	10	347.160.000	50	1.680.500.000
			104	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Menjadikan kabupaten layak anak	1	-	1	423.125.000	1	266.205.000	1	423.125.000	1	423.125.000	1	423.125.000	1	423.125.000	1	1.958.705.000
			105	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Angka partisipasi perempuan	21590	-	200	347.160.000	200	261.000.000	200	347.160.000	200	347.160.000	200	347.160.000	200	347.160.000	200	1.649.640.000
			106	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah pembinaan bagi organisasi perempuan	4	-	4	423.125.000	4	87.650.000	4	423.125.000	4	423.125.000	4	423.125.000	4	423.125.000	4	1.780.150.000
			107	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Dinas Sosial	Penyandang cacat yang dibina	30	300.000.000	30	300.000.000	35	89.870.000	45	450.000.000	50	500.000.000	60	600.000.000	220	1.939.870.000		
			108	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Pengguna narkoba yang direhabilitasi	6	120.000.000	6	120.000.000	6	-	6	120.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	360.000.000
			109	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Penurunan jumlah kejadian KDRT (%)	90	50.000.000	90	50.000.000	80	261.800.000	70	50.000.000	60	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	461.800.000
			110	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Dinas Sosial	PMKS yang dibina (orang)	10	50.000.000	10	50.000.000	15	-	20	100.000.000	30	150.000.000	40	200.000.000	40	500.000.000		
			111	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	Menurunnya jumlah PMKS	1.560	500.000.000	1.500	500.000.000	1.420	565.372.500	1.376	500.000.000	1200	500.000.000	1200	500.000.000	1200	500.000.000	1.200	2.565.372.500
112	Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Dinas Sosial	Jumlah fakir miskin yang dibina (orang)	30	150.000.000	30	150.000.000	35	374.855.000	40	200.000.000	50	300.000.000	60	400.000.000	215	1.424.855.000					
113	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya IPM (%)	72	150.000.000	72	150.000.000	72	150.000.000	75,93	150.000.000	75,93	150.000.000	75,93	150.000.000	75,93	150.000.000	75,93	750.000.000			
9	Peningkatan ekonomi berbasis pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP)	114	Program kerjasama pembangunan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Terbangunnya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga (bidang kerjasama)	7	100.000.000	7	100.000.000	7	124.080.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	978	524.080.000		
			115	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan	Peningkatan Jumlah UMKM	2380	75.975.000	2428	100.000.000	2477	46.840.000	2527	150.000.000	2578	175.000.000	2630	200.000.000	2630	671.840.000		
			116	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan	Peningkatan Jumlah koperasi	225	117.339.000	230	100.000.000	235	67.860.000	240	150.000.000	245	175.000.000	250	200.000.000	250	692.860.000		
			117	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan	Peningkatan UMKM yang mendapatkan bantuan modal usaha	50	347.777.300	55	100.000.000	60	112.580.000	65	150.000.000	70	175.000.000	75	200.000.000	75	737.580.000		
			118	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan	Pertumbuhan Jumlah IKM	350	459.141.250	500	150.000.000	626	249.790.000	695	200.000.000	700	225.000.000	705	250.000.000	705	1.074.790.000		
			119	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	45	234.844.250	64	100.000.000	80	52.340.000	90	150.000.000	100	175.000.000	110	200.000.000	110	677.340.000		
			119	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan	Pertumbuhan jumlah pedagang	1.475	261.944.000	1.500	150.000.000	1.525	3.606.390.000	1.550	210.000.000	1.575	240.000.000	1.600	270.000.000	1.600	270.000.000	1.600	4.476.390.000

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggungjawab	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012/2013)			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
				Keterangan	Nilai	Rp	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		120	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan	Penurunan kasus pelanggaran terkait kelayakan peredaran barang dan usaha perlindungan konsumen (kasus)	176	83.786.500	140	100.000.000	110	87.880.000	90	150.000.000	70	100.000.000	50	200.000.000	50	637.880.000			
		121	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha kecil Menengah	Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	45	234.844.250	64	100.000.000	80	52.340.000	90	150.000.000	100	175.000.000	110	200.000.000	110	677.340.000			
		122	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Meningkatnya desa swasembada	0	1.750.000.000	0	229.125.000	0	361.230.000	1	229.125.000	1	229.125.000	1	229.125.000	1	1.750.000.000			
					Pembangunan rumah Gakin (unit)	891	44.550.000.000	127	6.350.000.000	127	6.350.000.000	127	6.350.000.000	127	23.910.000	127	23.910.000	127	23.910.000	635	119.550.000	
					Pemekaran Desa (kajian dan proses)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3	900.000.000	3	900.000.000	
					Perubahan status kelurahan menjadi desa	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3	300.000.000	3	300.000.000	
		123	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Jumlah Angka partisipasi	12.519	550.000.000	13.000	387.225.200	13.500	2.881.802.500	14.000	387.225.200	14.500	387.225.200	15.000	387.225.200	15.000	550.000.000			
					Jumlah konversi dana partisipasi masyarakat (Rp)	13.059.779	550.000.000	1.000.000.000	1.450.000.000	1.900.000.000	2.350.000.000	2.350.000.000	2.350.000.000	2.350.000.000	2.350.000.000	2.350.000.000	2.350.000.000	2.350.000.000	2.350.000.000	2.350.000.000		
		124	Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan aktif/berkembang	5	80.000.000	3	73.638.000	3	166.915.000	3	73.638.000	3	73.638.000	3	73.638.000	15	80.000.000			
					Jumlah pengelola pasar desa yang baik dan benar (pasar)	2	75.000.000	2	52.450.000	2	52.450.000	2	52.450.000	2	52.450.000	2	52.450.000	2	52.450.000	12	75.000.000	
		125	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Jumlah PKK aktif yang dibina	0	-	10	1.800.000.000	15	502.271.000	10	1.800.000.000	10	1.800.000.000	9	1.800.000.000	54	9.000.000.000			
					Kelompok binaan PKK	0	-	150	-	128	-	100	-	100	-	100	-	100	-	578	-	
		126	Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Kelompok UPPKS	31	-	2	542.000.000	2	31.850.000	2	542.000.000	2	542.000.000	2	542.000.000	10	2.199.850.000			
		127	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan	Desa mandiri pangan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	630.825.000	1	75.000.000	1	100.000.000	2	100.000.000	2	955.825.000			
					Dinas Pertanian	Peningkatan luas areal tanaman perkebunan Rakyat (Ha)	0	272.000.000	50	1.820.000.000	100	850.000.000	50	900.000.000	50	900.000.000	50	1.000.000.000	300	4.570.000.000		
		128	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai investasi yang diperoleh	PMA	3 = Rp. 150.000.000,000	464.660.000	5 = Rp. 200.000.000,000	481.000.000	5 = Rp. 500.000.000,000	315.230.000	5 = Rp. 750.000.000,000	2.928.000.000	5 = Rp. 800.000.000,000	3.038.000.000	5 = Rp. 850.000.000,000	3.171.000.000	25 = Rp. 3.250.000.000,000			
						PMDN	13 = Rp. 100.000.000,000	15 = Rp. 3.000.000.000	15 = Rp. 500.000.000,000	20 = Rp. 500.000.000,000	25 = Rp. 800.000.000,000	30 = Rp. 900.000.000,000	118 = Rp. 3.100.000.000,000									
		129	Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Sekretariat Daerah	Dokumen data administrasi investasi, realisasi investasi	12	207.000.000	15	300.000.000	20	533.740.000	25	400.000.000	25	450.000.000	25	500.000.000	110	1.350.000.000			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terlaksananya SOP perijinan	0	2.356.094.000	6	396.430.000	8	396.430.000	10	3.790.000.000	12	3.930.000.000	15	4.342.000.000	15	12.458.430.000		
					Peningkatan Jumlah Pengurusan administrasi Perizinan yang tertangani	0	-	200	435.480.000	250	435.480.000	300	540.685.000	200	550.000.000	200	555.000.000	200	555.000.000	200	2.081.165.000	
		130	Program peningkatan kesejahteraan petani	Dinas Pertanian	Perbaikan Nilai Tukar Petani	0	-	-	2.260.515.000	0	310.300.000	104,45	2.040.127.550	104,45	2.340.140.305	104,45	2.624.054.336	104,45	9.575.137.191			
					Dinas Pangan	Jumlah petani berprestasi	12	30.000.000	12	37.957.500	12	37.957.500	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	202.957.500		
		131	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian	Jumlah petani yang memanfaatkan teknologi tepat guna (kelompok)	0	-	20	500.000.000	30	501.980.000	40	700.000.000	40	800.000.000	40	900.000.000	40	3.401.980.000			
					Dinas Pertanian	Tersedianya sarana prasarana pertanian (alsintan)	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	15	600.000.000	15	600.000.000		
		132	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Dinas Pertanian	Produktivitas hasil peternakan	0	-	1	204.036.000	10	21.740.000	10	1.580.000.000	10	1.580.000.000	10	1.580.000.000	10	4.965.776.000			
10	Peningkatan produksi serta pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis	12	Pertumbuhan ekonomi tanpa migas	Sekretariat Daerah	Rasio elektrifikasi (%)	86,59	150.000.000	88	100.000.000	90	494.060.000	92	100.000.000	94	100.000.000	96	100.000.000	96	500.000.000			
					Rumah tangga sasaran (unit)	160	1.264.100.000	160	1.264.100.000	170	1.264.100.000	180	1.529.661.000	190	1.682.517.000	200	1.850.768.000	900	7.717.556.000			
					KK berlistrik PLN dan Non PLN	38.000	75.000.000	40.000	100.000.000	43.000	100.000.000	45.000	100.000.000	47.000	100.000.000	50.000	100.000.000	50.000	100.000.000	50.000	500.000.000	
					Jumlah PJJ -TS jalan lingkungan perdesaan (Unit)	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	
					Sekretariat Daerah	Meningkatnya jumlah rekomendasi perijinan	0	-	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	500.000.000
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJJ pada ruas jalan	0	-	26	1.700.000.000	0	-	20	1.500.000.000	180	7.000.000.000	20	1.500.000.000	246	11.700.000.000		
			13	Pertumbuhan ekonomi dengan migas	Sekretariat Daerah	Jumlah pengguna Gas Elpiji (%)	80	75.000.000	85	100.000.000	90	232.880.000	95	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000		
						Dana Bagi hasil migas (Barel)	Minyak Bumi	1.155.700	1.104.660	1.019.640	1.020.000	1.021.000	1.017.000	5.182.300								
						Gas Alam	4.907.180	17.061.790	11.358.790	11.500.000	11.900.000	12.000.000	63.820.580									
		135	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Sekretariat Daerah	Perusahaan tambang yang aktif	6	100.000.000	6	150.000.000	4	471.440.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	950.000.000			
					Produksi komoditas tambang batubara (Metric ton)	1.408.381.044	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.700.000	7.400.000										
11	Meningkatkan kualitas lingkungan dan pengelolaan bencana	14	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Koordinasi Penataan Hukum Lingkungan (KPHL)	0	-	0	-	4	534.302.000	2	820.000.000	1	820.000.000	1	820.000.000	5	2.994.302.000			
					Jumlah perusahaan yang memiliki predikat proper	0	-	2	242.000.000	3	242.000.000	3	700.000.000	5	700.000.000	5	700.000.000	3	2.342.000.000			
					Terbitnya rekomendasi (UKL/UPL, Ijin lingkungan)	0	-	0	-	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	1.800.000.000	
					Pengujian kualitas air dan udara (lokasi)	5	100.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	670.000.000	5	670.000.000	5	670.000.000	25	2.210.000.000			
					Peningkatan pengawasan terhadap jenis usaha/kegiatan	0	-	20	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000	70	800.000.000			
					Jumlah tingkat lanjut pengaduan sengketa lingkungan hidup	0	-	4	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000			
					Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen perencanaan emisi gas dan rumah kaca	0	-	0	-	1	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	200.000.000

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggungjawab	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012/2013)			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Keterangan	Nilai	Rp	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Dinas Lingkungan Hidup	Mempertahankan adipura	0	-	1	500.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	3.300.000.000			
			Dinas Sosial	Tagana	92	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	150	2.500.000.000			
			BPBD	Damkar	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	25	500.000.000					55	1.500.000.000			
				SAR	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	75	2.500.000.000			
		137	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	DPKP	Jumlah petugas yang mengikuti diklat pemadam kebakaran	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	40	1.000.000.000	35	1.000.000.000		
					Tersedianya perlengkapan penanggulangan Kebakaran (unit)	0	-	0	-	0	-	0	-	30	500.000.000	5	4.000.000.000	35	4.500.000.000		
	15	Energi baru terbarukan	138	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah adiwiyata	3	350.000.000	3	350.000.000	3	304.580.000	3	2.500.000.000	20	2.600.000.000	20	3.300.000.000	20	9.054.580.000	
					Sekretariat Daerah	Jumlah rekomendasi penertiban perusahaan pertambangan yang tidak terbit secara dan pelaksanaan pengelolaan pertambangan	0	80.325.000	5	139.070.000	5	146.023.500	5	152.977.000	5	159.930.500	5	166.884.000	5	764.885.000	
					Dinas Pertanian	Prosentasi tertanganinya gangguan usaha perkebunan (Jumlah kasus yang tertangani berbanding kasus yang terjadi)	0	74.000.000	50%	150.000.000	60%	-	75%	890.000.000	7 kasus	890.000.000	7 kasus	890.000.000	7 kasus	2.820.000.000	
			139	Program Rehabilitasi hutan dan lahan	Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha) / penurunan lahan kritis (%)	0	137.298.000	100	1.250.000.000	105	2.302.105.000	110	1.150.000.000	0	-	10	50.000.000	110	4.752.105.000	
			140	Program perlindungan dan kosevasi sumber daya hutan	Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup	Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan (kelompok)	0	366.443.000	2	650.000.000	2	1.245.530.000	2	1.025.000.000	0	-	1	100.000.000	6	3.020.530.000	
			141	Program peningkatan kualitas dan akses sumber daya lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Tersedianya dokumen Lingkungan Hidup Daerah	4	125.000.000	4	125.000.000	4	54.430.000	4	250.000.000	4	290.000.000	5	300.000.000	5	1.019.430.000	
			142	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup	Luas Konservasi Mangrove (Ha)	0	-	0	-	15	220.000.000	15	1.250.000.000	0	-	0	-	30	1.470.000.000	
			143	Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Dinas Pertanian	Operasional sarana dan prasarana (bulan) terkait penurunan titik api kebakaran lahan dan kebun	12	308.560.000	12	1.100.000.000	12	472.575.000	12	550.000.000	0	-	20	375.000.000	56	2.497.575.000	
					Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen kajian pengendalian kerusakan hutan dan lahan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	250.000.000	1	250.000.000	
					Dinas Kebakaran	Penanggulangan bencana kebakaran di hutan dan lahan	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	7	200.000.000	5	200.000.000	42	1.000.000.000	
			144	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Satuan Polisi Pamong Praja	Prosentase penanganan penanggulangan bencana	70	-	75	450.000.000	85	500.000.000	90	550.000.000	90	550.000.000	90	550.000.000	90	2.600.000.000	
					Kesbangpol, BPBD	Tersedianya perlengkapan penanggulangan bencana	0	699.515.550	424	913.565.000	0	-	100	1.280.000.000	424	159.000.000	424	1.800.000.000	424	4.152.565.000	
			145	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	80.000	100.000.000	80.000	100.000.000	90.000	1.171.840.000	100.000	100.000.000	110.000	100.000.000	120.000	100.000.000	120.000	1.571.840.000	
			146	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Obyek wisata yang dikembangkan	-	Belum tersedia	1	1.000.000.000	2	3.643.560.000	3	1.700.000.000	3	1.700.000.000	1	2.400.000.000	4	10.443.560.000	
						Terbangunnya jembatan titian mangrove (m)	0	-	1340	2.600.000.000	0	-	600	1.700.000.000	0	-	0	-	1.340	57.600.000.000	
			147	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Jumlah kerjasama dengan media	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.541.840.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	7	3.500.000.000	7	8.041.840.000	
			148	Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Jumlah lembaga komunikasi yang dibina	2	50.000.000	2	50.420.000	2	50.420.000	2	50.000.000	2	50.000.000	7	350.000.000	7	550.420.000	
			149	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Pelayanan pemerintahan berbasis e-gov (SKPD)	13	900.000.000	14 SKPD	990.000.000	15 SKPD	10.720.720.000	9	11.792.792.000	17 SKPD	12.972.071.200	74	2.800.000.000	74	39.275.583.200	
					Sekretariat Daerah	Penyebarluasan informasi	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	5	100.000.000	6	100.000.000	7	700.000.000	7	1.100.000.000	
			150	Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Jumlah kemitraan yang terbangun	4	100.000.000	4	100.000.000	4	639.090.000	5	100.000.000	6	100.000.000	7	700.000.000	7	1.639.090.000	
12	Peningkatan Ketahanan Pangan	16	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas (%)	151	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian	Komoditas olahan yang memenuhi jaminan mutu	0	-	25	710.000.000	30	307.290.000	35	1.066.000.000	9	798.000.000	9	833.000.000	9	3.714.290.000
					Dinas Pertanian	Komoditas perkebunan yang memenuhi standar harga minimum	0	348.647.450	2	325.000.000	2		2	500.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	10	1.325.000.000	
					Dinas Pertanian	Tersedianya pupuk (jenis)	0	-	3	3.875.897.500	3	4.359.860.000	3	4.986.126.405	1	4.084.739.046	1	4.193.212.950	3	21.499.835.901	
					Dinas Pertanian	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	0	-	0	0	-	0	-	10%	500.000.000	10%	700.000.000	10%	1.200.000.000		
					Sekretariat Daerah	Jumlah izin perusahaan pertanian/perkebunan	0	-	10	300.000.000	10	300.000.000	4	288.146.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	1.488.146.000	
			153	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Dinas Pertanian	Peningkatan populasi ternak	0	-	356.693	887.897.000	365.500	310.570.000	375.222	941.170.820	375.222	967.807.730	375.222	994.444.640	394.277	4.101.890.190	
			154	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Dinas Pertanian	Komoditas olahan yang memenuhi jaminan mutu	1	-	15	566.450.000	17	400.000.000	18	685.404.500	5	500.000.000	5	500.000.000	22	2.651.854.500	
			155	Program pengembangan budidaya perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemanfaat Kolam terpal (orang)	0	-	60	50.000.000	70	605.660.000	70	60.000.000	70	60.000.000	70	60.000.000	70	835.660.000	
						Terbangunnya balai benih ikan	0	-	1	2.529.000.000	1		1	3.500.000.000	1	3.500.000.000	1	4.000.000.000	5	13.529.000.000	
						Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	0	-	9.367,44	1.412.000.000	9.835,81		9.327,60	1.406.000.000	10.843,99	1.635.000.000	11.386,18	1.717.000.000	11.386	6.170.000.000	
			156	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Dinas Kelautan dan Perikanan	Bertambahnya luasan area budidaya laut, air payau (Ha)	0	-	502,65	90.000.000	512,70	321.320.000	522,9	250.000.000	533,4	300.000.000	544,1	300.000.000	544,1	1.261.320.000	
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbangunnya kawasan minapolitan	0	-	0	-	0	-	1	1.000.000.000	0	-	0	-	1	1.000.000.000	

BAB IX

PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

9.1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara. Selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program transisi adalah program yang akan dilakukan pada masa berakhirnya RPJM 2008-2013 dan akan masuk pada RPJM 2013-2018. Dasar yang dipakai untuk penyusunan program adalah Kerangka RPJM 2013-2018. Kerangka RPJM 2013-2018 dapat dipakai sebagai dasar penyusunan RKPD 2014. Program transisi sebagai rancangan program indikatif 1 (satu) tahun ke depan setelah periode RPJM Daerah berakhir. Program transisi ini digunakan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan kepala daerah.

Dalam implementasi program transisi ini, memerlukan komitmen dari semua unsur pemerintahan (*governance*) meliputi legislatif, eksekutif serta masyarakat luas. Mengingat program seperti ini memerlukan kesabaran dan kesamaan visi, agar tidak terjadi penyalahgunaan dari pembiayaan yang cukup besar tersebut.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018 yang telah disusun ini, hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparansi, partisipatif dan penuh tanggung jawab dan merupakan pedoman bagi penyusunan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

1. Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara serta masyarakat termasuk dunia usaha agar melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya.
2. Setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD)
3. Setiap SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dengan Rencana Strategis Badan/Dinas/Instansi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Konsepsi prioritas dalam naskah dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2018 baik mengenai aspek program maupun wilayah hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non prioritas.
5. Konsepsi diskripsi program utama dan program penunjang maupun kegiatan pokok serta kegiatan penunjang tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, akan tetapi lebih kepada logika berpikir tentang pentingnya sebuah program maupun kegiatan pokok dalam mewujudkan sasaran sub agenda/agenda pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan/implementasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018 ke dalam pelaksanaan dokumen Rencana Strategis Badan/Dinas/Instansi, agar terjaga keterpaduan dan kesinambungan antara 2 Dokumen Perencanaan diatas dengan cara membangun/menyusun mekanisme kontrol berupa Memoranda Anggaran Kegiatan (MAK).

BAB X

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara terpilih, yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah daerah selam lima tahun kedepan. RPJMD juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya selama periode tersebut.

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Penajam Paser Utara “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang sejahtera, berkualitas mandiri dalam kehidupan damai, berkeadilan dan agamis” maka perlu didukung oleh (1) Meningkatkan kemampuan SDM dengan penguasaan Iptek dan Imtaq (2) Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, berdaya guna dan berhasil guna, bebas dari KKN (3) Memelihara, meningkatkan dan membangun infrastruktur daerah (4) Memberdayakan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan (5) Optimalisasi potensi SDA untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian, maka dukungan dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan di Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan akan membawa masyarakat yang mandiri dan sejahtera sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara terpilih periode 2013-2018.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR